ATLAS
SEJARAH INDONESIA

GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA



orat
an

923.2 HEN a

ATLAS
SEJARAH INDONESIA
GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA

Penulis
Hendi Johari
Martin Sitompul

DIREKTORAT SEJARAH
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

ATLAS SEJARAH INDONESIA
GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA

Pengarah
Dra. Triana Wulandari

Editor Substansi
Dr. Agus Setiawan

Editor Bahasa
Drs. Sriyanto, M.M.,M.Pd

Penulis
Hendi Johari
Martin Sitompul

Kartografer
Dwi Kartika Wardani

Fotografer
Jati Mahatmaji

Desain Grafis
Bayu Isworo

Koordinator
Saptari Novia Stri

Riset
Budi Karyawan Sedjati, Agus Hermanto, Dede Sunarya, Ratih Widdyastuti, Muhammad Imam Firdaus, Nurwahyudi, Zakiyah Egar Imani, Muhammad Hafiz Wahfiudin, Dirga Fawaqih, Ryano Septian Brunning, Yunia Sarah dan Isti Sri Ulfiarti.

Diterbitkan oleh:
Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG:
Dilarang mengutip seluruh atau sebagian isi buku tanpa seizin penerbit

Cetakan I 2019

ISBN : 978-623-7092-09-4

DAFTAR ISI

Sambutan v

Pengantar vi

Daftar Singkatan dan Akronim viii

Peta Pembagian Wilayah 8 Provinsi di Indonesia pada Masa Kemerdekaan 2

Daftar Gubernur 4

Teuku Mohammad Hasan - Gubernur Sumatra 6

Soetardjo Kartohadikoesoemo - Gubernur Jawa Barat 32

R.P. Soeroso - Gubernur Jawa Tengah 50

R.M.T.A. Soerjo - Gubernur Jawa Timur 74

Pangeran Mohamad Noor - Gubernur Kalimantan 96

I Gusti Ketut Pudja - Gubernur Sunda Kecil 112

Sam Ratulangi - Gubernur Sulawesi 134

Johannes Latuharhary - Gubernur Maluku 154

Lampiran

Daftar Pustaka 173

Wawancara dengan Keluarga Gubernur Pertama di Indonesia 176

Biodata Penulis dan Editor 184



SAMBUTAN DIREKTUR SEJARAH

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya karena *Atlas Sejarah Indonesia: Gubernur Pertama di Indonesia* telah dapat diselesaikan. Atlas ini merupakan pengembangan Buku Gubernur Pertama di Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah pada tahun 2017. Atlas Sejarah ini menyajikan informasi kesejarahan dalam bentuk narasi dan peta dilengkapi dengan foto, gambar, ilustrasi, dan infografik. Penyajian ini menyandingkan antara kejadian yang kronologis dan tempat kejadiannya, sehingga lebih menarik.

Atlas Sejarah Indonesia: Gubernur Pertama di Indonesia disusun untuk memperkenalkan tokoh yang berjuang di daerah dan menyebarkan semangat kemerdekaan Indonesia serta menata sebuah birokrasi di tengah kondisi politik nasional dan lokal yang belum stabil. Delapan tokoh yang terpilih menjadi gubernur adalah putra-putra terbaik dari daerahnya yang memiliki pengalaman memimpin daerahnya. Para tokoh tersebut adalah Teuku Mohammad Hasan (Sumatra), Soetardjo Kartohadikoesoemo (Jawa Barat), R. Pandji Soeroso (Jawa Tengah), R. M. Soerjo (Jawa Timur), Ir. Pangeran M. Noor (Kalimantan), I Gusti Ketut Pudja (Sunda Kecil), G.S.S.J. Ratulangi (Sulawesi), dan Johannes Latuharhary (Maluku). Kisah perjuangan para gubernur pertama dalam menegakkan pemerintahan Indonesia diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kebangsaaan, rela berkorban, dan cinta tanah air pada generasi penerus bangsa.

Penulisan dan penerbitan atlas ini selain sebagai media informasi bagi masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi media pembelajaran interaktif bagi siswa di sekolah dan tenaga pendidik, khususnya di bidang kesejarahan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi mewujudkan terbitnya *Atlas Sejarah Indonesia: Gubernur Pertama di Indonesia*. Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Akhir kata, selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Direktur Sejarah.

Triana Wulandari

PENGANTAR

Sukacita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 diwujudkan rakyat Indonesia dengan memanjatkan doa dan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Proklamasi kemerdekaan adalah sebuah awal kehidupan berbangsa dan bernegara yang disadari benar oleh para pendiri bangsa. Hal itu sekaligus merupakan awal perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Upaya untuk mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan dengan berbagai upaya diplomasi dan kekuatan militer seperti banyak buku yang menjelaskan kesibukan bangsa ini dalam menghadapi berbagai upaya untuk menggagalkan cita-cita proklamasi. Periode yang dikenal dalam pembabakan sejarah Indonesia sebagai Revolusi Fisik (1945–1949) seolah melekatkan bayangan pemikiran para peminat sejarah serta tentunya para pelajar di sekolah dan mahasiswa, di perguruan tinggi yakni bahwa perjuangan diplomasi dan militer merupakan aktivitas utama dalam mempertahankan kemerdekaan. Pandangan tersebut sedikit banyak melupakan bahwa seiring dengan dibacakannya naskah proklamasi oleh Sukarno dan Hatta, maka amanah rakyat Indonesia kepada para pendiri bangsa adalah membentuk dan kemudian memulai sebuah pemerintahan. Dengan demikian, upaya mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan dengan jalan menjalankan pemerintahan.

Pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia menjadi sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan dengan proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Sebuah kerja maraton yang dilakukan semua elemen institusi dan lembaga tinggi negara saat itu, terutama Presiden dan Wakil Presiden, PPKI, serta KNIP, melahirkan sejumlah putusan penting yang ikut menentukan perjalanan republik ini pada masa selanjutnya. Putusan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi berikut penunjukkan kepala daerah pertama dan perjuangan mereka dalam dinamika perjuangan revolusi belum banyak diangkat. Pada kenyataannya para gubernur pertama merupakan garda terdepan dalam menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keutuhan negara ini di setiap wilayah administratif yang mereka pimpin.

Pembagian pemerintahan daerah ke dalam delapan provinsi pertama di Republik Indonesia mengacu pada hasil rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 mengenai pembagian wilayah administratif. Pembagian pemerintahan daerah tersebut kemudian ditetapkan melalui rapat PPKI pada tanggal 2 September 1945 berikut penetapan nama-nama gubernur pertama yang mendapat amanah memimpin provinsi masing-masing. Pembagian pemerintahan daerah ke dalam delapan provinsi merupakan putusan sidang PPKI dengan segala pertimbangan serta melihat situasi dan kondisi administrasi serta infrastruktur yang tersedia saat itu, terutama sistem administrasi yang merupakan warisan Jepang. Dalam melaksanakan pemerintahan militer di bekas Hindia Belanda, Pemerintah Pendudukan Jepang membagi tiga wilayah komando militer di Indonesia, yakni Wilayah Militer I yang meliputi Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta, Wilayah Militer II yang meliputi Sumatra dan sekitarnya yang berpusat di Bukittinggi dan Wilayah Militer III yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku dengan pusat pemerintahan di Makassar.

Delapan gubernur pertama yang ditunjuk langsung oleh Presiden Sukarno merupakan teladan yang patut diketahui latar belakang keluarga, pendidikan, dan perjuangannya oleh generasi penerus, terutama para pemimpin daerah di masa sekarang. Tidak hanya waktu, tenaga, dan harta, tetapi juga nyawa menjadi taruhan perjuangan mereka dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Gambaran sebagai seorang pejabat negara saat itu sangat berbeda dengan kondisi pada masa sekarang. Dengan segala keterbatasan fasilitas, kedelapan gubernur tersebut turun tangan langsung memimpin rakyat untuk menjalankan satu demi satu tugas yang dimanahkan kepada mereka, termasuk menjalankan tugas pertama, yakni menyebarkan berita proklamasi. Tugas tersebut memberikan tantangan tersendiri, terutama di wilayah yang minim infrastruktur dan sarana komunikasi di samping medan yang sulit secara geografis. Tak pelak bahwa hanya dengan kesabaran dan ketekunan dalam menjalankan tugas di tengah krisis dan dalam situasi serta kondisi yang kritis, para gubernur pertama tersebut mampu menjalankan tugas yang diamanahkan dengan baik. Di antara delapan gubernur tersebut bahkan masih ada yang harus mengalami penahanan dan menderita sakit dalam menjalankan tugas karena dinamika politik dan militer yang terjadi pada masa revolusi.

Sebagai sebuah refleksi, buku ini memaparkan dinamika perjuangan setiap gubernur di delapan provinsi pertama Republik Indonesia secara singkat, tetapi dengan penyajian yang berbeda. Kesan yang tidak bisa dilepaskan dari karakter para gubernur tersebut adalah keinginan kuat dengan pemahaman menyeluruh terhadap situasi yang tengah mereka hadapi. Pemahaman tersebut merupakan buah pikir dari kapasitas yang mereka miliki sehingga dapat mengambil putusan yang tepat di tengah situasi kritis dan krisis. Keinginan untuk menempuh studi di tengah belum terbukanya semua kesempatan bagi para pemuda pribumi merupakan salah satu faktor yang menunjukkan adanya keinginan kuat untuk maju di tengah kolonialisme yang melanda bangsa Indonesia. Selain itu, pengalaman berorganisasi saat menempuh studi merupakan sebuah kombinasi dalam membentuk karakter para gubernur tersebut sehingga melahirkan figur-figur yang tercerahkan.

Selain sebagai sebuah refleksi, pemanfaatan teknologi dalam menjelaskan dan merekonstruksi peristiwa pada masa lalu diharapkan dapat membantu untuk memahami perjuangan setiap gubernur tersebut sehingga mendapatkan gambaran perjuangan yang lebih komprehensif. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga diharapkan dapat menarik minat para pelajar dan mahasiswa, khususnya dalam mengikuti napak tilas perjuangan kedelapan gubernur pertama republik ini dengan bantuan media peta. Sejarah menjelaskan sebuah perubahan yang dilakukan oleh pelaku sejarah dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek sehingga peta dapat membantu pembaca untuk mengetahui di mana perubahan tersebut terjadi. Dengan bantuan media peta berikut keterangan yang melingkupinya, pemahaman akan perjalanan perjuangan setiap gubernur tersebut dapat diikuti dengan lebih komprehensif.

Tidak ada gading yang tidak retak. Demikian pula perjuangan kedelapan gubernur pertama Republik Indonesia. Namun, terdapat banyak sisi kehidupan yang dapat diambil pelajaran untuk lebih memaknai nilai perjuangan sekaligus bekal kontemplasi bangsa untuk lebih menghargai betapa mahal harga sebuah kemerdekaan. Bangsa ini menyebutnya dengan memulai sebuah kata indah penuh makna bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang diraih melalui pengorbanan para pejuang yang telah dipilih sebagai pahlawan, baik yang dikenal maupun yang namanya tidak tercatat dalam sejarah. Semoga buku ini juga dapat berkontribusi untuk mengingat jasa para gubernur pertama Republik Indonesia sekaligus memberi suntikan semangat dalam mengisi kemerdekaan.

Jakarta, 7 Agustus 2019.

Daftar Singkatan dan Akronim

Daftar Singkatan

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ALRI	: Angkatan Laut Republik Indoesia
AMS	: Algemeene Middlebare School (Setara SMA)
AMACAB	: Allied Military Authority, Civil Affairs Branch
BFO	: Bijeenkomst voor Federal Overleg
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BOMPA	: Badan Oentoek Membantu Perang Asia Timur Raya
BOW	: Burgerlijke Openbare Werken (Pengurus Besar Perhimpunan Pegawai)
BPOG	: Badan Pembantu Oesaha Gubernur
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
CoNICA	: Commanding Officer NICA
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
DPRS	: Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
DPRDS	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
ELS	: Europeesche Lagere School (Setara SD Bagi Kaum Bangsawan)
GAIB	: Gediplomeerd Assistant Inlandsch Bestuursambtenaar
HBS	: Hogere Burger School
HIS	: Hollandsch Inlandsche School
IKPN	: Induk Koperasi Pegawai Negeri
Inkopad	: Induk Koperasi Angkatan Darat
Inkopal	: Induk Koperasi Angkatan Laut
Inkopol	: Induk Koperasi Polisi
Inkopau	: Induk Koperasi Angkatan Udara
KNI	: Komite Nasional Indonesia
KNID	: Komite Nasional Indonesia Daerah
KNIL	: Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (Tentara Kerajaan Hindia Belanda)
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KPN	: Koperasi Pegawai Negeri
KWS	: Koningen Wilhelmina School
NICA	: Netherlands Indies Civil Administration (korps pemerintah kolonial yang dimiliterisasi)
NIT	: Negara Indonesia Timur

NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
MN 1001	: Mohammad Noor 1001
Mr	: Meester in de Rechten (Setara Sarjana Hukum)
MTK	: Mandau Talabang Kalimantan
MTKI	: Mandau Talabang Kalimantan Indonesia
MULO	: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
OSVIA	: Opleiding School voor Indlandsche Ambtenaren (Setara SMA)
PPBB	: Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra
PKI	: Partai Komunis Indonesia
Polri	: Polisi Republik Indonesia
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
RAF	: Royal Air Force (Angkatan Udara Kerajaan Inggris)
RHS	: Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum)
RAPWI	: Recovery of Allied Prisoners of War and Internees)
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
Sermi	: Serikat Muslimin Indonesia
SI	: Sarekat Islam
SKI	: Serikat Kerakyatan Indonesia
STOVIA	: School tot Opleiding van Indische Artsen (sekolah tinggi pendidikan medis zaman kolonial Belanda)
THS	: Technische Hooge School (sekolah tinggi teknik zaman kolonial Belanda)
TKR	: Tentara Keamanan Rakyat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TRI	: Tentara Republik Indonesia
UU	: undang-undang
Parindra	: Partai Indonesia Raya
Pertiwi	: Persatuan Tindakan Wanita Indonesia.
Poetera	: Poesat Tenaga Rakjat
PKII	: Partai Kemerdekaan Indonesia Irian
PPNI	: Pusat Pemuda Nasional Indonesia
PT PAL	: Perseroan Terbatas Penataran Angkatan Laut
PJM	: padoeka jang moelja (paduka yang mulia)
Sudara	: Sumber Darah Rakyat
VB	: Volkscrediet Bank (Bank Perkreditan Rakyat)

Daftar Istilah

ambtenaar ter beschikking : asisten ketua pengadilan tinggi (era Hindia-Belanda)

ad-interim : untuk sementara

afdeeling : wilayah administratif setingkat kabupaten zaman kolonial Belanda

amnesti : pengampunan yang dikeluarkan pemerintah

batalion : satuan militer yang terdiri dari 800–1.000 prajurit

Bestuurschool : Sekolah Tinggi Pemerintahan zaman kolonial Belanda

bumiputra : anak negeri; penduduk asli

bunken kanrinkan : penasehat para raja di Bali yang diambil dari kalangan orang Jepang.

bronchitis : peradangan yang terjadi pada saluran pernafasan

chōkan : wedana pada era Jepang berkuasa atas Indonesia

Chuo Sangi-in : Dewan Pertimbangan Pusat (era Jepang)

College van Gedelegeerde Volksraad: Badan Pekerja Dewan Rakyat

Dai Nippon : Tahta Kekaisaran Jepang

de facto : secara kenyataan

delegasi : orang yang ditunjuk dalam suatu perundingan

devide et impera : memecah belah dan menguasai

Dobuko : Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Domei : Kantor Derita Jepang

Eerste Klasse School: Sekolah Kelas Dua (setara SD yang berlangsung 7 tahun (khusus untuk kalangan Tionghoa, Manado dan Maluku)

federasi : gabungan beberapa negara bagian

feodal : susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan

gemeente : wilayah kota

gemeenteraad : dewan kota (era Hindia Belanda)

gubernuran : rumah atau kantor gubernur

Heiho : Kesatuan Paramiliter Indonesia yang direkrut pada masa Jepang

hinomaru : lingkaran matahari (istilah untuk bendera Jepang)

inlander : anak negeri (sebutan yang merendahkan untuk pribumi Hindia Belanda

Jawa-sentris : cenderung lebih fokus pada kejawaan

Kaigun : Angkatan Laut Kekaisaran Jepang

kampemen : Kelompok rumah militer atau barak tentara Jepang

Kempeitai : Polisi Militer Angkatan Darat Jepang

kelompok kooperator: kaum nasionalis yang tidak mengharamkan kerja sama dengan pihak pemerintah Hindia-Belanda

kolonialisme : paham penjajahan

konservatif : bersifat kolot atau lebih cenderung pada tatanan lama

Kosubu : Kepala Departemen Lalu Lintas (era Jepang)

landschap : wilayah administratif (setingkat distrik) pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda

landrechter : hakim (era Hindia-Belanda)

maklumat : pemberitahuan atau pengumuman

minseibu chōkan : kepala Karesidenan (zaman Jepang)

Naimubu Sanyo : Departemen Dalam Negeri masa pendudukan Jepang

Naimubu : Kepala Departemen Dalam Negeri (era Jepang)

nasionalisme : paham kebangsaan

pamong praja : pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara

paratroops : pasukan penerjun payung

Paruman Agung : dewan para raja yang dibentuk Hindia-Belanda pada 1938

petisi : permohonan resmi kepada pemerintah

Petisi Soetardjo : Permohonan kepada pemerintah kolonial tentang memandirikan negeri Hindia yang dilayangkan anggota Voolksraad bernama Soetardjo

punggawa : petugas kerajaan

president van de raad van justitie: ketua pengadilan tinggi (era Hindia-Belanda)

raad van justitie : semacam dewan kehakiman yang bertugas dan berwenang menangani masalah pidana dan perdata di wilayah Hindia Belanda

rijikan-dairi : wakil wedana di masa Jepang berkuasa atas Indonesia

Rikugun : Angkatan Darat Kekaisaran Jepang

satyalencana : penghargaan tanda kesetiaan pada negara

Sekolah Raja : sekolah bagi anak kepala desa di Distrik Tondano

sekutu : aliansi negera pemenang dalam Perang Dunia II

sendenbu : kepala departemen propaganda (era Jepang)

shireikan : panglima militer

shu sangi-kai : dewan pertimbangan Karesidenan (era Jepang)

sngyobu : kepala departemen ekonomi (era Jepang)

somubu : pimpinan departemen urusan umum (era Jepang)

status-quo : posisi yang sudah mapan (istilah dalam politik)

studentenhuis : asrama mahasiswa

swapraja : daerah yang berpemerintahan sendiri

syihobu : kepala departemen kehakiman

syu : istilah Jepang untuk kerajaan-kerajaan di Bali

syucho : istilah Jepang untuk raja di Bali

syucokan : kepala residen setara walikota

tinzukyoku : kantor permohonan kepada penguasa militer

Tjhoeo Sangi-in : badan perwakilan bentukan Jepang

Tweede Klasse School: Sekolah Kelas Dua setara SD, tetapi hanya sampai kelas 3 (khusus untuk kalangan bumiputra)

uleebalang : sebutan bagi kaum bangsawan di Aceh

Volksraad : Dewan Rakyat Hindia Belanda

volkschool : sekolah rakyat zaman kolonial Belanda (setara SD)

wedana : pembantu bupati

zelfbesturende landschappen: tanah-tanah kerajaan

Gubernur Pertama di Indonesia

pada masa kemerdekaan



Peta Dasar Badan Informasi Geospasial (BIG), 2019

Peta Pembagian Wilayah 8 Provinsi di Indonesia pada Masa Kemerdekaan



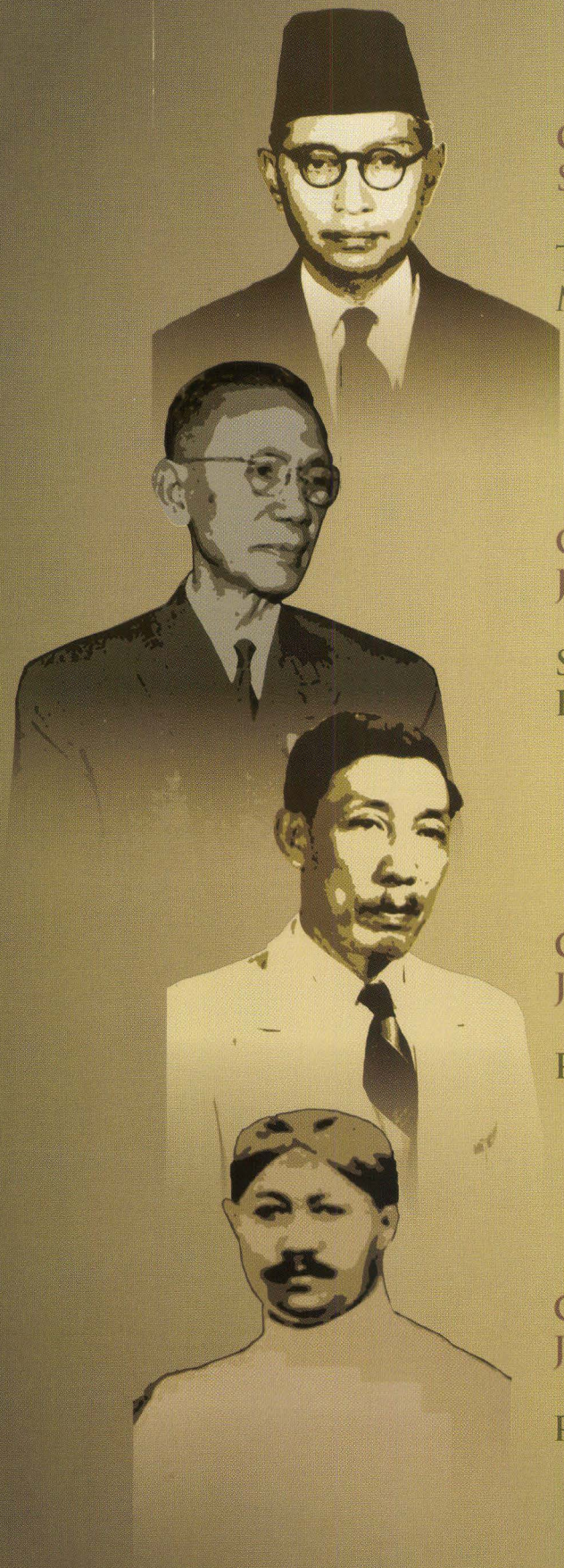

Gubernur Provinsi
Sumatra

Teuku
Mohammad Hasan

Gubernur Provinsi
Jawa Barat

Soetardjo
Kartohadikoesoemo

Gubernur Provinsi
Jawa Tengah

R.P. Soeroso

Gubernur Provinsi
Jawa Timur

R.M.T.A. Soerjo

Gubernur Provinsi
Kalimantan

Pangeran
Mohamad Noor

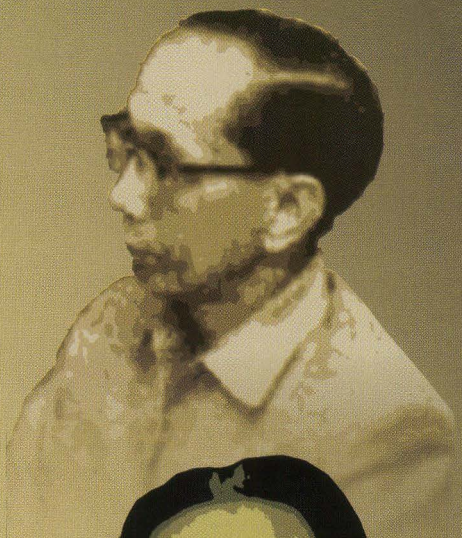

Gubernur Provinsi
Sunda Kecil

I Gusti Ketut Pudja



Gubernur Provinsi
Sulawesi

Sam Ratulangi

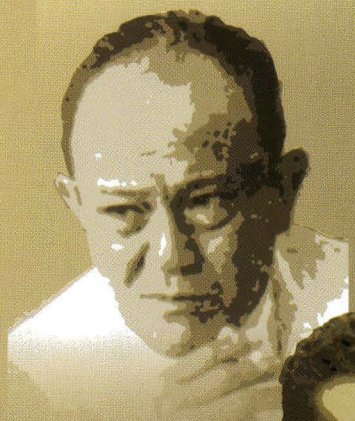

Gubernur Provinsi
Maluku

Johannes Latuharhary

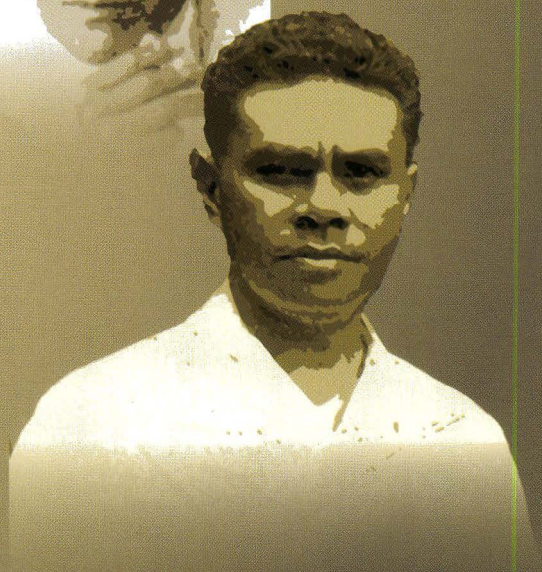



Teuku Mohammad Hasan

Gubernur Sumatra

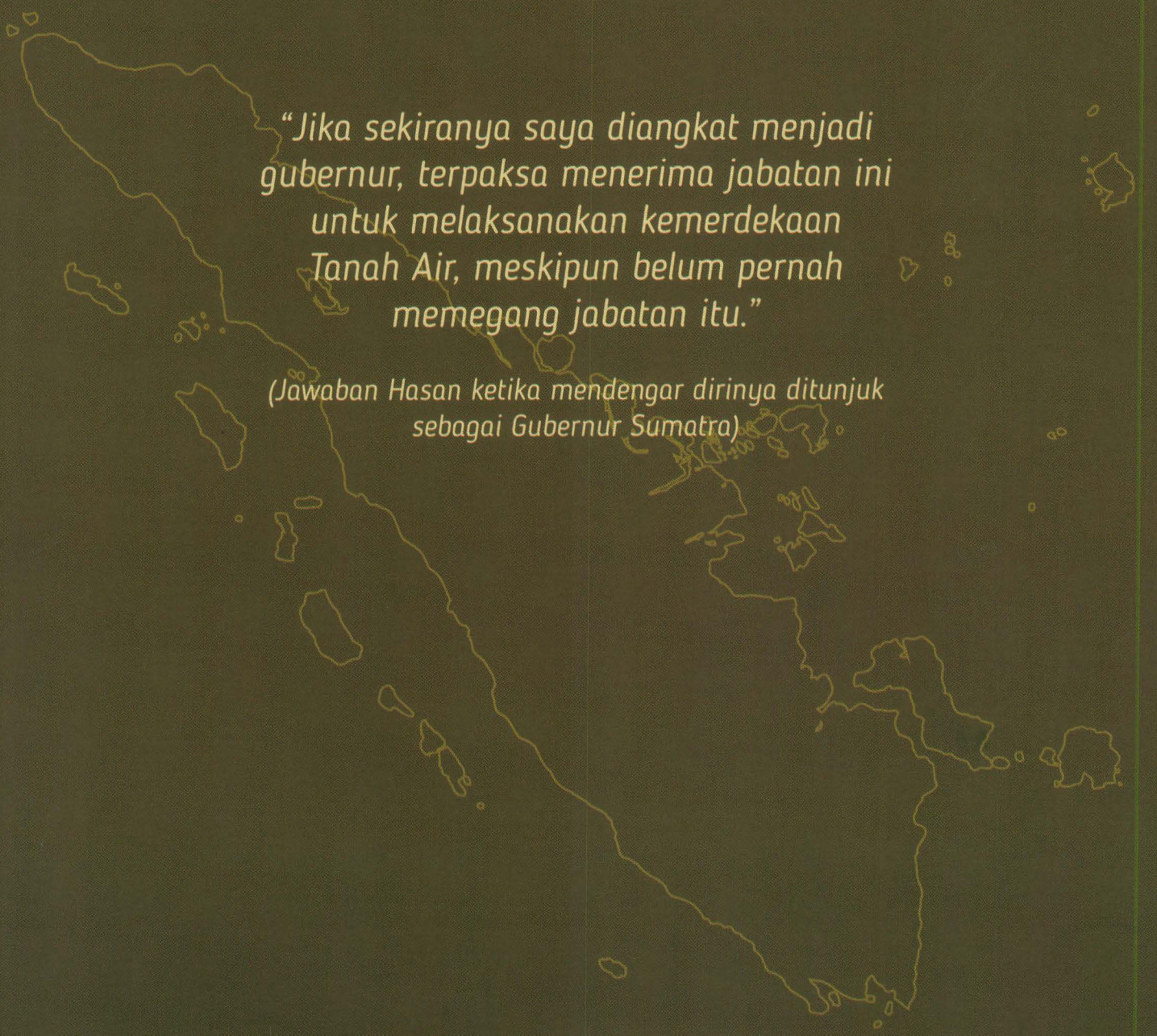

"Jika sekiranya saya diangkat menjadi gubernur, terpaksa menerima jabatan ini untuk melaksanakan kemerdekaan Tanah Air, meskipun belum pernah memegang jabatan itu."

(Jawaban Hasan ketika mendengar dirinya ditunjuk sebagai Gubernur Sumatra)

1. Putra Bangsawan Aceh

Jejak langkah Mohammad Hasan bisa ditelusuri mulai dari Desa Peukan Sot yang pada zaman kolonial merupakan bagian dari *landschap* Pineung di *afdeeling* Pidie, Aceh. Berdasarkan catatan administratif, Hasan lahir di sana pada 4 April 1906. Ayahnya, Teuku Bintara Pineung Ibrahim, adalah *uleebalang* atau penguasa lokal wilayah Pineung, Pidie. Ibunya, Cut Manyak, adalah putri *uleebalang* di wilayah Keumangan, Pidie, dan merupakan keturunan Hadrami dari Yaman. Sebagian besar masa kecil Hasan dihabiskan di kampungnya, Lampoh Saka, Sigli.

Statusnya sebagai anak *uleebalang* membuat Hasan memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan formal dan informal. Pada pagi hari ia mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat (*Volkschool*) Lampoh Saka dan pada malam harinya menuntut ilmu agama di balai pengajian milik Teungku Alibasyah yang saat itu menjabat sebagai wakil kadi (hakim agama) di Pineung. Hasan menempuh pendidikan di *volkschool* hanya selama 2 tahun karena kemudian melanjutkan pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS) di Kota Sigli pada 1917. (ELS adalah sekolah khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak bangsawan dan orang-orang terkemuka dari kalangan orang-orang Belanda dan Eropa). Keinginan untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan membawa Hasan berlayar ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan sekolah kejuruan Koningen Wilhelmina School (KWS) yang setara dengan Sekolah Teknik Menengah (STM) pada 1924. Sebelum berangkat menuju Batavia, Hasan menikah dengan Pocut Hijo yang merupakan anak dari adik bungsu ayahnya. Mereka menikah di Kuta Tuha, yakni tempat yang diyakini oleh masyarakat setempat bahwa siapa pun yang menikah di Kuta Tuha kelak menjadi orang yang terkemuka.

Di KWS Hasan memilih jurusan teknik perairan dan sering serta kerja lapangan yang menyita waktunya. Namun, pada akhir pekan murid-murid diperbolehkan berekreasi hingga pukul satu dinihari. Bersama teman-temannya, Hasan bersepeda dari asrama mencari hiburan dengan menonton film di Cikini. Pertemanannya dengan pelajar MULO bermanfaat dalam menambah ilmu dan wawasannya karena mereka meminjami Hasan buku-buku berbahasa Inggris, Prancis, dan Jerman serta buku-buku Hitung Dagang, Sejarah, dan Botani.

Setelah 3 tahun tinggal di asrama, Hasan mulai berpikir untuk mengikuti pendidikan MULO. Pertimbangannya adalah bahwa jika ia hanya lulusan KWS, kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi akan terbatas karena ia diwajibkan bekerja terlebih dulu. Sementara itu, jika lulus dari MULO, ia bisa melanjutkan ke Algemeene Middlebare School (AMS) yang setara dengan SMA sehingga satu saat ia dapat melanjutkan pedidikan ke perguruan tinggi. Keinginannya terkabul. Berkat prestasi akademiknya di KWS, Hasan diperbolehkan mengikuti ujian MULO oleh kepala asrama dan Direktur KWS. Namun, saat itu MULO tidak menerima murid baru sehingga Hasan mengikuti ujian MULO Douwes Dekker di Bandung dan dinyatakan lulus. Pada 1928 Hasan mengikuti ujian akhir di KWS dan dinyatakan lulus dengan peringkat terbaik. Dengan berbekal ijazah dari MULO dan KWS, Hasan mendaftarkan diri ke AMS Batavia dan lulus pada 1929 dengan prestasi terbaik, terutama untuk pelajaran Aljabar.

Pada 1930 Hasan berhasil lulus ujian kandidat I RHS dan pada tahun berikutnya lulus kandidat II sekaligus memperoleh ijazah sarjana muda. Selanjutnya, pada penghujung 1931 Hasan berlayar menuju negeri Belanda. Sebelum berangkat, Hasan menyempatkan pulang ke rumah masa kecilnya di Lampoh Saka untuk berpamitan dengan keluarganya. Ia juga berpamitan dengan Gubernur Aceh, Dr. Van Aken, di Kutaraja. Istri, anak, ayah, dan ibu beserta kerabat *uleebalang* lain seperti Teuku Hasan Glumpang Payung ikut mengantar kepergian Hasan di Pelabuhan Sabang.



Potret sang Gubernur Sumatra. Dok. repro buku: Medan Area Mengisi Proklamasi.



4 April 1905

Hasan lahir di Pineung di *afdeeling* Pidie, Aceh.

ACEH

PIDI

MEDAN

1917

Hasan melanjutkan pendidikan di sekolah Belanda, *Europeesche Lagere School* (ELS) di Kota Sigli.

1924

Hasan masuk ke sekolah kejuruan *Koningen Wilhelmina School* (KWS, setara STM) di Batavia.

Hasan mendaftarkan diri ke AMS Batavia dan lulus pada 1929 dengan prestasi terbaik, terutama aljabar di Batavia.

1928

Hasan berlayar menuju Negeri Belanda.

1931

Hasan menghadapi ujian akhir di hadapan komite sidang terbuka yang disaksikan oleh teman-teman dari koloni Hindia dan Belanda di Negeri Belanda.

November 1933

1934

Hasan kembali ke Aceh.

Pada akhir 1936, Hasan pindah ke kantor *Voor Bestuurshervorming* di Jalan Keboen Sirih Batavia..

1936



21 September 1997

Hasan meninggal dalam usia 91 tahun. Pemerintah Indonesia pada 2006 mengabadikan nama Hasan sebagai pahlawan nasional.

2 Oktober 1945

Hasan sendiri baru menerima telegram pengangkatannya dari Jakarta pada 2 Oktober. Dalam memoarnya, Hasan mengaku bersedia menerima penunjukan dirinya itu semata-mata karena cita-citanya demi mengabdi kepada Indonesia merdeka.

29 September 1945

Hasan dilantik sebagai Gubernur Sumatra, dengan ibu kota Medan

13 Agustus 1945

Hasan diminta oleh *Somubuco* (Kepala Pemerintahan Umum) Handa untuk menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai utusan dari Sumatra. Ia menerima permintaan tersebut dan berangkat ke Jakarta pada 13 Agustus 1945 bersama dr. Moh. Amir. Penunjukan tersebut menjadi penanda babak baru dalam kehidupan Teuku Mohammad Hasan.

BATAVIA/
JAKARTA

1939

dia mendirikan perkumpulan "Ichwanus Shafa Indonesia" yang bertujuan mengakrabkan hubungan para intelektual dengan golongan ulama di Medan

1.1 Merantau ke Belanda

Setelah menempuh perjalanan panjang, Hasan tiba di negeri Belanda dan mendaftar di Jurusan Indisch Recht atau Hukum Hindia Belanda di Rijksuniversiteit Leiden yang kini bernama Universiteit Leiden. Ia beruntung karena dapat menimba ilmu langsung dari dari pakar hukum dan kebudayaan kolonial yang sangat dikenal pada waktu itu diantaranya adalah Van Vollenhoven, Cleverings, Van den Berg, Kern, dan indolog terkemuka Snouck Hurgronje. Hasan memperoleh materi berbagai topik mulai dari hukum adat, sejarah Islam, bahasa Melayu, bahasa Arab, dan ilmu tafsir serta analisis surat kabar Arab.

Selama menempuh studi di Belanda, Hasan kerap mengikuti diskusi yang dielenggarakan oleh Perhimpunan Indonesia (PI) yang lokasinya berpindah. Hal itu membuat Hasan berkenalan dengan Sutan Sjahrir, Mohammad Hatta, Mariah Ulfah, Rustam Effendi, Darsono, dan Soumokil. Oleh teman-temannya di PI, Hasan dijuluki "profesor" karena giat belajar dengan sikapnya yang tenang.Pada November 1933 Hasan menghadapi ujian akhir di hadapan komite sidang terbuka yang disaksikan oleh teman-teman dari koloni Hindia dan Belanda. Sebelum memasuki musim dingin, Hasan kembali ke Aceh dengan gelar *meester in de rechten* (Mr.).



Jenjang Pendidikan

1915 : Volkschool Sekolah (Sekolah Rakyat) di Lampoh Saka
1917 : Europeesche Lagere School (Sekolah Dasar Belanda) di Sigli
1924 : Koningen Wilhelmina School (Sekolah Teknik) Bagian Teknik Perairan di Batavia
1927 : Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (Setara SMP) di Batavia
1929 : Algemeene Middelbare School (Setara SMA) di Batavia
1930 : Kandidat I Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia
1931 : Kandidat II (Sarjana Muda) Rechtshoogeschool di Batavia
1933 : Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) di Rijksuniversiteit Leiden, Belanda

Jenjang Karier

1936 : Voor Bestuurshervorming (Pegawai Pemerintahan) di Batavia
1938 : Pegawai di Kegubernuran Sumatra Bagian Pendidikan di Medan
1942 : Pegawai Tinzukyoku (Kantor Permohonan kepada Penguasa Militer atau Gunsaibu)
1945 : Gubernur Sumatra
1948 : Ketua Komisariat Pemerintah Pusat RI di Sumatra
1950 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)

Teuku Mohammad Hasan (tanda x, baris tengah ketiga dari kiri) pada masa pendidikan sekitar tahun 1931-1932. Dok. digitalcollections.universiteitleiden.nl.



1.2 Menjadi Pegawai Kolonial

Hasan kembali ke Aceh pada 1934. Dari pertemuan dengan Gubernur Aceh Van Aken, Hasan diberi tahu bahwa ia tidak akan melanjutkan pekerjaan ayahnya sebagai *uleebalang*. Namun demikian, Hasan ditugaskan sebagai pegawai pemerintah di Batavia. Pada awalnya Hasan diangkat menjadi pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, pada akhir 1936 ia pindah ke kantor Voor Bestuurshervorming di Jalan Keboen Sirih Batavia.

Dengan terbentuknya Gubernemen Sumatra pada 1938, Hasan pindah lagi ke Medan untuk bekerja pada Kantor Gubernur Sumatra dan selanjutnya ia banyak bergiat mengurusi bidang pendidikan. Pada 1939 ia mendirikan perkumpulan Ichwanus Shafa Indonesia yang bertujuan mengakrabkan hubungan para intelektual dengan golongan ulama. Seiring dengan mendaratnya tentara Jepang di Medan dan Sumatra, Hasan menetap di Medan sampai tahun 1942 dan bekerja sebagai pegawai Tinzukyoku (kantor permohonan kepada Gunsaibu).

Menjelang kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, Hasan kian aktif berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, Hasan bergabung sebagai Bendahara Bompa (Badan Oentoek Membantu Perang Asia Timur Raya) di Medan. Badan ini diketuai oleh Karim M.S., Moh. Yusuf, dr. Pirngadi, drh. Abdul Manaf, dan Sugondo Kartoprodjo. Berselang setahun dari pengumuman janji kemerdekaan yang didengungkan pihak Jepang, Hasan diminta oleh Somubuco (Kepala Pemerintahan Umum) Handa untuk menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ia menerima permintaan tersebut dan berangkat ke Jakarta pada 13 Agustus 1945 bersama dr. Moh. Amir. Penunjukan tersebut menjadi penanda babak baru dalam kehidupan Teuku Mohammad Hasan.

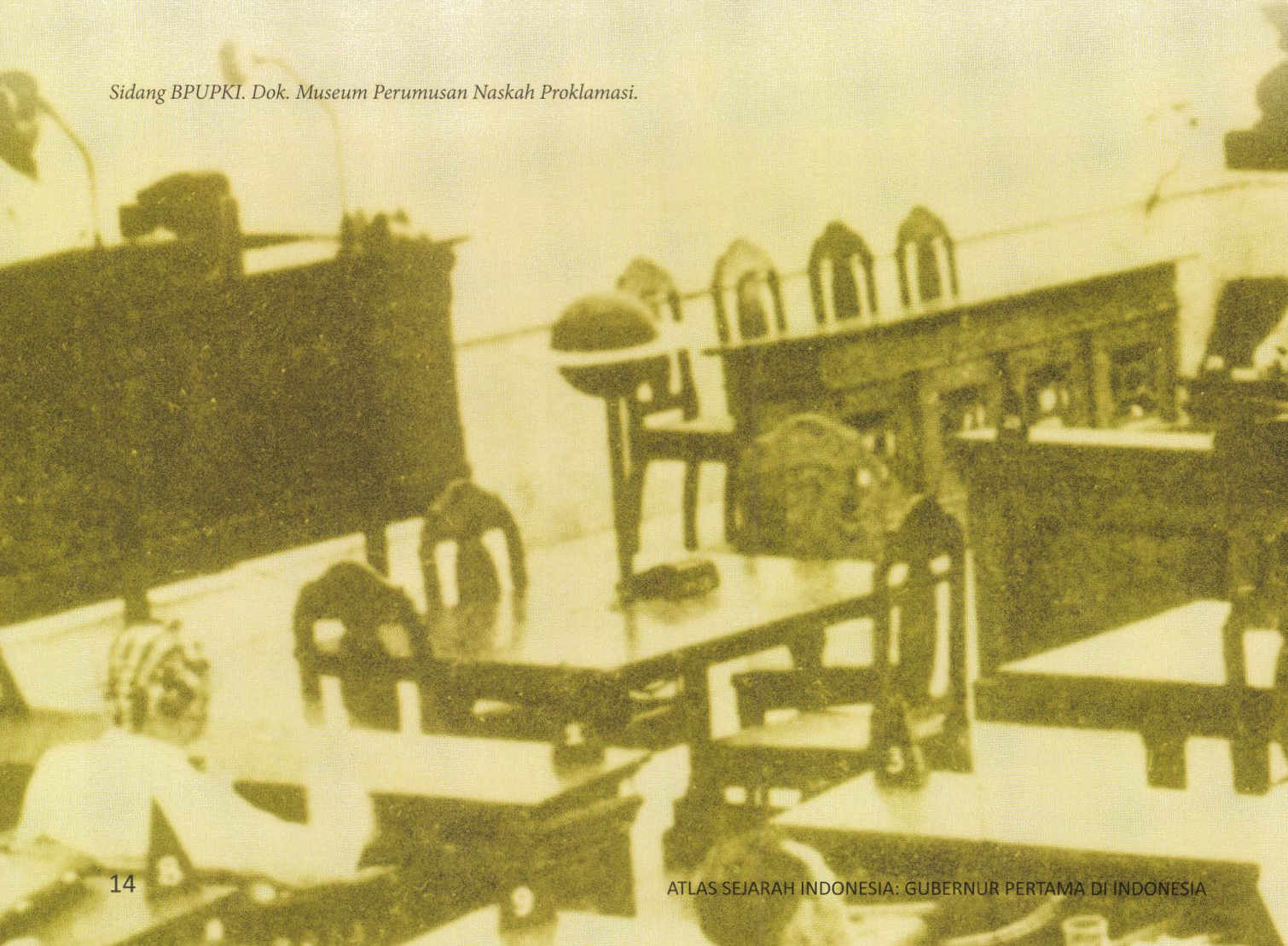

Sidang BPUPKI. Dok. Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

1.3 Berdebat di Sidang PPKI

Pada 18 Agustus 1945 PPKI menggelar rapat di gedung bekas Raad van Indië di Pejambon untuk menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) serta memilih presiden dan wakil presiden. Para utusan dari berbagai daerah dan golongan menyampaikan usul dan pendapatnya agar dipertimbangkan sebagai dasar negara. Hasan sendiri menjadi anggota yang mewakili daerah Sumatra.

Tantangan menuju kehidupan bernegara datang melalui Ki Bagus Hadikusumo, ulama Muhammadiyah Yogyakarta. Ki Bagus meminta agar dalam rancangan Mukadimah UUD dan Pasal 29, Ayat 1, ditambahkan kalimat, "Dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Wakil Ketua PPKI, Mohammad Hatta kewalahan dengan argumentasi Ki Bagus Hadikusumo. Jika tidak menampung kepentingan kelompok Muhammadiyah, kemungkinan tuntutan tersebut melebar ke kelompok muslim lainnya. Kemudian, Hatta mengutus Hasan untuk membujuk Ki Bagus Hadikusumo agar bersedia memikirkan ulang usulannya. Kemudian, Hasan berunding dengan Ki Bagus Hadikusumo. Setelah melalui diskusi panjang, usulan Mohammad Hasan disepakati oleh utusan lain untuk menggantikan kalimat yang diusulkan oleh Ki Bagus Hadikusumo,yakni dengan kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa".Ketenangan sikap Mohammad Hasan yang mengedepankan dialog membuat proses negosiasi berjalan dengan baik.

Rapat persiapan tersebut juga menjadi awal pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI). Badan ini disahkan pada 22 Agustus 1945 dan menjadi perhimpunan bagi wakil rakyat Indonesia di pusat dan di daerah-daerah untuk menyelenggarakan perpindahan kekuasaan dari pemerintah Jepang ke pemerintah Republik Indonesia. Dalam skema KNI, pembagian wilayah terpilah atas pusat-daerah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Fungsi utama KNI adalah menjembatani aspirasi politik daerah dan pusat agar dapat mencapai tujuan bersama sebagai bangsa yang merdeka.

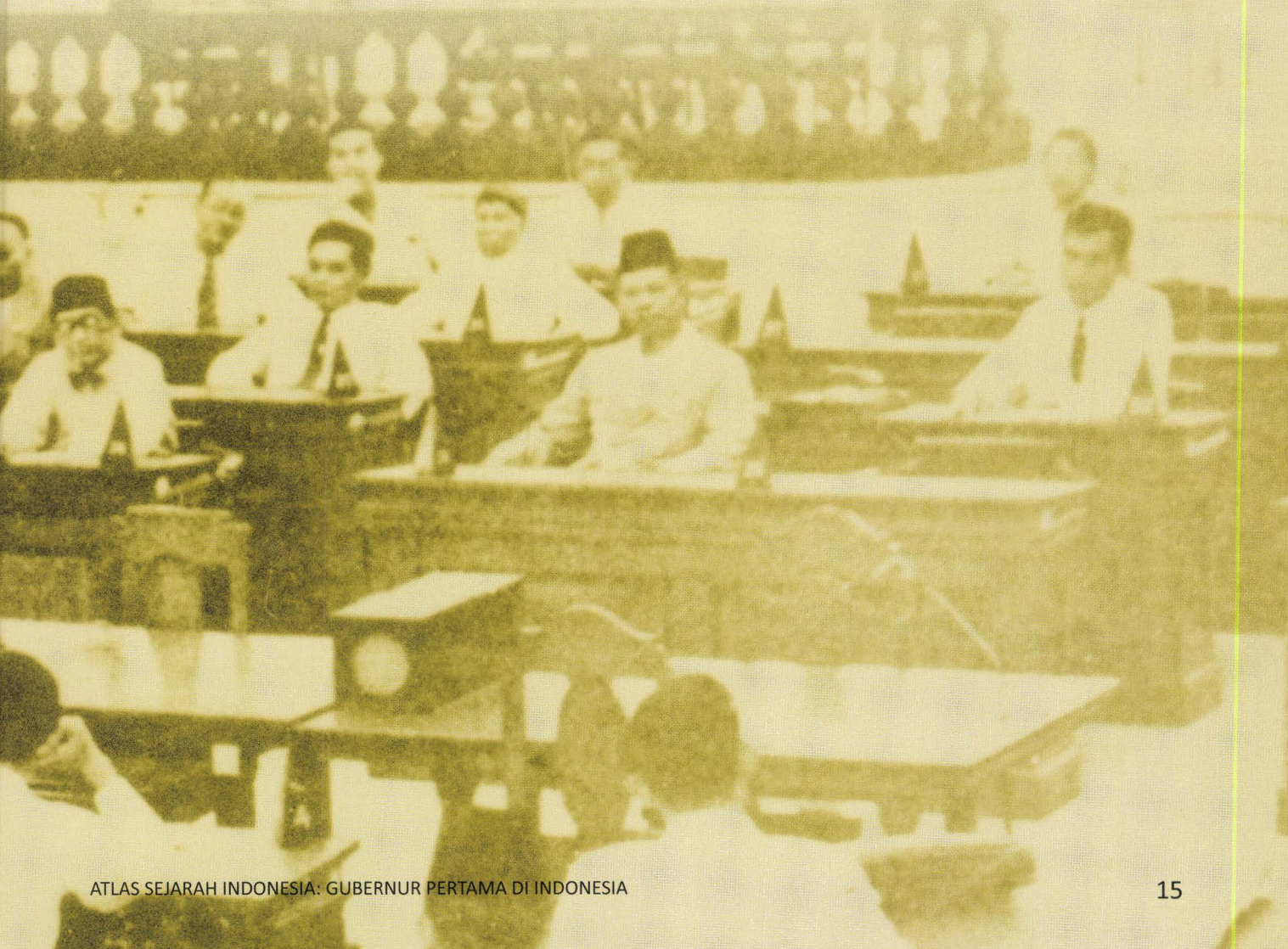

PROVINSI SUMATRA PADA MASA KEMERDEKAAN



Peta Dasar Badan Informasi Geospasial (BIG), 2019

2. Menjadi Gubernur Sumatra

Dalam rapat KNI, pemerintah pusat mengambil putusan bahwa Sumatra akan menjadi satu provinsi dan dipimpin oleh seorang gubernur. Dokter Amir, seorang tokoh Sumatra Utara yang juga menteri negara merekomendasikan agar Teuku Mohammad Hasan ditunjuk sebagai Gubernur Sumatra. Menurutnya, Hasan memiliki pendidikan yang tinggi dan pengalaman bekerja dalam bidang pemerintahan. Kemudian. Amir sendiri ditunjuk menjadi pendamping Hasan sebagai wakil gubernur. Pada 29 September 1945 Teuku Mohammad Hasan dilantik sebagai Gubernur Sumatra dengan ibu kota Medan. Dalam memoarnya, Hasan mengaku bersedia menerima penunjukan dirinya itu semata-mata karena cita-citanya demi mengabdi pada Indonesia merdeka. Untuk membantunya mengelola pemerintahan, Hasan mengangkat sepuluh orang residen untuk seluruh Sumatra. Selain itu, ia juga mengangkat delapan orang staf gubernuran untuk membantu program kerja di berbagai karesidenan yang telah ditetapkan.

Pada 3 Oktober 1945 Hasan mengeluarkan dekrit pertamanya yang berisi bahwa siapa pun harus menerima perintah langsung dari otoritas Republik dan berhenti bekerja dari kantor yang tidak mengibarkan bendera Merah Putih. Untuk meneruskan intruksi Gubernur Hasan, diterbitkanlah Koran *Soeloeh Merdeka* sekaligus menyebarluaskan kabar pengangkatan pejabat negara di Sumatra. Barulah pada 6 Oktober bendera Merah Putih secara resmi berkibar pada rapat akbar di alun-alun kota yang dihadiri ribuan peserta. Untuk merangkul kaum Republikan, Hasan melakukan muhibah ke penjuru wilayah Sumatra untuk meyakinkan bahwa setiap pemimpin daerah di Sumatra harus mendukung negara Republik Indonesia.

Pada 26 November, Hasan bertemu dengan Letnan Jenderal Sir Philip Christison di Medan. Komandan Sekutu di Indonesia itu membujuk Hasan untuk menjadikan Sumatra dalam pemerintahan tersendiri yang terpisah dari Jawa. Hasan menolaknya. Sebagai gubernur dari negara berdaulat, Hasan hanya bersedia menempuh kebijakan yang seturut dengan keputusan pemerintah pusat di Jawa.

"Demokrasi itu sebenarnya sedjak dahulu kala telah ada dalam masyarakat kita di Sumatra ini. Dalam negeri di Minangkabau, atau luhak di Tapanuli, hak rakyat dibela dan kata-mufakat dijunjung tinggi."

(Pidato Hasan di hadapan para raja dan sultan di Sumatra Timur)


BANDA ACEH
LANGSA
MEDAN
PEMATANGSIANTAR
TARUTUNG
SIPIROK
PADANG SIDEMPUAN
KOTANOPAN
PEKANBARU
BUKITTINGGI
PADANG PANJANG
SAWAH LUNTO
PADANG
BENGKULU
September s.d. November 1945
28 Agustus 1945
26 Agustus 1945

Muhibah Keliling Sumatra

Menyebarluaskan berita kemerdekaan dan perintah tunduk kepada Republik Indonesia.

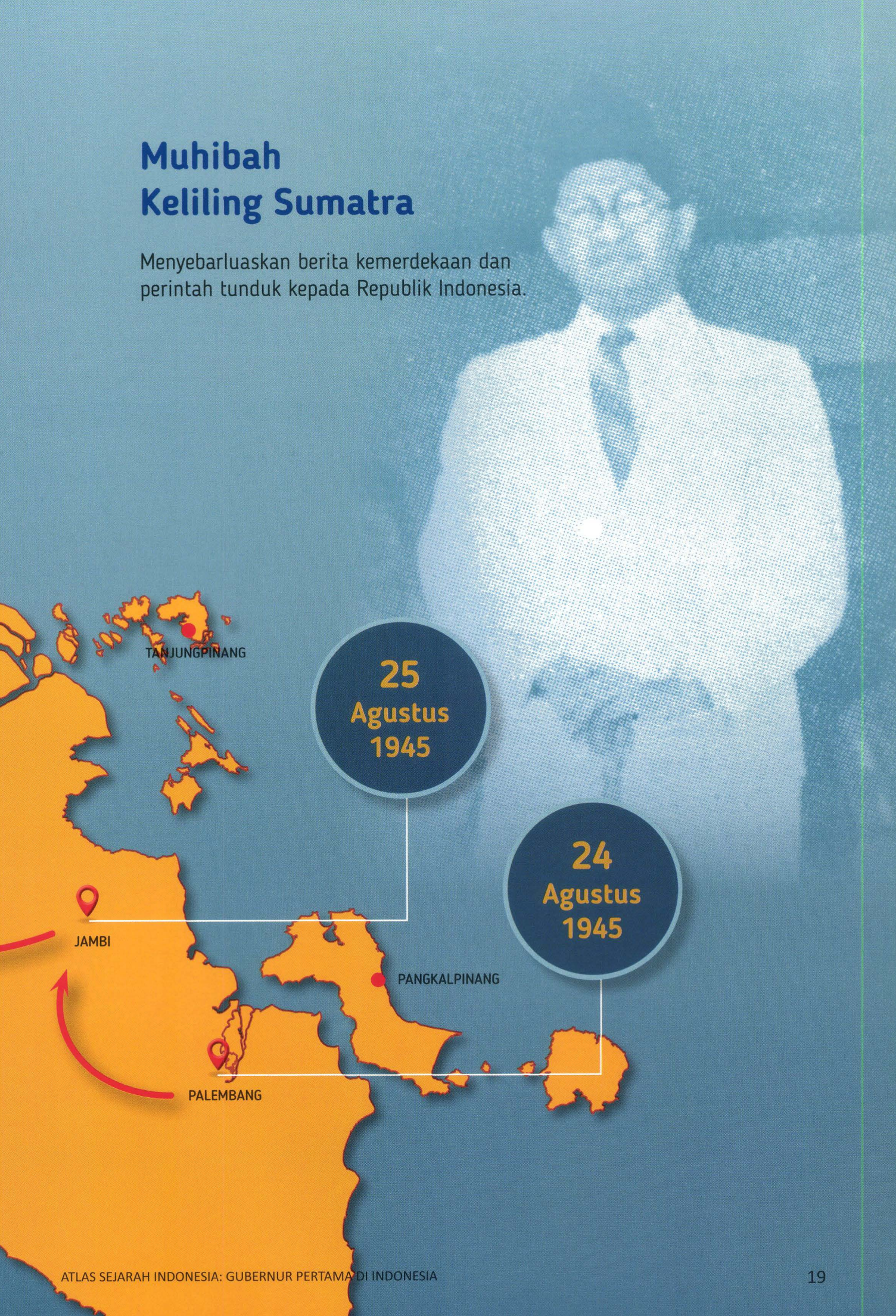

2.1 Menghadapi Pasukan Sekutu

Sejak Oktober 1945 kota Medan jatuh ke tangan pasukan Sekutu yang terdiri dari British-Indian Army dan pasukan Belanda, yakni NICA. Objek vital di Medan disegel dan ditandai sebagai Fixed Boundaries Medan Area untuk dijadikan basis militer. Istilah medan area selanjutnya menjadi palagan pertempuran merebut kembali kota Medan.

Tentara Inggris menggelar operasi ke berbagai penjurukota Medan. Pada 6 Desember 1945 tentara Inggris mengepung gedung Oranye Bioscop tanpa melalui perantaraan pembesar-pembesar setempat. Kemudian, terjadi peledakan terhadap masjid di Jalan Serdang (kini Jalan Mohammad Yamin) hingga rata dengan tanah. Aksi-aksi tersebut mengarah pada pertempuran terbuka antara pasukan Inggis dan pejuang Republik. Salah satu pertempuran yang paling sengit terjadi di bagian selatan Medan pada 10 Desember 1945. Pasukan Inggris berusaha merebut alat transportasi bersenjata dan membebaskan tiga tentaranya di Deli Tua. Mereka menghadapi perlawanan yang keras dari TKR, TKR-B, dan laskar.

Dalam keadaan genting, pihak Sekutu dan pemerintah Indonesia sepakat melakukan perundingan. Setelah kembali dari Aceh, pada 17 Desember Gubernur Hasan dipanggil oleh Komandan Sekutu di Medan, Brigadir Jenderal Ted Kelly, untuk membahas keadaan kota yang memanas. Namun, baru berselang 10 hari, kesepakatan yang lebih produktif dengan Komandan Inggris untuk Sumatra, Mayor Jenderal Chambers, berhasil dicapai oleh Gubernur bersama Walikota Medan, Mohammad Jusuf.

Chambers mengakui keberadaan TKR. Selama di luar wilayah kunci pendudukan Inggris, TKR diperbolehkan memiliki senjata. Chambers menegaskan bahwa pihak Inggris dan Jepang tidak akan melakukan intervensi apapun dalam

Tentara Sekutu Inggris memasuki perkampungan di Medan, 15 Mei 1945.
Dok. repro buku: Anthony Reid, The Blood of the People.



urusan sipil di Medan, kecuali keamanan benar-benar terancam. Sebagai balasan, Hasan berjanji mengakhiri embargo Indonesia dalam jasa dan pasokan logistik untuk Sekutu serta mengakomodasi orang-orang Belanda yang ada di kamp tawanan perang (RAPWI) Sumatra. Untuk itu, dikeluarkanlah maklumat bahwa pemerintah Sumatra tidak bermusuhan dengan Belanda, tetapi hanya menentang sistem kolonialnya. Pemerintah Sumatra akan memelihara sebanyak 18.000 jiwa tawanan Belanda. Proses evakuasi tawanan asing ini ke luar negeri dijamin dengan baik.

Menurut Hasan, rekonsiliasi yang terjalin merupakan bentuk pengakuan pihak Inggris terhadap Republik Indonesia. Terobosan diplomasi Hasan mengarahkan para pemuda untuk melunak dan menggencat adu senjata. Selama beberapa bulan tindak kekerasan kelompok pemuda berkurang jauh jika dibandingkan dengan awal Desember.

Kebijaksanaan serupa juga diterapkan kepada pasukan Jepang yang tersisa di Sumatra. Pemerintah Sumatra menyatakan tidak bermusuhan dengan Jepang. Gubernur Hasan mengimbau kepada rakyat, khususnya kepada barisan lascar, supaya tidak mengganggu pasukan Jepang. Sebaliknya, segala tindakan provokasi yang dilakukan oleh Jepang akan dibalas setimpal oleh rakyat.

Kekuatan dan energi para pemuda lalu dialihkan kepada hal yang bersifat kekaryaan. Dari konfrontasi dengan pihak Sekutu dan Jepang, mereka disibukkan pada proses pengambilalihan lahan perkebunan atau sumber daya lainnya. Mereka sekaligus dijadikan garda terdepan melawan anasir-anasir konservatif di kalangan orang-orang Indonesia yang enggan bergabung dengan Republik.

TKR berangkat MedanArea. Dok. id.wikipedia.org.



2.2 Menyatukan Kaum Republik

Pada bulan-bulan awal kemerdekaan Indonesia situasi keamanan di Sumatra kawasan utara cukup rawan. Para pemuda yang tergabung dalam kelaskaran tidak kerap terlibat dengan upaya pelucutan senjata kepada tentara Jepang, Sekutu, atau kelompok yang dianggap dekat dengan kedua pihak. Selain itu, beberapa wilayah mengalami pergolakan karena dilanda revolusi, terutama di Sumatra Timur dan Aceh.Situasi yang memanas menyebabkan bentrokan kepentingan antarsesama anak bangsa.Sebagai gubernur, Teuku Mohammad Hasan dihadapkan pada situasi yang pelik. Gejolak terjadi di sana-sini. Hasan banyak terlibat dalam menangani kisruh antarelite yang dilanda revolusi atau tantangan dari pihak Sekutu dan Belanda.

Di Sumatra Timur friksi antara laskar pemuda dan pihak kerajaan yang konservatif juga akut.Para pemuda memiliki kekuatan fisik yang tangguh, tetapi terbelah sehingga setiap upaya untuk bersatu-padu kadang malah cenderung bersifat destruktif. Di sisi lain, pihak kerajaan bersikeras mempertahankan kekuasaan yang membuatnya makin terisolasi dari masyarakat. Pengaruh pihak kerajaan Melayu dan Simalungun, misalnya, hanya sebatas di wilayah etnik mereka sendiri.

Tanggung jawab yang diemban Gubernur Teuku Mohammad Hasan dan wakilnya, dr. Amir, untuk memperantarai dua kelompok tersebut bukan perkaramudah. Pada 3 Februari 1946 diadakan pertemuan antara pemerintah Karesidenan Sumatra Timur dan semua sultan dan raja di wilayah itu.Seluruh sultan di Sumatra Timur hadir, kecuali dari Serdang. Gubernur Hasan memanfaatkan momentum itu untuk membujuk para sultan menerima sistem demokrasi dalam kerangka negara Republik Indonesia.

Dalam pidatonya Hasan menganjurkan agar raja-raja di Sumatra Timur jangan ragu berdiri di belakang Republik yang didukung seluruh rakyat. Dia menambahkan bahwa pemerintahan Republik tidak akan menghapuskan struktur kerajaan. Dalam pertemuan itu para sultan menyatakan keberpihakannya terhadap Presiden Sukarno dan pemerintahan nasional. Mereka berkomitmen untuk ikut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebuah prasyarat diajukan, yakni dengan tergabungnya mereka dalam Komite Nasional Indonesia (KNI) semacam Dewan Perwakilan Rakyat.Perubahan sikap ini dilatarbelakangi dengan terjadinya pembunuhan terhadap keluarga bangsawan *uleebalang* di Pidie, Aceh, beberapa waktu sebelumnya.

Sementara itu, di luar lingkaran pemerintah para pemuda yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok kirisudah tidak sabar ingin menggantikan "daulat tuanku" ke "daulat rakyat." Tiga hari setelah pertemuan itu Gubernur Hasan meninggalkan Medan untuk berkeliling Sumatra. Tekanan kelompok pemuda revolusioner untuk melakukan kudeta terhadap raja-raja semakin tidak terelakkan. Pada 3 Maret 1946 kudeta terhadap sultan-sultan di Sumatra Timur dilancarkan kelompok Persatuan Perjuangan. Beberapa nama yang menjadi pimpinan gerakan ini adalah tokoh-tokoh PKI Sumatra, seperti Karim M.S., Nathar Zainuddin, dan Junus Nasution. Tuntutan untuk menciptakan tentara rakyat, pemerintahan rakyat, dan pengambilalihan perkebunan serta aset milik Belanda lainnya menjadi dorongan utama meletusnya revolusi sosial di Sumatra Timur.Hasan sendiri sedang berada di Sumatra Selatan ketika peristiwa berdarah itu berlangsung.

Di Tanjung Balai ribuan orang berkumpul karena mendengar rumor pihak Belanda akan mendarat di sana. Mereka mengantisipasi kembalinya Belanda melalui perantara sultan-sultan dalam Comite van Ontvangst.Mereka juga mengambil alih kekayaan kesultanan yang dijustifikasi sebagai "perampasan properti musuh adalah berguna untuk perjuangan nasional". Sekitar 140 orang terdiri atas sultan dan keluarganya dibunuh kelompok pemuda Persatuan Perjuangan Kudeta meluas ke Labuhan Batu, Rantau Prapat, Deli, Serdang, Langkat,dan Sunggal.

Ketika Gubernur Hasan kembali ke Medan pada 21 Maret, ketegangan yang diciptakan oleh kelompok pemuda semakin nyata. Pada saat yang sama beredar desas-desus bahwa kedudukan Hasan juga akan dikudeta. Gubernur Hasan sempat tinggal beberapa lama di Medan. Pada 27 April Gubernur Hasan dengan ditemani Mr. Hermani menuju Pematangsiantar. Namun, rencana kudeta itu gagal karena perpecahan dalam kelompok revolusioner sendiri, yakni antara kubu Junus Nasution dan Nathar Zainuddin. Hasan mengalami pergolakan dan menjadi bagian dari sisa penguasa lokal yang memiliki ikatan emosional dengan Belanda, tetapi juga berada di bawah tekanan laskar pemuda yang menuntut revolusi sosial.


PETA WILAYAH
KESULTANAN SUMATRA TIMUR
Banda Aceh
Kesultanan Aceh
Kesultanan Deli
Kesultanan Serdang
Kesultanan Langkat
Medan
Pematangsiantar
Kerajaan Simalungun
Kesultanan Asahan
Kesultanan Siak Sri Indrapura
Pekanbaru
Kesultanan Pelalawan
Bukittinggi
Kesultanan Indragiri
Padang



Peta kota Medan dalam garis demarkasi. Dok. Repro buku: Medan Area Mengisi Proklamasi.

2.3 Menata Sumatra

Pada akhir Maret 1946 Hasan mempertimbangkan usulan Residen Sumatra Timur Laut, Siregar, untuk memindahkan ibu kota dari Medan karena keadaan yang semakin rawan. Bersama dengan rombongan kecil, Mohammad Hasan singgah di Pematangsiantar untuk memantau kota itu sebagai pusat pemerintahan. Pada 12 April 1946 Hasan menerbitkan ketetapan Gubernur Sumatra Nomor 8/MGS tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra (DPS).

Secara perlahan tata kelola pemerintah di Sumatra mulai bergerak. Gubernur Hasan menetapkan peraturan dan menentukan hak residen-residen untuk mengangkat atau memberhentikan pegawai-pegawai negara. Peraturan ini berlaku untuk semua jawatan, kecuali pertahanan. Hasan juga mengangkat pegawai-pegawai yang bersangkutan atas usul residen masing-masing daerah. Residen bertanggung jawab atas keamanan dalam daerahnya. Kepada residen diberi hak untuk mengangkat pegawai kepolisian sampai tingkat komandan.

Pada 22 Juli 1946, Hasan mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatra (PGS) 22 Juli 1946 tentang penetapan gaji pegawai negeri di Sumatra. Hasan menetapkan gaji pegawai negeri sebesar dua pertiga dari gaji pegawai zaman Belanda. Penetapan gaji pegawai di Sumatra sempat bertentangan dengan Peraturan Gaji Pegawai yang dikeluarkan pemerintah pusat pada 1948. Dalam peraturan pusat disebutkan bahwa gaji presiden dan wakilnya sebesar 1.000 rupiah, menteri 750 rupiah, dan gubernur 650 rupiah. Dengan demikian, gaji Gubernur Hasan sebesar 1.200 rupiah masih lebih besar jika dibanding gaji Presiden Sukarno.



Peta wilayah Sumatra Utara. Dok. Repro buku: Republik Indonesia: Propinsi Sumatra Utara.


Perpindahan ibu kota
Provinsi Sumatra
untuk menghindari
serangan Belanda
Banda Aceh
Medan
Pematangsiantar
Pekanbaru
Bukittinggi
Padang
Bengkulu
Medan, Agustus 1945
Pematang Siantar, April 1946
Bukittinggi, Juli 1947

2.4 Diberhentikan Secara Hormat

Pada November 1946 Perjanjian Linggajati disepakati antara pihak Indonesia dan Belanda. Perjanjian itu mengakui kekuasaan Republik hanya di Pulau Jawa, Madura, dan Sumatra. Perjanjian tersebut juga mencakup pembentukan negara Republik Indonesia Serikat yang merupakan persemakmuran dari Kerajaan Belanda. Sementara itu, dalam proses menuju ke tahap itu, kedua belah pihak bersepakat untuk mengawal keamanan dengan cara-cara yang damai. Namun, belum genap 1 tahun Perjanjian Linggajati, pihak Belanda melancarkan serangan militer pada Juli 1947.Di Sumatra tersiar kabar bahwa tentara Belanda mulai memasuki Pematangsiantar dari Tebingtinggi pada 29 Juli 1947.Pada saat yang bersamaan Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama dengan Gubernur Hasan berada di Pematangsiantar. Setelah mendengar kabar tersebut, Hasan meninggalkan Pematangsiantar menuju Brastagi melalui Kabanjahe di tengah gencarnya pesawat terbang Belanda yang melintas rendah di sana.

Masuknya tentara Belanda ke Pematangsiantar memutar akal Gubernur Hasan untuk memindahkan ibu kota Sumatra ke Bukittinggi. Tujuannya agar proses pengiriman dan penerimaan informasi berjalan lancar. Keadaan di Bukittinggi memang jauh lebih kondusif dan memungkinkan seorang penerbang asal India, Biju Patnaik, masuk melalui udara dan mendarat di landasan pacu Gadut.

Hasan menyebutkan bahwa Patnaik adalah sahabat Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, yang datang ke Bukittinggi untuk mengantarkan surat Presiden Sukarno kepada Hatta. Dalam surat itu Sukarno meminta Hatta ikut bersama Patnaik menemui Nehru di India untuk meminta bantuan persenjataan. Hatta menyanggupi permintaan itu dan menyamar sebagai co-pilot Patnaik dengan nama Abdullah. Setelah perjalanan singkat dan rahasia ke India, Hatta kembali ke Bukittinggi dan berkeliling ke wilayah-wilayah lainnya untuk menggalang dukungan kepada Republik.Hasan



Presiden Sukarno didampingi Gubernur Teuku Mohammad Hasan dalam kunjungan ke Jambi, 1948. Dok. Repro buku: Gubernur Sumatra: Dari Aceh ke Pemersatu Bangsa.

menemani Hatta berkunjung ke daerah Palupuh, Sipisang, Bonjol, dan Lubuk Sikaping di Pasaman.

Atas permintaan Presiden Sukarno, Mohammad Hatta tetap tinggal di Sumatra hingga Perjanjian Renville ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada Januari 1947. Kemudian, pada bulanJuni Presiden Sukarno ganti berkunjung ke Sumatra untuk menggalang dukungan dan kekuatan nasional. Presiden ke Aceh bertemu Tengku Daud Beureueh untuk merumuskan strategi mobilisasi umum dan pengumpulan dana pembelian pesawat Dakota DC-3. Pada kunjungan itu struktur pemerintahan Sumatra secara terpusat sebagai satu provinsi dibatalkan. Sebagai gantinya, dibentuk struktur baru, yaitu Komisariat Negara Republik Indonesia di Sumatra, yang menjadikan status Gubernur Mohammad Hasan berubah menjadi Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia di Sumatra.

Mulai tanggal 1 Juni 1948 dibentuklah Komisariat Pusat di Sumatra. Hasil keputusan menyetujui adanya tiga provinsi di Sumatra: Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Dengan demikian, Mohammad Hasan diberhentikan dengan sangat hormat sebagai Gubernur Sumatra dan juga kepala daerah Provinsi Sumatra. Selanjutnya, ia diangkat menjadi Komisaris Urusan Umum merangkap Ketua Komisariat Pemerintah Pusat RI di Sumatra.



Pembagian wilayah Sumatra menjadi tiga provinsi

3. Gubernur Pertama dan Terakhir Sumatra

Hasan menjabat Gubernur Sumatra sejak 29 September 1945 hingga 31 Mei 1948. Dia merupakan gubernur Sumatra yang pertama sekaligus terakhir. Selama memimpin Provinsi Sumatra, Hasan menerbitkan sebanyak enam belas peraturan dan keputusan diantaranya peraturan tentang pembentukan Dewan Perwakilan Sumatra, susunan Pemerintah Sumatra Timur dan peraturan pelaksanaanpemerintahan untuk gubernur-gubernur muda di Provinsi Sumatra.

Ketika Belanda melancarkan agresi militer yang kedua, Hasan ikut mengungsi bersama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Ketua PDRI, Sjafruddin Prawiranegara, menunjuk Hasan sebagai wakilnya yang berkedudukan di Bukittinggi. Keputusan pertama yang diambil Hasan adalah menginstruksikan pejabat pemerintah di Bukittinggi agar bersiap untuk mengungsikan diri ke perkebunan Halaban, dekat Payakumbuh.

Seiring dengan pengakuan atas kedaulatan wilayah Indonesia, struktur administrasi negara terus menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Teuku Mohammad Hasan tidak lagi menjabat sebagai gubernur, tetapi senantiasa ditawari berbagai kedudukan. Dalam memoarnya, Hasan mengenang bahwa Mohammad Hatta sekali waktu pernah menawarinya posisi duta besar untuk Mesir. Hasan menolak tawaran tersebut dan menyatakan keinginannya untuk hidup bebas sebagai rakyat biasa.

Masa-masa setelah pengakuan kedaulatan, Hasan menetap di Jakarta.Dia mengabdi sebagai wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Hasan juga terlibat dalam upaya nasionalisasi perusahaan minyak asing menjadi milik negara dalam Permina (Perusahaan Minyak Negara). Buah pikiran Hasan tentang sejarah perminyakan dibukukan dalam *Sejarah Perminyakan di Indonesia* (1985). Hingga masa tuanya, Hasan tetap berkhidmat untuk negara baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

Hasan, gubernur pertama dan terakhir Sumatra, telah berjuang melintasi berbagai zaman mulai dari era kolonial hingga menyaksikan Indonesia merdeka dan tumbuh menjadi negara menuju maju. Hasan meninggal di Jakarta pada 21 September 1997 dalam usia 91 tahun. Pemerintah Indonesia pada 2006 mengabadikan nama Hasan sebagai pahlawan nasional.

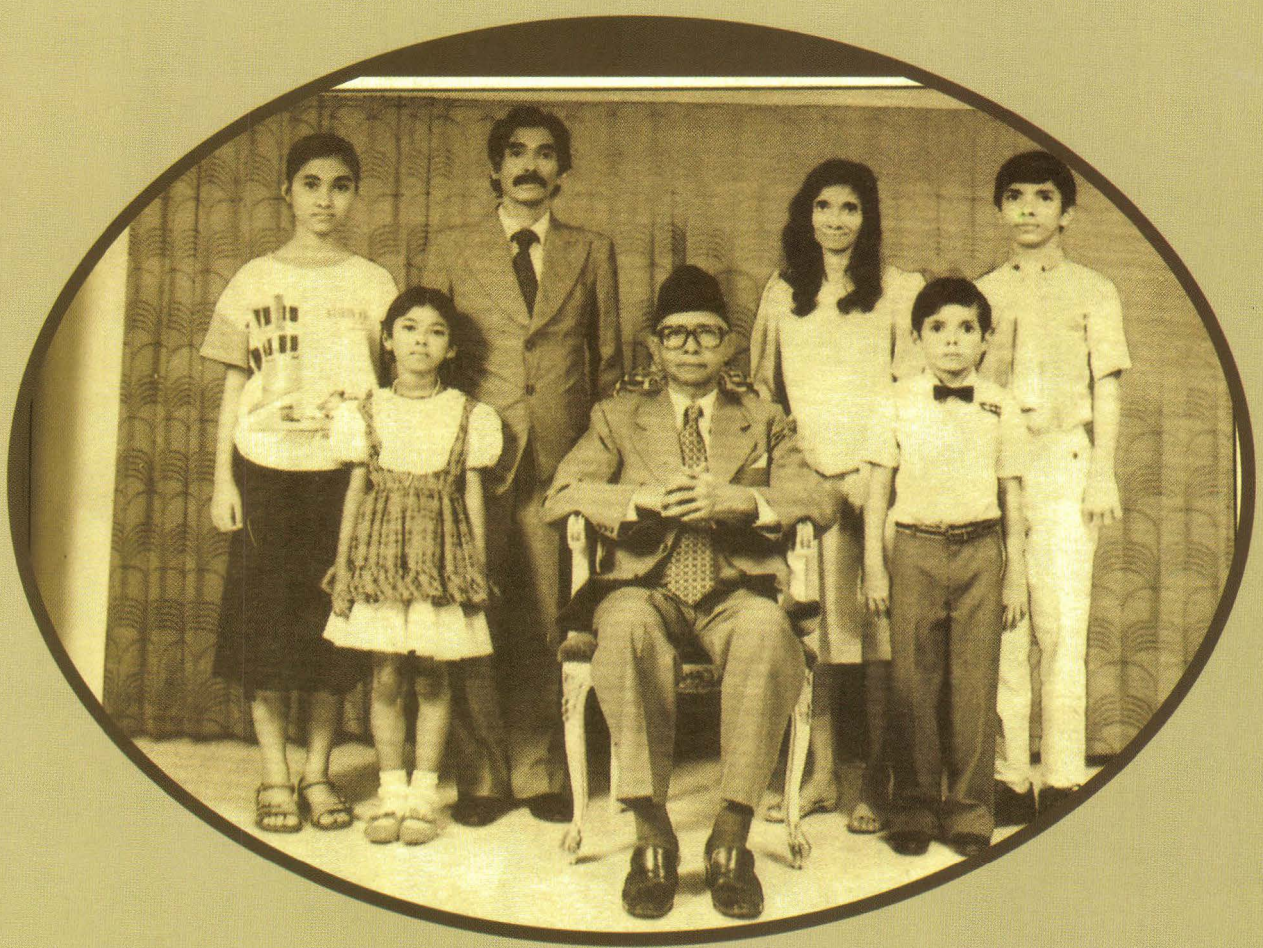

Hasan bersama keluarga. Dok. repro buku: Dr. Mr. Moehammad Hassan: Salah Seorang Pendiri Republik Indonesia dan Pemimpin Bangsa



Soetardjo Kartohadikoesoemo

Gubernur Jawa Barat

"Berperanlah tanpa jabatan;
bukan menjabat tapi tanpa peranan"

(Pesan Soetardjo kepada keluarganya)

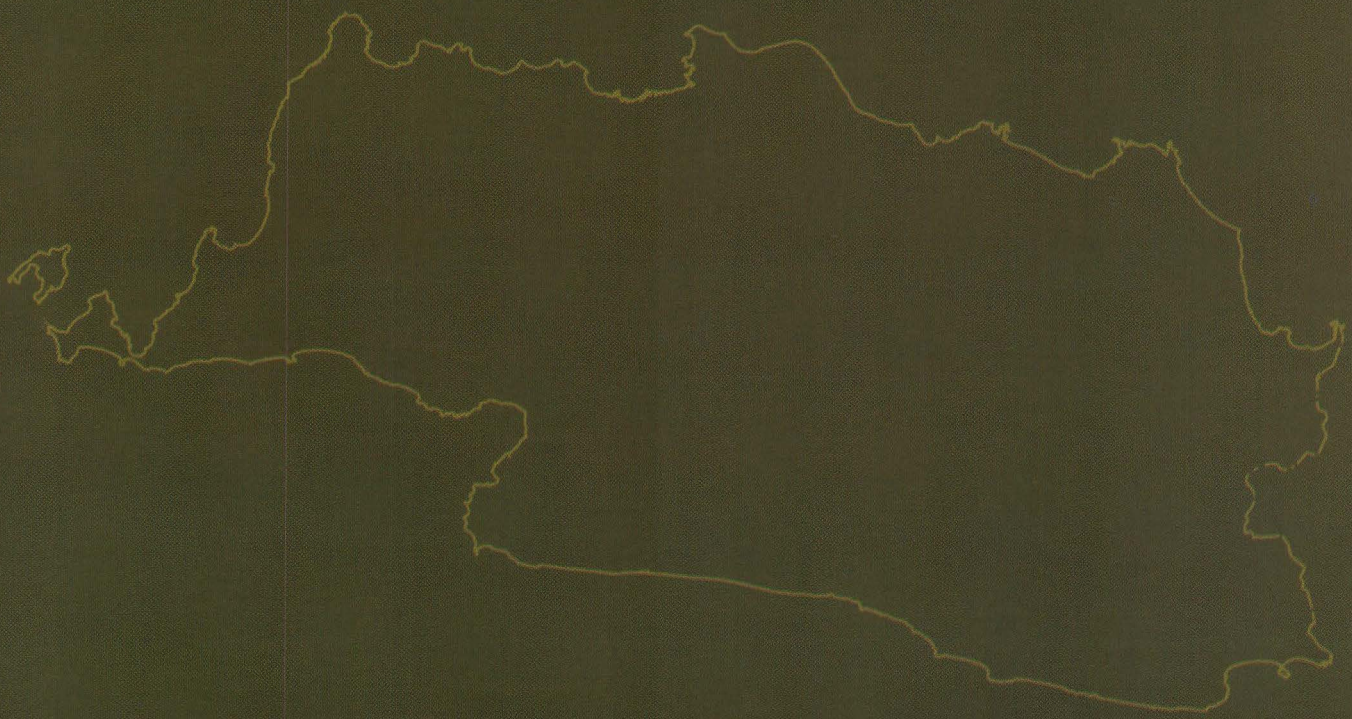

1. Kiprah Sebelum Gubernur

Mas Soetardjo Kartohadikoesoemo lahir di Desa Kunduran, Blora, Jawa Tengah, 22 Oktober 1890 dari keluarga priayi. Ayahanda Soetardjo, yakni Mas Kartoredjo, adalah Wedana Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang masih keturunan keluarga pemerintahan dari Madura. Adapun ibunda beliau yang bernama Mas Ayu Kartoredjo merupakan keturunan keluarga pemerintahan dari Banten.Kakek Soetardjo dari pihak ayahyang bernama Kiai Kartowijoyo adalah Lurah Pandean, Kabupaten Tuban. Dapat dikatakan bahwa keluarga Soetardjo adalah keluarga birokrat karena 5 orang kakak dan 2 orang adiknya bekerja sebagai pegawai negeri, kecuali saudara wanitanya yang menikah dengan pegawai negeri.

Pendidikan formal Soetardjo diawali dari ELS (Europeesche Lagere School), yakni sekolah dasar pada masa Hindia Belanda yang diperuntukkan bagi keturunan Belanda, Eropa, dan rakyat Indonesia dari golongan terpandang. Setelah menyelesaikan pendidikan di ELS, Soetardjo melanjutkan pendidikan di OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren) atau sekolah menengah khusus pamong praja bumiputra yang berlokasi di Magelang pada tahun 1919. Kesadaran politik mulai tumbuh dari dalam dirinya selama mengikuti pendidikan di OSVIA dan kesadaran tersebut mengantarkan Soetardjo bergabung dengan organisasi kebangsaan Boedi Oetomo Cabang Magelang. Bahkan, ia dipercaya untuk memimpin organisasi tersebut pada periode 1909–1911.

Soetardjo mengawali karier sebagai birokrat saat menjadi pembantu juru tulis di Rembang pada 1911. Kariernya di pemerintahan melesat. Pada tahun dan di tempat yang sama ia diangkat menjadi juru tulis jaksa dan kemudian diangkat menjadi mantri kabupaten. Bakat kepemimpinan Soetardjo terlihat saat ia berperan dalam memadamkan Gerakan Samin dengan pendekatan persuasif terhadap para penganutnya pada 1913. Saat itu Soetardjo menjabat sebagai asisten Wedana di Bogorejo, Blora.



Soetardjo (tanda X) sedang menjalankan tugas kepamongprajaan sebagai pembantu jurutulis. Dok. repro buku: Memoar "Soetardjo: 'Petisi Sutardjo' dan Perjuangannya karya Setiadi Kartohadikusumo.



Soetardjo berbincang dengan Presiden Sukarno seusai penganugrahan Bintang Mahaputra IV di Istana Negara, 1962. Dok. repro buku: Soetardjo: Petisi Sutardjo dan Perjuangannya karya Setiadi Kartohadikusumo.

Karier Soetardjo kian meningkat seiring dengan penunjukkan dirinya sebagai jaksa di Rembang pada 1915. Berbagai prestasi kerjanya menjadi bekal bagi dirinya untuk melanjutkan pendidikan pada Bestuurschool atau sekolah tinggi pemerintahan di Batavia pada tahun 1919–1921. Selain menjalani pendidikan, Soetardjo juga aktif dalam kegiatan penerbitan, yakni sebagai pemimpin redaksi buletin *Oud Osviaan*. Pada 1919 Soetardjo pernah membuat tulisan dalam pamflet yang berisikan keluhan dan diskriminasi yang dialami pamong praja bumiputra. Soetardjo menyingkap perilaku pejabat Belanda yang seringkali menegur pegawai bumiputra di depan umum. Pegawai bumiputra kerap dihambat untuk berkembang dan menyatakan pendapat. Tulisan Soetardjo tersebut menjadi tanda awal sentimen antikolonial dalam dirinya.

Jenjang pendidikan

1906 : EuropeescheLagere School (SekolahDasarBelanda) di Tuban

1911 : Opleiding School voor Indlandsche Ambtenaren (Sekolah Pendidikan Pamong Praja) di Magelang

1921 : Bestuurschool (Sekolah Pemerintahan) di Batavia

Jenjang Karier

1911 : Pembantu juru tulis di Rembang

1911 : Juru tulis jaksa di Rembang

1911 : Mantri kabupaten di Rembang

1913 : Asisten Wedana di Bogorejo

1915 : Jaksa di Rembang

1924 : Wedana di Rembang

1929 : Patih merangkap hakim di Gresik

1931 : Wakil ketua Volksraad di Batavia*

1942 : Naimubo-Sanyo, memimpin departemen dalam negeri di Jakarta

1943 : Residen Jakarta

1945 : Gubernur Jawa Barat

1946 : Gubernur-Penasihat Pemerintah Pusat RI di Yogyakarta

1947 : Anggota Dewan Pertimbangan Agung

1948 : Ketua Pertimbangan Agung

1950 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara

1956 : Dosen luar biasa Universitas Padjajaran

1964 : Dosen luar biasa IKIP Bandung

22 Oktober 1890

Mas Soetardjo Kartohadikoesoemo lahir di desa Kunduran, Blora.

1909

Pendidikan formal Soetardjo diawali dari ELS (Europeesche Lagere School), yakni sekolah dasar pada masa Hindia Belanda yang diperuntukkan bagi keturunan Belanda di Batavia.

1919

Soetardjo melanjutkan pendidikan di OSVIA (*Opleiding School VoorInlandsche Ambtenaren*) atau sekolah menengah khusus pamong praja bumiputera di Magelang.

1909–1911

Soetardjo bergabung dengan organisasi kebangsaan Boedi Oetomo Cabang Magelang.

1911

Soetardjo bekerja menjadi pembantu juru tulis di Rembang.

1913

menjabat asisten wedana di Bogorejo, Blora. Soetardjo Ikut serta memadamkan Gerakan Samin.

1915

Soetardjo menjadi jaksa di Rembang



1919–1921

Soetardjo melanjutkan sekolah di Bestuurschool (sekolah tinggi pemerintahan) di Batavia. Soetardjo juga aktif dalam kegiatan penerbitan, yakni sebagai pemimpin redaksi buletin *Oud Osviaan*.

1929

saat menjadi patih di Gresik, Soetardjo terlibat dalam pembentukan Perhimpunan Pegawai *Bestuur* Bumiputra (PPBB) - Soetardjo menjadi wakil.

20 Desember 1976 Soetardjo wafat dalam usia 84 tahun

1964–1967 Ia menjadi dosen luar biasa pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung

1956–1964 Pada 6 September 1945, diumumkan bahwa sesuai dengan keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Komite Nasional Indonesia Pusat, wilayah Pulau Jawa dibagi menjadi tiga provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Soetardjo ditunjuk sebagai gubernur Provinsi Jawa Barat yang pertama.



1945 Dalam rapat besar BPUPKI 11 Juli 1945, Soetardjo mengusulkan wilayah Indonesia meliputi seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya dan Papua

10 November 1943 Soetardjo menjadi *syucokan* atau residen (setara walikota) Jakarta

1938 Putusan kerajaan baru diperoleh dua tahun kemudian, tepatnya pada 16 November 1938 yang mengukuhkan penolakan terhadap Petisi Soetardjo.

1936 Pada Juli 1936 Soetardjo merancang petisinya yang kemudian dikenal sebagai Petisi Soetardjo.

1932 Soetardjo mendukung pengajuan petisi Husni Thamrin kepada pemerintah untuk menggunakan sebutan "orang Indonesia" mengganti kata *inlander* alias 'pribumi' dalam tata hukum dan lembaga resmi pemerintah.

1931 mewakili PPBB dan pemerintahan Jawa Timur dalam rapat Volksraad. Dalam sidang pertama Volksraad, ia terpilih sebagai anggota *College van Gedelegeerde Volksraad* atau Badan Pekerja Dewan Rakyat.



1.1 Bergulat di Dewan Rakyat

Setelah menyelesaikan pendidikan di Bestuurschool, Soetardjo kembali ke Rembang dan selanjutnya diangkat menjadi wedana (satu tingkat di bawah kabupaten). Pada 1929 saat menjadi patih di Gresik, Soetardjo ikut serta dalam pembentukan Perhimpunan Pegawai *Bestuur* Bumiputra (PPBB). Bupati Bandung, yakni Raden Adipati Aria Wiranatakusuma V, menjadi Ketua PPBB. Sementara itu, Soetardjo ditunjuk sebagai Wakil Ketua PPBB. Soetardjo Kartohadikoesoemo bertolak ke Batavia untuk mewakili PPBB dan pemerintahan Jawa Timur dalam rapat Volksraad pada 1931. Dalam sidang pertama Volksraad, ia terpilih sebagai anggota College van Gedelegeerde Volksraad atau Badan Pekerja Dewan Rakyat. Pada titik ini Soetardjo yang mengawali karier birokratnya dari daerah kini mulai berkecimpung dalam pemerintah pusat kolonial. Selama di Volksraad Soetardjo mencetuskan berbagai kebijakan sipil, terutama berbagai prakarsa untuk mendukung kesetaraan terhadap rakyat bumiputra. Ia banyak bergaul dengan tokoh-tokoh nasionalis Hindia.

Dalam harian *De Indische Courant*, 14 Juli 1933 Soetardjo mencela keputusan pemerintah yang tidak bersedia menggunakan kata *Indonesier*atau 'orang Indonesia'. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan kolonial Belanda tidak lepas dari upaya dan kerja keras pemerintah bumiputra. Volksraad akhirnya menyetujui agar tidak lagi menyebut anak negeri dengan *inlander.* Pengunaan sebutan *orang Indonesia* berangsur-angsur diperbolehkan.

Pada Juli 1936 Soetardjo merancang petisinya yang kemudian dikenal sebagai Petisi Soetardjo. Dalam petisinya, Soetardjo mengusulkan agar diselenggarakan konferensi antara wakil-wakil Belanda dan Hindia Belanda dengan kedudukan sejajar. Tujuannya adalah membuat rencana berjangka 10 tahun untuk menyiapkan kemerdekaan negeri Hindia Belanda. Kemudian, Petisi Soetardjo diperdebatkan dalam sidang Volksraad yang diputuskan lewat pemungutan suara. Hasilnya diterima dengan 26 suara setuju dan 20 suara menolak. Kemudian, Petisi diteruskan ke negeri Belanda. Keputusan Kerajaan Belanda baru diperoleh 2 tahun kemudian, tepatnya pada 16 November 1938 yang mengukuhkan penolakan terhadap Petisi Soetardjo. Kerajaan Belanda berpendapat bahwa rakyat Hindia Belanda belum matang untuk mempersiapkan sebuah pemerintahan sendiri. Penolakan terhadap Petisi Soetardjo menimbulkan kekecewaan besar di kalangan nasionalis yang bekerja dalam tatanan kolonial. Hal itu sekaligus memupus kepercayaan terhadap pemerintah kolonial yang berkaitan dengan masa depan wilayah jajahan. Lantaran petisinya itu, sebanyak empat kali Soetardjo pernah diperiksa oleh alat kekuasaan kolonial.

1.2 Naik Pentas di Panggung Nasionalis

Pada masa pendudukan Jepang Soetardjo Kartohadikoesoemo memimpin departemen dalam negeri atau Naimubu Sanyo. Selain itu, ia menjadi anggota badan perwakilan bentukan Jepang, Tjhoeo Sangi-in dan anggota Poetera (Pusat Tenaga Rakyat). Setahun kemudian, tepatnya 10 November 1943, Soetardjo menjadi *syucokan*atau residen (setara walikota) Jakarta. Sebagai pejabat di lingkungan pemerintahan sipil Jepang, Soetardjo acapkali berurusan dengan pejabat dari kalangan militer. Tugas yang dibebankan oleh pihak militer pun kadang tak tanggung-tanggung. Ia adalah salah satu dari tiga orang Indonesia yang dipercaya untuk menduduki posisi residen selama masa pendudukan Jepang selain Soeroso di Magelang dan Soerjo di Bojonegoro. Ketiganya kelak menjadi gubernur pertama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Pejabat militer Jepang kerap menekan Soetardjo, termasuk untuk memenuhi kebutuhan logistik pangan perang. Mereka memaksakan kehendak dengan memforsir kerja petani untuk menyediakan padi, terutama di daerah kekuasaan Karesidenan Jakarta yang kala itu meliputi daerah Karawang, Cikampek, Sukamandi, Tangerang, dan Purwakarta. Karesidenan Jakarta merupakan wilayah yang terkenal sebagai gudang padi. Soetardjo menyiasatinya dengan program kerja yang cerdik, yakni dengan menjalankan politik beras. Ia menertibkan distribusi beras sehingga beras tidak boleh dikuasai seluruhnya oleh pedagang Tionghoa. Sejak mulai menanam sampai menjemur, gabah harus berada di tangan rakyat desa dan petani. Sementara itu, orang-orang Tinghoa hanya diizinkan untuk menggiling padi. Dalam hal



Soetardjo (kanan) bersama rekannya Sam Ratulangi memperbincangkan tatktik memasyaratkan "Petisi Soetardjo" melalui majalah Nationale Commentaren yang dipimpin Ratulangi. Dok. repro buku: Memoar "Soetardjo: 'Petisi Sutardjo' dan Perjuangannya" karya Setiadi Kartohadikusumo.

distribusi beras, Soetardjo lebih banyak membela dan membantu kepentingan rakyat daripada kepentingan pemerintah pendudukan Jepang.

Hal pertama sekaligus tersulit yang ia lakukan adalah mengembalikan tanah partikelir kepada rakyat untuk menghasilkan sumber pangan. Persoalan lahan terpecahkan dengan mengadakan pembagian sawah dan tanah kering ke tiap-tiap desa yang terdaftar serta dihitung dan ditetapkan pajaknya. Langkah selanjutnya adalah produksi padi untuk rakyat dan angkatan perang Jepang. Dengan memanfaatkan jasa seorang ahli pertanian Jepang dan seorang ahli pertanahan lokal, Soetardjo memprakarsai gerakan menanam padi berlarik dan pembersihan sawah atau *mengoyos*. Hasilnya cukup baik karena kebutuhan pangan rakyat Jakarta dan angkatan perang Jepang dapat terpenuhi. Berbagai kebijakan yang diterapkan dengan baik oleh Soetardjo di Karesidenan Jakarta mendapat kesan positif para bupati di daerah Jawa Barat yang termasuk dalam Karesidenan tersebut. Hal ini yang kemudian membuat kalangan pamong praja Jawa Barat mengangkat Soetardjo menjadi Gubernur Jawa Barat.

Pada waktu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk pada 1 Maret 1945, Soetardjo menjadi salah satu anggotanya. Sebagai wadah bentukan Jepang, BPUPKI dimaksudkan untuk mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia. Soetardjo tercatat sebagai anggota membidangi urusan keuangan dan perekonomian dengan ketua Mohammad Hatta. Dalam rapat besar BPUPKI 11 Juli 1945, Soetardjo mengusulkan bahwawilayah Indonesia meliputi seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya dan Papua. Namun, yang diputuskan kemudian adalah wilayah Hindia Belanda dan Papua minus Malaya.

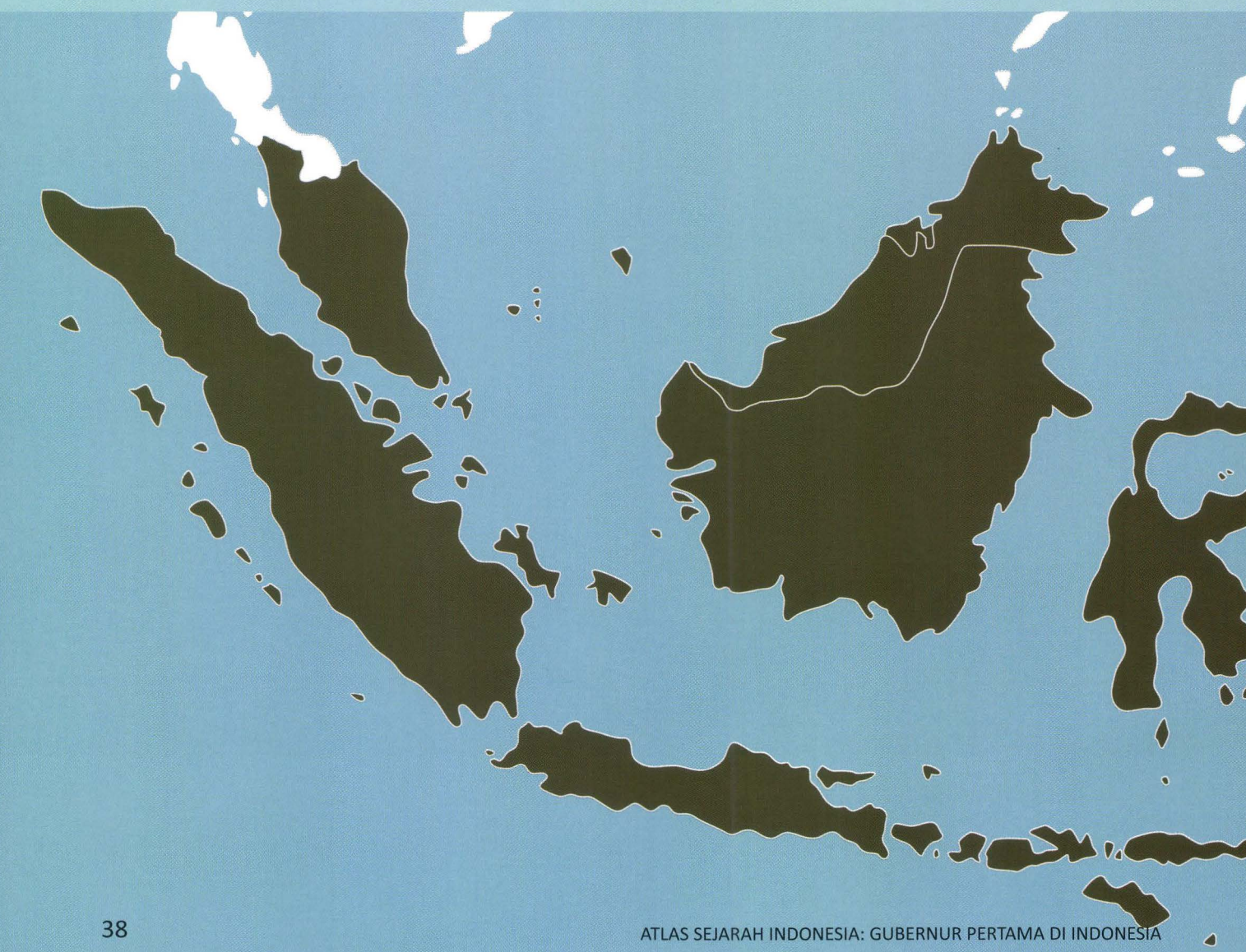

Yang paling kuat untuk menyusun negara yaitu memerdekakan batin

(Soetardjo dalam rapat BPUPKI tentang falsafah negara)

Peta Usulan Soetardjo pada 11 Juli 1945 untuk Wilayah Indonesia meliputi seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya dan Papua



2. Menjadi Gubernur Jawa Barat

Dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pemerintah menetapkan delapan provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kendati demikian, formasi resmi kabinet dan penataan regional belum terbentuk. Selain itu, aparatur dan birokrat di tingkat daerah masih diragukan loyalitas nasionalisnya.

Pada 2 September 1945 sebuah konferensi pamong praja di Jawa dan Madura dibuka di Jakarta.Konferensi tersebut berlangsung atas usul bersama antara Presiden Sukarno dan Soetardjo Kartohadikoesoemo yang bertindak selaku juru bicara utama mewakili kelompok pamong praja. Sukarno menyambut baik pertemuan itu dan berharap keberpihakan pamong praja dalam membangun negara.Hasil konferensi memperdengarkan semua ungkapan kesetiaan pamong praja kepada Republik dan sepakat untuk membantu menunjukkan kepada dunia bahwa seluruh rakyat bersatu di belakang kepemimpinan Republik Indonesia. Sebelum konferensi digelar, Soetardjo telah bertemu dengan Sukarno dan Hatta secara pribadi. Negosiasi politik terjalin di antara ketiganya. Soetardjo meyakinkan bahwa dwitunggal pemimpin Indonesia itu tentang dukungan *pangreh praja* terhadap negara Indonesia asal status mereka dapat dijamin.

Pada 6 September 1945 diumumkan bahwa sesuai dengan keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Komite Nasional Indonesia Pusat, wilayah Pulau Jawa dibagi menjadi tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, masing-masing akan dipimpin seorang gubernur yang bekerja langsung di bawah kabinet. Soetardjo ditunjuk sebagai gubernur Provinsi Jawa Barat yang pertama.

Sebagai seorang pamong praja, yang selalu patuh kepada pimpinan, saya menjawab bersedia.

(Soetardjo ketika Bung Karno memintanya pindah dari Jawa Barat dan bertugas di Yogyakarta)

2.1. Situasi di Jawa Barat

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1945, Jawa Barat merupakan daerah otonomi provinsi yang dipimpin Gubernur Soetardjo Kartohadikoesoemo. Provinsi Jawa Barat terdiri dari lima wilayah, yaitu Banten (kini provinsi sendiri), Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Setiap wilayah dikepalai seorang residen. Selain itu, terdapat 16 kabupaten, yakni Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Cirebon, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Tanggerang, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Serang, Rangkasbitung, dan Pandenglang. Di dalamnya terdapat lima kota otonomi, yaitu Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, dan Banten. Sebagian besar penduduk Jawa Barat beretnis Sunda. Diperkirakan bahwa penduduk Jawa Barat berjumlah 10 juta jiwa ketika Soetardjo memimpin provinsi ini.

Dalam usaha mengatur jalannya roda pemerintahan dan ketertiban di Jawa Barat, Soetardjo dibantu oleh tokoh-tokoh setempat yang berpengalaman. Raden Puradiredja, misalnya, diangkat menjadi residen Priangan. Kemudian, Oto Iskandar Dinata yang dalam susunan pemerintahan berkedudukan sebagai Menteri Negara dan Menteri Urusan Keamanan, ikut berperan mengatur persoalan yang timbul di daerah, khususnya di kota Bandung.



2.2 Merangkul Pemimpin Daerah

Pada masa awal menjabat sebagai gubernur Soetardjo lebih banyak berdinas di Jakarta. Keputusan menetap di ibu kota negara sehubungan dengan kedatangan tentara Sekutu yang akan melucuti pasukan Jepang. Soetardjo menjadi salah satu tokoh senior yang dipilih mendampingi pemerintah pusat Republik dalam menghadapi perundingan dengan pihak Sekutu.

Pertengahan September 1945 terdengar berita radio bahwa tentara Sekutu yang di dalamnya terdapat tentara NICA akan mendarat di Jakarta dan akan dilakukan pengalihan kekuasaan dari tangan pemerintah militer Jepang. Untuk menghadapi dan menyambut kehadiran Sekutu, Sukarno mengundang petinggi negara di kediamannya di Jalan Pegangsaaan Timur, Jakarta. Semua orang terkemuka hadir.Tampak di antaranya Menteri Dalam Negeri Wiranatakusuma. Soetardjo turut serta mewakili eksponen pamong praja. Rapat dipimpin langsung oleh Bung Karno. Namun, pembicaraan berlangsung alot karena hadirin berbicara simpang siur. Menjelang siang rapat belum menghasilkan keputusan. Sukarno dan Hatta pamit lebih dulu meninggalkan rapat. Pimpinan rapat diserahkan kepada Wakil Menteri Penerangan Ali Sastroamidjojo.

Bersama Kasman Singodimedjo, Ali Sastroamidjojo melanjutkan rapat karena sejak rapat berlangsung Soetardjo hanya menyaksikan jalannya rapat secara saksama. Sambil menimbang dan berpikir,

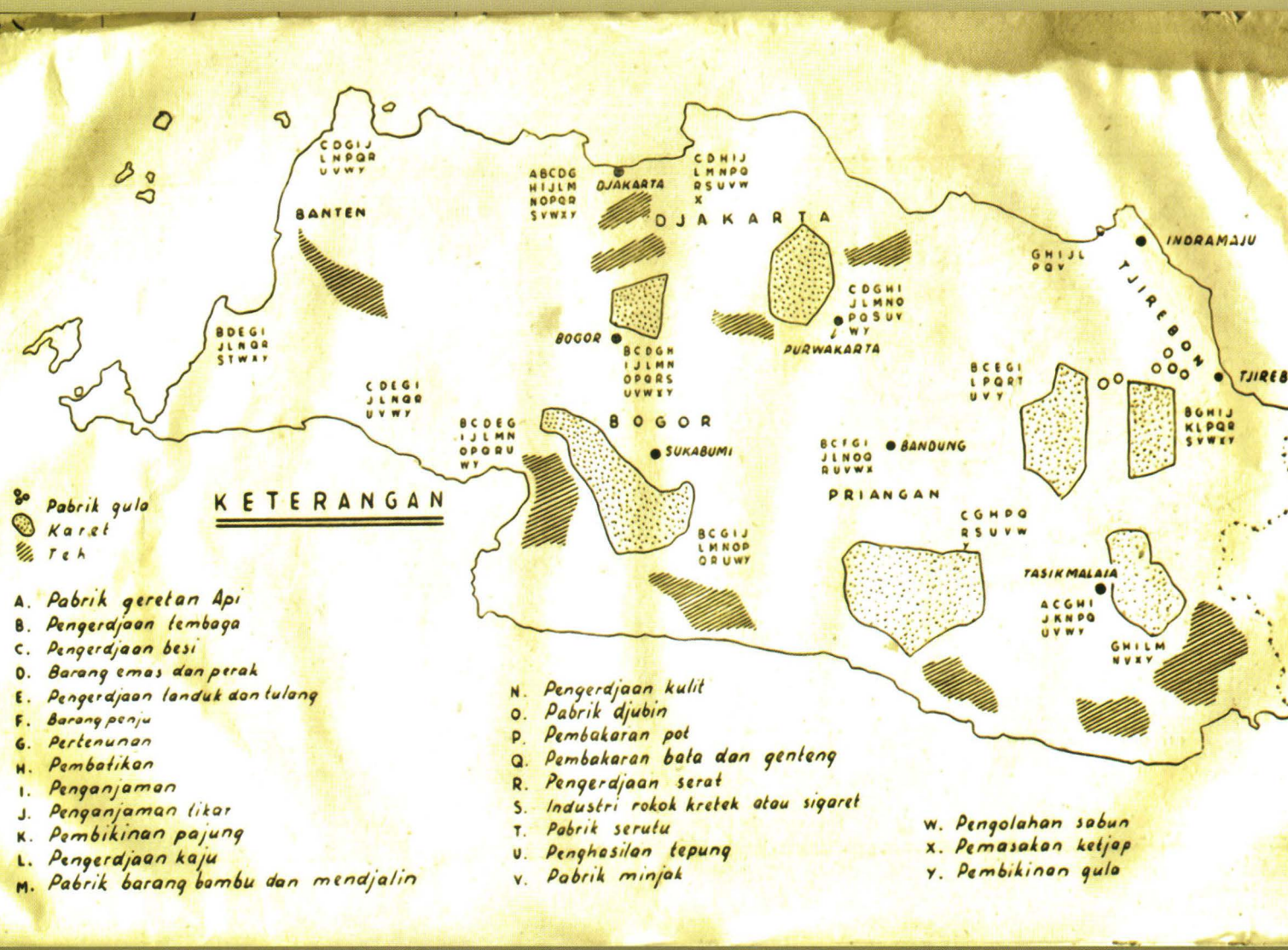

Peta tematik Provinsi Jawa Barat. Dok. repro buku: Kementerian Penerangan, 1952

tiba-tiba Ali Sastroamidjojo meminta pendapatnya. Kemudian, Soetardjo kemudian menyampaikan gagasannya. Menurut Soetardjo dalam situasi genting demikian, fungsi dan peran pamong praja di daerah amat penting.Ia menyederhanakan persoalan meski agak sedikit bertaruh bahwa jika terjadi pengalihan kekuasaan dari pemerintah militer Jepang kepada Sekutu, itu hanya berarti pengalihan kekuasan di tingkat pusat. Sementara itu, di daerah situasinya berbeda. Sebagai seorang birokrat berpengalaman, Soetardjo punya alasan kuat karena pamong praja adalah pemimpin rakyat di daerah. Jika tentara pendudukan Jepang menyerahkan kekuasaannya, akan terjadi kekosongan pemerintahan di daerah. Maka, kekuasaan daerah yang tertinggi praktis berada di tangan bupati. Oleh karena itu, bupati dengan pemerintah Republik Indonesia diharapkan dapat bersinergi demi satu kepentingan, yakni mempertahankan kemerdekaan.

Soetardjo menyarankan agar selekas mungkin para bupati dipanggil ke Jakarta. Mereka diminta untuk bersumpah mengakui Republik Indonesia dan tunduk pada pemerintahan yang dipimpin Sukarno-Hatta. Selanjutnya, para bupati diminta berkoordinasi dengan bawahannya yang juga melibatkan alim ulama untuk membela negara. Forum sepakat dengan usulan Soetardjo disertai riuh tepuk tangan sekaligus tanda rapat berakhir. Dua hari kemudian para bupati seluruh Jawa berdatangan ke Jakarta. Ketika tentara Sekutu mendarat 29 September 1945, pemerintah RI telah tersambung dengan pemerintah daerah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten).

Sementara itu, Sekutu sibuk melucuti tentara Jepang. Pasukan Belanda dan pejabat NICA berusaha memancangkan kekuasaannya. Pada pertengahan 1945 tentara Sekutu dan NICA telah memasuki dan menduduki beberapa kota penting, yakni Bogor, Cianjur, dan Bandung. Pada November 1945 Gubernur Soetardjo Kartohadikoesoemo mulai menetap di Bandung.Dalam memoarnya, Soetardjo mengenang suasana yang sangat mencekam. Kendati dijaga ketat oleh laskar, rumah gubernuran yang menjadi kediaman Soetardjo di Jalan Stasion Bandung tidak luput dari sasaran serangan.Setiap malam pekarangan belakang rumah gubernuran dilempari granat oleh serdadu-serdadu Belanda kendati tidak sampai mengenai rumah. Provokasi tentara Belanda ini membuat pejuang gerilya ganti membalas dengan serangkaian aksi kekerasan yang mengarah pada gejala sosial berdarah hingga jatuh korban yang tidak hanya orang Eropa dan Tionghoa, tetapi juga orang Indonesia yang dicurigai sebagai mata-mata.

Di kota-kota kabupaten para pemuda mengadakan latihan militer. Gubernur Soetardjo kerap turun ke daerah-daerah kabupaten menginspeksi pasukan. Selain itu, ia juga mengusahakan memperoleh senjata milik tentara Jepang. Pada waktu itu Jenderal Yamamoto, pimpinan staf Komando Angkatan Darat Jepang (Rikugun), diasingkan Sekutu di Bandung. Gubernur Soetardjo menjalin korespondensi dengan Yamamoto. Soetardjo melobi agar senjata Jepang tidak diserahkan seluruhnya kepada tentara Sekutu dan disetujui oleh Yamamoto. Perbincangan itu juga menyusun skenario untuk memperoleh senjata-senjata itu. Caranya adalah bahwa para pejuang gerilya berpura-pura menyerbu setiap *kampemen* (barak tentara Jepang). Kemudian, senjata-senjata beserta amunisinya "dibolehkan" direbut para pejuang. Untuk melaksanakan misi itu, Soetardjo disarankan menemui panglima resimen Jepang di Jawa Barat yang memegang gudang senjata.

Pada suatu hari para pemimpin gerilya dan pasukan bersenjata lainnya meminta izin Soetardjo untuk melakukan serangan umum. Sementara itu, senjata yang tersedia masih belum memadai. Senjata-senjata Jepang juga belum diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Menurut hemat Soetardjo, belum tiba waktunya untuk melakukan serangan skala besar. Serangan umum baru bisa dilancarkan jika latihan pematangan sudah selesai. Begitu pula dengan perolehan senjata Jepang yang masih diupayakan. Dua hari dua malam rapat berlangsung di rumah gubernuran. Soetardjo bersikukuh percobaan serangan akan berisiko besar. Akan tetapi, tekanan untuk melakukan serangan terbuka terhadap Inggris dan Belanda menjadi luar biasa. Para pejuang menyusun rencana untuk melangsungkan serangan umum pada 24 November 1945. Namun, tanpa diduga bahwa serangan dilancarkan pejuang-pejuang Bandung sebelum hari-H.

2.3 Turun ke FRONT garis depan

Pada 21 November 1945 terjadi serangan pertama terhadap prajurit patroli Gurkha. Tidak hanya saling menyerang dengan senjata, teror juga ditebar dalam bentuk lain. Dini hari, 25 November 1945, serdadu Belanda melancarkan serangan sabotase. Sehabis hujan deras di Kali Cikapundung yang melintasi tengah kota Bandung, tentara Belanda sengaja membuka penahan air. Sabotase itu mengakibatkan banjir besar melanda kawasan Bandung. Banyak rumah berikut penghuninya di tepi kali itu hanyut.

Gubernur Soetardjo terpaksa mengungsi ke Desa Majalaya di selatan Bandung. Dari dalam desa itu ia tetap mengawasi jalannya pertempuran bersama bupati Bandung. Seperti diduga bahwa serangan itu dapat ditangkis tentara Sekutu. Gerakan pejuang Bandung dipatahkan dan berujung kegagalan. Saat memasuki tengah hari 26 November 1945, pimpinan Sekutu memanggil Gubernur Soetardjo ke Bandung untuk berunding. Seorang diri Soetardjo berhadapan dengan tiga orang perwira Inggris yang dijaga oleh empat orang serdadu Gurkha bersenjata.Keadaan di bawah ancaman demikian membuat Soetardjo terintimidasi dalam posisi sulit.

Jenderal Mac Donald meminta pertanggungjawaban Soetardjo atas serangan bersenjata pasukan Indonesia. Ia juga meminta agar barikade harus disingkirkan dari jalan hari itu juga. Soetardjo menolak tudingan dan permintaan Mac Donald. Menurutnya, sebagai seorang pegawai pemerintahan sipil dengan kedudukan gubernur, dirinya tidak punya kekuasaan atas pasukan bersenjata. Pimpinan tentara Sekutu bergeming dan menyampaikan tuntutan tambahan, yaitu agar orang Indonesia eksodus dari kota Bandung ke arah selatan. Soetardjo tetap kukuh menolak tunduk seraya menjawab, "Setiap orang pun mengerti bahwa hal itu tidaklah mungkin."

Pertemuan berakhir dengan ultimatum: dalam dua hari berikutnya seluruh penduduk kota Bandung sudah harus pindah ke sebelah selatan jalur rel kereta api.

Pada 27 November 1945, dengan alasan menghindari pertentangan yang sering terjadi antara Sekutu dan Indonesia, kota Bandung ditetapkan menjadi dua bagian. Bagian sebelah utara merupakan wilayah Sekutu dan Belanda, sedangkan Indonesia menempati bagian selatan. Sebagai batas dari dari kedua wilayah, ditetapkan jalan kereta api yang membelah kota Bandung dari barat ke timur. Namun, pembagian areal Kota Bandung sama sekali tidak meredakan pertempuran. Gempuran terhadap Kota Bandung membuat Gubernur Soetardjo harus melindungi keluarganya dengan mengungsikan bolak-balik ke Majalaya yang curah hujannya tinggi. Di Majalaya keluarga Soetardjo dititipkan di rumah pesanggrahan Menteri Dalam Negeri Wiranatakumah V. Pengungsian sering kali berlangsung pada saat hujan lebat. Akibatnya fatal. Istri Soetardjo, Siti Djaetoen Kamarroekmini, terserang penyakit jantung yang kelak menjadi penyebab beliau wafat.

Soetardjo sendiri tetap tinggal di rumah gubernuran. Namun, karena keadaan kota semakin tidak kondusif, komandan Angkatan Bersenjata memintanya pindah permanen. Semula Soetardjo tidak menghiraukan, tetapi karena situasinya kian kritis, desakan pihak militer makin kuat. Setiap hari, siang dan malam, kereta api disediakan untuk memboyong Soetardjo sekeluarga keluar dari Bandung. Kepala Angkatan Kepolisian R. M. Suparta memberi batas tempo bagi Soetardjo meninggalkan Bandung.Akhirnya, Soetardjo memutuskan berangkat ke luar kota. Tasikmalaya menjadi tempat tujuan. Kabupaten yang terletak di bagian selatan Jawa Barat ini masih menjadi daerah yang tenang dan relatif aman.



Soetardjo (memakai blangkon) bersama rekan-rekan sesama anggota Volkraad.
Dok. Repro buku: Indonesia di Pasifik karya Sam Ratulangi

2.4 Akhir Sebagai Gubernur

Untuk menghindari serangan Sekutu, pemerintahan Republik direncanakan pindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada akhir 1945. Beredar kabar dari Menteri Wiranatakusuma bahwa Soetardjo akan diajak serta mengikuti kepindahan Presiden Sukarno ke Yogyakarta. Berita ini makin terang ketika di gelar konferensi pamong praja yang dihelat di Solo.

Presiden Sukarno, dalam konferensi itu, mengatakan lebih membutuhkan tenaga Soetardjo di pusat daripada di Jawa Barat. Bung Hatta menambahkan bahwa pekerjaan di pusat lebih genting. Lebih lanjut, Sukarno menyebutkan bahwa dengan pangkat gubernur Soetardjo langsung diperbantukan sebagai seorang anggota DPA dan penasihat Presiden. Soetardjo patuh kepada keputusan pemerintah kendati ia masih ingin berkontribusi terhadap Jawa Barat sebagai gubernur. Ia meletakkan jabatan gubernur pada 14 Desember 1945 dan digantikan oleh Mr. Datuk Djamin. Segenap pamong praja ikut mengantarkan dirinya. Di setiap stasiun besar hingga Kroya, kereta api dihentikan sejenak. Para pegawai negeri yang sengaja menunggu di stasiun menyampaikan kata selamat jalan.Inilah wujud hormat dan ucapan perpisahan kepada Soetardjo beserta keluarganya.

Gedung Gubernuran di Bandung, Besar kemungkinan di sinilah kantor gubernuran masa Soetardjo. Menurut kabar sekarang menjadi kantor walikota. Dok. repro buku: Kemenpen 1952.



3. Kehidupan Setelah Gubernur

Hingga masa pengakuan kedaulatan, Soetardjo Kartohadikoesoemo berkedudukan sebagai penasihat presiden. Di Yogyakarta ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang diperankan dengan baik. Ia memprakarsai penolakan penggabungan Palang Merah Indonesia dengan Palang Merah Belanda; meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapai agresi militer Belanda dan pemberontakan Musso di Madiun; dan menegakkan kewibawaan pemerintah pada waktu ibu kota RI di Yogyakarta diduduki Belanda masa agresi militer kedua. Sukarno acap kali menyebut Soetardjo yang lebih senior itu secara akrab sebagai "saudara tua". Selama beberapa bulan Soetardjo sempat "ditepikan" dari pemerintahan. Ia dianggap bagian dari birokrat rezim feodal warisan zaman kolonial. Pada 1950 Soetardjo menerima surat pembebasan tugasnya dari Menteri Dalam Negeri Mr. Mohammad Roem. Namun, atas campur tangan Presiden Sukarno, pada 1953 Soetardjo kembali memperoleh tempat dalam pemerintahan.

Mewakili Partai Indonesia Raya (Parindra), Soetardjo menjalankan peran baru sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Selain itu, Soetardjo ikut mengusahakan perbaikan gaji pegawai negeri dan pensiunan.Ia duduk dalam Panitia Gaji Pegawai Negeri sebagai ketua (1951–1955). Kariernya berlanjut sebagai Komisaris Negara Urusan Otonomi Daerah pada 1954–1956.Selain sebagai birokrat tulen, Soetardjo juga seorang intelektual dalam bidang kerjanya. Bukunya yang bertajuk *Desa* (1952) membuktikan bahwa Soetardjo sangat memahami dan menghayati seluk-beluk medan pengabdiannya. Buku tersebut menguraikan dasar-dasar kebudayaan asli menurut adat desa seperti sistem kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sipil masyarakat.



Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra dari Presiden RI Soeharto kepada Almarhum Soetardjo. Dok. Direktorat Sejarah, 2019.

Pada masa senjanya Soetardjo mengisi waktu sebagai akademisi di bidang ilmu politik dan pemerintahan.la menjadi dosen luar biasa pada Universitas Padjajaran (1956-64) dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung (1964-67). Lebih dari itu, Soetardjo diganjar gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Pendidikan Bidang Masyarakat dari IKIP Bandung pada 1967.

Sebagai tanda penghargaan pemerintah atas pengabdiannya, Soetardjo menerima Bintang Mahaputra Kelas IV pada 1962 dan Satyalencana Karya Satya Kelas II pada 1968. Pada usianya yang sepuh Soetardjo menerima nama ningrat Kanjeng Pangeran Hario Soetardjo Kartoningprang dari Sri Paku Alam VII di Yogyakarta pada 1976. Itu menjadi gelar kehormatan terakhir dalam hidup Soetardjo. Soetardjo wafat di Jakarta pada 20 Desember 1976 dalam usia 84 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Astana Bibis Luhur, Surakarta.

Makam Soetardjo. Dok. Direktorat Sejarah, 2019.





Soetardjo bersama istri dan sebelas putra-putrinya.
Dok. repro buku: Memoar Soetardjo: 'Petisi Sutardjo' dan Perjuangannya karya Setiadi Kartohadikusumo.



R.P. Soeroso

Gubernur Jawa Tengah

"Hendaknya para petani menyerahkan 10% dari tanaman padinya kepada TNI guna menunjang perjuangan gerilya anak-anak kita di hutan-hutan dan gunung-gunung,"

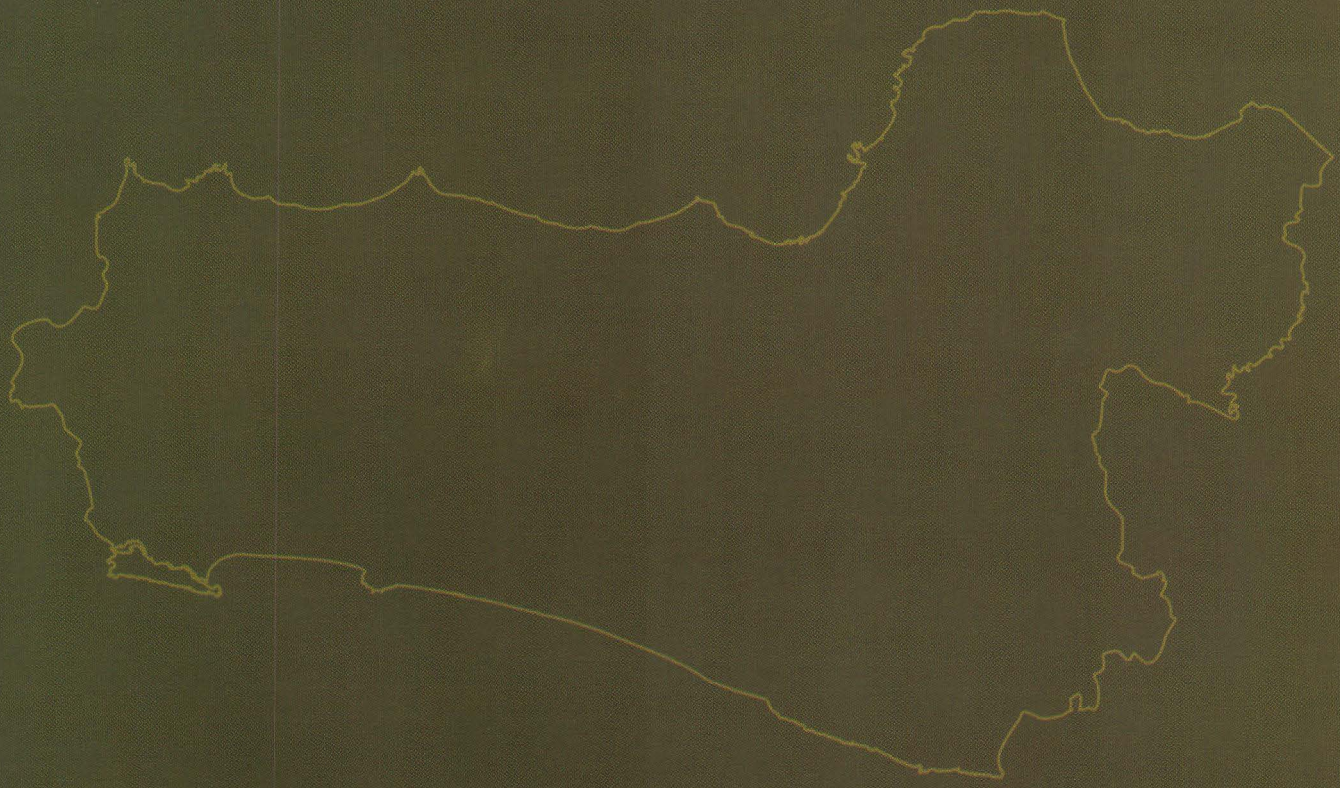

1. Kiprah Sebelum Gubernur

Raden Panji Soeroso lahir pada 3 November 1892 di Porong, Karesidenan Surabaya, Jawa Timur. *Raden panji* adalah gelar kebangsawanan pria dalam tradisi feodal Jawa dan digunakan di sebagian wilayah budaya Jawa Timur bagi keluarga bupati-bupati daerah vasal Kesultanan Mataram seperti Besuki dan Pasuruan. Soeroso juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri.

Soeroso merupakan tokoh berpikiran revolusioner. Pada usia 15 tahun ia bergabung dengan Budi Utomo, yakni organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada 1908. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kaum bumiputra, khususnya orang Jawa. Namun, ia kemudian merasa tidak puas terhadap organisasi tersebut yang dinilainya sangat Jawasentris dan semakin konservatif dalam perjuangannya. Kemudian, R.P. Soeroso bergabung dengan Sarekat Islam (SI) pada 1915. Tidak lama setelah bergabung, ia diangkat sebagai Presiden SI untuk wilayah Probolinggo dan Kraksaan pada usia 20 tahun. Bersama anggota pengurus SI yang lain Soeroso memusatkan diri pada gerakan nasional dan perbaikan perekonomian rakyat. Pengurus SI di Kota Probolinggo membangun dua buah toko untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan harga cukup terjangkau. Akan tetapi, toko-toko milik pengurus SI harus bersaing dengan toko-toko Cina yang menjual barang-barangnya lebih murah. Akibatnya, toko-toko milik pengurus SI terpaksa tutup. Kemudian, toko-toko orang Cina kembali menaikkan harga-harga barang kebutuhan masyarakat.

Pada 1916 R.P. Soeroso terpilih menjadi Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Pegawai (Burgerlijke Openbare Werken/BOW) seluruh Indonesia. Setahun kemudian (1917) ia dipilih kembali menjadi anggota Gemeenteraad Probolinggo. Dalam posisi itu Soeroso membela hak-hak pedagang kecil agar tidak mendapat perlakuan buruk dari pemerintah setempat. Ia memperjuangkan warung atau kios milik pedagang kecil di pinggir jalan agar tidak dibongkar oleh pihak tertentu, terutama kelompok pedagang besar atau pemerintah.

Di daerah *gemeente* yang mayoritas dihuni orang Belanda dan hak-hak penduduk pribumi menjadi terpinggirkan, Soeroso konsisten membela kepentingan masyarakat pribumi. Ia memperjuangkan penerangan listrik di kampung, akses terhadap air minum, pembuatan jalan kampung, dan berbagai hal lain yang berpengaruh besar dan menyentuh kehidupan sehari-hari orang-orang kecil di wilayah tersebut.

Pada 1918 R.P. Soeroso diangkat sebagai Commisaris Centraal Bestuur Sarekat Islam. Setahun berikutnya ia pindah ke Mojokerto, Jawa Timur. Ia tetap menjabat sebagai Ketua BOW dan kemudian Presiden Sarekat Islam Kabupaten Mojokerto. Dalam selang waktu tiga tahun Soeroso menjadi Ketua Personel Pabrik Bond Daerah Mojokerto. Saat itulahia sempat memimpin pemogokan buruh pabrik gula milik orang Belanda yang berjumlah dua belas pabrik. Pemogokan menuntut perbaikan nasib buruh pabrik yang dirasakan masih di bawah ukuran layak. Tak pelak, pemogokan itu dianggap sebagai simbol nyata perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.

Selain memperjuangkan nasib buruh, Soeroso juga memberikan perhatian besar terhadap nasib para petani. Salah satu hasil perjuangannya adalah pembagian lahan pertanian kepada para petani di Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Ia juga memperjuangkan harga sewa lahan persawahan untuk berbagai tanaman, termasuk tanaman tebu dan berupaya agar petani memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengelola sawahnya.

Prestasi Soeroso di Volksraad

Dalam pidato pertama yang disampaikan pada sidang tahun 1924, Soeroso mengkritik pemerintah Hindia Belanda yang menerapkan kebijakan menarik pajak landrente di wilayah Sumatra Barat. Pidato tersebut membuat Gubernur Jenderal Fock marah kepada Soeroso dan tidak mau mengundangnya saat sesi perkenanalan antara Gubernur Jenderal dan anggota Volksraad. Akan tetapi, kebijakan penarikan pajak di wilayah Sumatra Barat itu berhasil digagalkan. Lantaran keberhasilannya itu, Soeroso diberi gelar 'datuk' melalui rapat umum di Padang."

1.1 Kiprah di Volksraad

Berkat pengaruh dan kedudukannya, Soeroso kemudian diangkat menjadi anggota Volksraad sejak 1924. Meski secara harfiah bermakna 'dewan rakyat', fungsi dan peran Volksraad sebenarnya terbatas bagi rakyat pribumi. Namun, keterbatasan Volksraad tidak membuat Soeroso kehilangan semangat berjuang. Dalam pidato pertama yang disampaikan pada sidang tahun 1924, ia mengkritik pemerintah Hindia Belanda yang menerapkan kebijakan menarik pajak *landrente* di wilayah Sumatra Barat. Pidato tersebut membuat Gubernur Jenderal Fock marah. Akan tetapi, kebijakan penarikan pajak tersebut berhasil digagalkan sehingga Soeroso diberi gelar *datuk* melalui rapat umum di Padang.

Di Volksraad Soeroso tergabung dalam sebuah fraksi nasional yang dibentuk pada 1927 dan diketuai oleh Mohammad Husni Thamrin. Fraksi itu bertujuan mencapai kemerdekaan dan kedaulatan penuh Indonesia. Namun, fraksi itu juga berkolaborasi dengan pemerintahan kolonial. Hal itu bermakna bahwa Soeroso dan tokoh lain dalam fraksi itu juga bersedia bekerja sama dalam pemerintahan Hindia Belanda seperti halnya kelompok kooperator atau golongan nasionalis kanan. Pada 11 Januari 1941 Husni Thamrin meninggal dunia sehingga Soeroso tampil menggantikan sebagai ketua fraksi hingga kedatangan tentara Jepang pada tahun berikutnya.



Kantor Volksraad yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Dok. Direktorat Sejarah, 2019.

3 November 1892

Raden Panji Soeroso lahir.

1919

R. P. Soeroso pindah ke Mojokerto, Jawa Timur. Ia tetap sebagai ketua BOW, dan kemudian Presiden Sarekat Islam Kabupaten Mojokerto. Dalam selang waktu tiga tahun, Soeroso menjadi Ketua Personil Pabrik Bond Daerah Mojokerto.

Januari 1950

R.P. Soeroso diminta oleh Menteri Dalam Negeri untuk pergi ke Solo bersama dengan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri. Tujuannya adalah menjumpai Sri Sunan Pakubuwono XII dan Sri Mangkunegara VIII guna memberikan status daerah istimewa Surakarta yang terdiri dari Kesunanan dan Mangkunegaran. Hal ini sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22/1948.

1954

R.P. Soeroso mendirikan yayasan untuk mendorong adanya kemajuan kesehatan terhadap anak anak terutama bagi anak anak yang menderita sakit paru-paru. R.P. Soeroso membangun gedung-gedung untuk rumah sakit di atas tanah seluas 44 ha di desa Cilandak Selatan yang berlangsung selama empat tahun dari tahun 1954 hingga tahun 1958.





23 Oktober 1986

Lewat Surat Keputusan Presiden No.81/TK/1986. Soeroso ditabalkan sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia.

16 Mei 1981

Sang gubernur pertama Jawa Tengah itu menghembuskan nafasnya untuk terakhir kali.

1979

Kemudian ia kemudian dikukuhkan sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri oleh Presiden Soeharto.

Mei 1966

Ia terpilih menjadi Ketua Gerakan Koperasi Indonesia dan dilanjutkan dengan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia pada Juli 1973. Pada saat yang sama R.P. Soeroso juga menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat.

Maret 1966 s.d. Maret 1973

R.P. Soeroso diangkat sebagai anggota MPR dari unsur gerakan koperasi.

1967

Departemen Kesehatan mengajak Yayasan Fatmawati di bawah kepemimpinan R.P. Soeroso untuk membuat sebuah rumah sakit yang sesuai dengan prinsip pemerintah menggalakkan partisipasi rakyat sebesar-besarnya untuk usaha kesehatan.




1924 Batavia

Lahirnya Seorang Pemimpin

Jenjang Karier

1910 : Dalam usia 15 tahun bergabung dengan Boedi Oetomo cabang Surabaya.

1915 : Bergabung dengan Syarikat Islam (SI) dan langsung diangkat sebagai Pesiden SI untuk wilayah Probolinggo.

1916 : Terpilih menjadi Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Pegawai (*Burgerlijke Openbare Werken* [BOW]) seluruh Indonesia.

1917 : Dipilih menjadi anggota *Gemeenteraad* Probolinggo.

1918 : Diangkat sebagai *Commisaris Bestuur Centraal* Sarekat Islam untuk Jawa Timur di Surabaya.

1919 : Dipilih sebagai Presiden SI untuk wilayah Mojokerto

1922 : Dipilih sebagai Ketua Personil Pabrik Bond Daerah Mojokerto sekaligus Pemimpin Redaksi surat kabar *Kemadjoean Hindia* di Surabaya selama tiga tahun (1922-1925).

1924 : Terpilih sebagai anggota *Volksraad* yang berkedudukan di Batavia.

1943 : Diangkat oleh PUTERA Pusat sebagai Ketua PUTERA wilayah Malang.

1944 : Diangkat sebagai *sucokan* di Residensi Kedu, Jawa Tengah mencakup Magelang, Temanggung, Kebumen, Purworejo dan Wonosobo.

1945 : Diangkat sebagai Gubernur RI untuk Jawa Tengah (ibu kotanya saat itu di Purworejo).



1.2 Kiprah di Masa Pendudukan Jepang

Ketika Jepang berkuasa di Indonesia, R.P.Soeroso masih menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pegawai, Ketua Vaksentraal, dan anggota Volksraad. Namun, dalam masa penjajahan baru itu terjadi pembekuan terhadap seluruh organisasi dan partai politik peninggalan Hindia Belanda. Sebagai gantinya, pemerintah pendudukan Jepang membentuk organisasi Putera (Pusat Tenaga Rakyat) pada 16 April 1943. Tujuannya adalah menghimpun kaum nasionalis dan intelektual untukbersatu melawan Sekutu. Selain itu, Putera diharapkan melahirkan pemimpin dari kalangan orang Indonesia sendiri.

Untuk memimpin Putera, pemerintah pendudukan Jepang menunjuk Ir. Sukarno, Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K. H. Mas Mansur yang dikenal sebagai Empat Serangkai. Empat Serangkai tersebutmeminta Soeroso tetap bekerja di daerah dan duduk sebagai Ketua Putera Daerah Malang, Jawa Timur, sekaligus duduk dalam Pusat Barisan Pelopor di Jakarta. Dalam suatu kunjungan ke Malang, Bung Karno atas nama Empat Serangkai meminta Soeroso menjadi Sucokan Kedu yang diangkat oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk menunjukkan bahwa orang Indonesia mampu menjalankan pemerintahan. Setelah menjabat

Sidang PPKI Agustus 1945. Dok. ANRI, IPPHOS 34



sebagai *sucokan* di Residensi Kedu, Soeroso aktif mengobarkan semangat kebangsaan kepada lurah-lurah di berbagai desa dan kabupaten di wilayah tugasnya. Pada saat bersamaan, Soeroso juga memimpin dinas-dinas pertanian, pendidikan, dan pekerjaan pamong praja. la juga melakukan pengaturan terhadap pengumpulan beras atau padi untuk tentara Jepang dan daerah di sekitar Jakarta.

Pada masa awal kemerdekaan jabatan Soeroso bertambah,yaknisebagai Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Adapun ketuanya adalah Dr. Radjiman Wedyodiningrat.

DalamSidang Kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dibahas mengenai pembagian wilayah administrasi Indonesia merdeka. Saat itu diputuskan bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi, yakni Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Maluku. Masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Presiden Sukarno mengangkat R.P. Soeroso sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah merangkap Residen Kedu di tengah situasi politik yang tidak menentu karena Secara *dejure* kekuasaan di tangan Sekutu, sedangkan *de facto* diserahkan kepada Jepang.

Sidang PPKI Agustus 1945. Dok. ANRI, IPPHOS 34



Keadaan yang kami alami selama melakukan perjuangan gerilya melawan Belanda sangatlah sengsara...

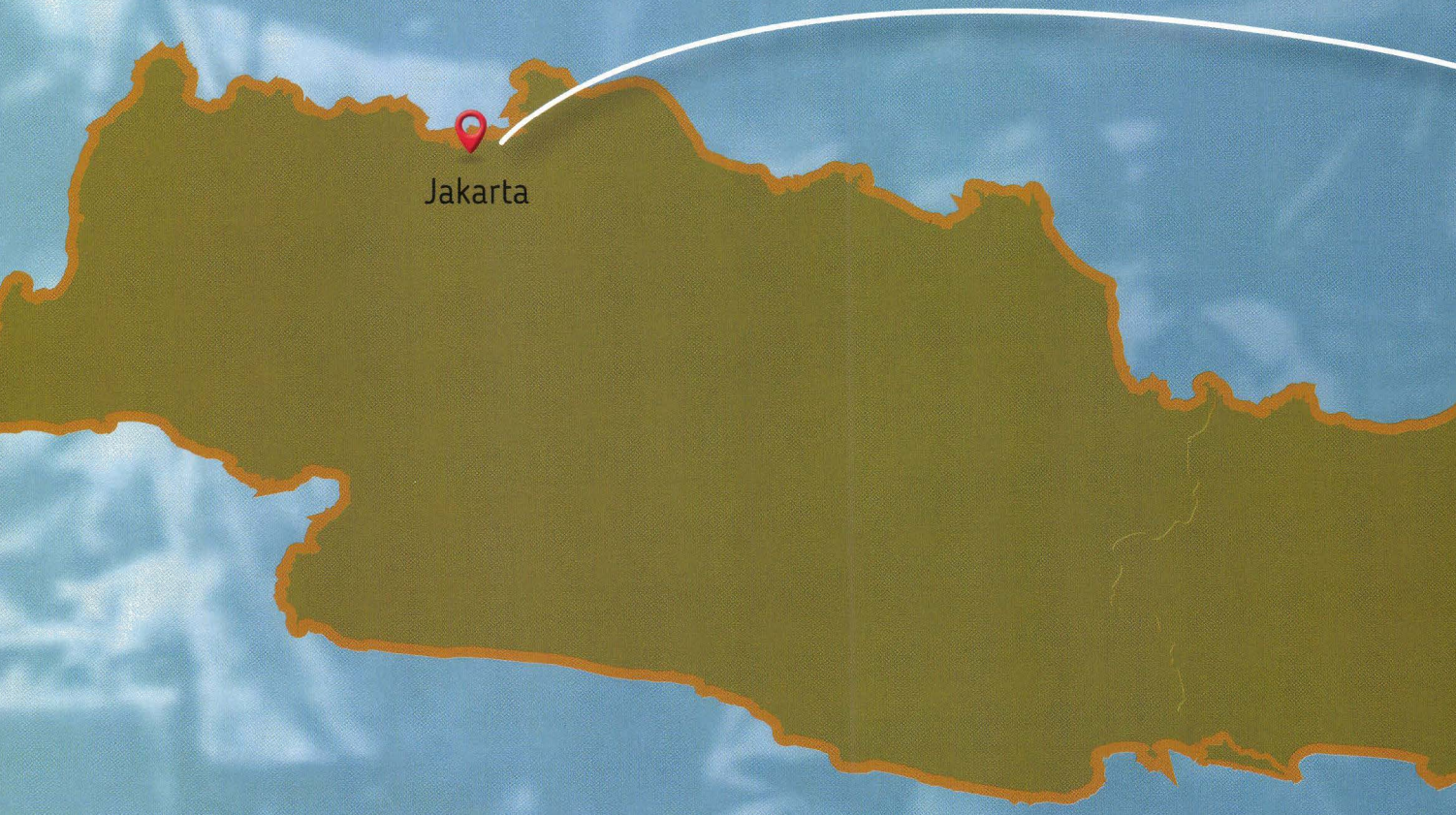

Gubernur Gerilya

19 Agustus 1945 : Diangkat oleh Pemerintah RI sebagai Gubernur RI untuk Provinsi Jawa Tengah.

1 Oktober 1945 : Atas permintaan dari delegasi di Solo, Gubernur Soeroso menjalankan konsolidasi pemerintahan terhadap wilayah Jawa Tengah.

1 Maret 1948 : Selain menjadi gubernur di Jawa Tengah, Soeroso pun memegang jabatan di Departemen Dalam Negeri yang khusus mengurusi soal minoritas dan menjadi kepala bagian urusan pemerintah daerah yang kantornya terletak di Yogyakarta.

19 Desember 1948 : Begitu militer Belanda menjalankan aksi agresinya yang ke-2, Soeroso masuk ke hutan dan memimpin Jawa Tengah dari tempatnya bergerilya. Lokasi gerilyanya meliputi Tawangmangu ke timur hingga Ngrambe, Madiun, dan terus ke timur.

30 Juni 1949 : Soeroso menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri untuk urusan pemerintahan daerah dan menjadi kepala Kantor Urusan Pegawai di kota Yogjakarta. Sebagai tempat kerja, secara rahasia dia menempati sebuah rumah milik kerabat.

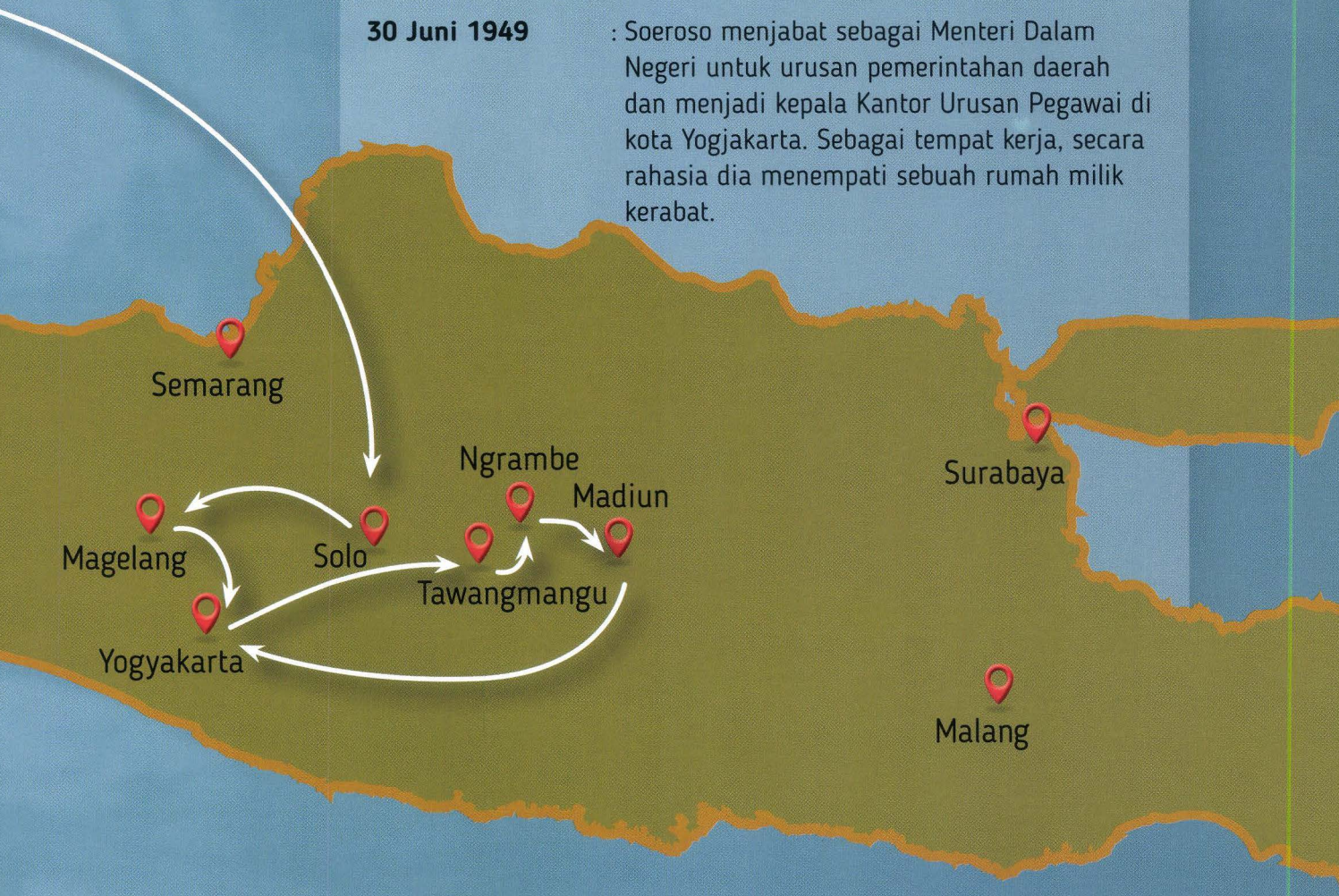

2. Menjadi Gubernur Jawa Tengah

Ketika R.P. Soeroso menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, pada akhir 1945 dia sempat didatangi oleh seorang perwira RAF (Angkatan Udara Kerajaan Inggris) yang mengaku datang ke Jawa Tengah untuk mengurus keamanan orang Eropa, termasuk warga Belanda. Selain orang Inggris, datang pula orang Belanda yang mengaku sebagai Kepala Palang Merah Internasional dan bermaksud bertemu dengan pejabat Jepang untuk mengatur mereka di daerah Jawa Tengah, terutama Magelang. Orang Belanda tersebut kemudian berhasil mengumpulkan 400 orang mantan anggota KNIL untuk menjadi perawat. Kekuasaan *defacto* yang dimiliki oleh Jepang terhadap Indonesia tidak dapat menjadi jaminan bahwa Jepang berani menolak permintaan orang-orang Belanda yang mengatasnamakan Sekutu tersebut. Namun, alih-alih menjadi takut, R.P. Soeroso justru berani membubarkan kumpulan orang-orang Belanda tersebut dan meminta pemimpin Palang Merah Internasional untuk meninggalkan wilayah Magelang secepatnya. Selain berani mengambil tindakan, Soeroso juga seorang yang sabar dan tenang dalam menghadapi teror yang dilakukan pihak Belanda, termasuk ancaman penyerbuan terhadap kedudukan para pejabat Republik Indonesia.

Selain aktif dalam berbagai kegiatan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di wilayahnya, Soeroso juga menjadi anggota KNI pusat sejak terbentuknya organisasi tersebut. Atas permintaan dari delegasi di Solo, R.P. Soeroso menjalankan konsolidasi pemerintahan terhadap wilayah Jawa Tengah dalam bulan



Peta Dasar: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2019

Pemerintah Eksekutif-Legislatif versi Soeroso

Guna mempermudah urusan terkait pemerintahan administratif, terutama di daerah Kasunanan, Mangkunegaran, dan Pakualaman pada waktu itu, R.P. Soeroso menjalankan pemerintahan yang bersifat legislatif dan eksekutif. Ketika itu, hal tersebut tidak berada pada ranah yang sewajarnya. Oleh karena itu, di antara KNI Daerah, sel diketuai oleh Kusumadiningrat dan Sri Sunan XII, dan Mangkunegara VIII, Terdapat pembagian tugas terhadap Sri Mangkunegara yang menjalankan urusan legislatif bersama KNI Daerah, sedangkan Sri Sunan dan Mangkunegoro menjalankan urusan eksekutif di wilayah tersebut. Awalnya pembagian itu bisa diterima oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, beberapa hari kemudian R.P. Soeroso menerima surat dari para penasihat Sunan dan Mangkunegara bahwa dalam kesehariannya yang menjalankan pemerintahan eksekutif adalah para patih dari kedua raja tersebut. Tentu saja situasi itu ditolak oleh daerah. Sebagai gantinya dibentuk suatu presidium untuk mengurus urusan eksekutif yang langsung dipimpin oleh Gubernur Soeroso sendiri."

Menyelesaikan Masalah Pemogokan

Ketika menjabat sebagai Menteri Perburuhan pada masa Kabinet Wilopo, R.P. Soeroso dapat menyelesaikan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada pemerintahan sebelumnya. Permasalahan tersebut adalah pemogokan buruh perkebunan Belanda yang berjumlah puluhan ribu pekerja. Ia memberikan kenaikan upah dan jatah pangan secara berkala kepada seluruh pekerja di perkebunan sehingga mereka bekerja seperti sediakala."

Pionir Pembentukan IKPN

Hasil perjuangan dari R.P. Soeroso yang paling penting adalah gagasan mendirikan koperasi di tingkat daerah. Koperasi di daerah tingkat dua juga didukung oleh gabungan koperasi di tingkat provinsi dan kemudian menggabungkan diri dalam induk koperasi di pusat yang menjadi cikal bakal apa yang kita kenal juga sebagai Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN). Koperasi bentukkan R.P. Soeroso ini mendapat perhatian yang penuh dari semua kabinet parlementer yang sedang berkuasa pada era itu.

Oktober 1945 dan sekaligus menjadi komisaris tinggi untuk wilayah Solo dan Yogjakarta sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Solo.

Semasa menjabat sebagai gubernur terdapat satu insiden yang menjadi catatan tersendiri bagi R.P. Soeroso, yaitu insiden menaikkan bendera merah putih oleh para pemuda yang dipimpin oleh Patih Judadibrata dari kantor gubernur di Magelang. Pada waktu itu Jepang olehtentara Sekutu masih diberikan kekuasaan *de facto* dan masih melarang mengibarkanbendera Merah Putih sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia.

Rakyat sudah berkumpul di Gunung Tidar karena telah mendengar kabar akan dilaksanakannya peristiwa pengibaran bendera tersebut. Kemudian, kabar itu mulai menyeruak masuk ke dalam kantor gubernur di kota Magelang. Akan tetapi, pihak tentara Jepang berupaya untuk menghalang-halangi kegiatan tersebut sehingga situasi menjadi panas. Hingga siang hari rakyat terus berdatangan dari sekitar kota Yogjakarta. Dalam insiden itu sempat terjadi peristiwa penembakan oleh militer Jepang hingga menyebabkan dua pemuda menjadi korban. Kemudian, Rakyat menjadi marah dan menyerang tentara Jepang yang lari menyelamatkan diri ke markasnya. Soeroso yang menerima laporan tersebutlangsung datang dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tenang dan tidak menyerbu Markas Kenpetai yang sudah siap dengan berbagai senjata lengkap. Kemudian, Soeroso pergi menghadap Jenderal Tanaka untuk memintanya menghukum anggota Kenpetai yang telah berlaku represif itu. Jenderal Tanaka menyanggupi.

Selain menjadi gubernur, Soeroso juga memegang jabatan di Departemen Dalam Negeri yang khusus mengurusi soal minoritas dan menjadi kepala bagian urusan pemerintah daerah pada awal tahun 1948. Ia diangkat menjadi panitia gaji pegawai negeri yang juga merangkap sebagai kepala urusan pegawai. Selain itu, ia diangkat menjadi penasihat Sutan Sjahrir dalam perundingan antara wakil Republik Indonesia dan wakil pemerintah Belanda dalam perundingan dengan Schmerhorn. Dalam soal pembuatan undang-undang, Soeroso juga sempat diminta oleh Wakil Presiden Hatta untuk membuat rencana undang-undang tentang pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Kelak rencana undang-undang yang ikut dibuat oleh Soeroso tersebut dan diterima oleh badan pengurus pusat dan menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 yang menjadi landasan terciptanya tata kerja pemerintahan daerah yang pada waktu itu masih dalam keadaan belum stabil.

Tugas lain yang dilakukan oleh R.P. Soeroso dalam masa perjuangan revolusi adalah merencanakan lahirnya undang-undang pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk rancangan mengenai otonomi pemerintahan daerah. Dia menjadi salah satu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang aktif dalam memperjuangkan dan membentuk bermacam undang-undang terkait pemerintahan di dalam negeri.

Dalam upaya memperkuat konsolidasi antarpamongpraja Republik, Soeroso kerap aktif mengadakan rapat dengan para lurah di desa-desa agar para petani menyerahkan 10% hasil tanaman padi yang mereka tanam untuk memenuhi kebutuhan logistik TNI, tentara pelajar, dan para pejuang. Dalam sejarah, Soeroso tercatat sebagai gubernur yang aktif bergerilya dari 18 Desember 1948 hingga akhir Juni 1949. Lokasi gerilyanya meliputi Tawangmangu ke timur hingga Ngrambe, Madiun, terus ke timur. Namun, selama melakukan gerilya, ia sempat terserang penyakit *bronchitis* yang amat parah sehingga tidak bisa berjalan dan harus ditandu. Kemudian, ia dapat pulih kembali dan beraktivitas secara normal.

Pada bulan Januari 1950, R.P. Soeroso diminta oleh Menteri Dalam Negeri untuk pergi ke Solo bersama dengan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri. Tujuannya adalah menjumpai Sri Sunan Pakubuwono XII dan Sri Mangkunegara VIII guna memberikan status Daerah Istimewa Surakarta yang terdiri dari Kesunanan dan Mangkunegaran. Hal ini sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Dalam persetujuan ini, Sri Sunan tidak keberatan terhadap keputusan tersebut. Akan tetapi, Sri Mangkunegara meminta posisi masing-masing untuk berdiri secara sendiri-sendiri. Soeroso menegaskan bahwa pemerintahan daerah harus sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan.

Surat jalan RP Soeroso untuk masuk ke Yogyakarta. Dok. Koleksi Ugrasena

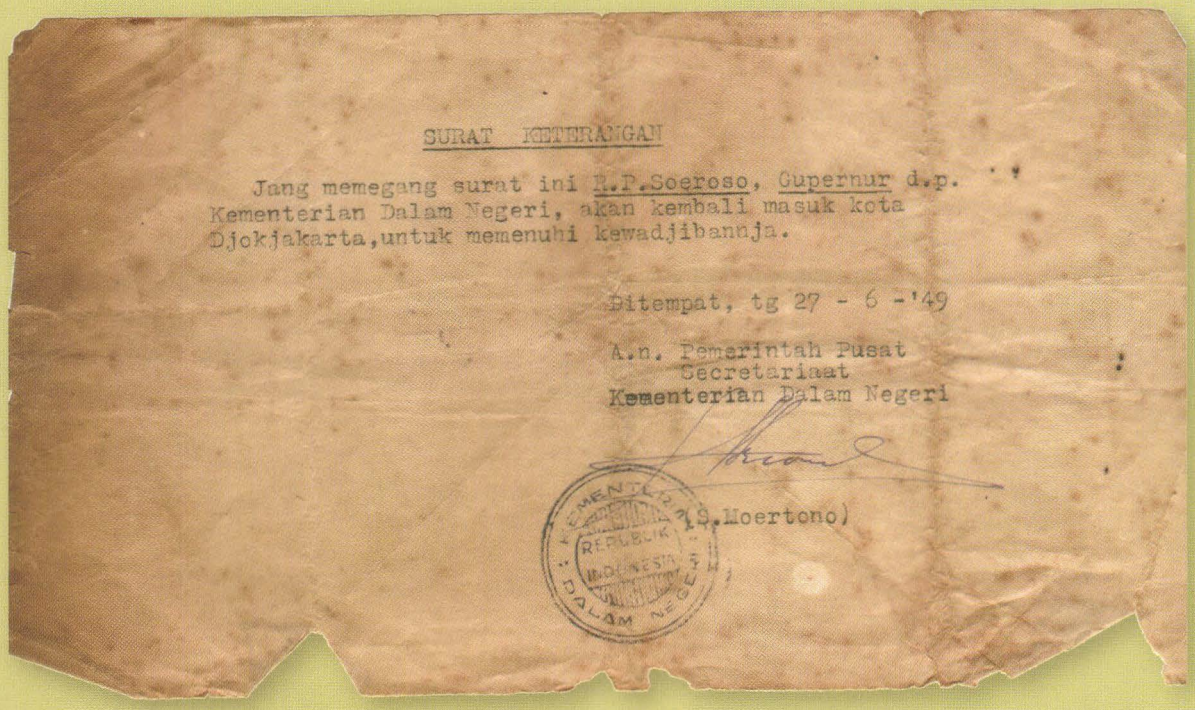

SURAT KETERANGAN

Jang memegang surat ini R.P.Soeroso, Gupernur d.p. Kementerian Dalam Negeri, akan kembali masuk kota Djokjakarta,untuk memenuhi kewadjibannja.

Ditempat, tg 27 - 6 -'49

A.n. Pemerintah Pusat
Secretariaat
Kementerian Dalam Negeri

(R.Moertono)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Surat keterangan Pejabat Gubernur. Dok. Koleksi Ugrasena



SURAT KETERANGAN.

Jang memegang surat keterangan ini:

Nama: R.P.SOEROSO,

Djabatan: Gubernur dp.Kementerian Dalam Negeri Rep.Indonesia,

Tp.tinggal: Jogjakarta.

Jogjakarta, 7 Djanuari 1950.
A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.
Sekretaris

(Mr.Soemarman).

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2.1 Kiprah Pasca Revolusi

Semenjak berakhirnya masa revolusi Indonesia, R.P. Soeroso menjabat berbagai posisi di pemerintahan Republik Indonesia. Pada 1950, ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak lama sebagai anggota parlemen, ia kemudian diangkat menjadi menteri. Beberapa posisi menteri yang ia duduki antara bulan September 1950 hingga bulan maret 1956, secara berturut-turut menjabat adalah:

1. Menteri Perburuhan dari Kabinet Mohammad Natsir: 6 Sep 1950 -20 Mar 1951
2. Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Dr. Sukiman; 27 Aprl 1951–3 Aprl 1952
3. Menteri Urusan pegawai dari Kabinet Wilopo; 3 Aprl 1952–30 Aprl 1953
4. Menteri Sosial dari Kabinet Wilopo; 3 Aprl 1952–30 Aprl 1953
5. Menteri Sosial dari Kabinet Ali Sastroamindjojo; 30 Juli 1953–12 Agst 1955
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dari Kabinet Burhanuddin Harahap; 12 Agustus 1955- 3 Maret 1956
7. Menteri Dalam Negeri ad interim Kabinet Burhanuddin. 12 Agustus 1955- 3 Maret 1956

Salah satu kontribusi penting Soeroso di bidang kesehatan adalah pendirian Rumah Sakit Fatmawati pada tahun 1967. Ia berhasil mengajak Yayasan Fatmawati untuk mendirikan sebuah rumah sakit yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintah, yakni menggalakkan partisipasi rakyat semaksimal mungkin untuk usaha kesehatan.

Pada Maret 1956 R.P. Soeroso terpilih menjadi Ketua Badan Koordinasi Pusat Koperasi Pegawai Negeri Seluruh Indonesia. Kemudian, badan tersebut berganti nama menjadi Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) pada 1960. Sebelumnya Soeroso juga terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia pada September 1959. Presiden Sukarno juga mengangkat Soeroso sebagai anggota Pertimbangan Penghargaan Perintis Kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus 1958 dan selanjutnya menempati posisi sebagai wakil ketua. Posisi tersebut ia manfaatkan untuk memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh penting pada masa perjuangan mendapatkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada 1961 Presiden Sukarno kembali memberikan kepercayaan kepada Soeroso untuk menjadi ketua sekaligus anggota Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Panitia tersebut bertugas untuk menyusun rencana undang-undang pokok tentang pemerintahan daerah dan selanjutnya melakukan tinjauan terhadap pertimbangan keuangan serta menyusun rancangan pemerintahan desa yang memiliki hak otonomi. Panitia tersebut menyelesaikan tugasnya pada 1962.

Kemudian, pada Maret 1966 hingga Maret 1973 R.P. Soeroso diangkat menjadi anggota MPR dari unsur gerakan koperasi. Selanjutnya, pada Mei 1966 ia terpilih menjadi Ketua Gerakan Koperasi Indonesia dan kemudian menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia pada Juli 1973. Uniknya, pada saat yang samaSoeroso juga menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Selama menduduki berbagai posisi penting di pemerintahan Republik Indonesia, Soeroso menerima banyak tanda penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia. Berbagai tanda penghargaan itu, antara lain, adalah Bintang Mahaputra Adhi Pradana, Bintang Gerilya, Bintang Perintis Kemerdekaan RI, Lencana Satya Karya KL. 1, Lencana Kemerdekaan, dan Lencana Pembangunan.



Rumah Sakit yang diprakarsai oleh R.P Soeroso pada waktu menjadi menteri Sosial. Dok. Direktorat Sejarah, 2019.

2.2 Bapak Koperasi Pegawai Negeri

Menjelang akhir hayatnya, Soeroso mengabdikan diri ke dunia koperasi untuk mewujudkan pembangunan rumah-rumah pegawai negeri melalui program menabung yang dikelola oleh Koperasi Pegawai Negeri dalam waktu jangka panjang dan jangka pendek. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada para pegawai negeri yang sudah mempunyai tanah atau mempunyai rumah yang kecil sehingga dapat diberikan kemudahan untuk membangun, memperbaiki, atau memperluas rumahnya sendiri di atas tanah mereka dengan pinjaman dari Koperasi Pegawai Negeri yang dapat diangsur. Ia juga membentuk Koperasi Pegawai Negeri di setiap kantor mulai dari pusat hingga di daerah-daerah. Pemerintah menyetujui hal itu dengan keluarnya surat edaran kepada para menteri Republik Indonesia pada 22 November 1954 nomor 34146/54 terkait pembentukan Koperasi Pegawai Negeri. Kepedulian terhadap sesama juga diperlihatkan Soeroso ketika dia memperjuangkan nasib para perintis kemerdekaan. Dalam perjuangannya, R.P. Soeroso berusaha untuk menjadikan Gedung Pola di Pegangsaan Timur Nomor 56 menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan yang diresmikan oleh Presiden Soeharto.

Berkat kecakapan dalam pengelolaan usaha, uang pinjaman yang didapat dari Bank Indonesia itu kemudian dapat dikembalikan tanpa adanya bunga sehingga modal dan keuntungan bisa dipergunakan secara optimal dan keuntungan bisa didapatkan secara maksimal. Selain itu, KPN juga memberikan fitur terhadap para anggotanya untuk dapat mengangsur berbagai barang selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Kemajuan yang diperoleh oleh gerakan koperasi pegawai negeri merupakan hasil perjuangan langsung dari R.P. Soeroso. Hingga 1958 gerakan koperasi yang digagas oleh Soeroso sudah mencapai jumlah anggota sekitar 1,3 juta orang.

IKPN mulai mengalami kemunduran ketika terjadi perubahan sistem pemerintahan dari parlementer menuju presidensial pada 1959. Itu disebabkan banyaknya bank yang sebelumnya merupakan sumber pemodalan yang digunakan oleh Koperasi Pegawai Negeri dibekukan oleh pemerintah. Koperasi Pegawai Negeri mengalami kesulitan pencarian modal pada saat itu. Dengan kemampuan dan keinginan yang kuat dari R.P. Soeroso, IKPN dapat tetap bertahan dengan kredit dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta jaminan dari para anggota pengurusnya. Soeroso berusaha dengan sekuat tenaga menjaga agar KPN dapat mendapatkan kredit untuk usaha-usahanya dan sekaligus mengembalikan modal tepat waktu kepada bank yang memberikan modal pinjaman. Dapat dikatakan bahwa periode tersebut dilalui oleh para pengurus Koperasi Pegawai Negeri dengan sangat sulit, tetapi para anggotanya melakukan pengabdian tanpa imbalan jasa dan dilakukan secara sukarela. Baru pada sekitar 1969 Soeroso berkesempatan untuk mengungkapkan kesulitan KPN kepada Presiden Suharto dan mendapat respons langsung.

Gerakan KPN kemudian mendapat bagian dari potongan seluruh gaji pegawai negeri, termasuk anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) besertaPolisi Republik Indonesia (Polri). KPN sendiri terdiri dari IKPN, Inkopad, Inkopal, Inkopau, dan Inkopol. Setelah melewati perjuangan panjang, pada 1969 keluarlah Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1970. Sejak saat itu KPN mendapat modal dari potongan gaji para pegawai negeri hingga tahun 1974.

Pada tahun 1974 Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1970 akan dihentikan. Dengan penghentian itu, Direktur Jenderal Koperasi ingin mengambil modal dari KPN sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 69 dan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1970 bersamaan dengan keputusan bersama tiga menteri lainnya. Soeroso menentang tindakan tersebut karena menurutnya keputusan tiga menteri bukan merupakan landasan yang kuat serta bukan suatu peraturan pemerintah. Bantuan presiden yang sudah diberikan itu harus tetap menjadi modal abadi KPN. Namun, penentangan Soeroso tidak digubris. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 mulai berlaku pada 1 Januari 1975. IKPN di bawah pimpinan Soeroso kemudian berjuang untuk terus mendapatkan tambahan modal dengan modal

Surat Keterangan Menteri dari Presiden. Dok. Koleksi Ugrasena

No. 18/Kab./'52.-

Djakarta, 5 April 1952.

Kami, Presiden Republik Indonesia, dengan ini menjatakan bahwa

J. Suroso

adalah

Menteri Urusan Pegawai

dalam Pemerintah Republik Indonesia. Beliau berhak bepergian dimana-mana pun diseluruh Indonesia.

Presiden Republik Indonesia,

Soekarno.

SUKARNO

Hanja berlaku selama pemegang surat ini memegang djabatan sebagai tertera disebelah.



Tanda tangan :

Kami, Presiden Republik Indonesia, dengan ini menjatakan bahwa

J. Suroso

adalah

Menteri Sosial

dalam Pemerintahan Republik Indonesia. Beliau berhak bepergian dimana-mana pun diseluruh Indonesia.

Presiden Republik Indonesia,

Soekarno.

SUKARNO

Hanja berlaku selama pemegang surat ini memegang djabatan sebagai tertera disebelah.



Tanda tangan :



Bung Hatta sedang menjenguk Gubernur Jawa Tengah RP Suroso yang terbaring sakit akibat kelelahan keluar masuk medan gerilya. Dok: Arsip Nasional Republik Indonesia-ANRI.

awal yang didapat dengan nilai 105 juta rupiah. Dengan dana tersebut IKPN mencoba untuk membuat proyek pembangunan perumahan untuk pegawai negeri di Desa Bintaro Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kelak proyek yang dibangun IKPN itu menjadi contoh perumahan nasional yang ditangani langsung oleh pemerintah dan dikembangkan secara berkala.

Soeroso memang manusia yang sangat militan dalam mengusahakan kesejahteraan para pegawai negeri lewat koperasi. Wajar jika pada 1979 ia kemudian dikukuhkan sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri oleh Presiden Soeharto. Sebuah penyematan yang bermakna sebelum dua tahun kemudian, tepatnya pada 16 Mei 1981, sang gubernur pertama Jawa Tengah itu mengembuskan napasnya yang terakhir kali. Melalui Surat Keputusan Presiden No.81/TK/1986 pada 23 Oktober 1986 Soeroso diangkat sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia.



Makam R.P Soeroso . Dok. Direktorat Sejarah, 2019.





Kiprah Pasca Revolusi

Semenjak berakhirnya masa revolusi Indonesia, R.P. Soeroso menjabat berbagai posisi di pemerintahan Republik Indonesia. Pada 1950, ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak lama sebagai anggota parlemen, ia kemudian diangkat menjadi menteri. Beberapa posisi menteri yang ia duduki antara bulan September 1950 hingga bulan maret 1956, secara berturut-turut menjabat adalah:

6 September 1950–20 Maret 1951
Menteri Perburuhan dari Kabinet Mohammad Natsir

27 April 1951–3 April 1952
Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Dr. Sukiman

3 April 1952–30 April
1953 Menteri Urusan pegawai dari Kabinet Wilopo

3 April 1952–30 April 1953
Menteri Sosial dari Kabinet Wilopo

30 Juli 1953–12 Agustus 1955
Menteri Sosial dari Kabinet Ali Sastroamindjojo

12 Agustus 1955–3 Maret 1956
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dari Kabinet Burhanuddin Harahap

12 Agustus 1955–3 Maret 1956
Menteri Dalam Negeri ad interim Kabinet Burhanuddin

Hari Terakhir Bapak Koperasi Pegawai Negeri

1954 : Soeroso menjadi pencetus utama berdirinya Koperasi Pegawai Negeri berdasarkan surat edaran kepada para menteri Republik Indonesia pada 22 November 1954 nomor 34146 / 54 terkait pembentukan Koperasi Pegawai Negeri.

1955 : Ikut memperjuangkan keluarnya Surat Edaran dari Perdana Menteri Republik Indonesia kepada para menteri pada 7 April 1955 nomor 9190 / 55 yang membebaskan para pegawai negeri untuk keperluan Koperasi Pegawai Negeri.

1969-1970 : Selama 14 tahun, Soeroso terus memperjuangkan kesejahteraan para pegawai negeri hingga munculnya Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1969 dan nomor 22 tahun 1970 mengenai Koperasi Pegawai Negeri untuk mendapat modal dari potongan gaji pegawai negeri sehingga dengan mudah, gerakan Koperasi Pegawai Negeri dapat berkembang secara terus menerus.

1974 : Keputusan Presiden Nomor 22 / 1970 akan dihentikan, Dengan penghentian itu, Direktur Jenderal Koperasi ingin mengambil modal dari KPN sesuai dengan keputusan presiden nomor 36 / 69 dan keputusan presiden nomor 22 / 19 70 bersamaan dengan keputusan bersama tiga menteri lainnya. Soeroso menentang tindakan tersebut. Baginya, keputusan tiga menteri bukan merupakan landasan yang kuat serta bukan suatu peraturan pemerintah. Bantuan presiden yang sudah diberikan itu harus tetap menjadi modal abadi KPN.

1975 : Namun penentangan Soeroso, tidak digubris. Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1974 mulai berlaku pada 1 Januari 1975. IKPN di bawah pimpinan Soeroso kemudian berjuang untuk terus mendapatkan tambahan modal dengan modal awal yang didapat dengan nilai 105 juta rupiah. IKPN mencoba untuk membuat proyek pembangunan perumahan untuk pegawai negeri di Desa Bintaro Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Di dalam proyek itu, lewat IKPN, R.P. Soeroso mendirikan 188 buah rumah dari tipe 25, 45, 54, dan 70, yaitu tipe yang dibuat oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Di dalam komplek perumahan yang didirikan tersebut, dilakukan pula pembangunan sekolah dasar dari modal INPRES, kemudian terdapat pula bangunan tempat ibadah berupa musola yang dibangun oleh IKPN. Kelak proyek yang dibangun IKPN itu menjadi contoh perumahan nasional yang ditangani langsung oleh pemerintah dan dikembangkan secara berkala.

1979 : Dikukuhkan oleh Presiden Soeharto sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri bagi seluruh Indonesia.

1981 : Pada 16 Mei, sang gubernur pertama Jawa Tengah itu menghembuskan nafasnya untuk terakhir kali.

1986 : Lewat Surat Keputusan Presiden No.81/TK/1986, pada 23 Oktober 1986 Soeroso ditabalkan sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia.



R.M.T.A. Soerjo

Gubernur Jawa Timur

"Berulang-ulang saya katakan:
lebih baik hancur daripada
dijajah kembali..."

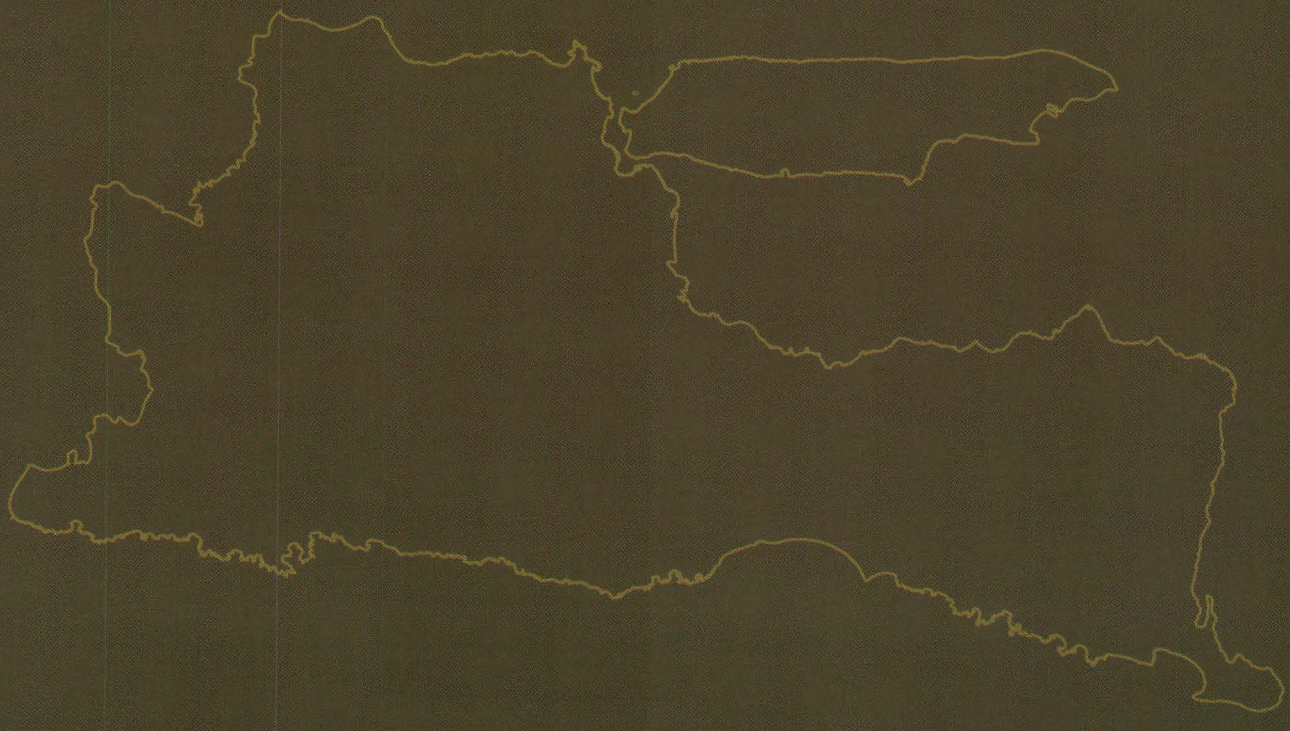

1. Kiprah Sebelum Menjadi Gubernur

Raden Mas Tumenggung Aryo Soerjo lahir di Magetan pada 9 Juli 1896. Ia berasal dari keluarga bangsawan. Ayahanda Soerjo, yakni Raden Mas Wirjo Soemarto, adalah ajun jaksa di Magetan, sedangkan ibunda beliau yang bernama Raden Ayu Koestilah adalah putri Raden Ronggo Prawirodirdjo III yang merupakan musuh besar Gubernur Jenderal Hindia Belanda Ke-33, yakni Herman Willem Daendels (1808–1811).

Sebagai anak dari kalangan bangsawan, Soerjo mengenyam pendidikan formal dengan baik. Ia mengawali pendidikan di Tweede Inlandsche School Magetan yang setara dengan sekolah dasar. Kemudian, ia melanjutkan dengan menuntut ilmu di Hollandsch Inlandsche School Magetan. Setelah menyelesaikan pendidikan di dua institusi pendidikan tersebut, Soerjo menempuh pendidikan di sekolah menengah khusus pamong praja bumiputra atau OSVIA. Wawasan politik Soerjo mulai terbuka saat ia menjadi siswa di sekolah pamong tersebut. Bahkan, ia terlibat dalam pembelaan terhadap empat orang kawannya yang dikeluarkan pihak OSVIA karena menolak ikut dalam upacara peringatan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis.

Soerjo mengawali karier sebagai birokrat saat Gediplomeerd Assistant Inlandsch Bestuursambtenaar (GAIB) di kantor Kontrolir Ngawi pada 1918. Karena melihat bakatnya yang luar biasa, atasannya menyekolahkan Soerjo ke Sekolah Polisi di Sukabumi pada 1922. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Polisi, Soerjo diberikan kepercayaan menjabat sebagai wedana di wilayah Karangrejo, Glodog, Madiun. Kariernya di bidang kepamongprajaan kian melesat seiring dengan diangkatnya Soerjo menjadi asisten wedana di Madiun Kota pada 1926. Pada tahun itu pula ia kemudian diangkat menjadi juru tulis jaksa untuk selanjutnya diberi tugas sebagai Mantri Kabupaten Madiun. Saat menjadi asisten wedana di Madiun, Soerjo menemukan jodohnya, yakni Raden Ayu Mustapeni, putri dari Raden Adipati Hadiwinoto, Bupati Magetan. Kendati menikahi seorang janda beranak satu, Soerjo sangat bahagia dengan pernikahan itu.

Dinamika karier Soerjo terus berlanjut. Ia dipindah ke Jetis, Ponorogo. Kemudian, pemerintah Hindia Belanda menaikkan pangkat Soerjo menjadi wedana di Pacitan pada 1929. Selanjutnya, Soerjo ditugasi untuk melanjutkan pendidikan di Bestuursschool (Akademi Pamong Praja) di Batavia dan berhasil menyelesaikannya pada 1931. Pada tahun itu pula ia ditugasi untuk menjabat sebagai wedana di Gedeg, Mojokerto. Kepiawaian beliau dalam memimpin wilayah Gedeg membuatnya dipromosikan menjadi wedana di Porong, sebuah wilayah yang dikenal rawan banjir di kawasan Sidoarjo. Baru pada 1938 Soerjo kembali ke Magetan dan diangkat menjadi bupati.



Gedung OSVIA yang kini telah menjadi kantor Polres Magelang Kota. Dok. Direktorat Sejarah, 2019.

> *Tetaplah menjadi seorang nasionalis yang baik. Tabahlah, jangan berputus asa...*

9 Juli 1896

Raden Mas Tumenggung Aryo Soerjo lahir. Soerjo muda mengawali pendidikan formalnya di *Tweede Inlandsche School* Magetan (setara SD). Setelah tamat dari *Hollandsch Inlandsche School* Magetan, Soetardjo melanjutkan ke OSVIA di Magelang.

1913

Di OSVIA Soerjo terlibat dalam advokasi 4 orang kawannya yang dikeluarkan pihak OSVIA akibat menolak ikut upacara peringatan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis.

1918

Soerjo mengawali karier sebagai birokrat saat menjadi *Gediplomeerd Assistant Inlandsch Bestuursambtenaar* (GAIB) di kantor Kontrolir Ngawi.

1922

Soerjo mengawali pendidikannya pada Sekolah Polisi di Sukabumi, Jawa Barat.

1926

Pemerintah Hindia Belanda mengangkatnya sebagai asisten wedana di Madiun Kota.

1929

Pemerintah Hindia Belanda menaikkan pangkat Soerjo menjadi wedana di Pacitan.

1931

Soerjo ditempatkan sebagai Wedana di Gedeg, Mojokerto.

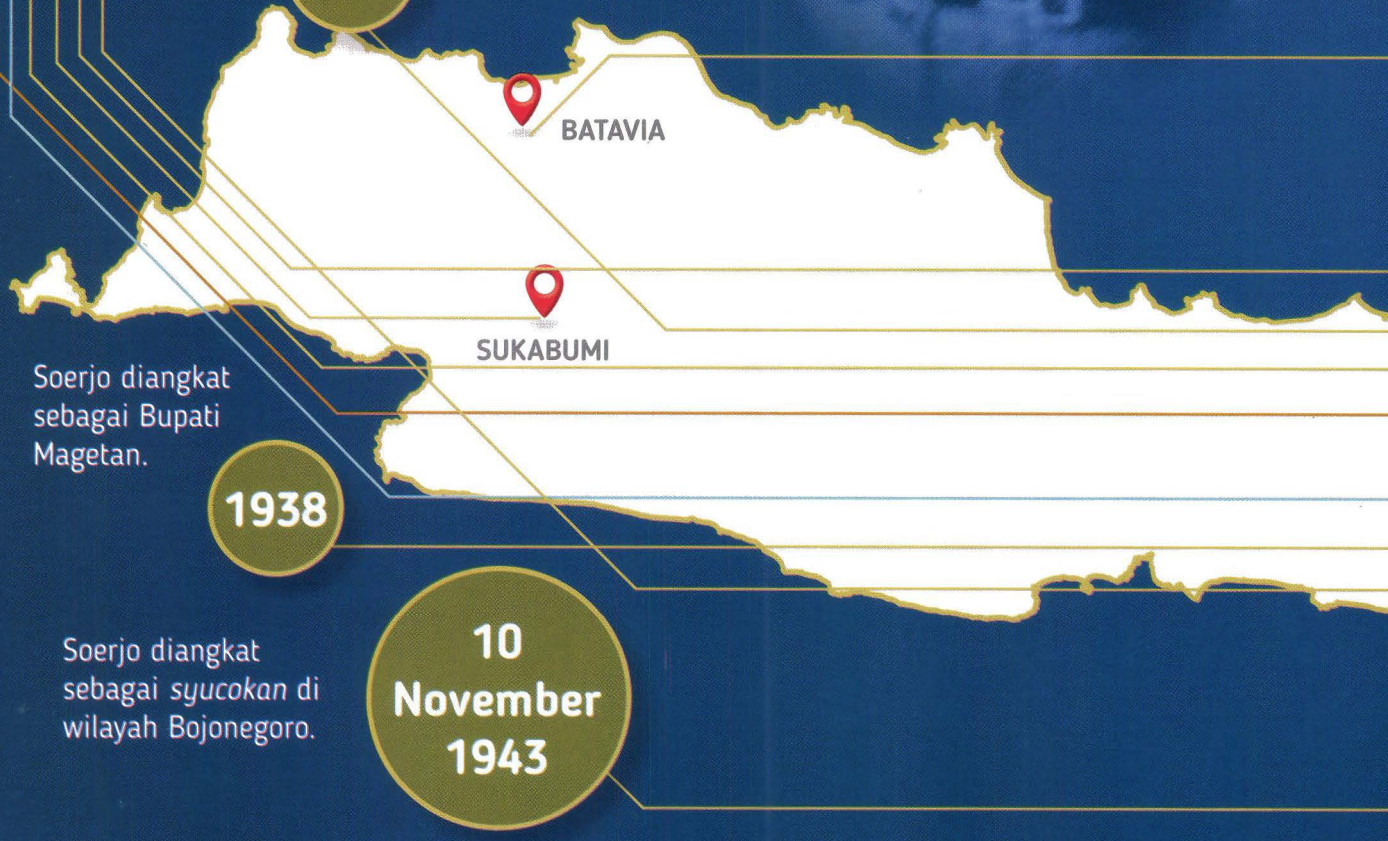

Soerjo diangkat sebagai Bupati Magetan.

1938

Soerjo diangkat sebagai *syucokan* di wilayah Bojonegoro.

10 November 1943

12 November 1945

Soerjo bersama ajudan dan 2 anggora kepolisian RI yakni Komisaris Besar M. Doerjat dan Komisaris Soeroko dieksekusi oleh Pasukan Pro PKI di bawah Maladi Yusuf. Soerjo bersama ajudannya ditangkap saat sedang melintasi kawasan hutan jati di wilayah Bogo, Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur saat sedang berangkat ke Madiun.

9 November 1945

Didampingi Doel Arnowo, tepat jam 21.00, Gubernur Soerjo berbicara di depan corong Radio Surabaya menanggapi ultimatum pihak Inggris. Dalam pidatonya, Soerjo menegaskan sikap bahwa, "Lebih baik hancur daripada dijajah kembali". Sebuah pidato kharismatik yang membakar semangat rakyat Jawa Timur.

7 November 1945

Gubernur Soerjo menerima surat dari Mansergh. Dalam suratnya Mansergh menuduh pihak Indonesia telah menunda-nunda evakuasi kaum interniran dan pengembalian pasukan Inggris yang tertawan atau terluka dalam pertempuran 28-30 Oktober.

24 September 1945

Di hadapan ribuan rakyat Bojonegoro, Residen Soerjo membacakan dukungan resmi Karesidenan Bojonegoro terhadap Republik Indonesia.

18 Agustus 1945

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang istimewa yang melahirkan lima keputusan penting yang salah satunya adalah pembentukan delapan provinsi NKRI, yakni Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, JawaTimur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Dalam hal ini, Soerjo diangkat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur.



Jenjang Pendidikan

1906 : Europeesche Lagere School (Sekolah Dasar Belanda) di Tuban

1911 : Opleiding School voor Indlandsche Ambtenaren (Sekolah Pendidikan Pamong Praja) di Magelang

1921 : Bestuurschool (Sekolah Pemerintahan) di Batavia

Jenjang Karier

1911 : Pembantu Juru Tulis di Rembang

1911 : Juru Julis Jaksa di Rembang

1911 : Mantri Kabupaten di Rembang

1913 : Asisten Wedana di Bogorejo, Blora

1915 : Jaksa di Rembang

1924 : Wedana di Rembang

1929 : Patih Merangkap Hakim di Gresik

1931 : Wakil Ketua Volksraad di Batavia*

1942 : Naimubo-Sanyo Memimpin Departemen dalam Negeri di Jakarta

1943 : Residen Jakarta

1945 : Gubernur Jawa Barat

1946 : Gubernur-Penasihat Pemerintah Pusat RI di Yogyakarta

1947 : Anggota Dewan Pertimbangan Agung

1948 : Ketua Pertimbangan Agung

1950 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara

1956 : Dosen Luar Biasa Universitas Padjajaran

1964 : Dosen Luar Biasa IKIP Bandung



1.1 Sebagai Pejabat Hindia Belanda

Selama menjabat berbagai jabatan pemerintahan, Soerjo telah menorehkan berbagai prestasi sekaligus menunjukkan bakat kepemimpinannya dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang ia pimpin. Saat ia bertugas di Porong sebagai wedana, ia berhasil menggerakkan masyarakat untuk memperbaiki bendungan dan saluran air di daerah aliran Sungai Porong untuk mengatisipasi banjir yang kerap terjadi setiap tahun. Sementara itu, saat ia menjadi Bupati Magetan, Soerjo berhasil memperbaiki jalan antara Magetan dan Sarangan yang menunjang sektor pariwisata dan pertanian, terutama sayuran dan buah di daerah Magetan dan sekitar Madiun.



Gubernur Soerjo (berkacak pinggang) bersama staf-nya saat mengunjungi situasi Pertempuran Surabaya di front Krian. Dok: repro buku: Republik Indonesia: Provinsi Djawa Timur, 1952 oleh Kementerian Penerangan RI.

> *"Berulang-ulang saya katakan: lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum itu!"*

1.2 Sebagai Pejabat di Masa Pendudukan Jepang

Tidak seperti di wilayah lain yang menyambut kedatangan pasukan Jepang pada awal Perang Asia Timur Raya, masyarakat Magetan tidak berani untuk keluar rumah. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi kemudian. Soerjo yang saat itu menjabat sebagai Bupati Magetan berupaya agar kehidupan masyarakat kembali normal dengan menyerukan agar rakyat tidak khawatir dengan situasi yang tengah terjadi. Keamanan Magetan ia tunjukkan dengan berjalan-jalan di alun-alun Magetan bersama istrinya. Namun, seiring dengan kedatangan pasukan Jepang, Soerjo tidak bisa berbuat apa-ap, selain menerima uluran kerja sama dengan mereka kendati ia sesungguhnya membenci perilaku penguasa militer Jepang. Bahkan, ia menolak memenuhi permintaan penguasa militer Jepang yang mengumpulkan perempuan muda untuk diserahkan kepada para serdadu sebagai pelampiasan nafsu mereka.

Guna mengatur tata kelola pemerintahan, pada September 1943 mereka mengangkat tujuh orang Indonesia terkemuka sebagai penasihat pada pemerintahan militer Jepang. Mereka adalah Ir. Sukarno sebagai *somubu* (pimpinan Departemen Urusan Umum), Mr. Suwandi sebagai *naimubu* (pimpinan Departemen Urusan Dalam Negeri), Dr. Abdul Rasyid sebagai wakil *naimubu*, Prof. Mr. Dr.Soepomo sebagai *syihobu* (pimpinan Departemen Kehakiman), Mochtar bin Prabu Mangkunegoro sebagai *kosubu* (pimpinan Departemen Lalu Lintas), Mr. Muhammad Yamin sebagai *sendenbu* (pimpinan Departemen Propaganda), dan Prawoto Sumodilogo sebagai *sngyobu* (pimpinan Depatemen Ekonomi).

Di tingkat daerah pemerintah militer Jepang menghapus tiga provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebagai gantinya, pada 8 Agustus 1942 dibentuk 17 daerah *syu* yang dipimpin oleh seorang *syucokan* (setara dengan jabatan residen pada masa kolonial, tetapikekuasaannya seperti seorang gubernur). Pada titik ini nama Soerjo yang telah dikenal sebagai salah satu bupati yang cakap dalam memimpin wilayah administrasinya ditunjuk pemerintah militer Jepang sebagai *syucokan* di wilayah Bojonegoro pada 10 November 1943.

Pada tahun 1943 posisi pasukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya mulai mendapat pukulan balik dari tentara Sekutu. Jalannya perang tersebut sedikit demi sedikit mulai menyudutkan posisi pasukan Jepang sehingga pemerintah militer Jepang menghidupkan rencana memberi janji kemerdekaan Indonesia. Pada 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 68 tokoh terkemuka di Indonesia. Namun, belum lagi janji kemerdekaan tersebut diwujudkan, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pasukan Sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat.

Kekalahan Jepang tidak disia-siakan oleh kaum nasionalis Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Satu hari kemudian BPUPKI yang telah bertransformasi menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang istimewa yang melahirkan lima keputusan penting. Salah satu keputusantersebut adalah pembentukan delapan provinsi yang menjadi bagian wilayah Republik Indonesiayang baru berdiri, yakni Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Kepiawaian dan prestasi Soerjo selama memimpin sejumlah wilayah di Jawa Timur sejak masa pemerintahan Hindia Belanda merupakan alasan kuat diangkatnya ia sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur.

2. Menjadi Gubernur Jawa Timur

Meskipun secara resmi pemerintah Republik Indonesia telah mengumumkan Soerjo sebagai Gubernur Jawa Timur, pada kenyataannya hingga awal Oktober 1945 pemerintahan daerah di provinsi tersebut belum terselenggara. Kekosongan kekuasaan itu menjadikan para pemuda pro-Republik khawatir. Situasi ini membuatKomite Nasional Indonesia (KNI) mendesak Gubernur Soerjo agar secepatnya berangkat ke Surabaya untuk menduduki jabatannya.

Pada 12 Oktober 1945 Gubernur Soerjo langsung menjalankan tugasnya di Surabaya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menyusun staf pegawai. Ia mengangkat Doel Arnowo (Ketua KNID Surabaya) sebagai pembantu gubernur dan beberapa tokoh terkemuka, antara lain, Roeslan Abdulgani, Mr. Dwidjosewojo, Bambang Suparto, serta Subianto sebagai bagian dari tulang punggung pemerintahannya.

Ketika Gubernur Soerjo tiba di Surabaya, situasi kota tersebut tengah memanas menyusul perlucutan senjata tentara Jepang oleh pemuda Surabayayang sering kali menimbulkan aksi kekerasan. Suasana anti-Belanda masih sangat terasa seperti terlihat dalam insiden perobekan bendera Belanda yang tengah berkibar di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Situasi itu mendorong Soerjo bergerak cepat mengatasi keadaan. Namun, situasi kembali memanas seiring dengan kedatanganpasukan Inggris yang merupakan bagian dari tentara Sekutu. Mereka bertujuan mengurus tawanan perang dan kaum interniran (orang-orang Eropa bekas tahanan Jepang) dan menjaga ketertiban serta kemananan setelah perang. Namun, isu yang bergulir saat itu bahwa kedatangan pasukan Inggris diikuti oleh orang-orang Belanda yang berniat untuk kembali berkuasa di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, Gubernur Soerjo memperingatkan militer Inggris dan Belanda berikut pendukungnya agar tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Ia mengusulkan agar pihak Inggris di Jakarta



membatalkan kedatangannya ke Surabaya karena kehadiran mereka tidak diperlukan. Pemerintah Jawa Timur menyatakan akan menyelesaikan urusan bekas tahanan perang dan tentara Jepang secepatnya. Di sisi lain, pemerintah pusat di Jakarta yang tengah membangun posisi tawar dengan Inggris menyarankan kepada Pemerintah Jawa Timur untuk menyambut baik kedatangan tentara Inggris. Situasi di Surabaya dan kebijakan pemerintah RI membuat dilema bagi Gubernur Soerjo. Di satu sisi, ia harus bersikap tegas terhadap pasukan Inggris dan Belanda di sisi lain ia juga harus menaati kebijakan pemerintah pusat.

Sebenarnya Gubernur Soerjo telah mendelegasikan Jenderal Mayor drg. Moestopo, Ketua Badan Keamanan Rakyat Jawa Timur, untuk menghadiri perundingan dengan pihak Sekutu, tetapi perundingan tersebut tidak terlaksana. Kendati gagal, Gubernur Soerjo kembali mengutus Komisaris Polisi Mr. Masmuin, Inspektur Polisi Mohammad Jasin, dan T.B. Kundan. Pada perundingan yang dilangsungkan 26 Oktober 1945, pihak Inggris/Sekutu bersedia untuk datang ke kantor gubernur dan berunding dengan Gubernur Soerjo. Kedua belah pihak berhasil menyetujui empat kesepakatan. *Pertama*, Sekutu mengakui keberadaan Republik Indonesia sebatas distrik Surabaya. *Kedua*, Sekutu tidak akan membawa masuk pasukan Belanda dan tidak ada pasukan Belanda yang disusupkan pada pasukan Inggris yang mendarat di Surabaya. *Ketiga*, pasukan Sekutu hanya dibolehkan berada pada radius 800 meter dari pelabuhan. *Keempat*, untuk memperlancar komunikasi antara Sekutu dan Republik, dibentuk biro kontak yang beranggotakan perwakilan kedua belah pihak.

Kendati rawan dilanggar, kesepakatan tersebut disiarkan secara luas oleh Radio Surabaya dan disambut baik oleh semua pihak. Kekhawatiran pelanggaran kesepakatan tersebut akhirnya terjadi saat Komandan Pasukan Inggris, Mallaby, memerintahkan pasukannya untuk menduduki dua puluh titik strategis di dalam kota Surabaya, khususnya kesepakatan terkait radius yang boleh dikuasai oleh pasukan Inggris.Bahkan, ketika pemerintah Republik di Jawa Timur tengah membangun kesepakatan dengan Mallaby, diam-diam pasukan Inggris di Surabaya menerima perintah baru dari Mayor Jenderal Douglas Hawthorn (Komandan Tentara Inggris untuk Jawa, Madura, Bali, dan Lombok) untuk secepatnya menduduki Surabaya secara militer.

Mallaby yang telanjur menempuh jalan diplomasi tampak gamang. Dalam situasi itu tiba-tiba sebuah pesawat melayang-layang di langit Surabaya. Pesawat milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris itu menyebarkan ribuan pamflet ancaman pada 24 Oktober 1945. Tindakan tentara Inggris dan Sekutu jelas menimbulkan sentimen negatif masyarakat Surabaya, terutama *arek-arek* muda yang tersulut semangat juangnya.

Gedung Grahadi, kantor Gubernur Pertama Jawa Timur yang sekarang menjadi rumah dinas. Dok. Direktorat Sejarah, 2019.



Kami tidak pernah ingin menyerang. Tetapi kami akan mempertahankan hak-hak kami. Sebagai suatu bangsa yang mencintai kebebasan, kami berada di pihak yang benar. Kami hanya menghendaki kebenaran. Terpujilah selalu, Tuhan Yang Maha Tinggi."



Gubernur Soerjo (barisan depan paling kanan) bersama staf-nya saat meninjau suatu wilayah di Jawa Timur. Dok: repro buku: Republik Indonesia: Provinsi Djawa Timur, 1952 oleh Kementerian Penerangan RI.

Gubernur Soerjo terus berupaya mencari jalan keluar dari situasi kemelut. Lewat para pembantunya, Gubernur tetap berusaha agar Mallaby dan Sekutu kembali ke jalur kesepakatan. Namun, kondisi semakin memanas seiring dengan terjadinya insiden di Kedungdoro dan Keputren. Sekelompok tentara Inggris berkebangsaan India menembakkan senjatanya secara provokatif sehingga menimbulkan aksi balasan dari pejuang Republik. Berbagai insiden tersebut pada akhirnya bermuara pada pertempuran besar melawan pasukan Sekutu. Gubernur Soerjo menyerahkan komando pertempuran kepada para pemuda pejuang. Total pasukan yang dikerahkan saat itu mencapai sekitar seratus ribu orang dan terus bertambah dari jam ke jam. Mereka gabungan relawan dari kampung-kampung dan kota-kota lain di Jawa Timur seperti Mojokerto, Malang, Sidoarjo, Jombang, Bangil, dan Pasuruan. Semangat tempuryang digaungkan dari Radio Pemberontak oleh Bung Tomo merupakan salah satu faktor penting dari semakin bertambahnya tenaga tempur di medan perang.

Hingga hari kedua pertempuran *arek-arek Suroboyo* telah menewaskan sekira 400 serdadu Inggris, termasuk 16 perwira. Komandan pasukan Sekutu di Asia Tenggara, Jenderal Sir Philip Christison, segera meminta Sukarno-Hatta meredakan kemarahan *arek-arek Suroboyo* yang tak terbendung. Untuk memenuhi permintaan Christison, pada 29 Oktober rombongan Presiden Sukarno bertolak ke Surabaya bersama Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeddin dengan menggunakan pesawat RAF milik Inggris. Dengan disertai para perwira Inggris, rombongan langsung ke kantor gubernur untuk berunding dengan Gubernur Soerjo. Di hadapan Presiden dan Wakil Presiden para pemimpin Jawa Timur menjelaskan situasi terakhir di Surabaya kala itu. Mereka



Sukarno berkeliling kota Surabaya untuk menenangkan masa. Dok. Perpustakaan Nasional

menegaskan tekadnya untuk terus melanjutkan pertempuran dan menjamin bahwa mereka tidak pernah melanggar perjanjian 26 Oktober. Pengingkaran janji, menurut para pejuang, dilakukan oleh Inggris atau Sekutu. Secara khusus, Gubernur Soerjo dan Doel Arnowo meminta Presiden bersikap tegas terhadap Inggris. Begitu pula pemuda Sutomo atau Bung Tomo meminta Sukarno memahami perasaan rakyat Surabaya. Sukarno bergeming. Ia meminta agar gencatan senjata dijalankan dan kerja sama dengan tentara Inggris terus dilakukan.

Keesokan harinya dilakukan perundingan antara pihak Inggris dan Sekutu yang diwakili Hawthorn dan Mallaby dengan perwakilan RI Sukarno-Hatta. Perundingan tersebut menghasilkan gencatan senjata. Namun, seperti perundingan sebelumnya, perundingan tersebut juga berpotensi dilanggar oleh pihak Sekutu terlebih di mata para pejuang Surabaya hasil perundingan antara RI dan Sekutu tersebut sama sekali tidak ada harganya. Setelah rombongan Presiden Sukarno kembali ke Jakarta, baku tembak masih tetap berlangsung. Meskipun demikian, seruan Presiden untuk menghentikan pertempuran secara umum ditaati. Di sisi lain, gencatan senjata itu memberi kesempatan kepada pasukan Inggris untuk menyusun kembali kekuatannya. Mereka diam-diam mendatangkan pasukan tambahan.

Di tengah berlangsungnya gencatan senjata, Brigadir Mallaby diberitakan tewas dalam suatu insiden di depan Gedung Internatio, tepat di tepi Kali Mas. Peristiwa itu terjadi hanya beberapa jam setelah kesepakatan antara Sukarno-Hawthorn ditandatangani. Kemudian, Gubernur Soerjo mengutus Roeslan Abdulgani dan Dokter Soegiriuntuk menawarkan perundingan dan meminta Inggris mencabut ultimatumnya yang menuntut pimpinan pemerintah RI di Surabaya, pemuda, dan badan-badan perjuangan agar melaporkan diri untuk menyerah kepada Inggris atau Sekutu. Inggris menyebarkan ultimatumnya melalui pamflet yang justru membuat rakyat Surabaya sangat marah. Pamflet tersebut ditandatangani oleh Mayor Jenderal E.C. Mansergh selaku Panglima Tentara Inggris di Jawa Timur. Isi pamflet persis sama dengan ultimatum yang telah diterima Gubernur Soerjo. PresidenSukarno menyatakan telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Soebardjo untuk meminta Jenderal



Mobil Brigjen Mallaby diserang di kota Surabaya

Christison membatalkan ultimatum, tetapi yang bersangkutan menolaknya. Menurut Soebardjo, putusan akhir sepenuhnya di tangan Gubernur Soerjo dan pada akhirnya Gubernur Soerjo memang harus mengambil putusan. Dengan didampingi Doel Arnowo, tepat pukul 21.00 Gubernur berbicara di depan corong Radio Surabaya. Seusai pidato Gubernur Soerjo, Surabaya dicekam semangat perlawanan yang sangat kuat.

Tepat pukul 06.00 tentara Inggris menyerang Surabaya dan menghujani kota itu dengan bom udara yang diikuti serangan darat dengan menggunakan tank dan infanteri pada 10 November 1945. Serangan Inggris tersebut dihadapi dengan perlawanan yang heroik dari arek-arek Surabaya kendati mengakibatkan jatuhnya korban rakyat sipil hingga kurang lebih 16.000 jiwa.Sementara itu, pihak Inggris kehilangan 1.500 prajurit, termasuk dua orang jenderal.

Gubernur Soerjo dan para stafnya berhasil diamankan ke kawasan Sepanjang. Pusat Gubernuran Surabaya dipertahankan dengan sekuat tenaga oleh pemuda Surabaya kendati pada akhirnya berhasil dikuasai oleh pasukan Inggris pada 17 November 1945. Pasukan Inggris terus membombardir kantor Gubernur Soerjo yang pada akhirnya harus memindahkan lagi kantornya ke Mojokerto. Kantor Gubernur Jawa Timur pada akhirnya kembali dipindahkan pada pertengahan November 1945. Soerjo memilih Kediri sebagai pusat kegiatan pemerintahan Republik di Jawa Timur.



Pergerakan Gubernur Soerjo menghindari gempuran tentara sekutu dalam mempertahankan pemerintahan Jawa Timur

Pidato Gubernur Soerjo pada 10 November 1945:

Saudara-saudara sekalian!

Pucuk pimpinan kita di Jakarta telah mengusahakan akan membereskan peristiwa di Surabaya pada hari ini. Tetapi sayang sekali, sia-sia belaka, sehingga kesemuanya diserahkan kepada kebijaksanaan kita di Surabaya sendiri.

Semua usaha kita untuk berunding, senantiasa gagal. Untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, maka kita harus menegakkan dan meneguhkan tekad kita yang satu, yakni berani menghadapi segala kemungkinan.

Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah: Lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum itu. Dalam menghadapi segala kemungkinan besok pagi, mari kita semua memelihara persatuan yang bulat antara pemerintah, rakyat, TKR, Polisi dan semua badan-badan perjuangan pemuda dan rakyat kita.

Mari kita sekarang memohon kepada Tuhan Yang Mahakuasa, semoga kita sekalian mendapat kekuatan lahir batin serta rahmat dan taufik dalam perjuangan.
Selamat Berjuang!

Sang Gubernur di Tengah Perang

12 Oktober 1945
R.M.T.A. Soerjo mengawali tugasnya sebagai gubernur pertama Republik Indonesia untuk Jawa Timur. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengangkat Doel Arnowo (Ketua KNID Surabaya) sebagai pembantu gubernur dan beberapa tokoh terkemuka, antara lain, Roeslan Abdulgani, Mr. Dwidjosewojo, Bambang Suparto, serta Subianto sebagai bagian dari tulang punggung pemerintahannya.

25 Oktober 1945
Sekitar 6.000 prajurit Sekutu dari Brigade 49 Infanteri India (Inggris) mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selain mengurusi kaum interniran, mereka pun akan mengawasi pemindahan kekuasaan dari militer Jepang. Pimpinan mereka Brigadir Jenderal A. W. S. Mallaby, lewat dua perwiranya, menyampaikan undangan lisan kepada Gubernur Soerjo untuk melakukan pertemuan di atas kapal Inggris. Namun karena ada kesalahpahaman, perundingan ini gagal terlaksana.

26 Oktober 1945
Bertempat di Kegubernuran Jawa Timur, berlangsung perundingan antara utusan pihak Sekutu dengan Gubernur Soerjo.

28 Oktober 1945
Terjadi bentrok antara pasukan Sekutu dengan para pejuang Surabaya. Bentrok itu kemudian menjalar ke seluruh Surabaya dan menimbulkan pertempuran-pertempuran hebat.

29 Oktober 1945
Posisi pasukan Sekutu di Surabaya terjepit. Atas insiatif Komandan Pasukan Sekutu di Asia Tenggara Jenderal Sir Philip Christison, pihak Sekutu kemudian meminta Presiden Sukarno untuk turun tangan.

30 Oktober 1945
Berlangsung perundingan antara pihak RI yang diwakili oleh Sukarno-Hatta dengan Hawthorn dan Mallaby dari pihak Sekutu. Kedua pihak setuju untuk kembali melakukan gencatan senjata dan meratifikasi hasil perundingan yang sudah dilakukan antara kedua pihak pada 26 Oktober 1945. Beberapa saat setelah Sukarno-Hatta meninggalkan Surabaya, situasi kembali memanas. Bentrok senjata kembali terjadi dan menyebabkan Brigjen Mallaby tewas.



25 November 1945

Pada hari ke-15 pertempuran di Surabaya, Gubernur Soerjo dievakuasi ke luar Surabaya. Sebelumnya dia memilih bertahan di Sepanjang dan Mojokerto, namun kedudukannya terus dibombardir pasukan Sekutu sehingga para staf-nya mengungsikan Soerjo ke Kediri. Dari sinilah, Soerjo kemudian memimpin Jawa Timur sejak akhir November.

10 November 1945

Surabaya digempur lewat darat, laut dan udara oleh kekuatan militer Sekutu. Para pejuang Indonesia melakukan perlawanan secara heroik. Pada hari pertama pertempuran, lewat corong radio, Gubernur Soerjo memberikan semangat kepada para pejuang yang terlibat dalam pertempuran untuk membela kehormatan bangsa.

9 November 1945

Sekutu memberikan ultimatum kepada semua orang Indonesia di Surabaya untuk menyerah tanpa syarat, setidaknya sampai 10 November 1945 jam 06.00. Jika ultimatum itu tidak diindahkan, maka militer Sekutu mengancam akan menggempur Surabaya dari laut, darat dan udara. Jam 21.00, lewat corong radio, Gubernur Soerjo menolak secara tegas ultimatum Sekutu tersebut.

7 November 1945

Gubernur Soerjo menerima surat dari Mayor Jenderal Mansergh. Dalam surat itu, Mansergh menuduh pihak Indonesia telah menunda-nunda evakuasi kaum interniran dan pengembalian pasukan Inggris yang tertawan atau terluka dalam pertempuran 28-30 Oktober. Mansergh juga menyatakan akan mengambil-alih Morokrembangan dengan alasan lapangan terbang itu akan digunakan pasukan Indonesia untuk menyerang Inggris.

1 November 1945

Sekutu menambah kekuatan militernya di Surabaya dengan mendatangkan ribuan prajurit dan pesawat-pesawat tempur.

3. Hari-Hari Terakhir Gubernur Soerjo

Selama di Kediri Gubernur Soerjo menjalankan tugas-tugasnya yang tertunda karena peristiwa 10 November di Surabaya dengan memfokuskan pembenahan struktur ekonomi daerah melalui sektor pertanian. Ketika tentara Belanda mendekati wilayah Kediri, pemerintah Jawa Timur pindah ke Malang pada Februari 1947. Saat Gubernur Soerjo berkantor di kota Malang, Sidang Lengkap KNIP yang ketiga diselenggarakan di kota tersebut pada 25 Februari hingga 6 Maret 1947. Selanjutnya, pada Juni 1947 Pemerintah RI pindah dari Jakarta ke Yogyakarta akibat agresi militer Belanda yang menghendaki Soerjo menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung mendampingi R.A.A. Wiranatakusumah sebagai ketua. Ketika menjadi Wakil Ketua DPA itulah takdir hidup Soerjo ditentukan.

Pada pertengahan September 1948 Partai Komunis Indonesia pimpinan Muso melancarkan gerakan melawan pemerintahan Sukarno-Hatta. Pada mulanya fokus gerakan hanya di Solo dan Madiun, tetapi berhasil dipukul mundur oleh TNI hingga ke pelosok-pelosok di Jawa Timur. Dalam gerakan mundur itulah pada November 1948 PKI melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap feodal. Salah seorang yang menjadi korban pembunuhan adalah adik laki-laki Soerjo yang bernama R.M. Sardjoeno yang kala itu menjabat Wedana Sepanjang.

Soerjo yang saat itu tengah berada di Yogyakarta sangat berduka dengan kematian adik tercinta. Pada 10 November 1948 Soerjo berkesempatan ikut memperingati 40 hari kematian sang adik di Madiun. Usai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan, Soerjo berkemas ke Madiun dengan hanya dikawal salah seorang ajudan, Mayor Soehardi, dan sopirnya, Letnan Soenarto. Sejumlah kawannya, termasuk Hatta, menganjurkan Soerjo tidak berangkat ke Madiun karena situasi jalan menuju kota itu belum aman. Namun, Soerjo bersikeras berangkat. Ketika Soerjo baru saja keluar kota Yogyakarta, ban depan mobil tiba-tiba meletus. Ban cadangan pun dipasang dan mobil kembali melaju, tetapi tiba-tiba mogok karena kehabisan bensin. Menjelang Solo, hari mulai gelap. Soerjo dan kedua pendampingnya memutuskan menginap di rumah Soediro, Residen Solo.

Keesokan harinya rombongan kecil Soerjo melanjutkan perjalanan. Pada saat siang hari menjelang sore, mereka melintasi kawasan hutan jati di wilayah Bogo, Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur. Tanpa sepengetahuan mereka, kawasan hutan itu menjadi tempat istirahat sekitar 3.000 prajurit pro-PKI pimpinan Maladi Yusuf. Mobil dihentikan, Soerjo, ajudan dan sopir ditahan. Ikut pula ditahan dua anggota Kepolisian RI, yakni Komisaris Besar M. Doerjat dan Komisaris Soeroko yang pada saat bersamaan juga tengah melewati kawasan tersebut.

Setelah membakar mobil-mobil para tawanan, anggota pasukan Maladi Yusuf menggiring kelimanya ke Kampung Sundi di Desa Bangunrejo Lor, sekitar 5 kilometer dari lokasi mereka dihadang. Pagi hari tanggal 12 November 1948, dalam keadaan hanya memakai celana dalam dan mata tertutup secarik kain, pasukan Maladi membawa tawanan ke tepi Kali Kakah di Dusun Ngandu. Dengan senjata tajam, orang-orang Maladi Yusuf menghabisi satu persatu kelima tawanan tersebut dengan cara memenggal kepala mereka. Jasad Soerjo kemudian dibawa ke Madiun. Atas keinginan keluarga besarnya, Soerjo dikebumikan di pemakaman keluarga besar istrinya di Sawahan, Desa Kapalorejo, Magetan.

18 September 1948 : PKI melakukan pemberontakan di Madiun

3 Oktober 1948 : R.M. Sardjoeno, adik laki-laki Soerjo yang menjadi Wedana Sepanjang dibunuh oleh tentara yang pro PKI.

10 November 1948 : Soerjo berangkat ke Madiun untuk menghadiri 40 hari kematian adiknya.

11 November 1948 : Soerjo bersama kedua pengawalnya ditangkap oleh tentara yang pro PKI di wilayah Jalan Raya Ngawi-Solo

12 November 1948 : Soerjo bersama tahanan tentara PKI lainnya dieksekusi mati di Kali Kakah (masuk wilayah Ngawi).



Soerjo (paling kanan) bersama keluarga besarnya. Dok. Keluarga Besar R.M.T.A. Soerjo

Hari terakhir Gubernur Soerjo



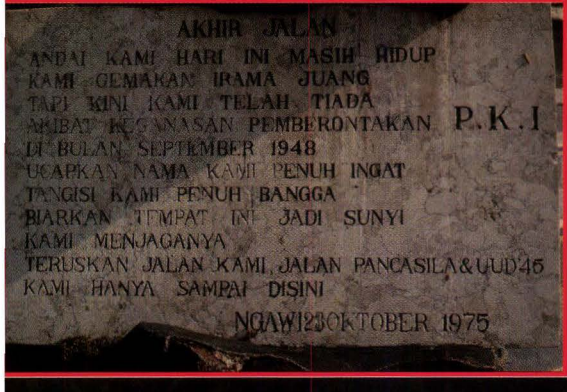

Monumen Eksekusi Gubernur Soerjo di Ngawi, Jawa Timur. Dok. Direktorat Sejarah 2019.

Warga memperingatkan Soerjo soal kemananan sepanjang jalan Ngawi-Solo yang tengah dikuasa tentara pro PKI. Dok. Direktorat Sejarah 2019.



1



2

Rombongan Gubernur Soerjo dihadang oleh tentara pro PKI. Dok. Direktorat Sejarah 2019.

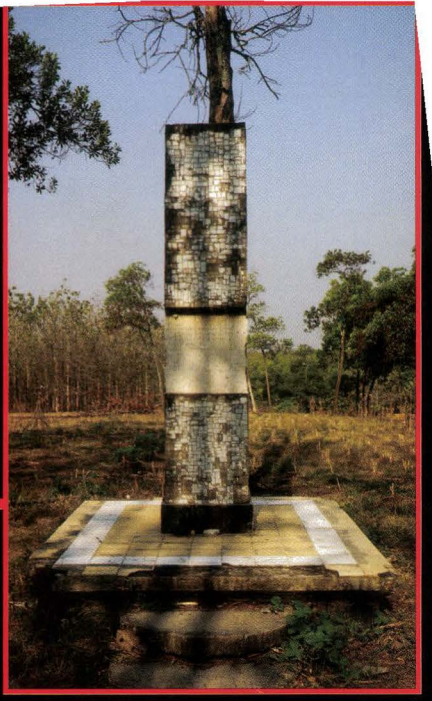

pembakaran mobil Soerjo. Dok. Direktorat Sejarah 2019.

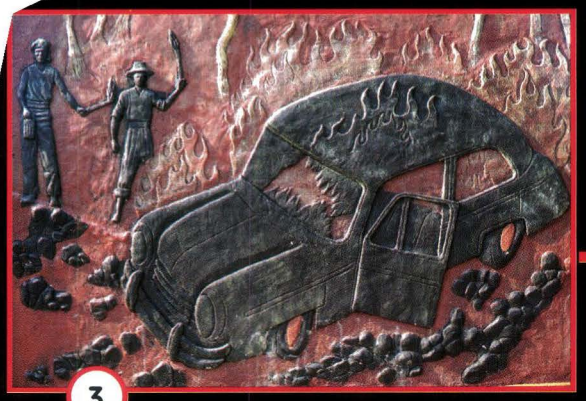

3

Mobil Gubernur Soerjo dibakar. Dok. Direktorat Sejarah 2019.

Soerjo dan rombongan dieksekusi oleh Pasukan PKI di kali Kakah. Dok. Direktorat Sejarah 2019

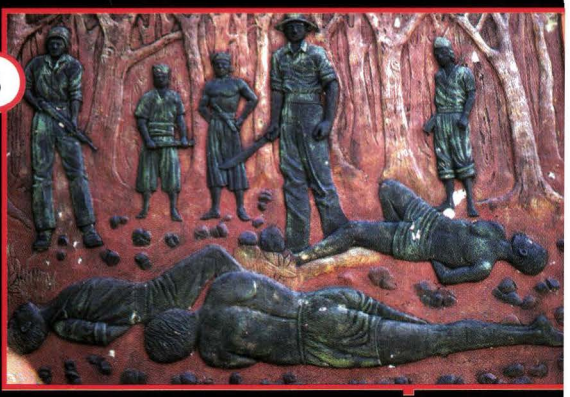

5

4



Soerjo ditawan dan digiring menuju markas tentara pro PKI di Desa Sundi. Dok. Direktorat Sejarah 2019.

Monumen tempat Eksekusi Gubernur Soerjo dan rombongannya. Dok. Direktorat Sejarah 2019

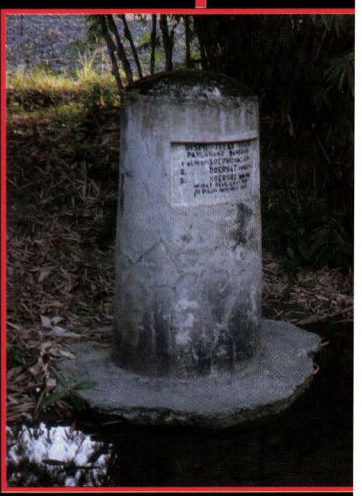



Pangeran Mohamad Noor
Gubernur Kalimantan

"Teruskan.... Gawi kita balum tuntung!
(Teruskan....Kerja kita belum selesai)"

(M. Noor menjelang meninggalnya, 1979)



1. Pangeran Banjar

Pangeran Mohamad Noor (selanjutnya akan disebut P.M. Noor) lahir di Martapura pada 24 Juni 1901 dari pasangan Pangeran Ali dan Ratu Intan binti Pengeran Kesuma Giri. Kedua orang tuanya merupakan keturunan bangsawan Kerajaan Banjar. Gelar pangeran disematkan kepada P.M. Noor yang merupakan penerus tahta Kesultanan Banjar.

Karena seorang ningrat, P.M. Noor dapat mengenyam pendidikan tinggi zaman di kolonial. Ia mengawali pendidikan formal di sekolah rakyat di Kota Barudan Amuntai. Pada 1911 P.M. Noor melanjutkan pendidikan di Hollands Inlandse School (HIS) atau setara dengan sekolah menengah pertama (SMP) di Banjarmasin. Pada tahun 1917 ia melanjutkan pendidikan di Hogere Burger School (HBS) atau setara SMA di Surabaya dan berhasil menyelesaikan ujian akhir di sekolah tersebut pada 1923. Namun, pada tahun itu pula ibunda P.M. Noor, yakni Ratu Intan binti Pangeran Giri, meninggal dunia. Di tengah duka yang mendalam, P.M. Noor menikah dengan Gusti Aminah binti Gusti Mohammad Abi.

Kapasitas intelektual dan kesempatan studi membawa P.M. Noor melanjutkan pendidikan di Technische Hooge School (THS) atau Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Pada 1927, P.M. Noor berhasil menyelesaikan studi di THS sekaligus mencatatkan nama sebagai orang Kalimantan pertama yang berpredikat sarjana. Di sekolah itu pula P.M. Noor aktif dalam organisasi kepemudaan Jong Islamiten Bond (JIB) dan bersua dengan Sukarno yang juga menempuh pendidikan di THS.

P.M. Noor merintis kariernya dengan bekerja sebagai pegawai kolonial di Tegal. Ia diangkat sebagai insinyur sipil pada Department van Verkeer en Waterstaat yang menangani persoalan irigasi. Pada 1929, ia dipindahkan ke Malang dan kemudian kembali dipindahkan ke Batavia. Cukup lama P.M. Noor menimba pengalaman bekerja sebagai teknokrat di Pulau Jawa.

Pada 1933 P.M. Noor kembali ke Banjarmasin yang merupakan kampung halamannya. Ia tidak hanya mendedikasikan keahliannya untuk membenahi irigasi, tetapi juga terjun ke dunia politik sebagai anggota Voolksraad atau Dewan Rakyat Hindia untuk menggantikan posisi ayahnya, yakni Pangeran Ali. P.M. Noor berkhidmat di Volksraad hingga 1939. Pada masa pendudukan Jepang P.M. Noor menetap di Bondowoso sebagai Kepala Irigasi Pakalem-Sampean. Memasuki tahun 1945 P.M. Noor diangkat menjadi wakil Sumobucho atau posisi yang setara dengan Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan/Pekerjaan Umum.

Sebagai seorang tokoh kemerdekaan Indonesia, jejak P.M. Noor setidaknya teridentifikasi tatkala dirinya menjadi salah satu anggota BPUPKI. Dalam buku *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945,* Mohammad Yamin mencatat nama "Tuan Mohamad Noor" atau tertulis "Mohd. Noor" yang mewakili wilayah Kalimantan. Sebagai wakil dari Kalimantan, P.M. Noor memastikan bahwa rakyat Kalimantan mendukung cita-cita kemerdekaan Indonesia.



orneoC18-1

Peta wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan di Kalimantan tahun 1800-1857. Dok. Robert Crib

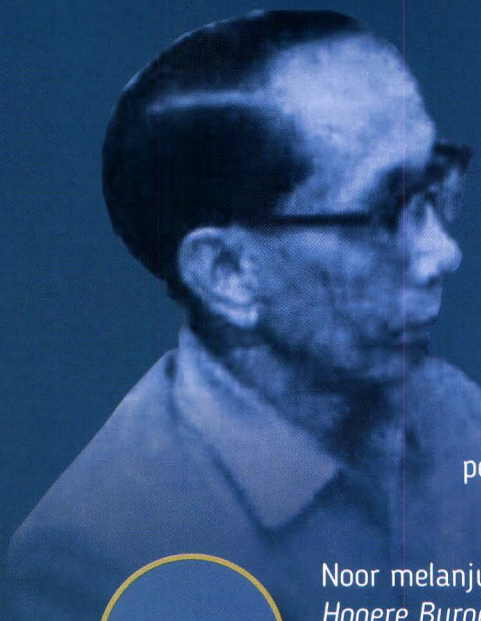

Pangeran Mohamad Noor lahir.

24 Juni 1901

1911

Noor menempuh pendidikan formal awal di Sekolah Rakyat di Kota Baru dan Amuntai. Noor melanjutkan pendidikan di *Hollands Inlandse School* (HIS, setara SMP) di Banjarmasin.

1917

Noor melanjutkan pendidikan di *Hogere Burger School* (HBS, setara SMA) di Surabaya. Dia menyelesaikan ujian akhir pada 1923.

1920an

Noor meniti ilmu perguruan tinggi di *Technische Hooge School* (THS, Sekolah Tinggi Teknik) Bandung pada 1920-an. Noor getol mendalami teknik lingkungan. Di kampusnya, Noor aktif sebagai anggota *Jong Islamieten Bond* (JIB, Ikatan Pemuda Islam).

1927

Noor meraih gelar insinyur sipil dan menjadi orang Kalimantan pertama yang berpredikat sarjana.

1933

Noor kembali ke tanah kelahirannya, Banjarmasin. Selain mendedikasikan keahliannya membenahi irigasi, Noor juga terjun ke politik sebagai anggota Dewan Rakyat Hindia, *Voolkraad* menggantikan posisi ayahnya, Pangeran Ali.




2018
Pemerintah Indonesia menetapkan Noor sebagai pahlawan nasional.
15 Januari 1979
Gubernur pertama Kalimantan ini wafat dan dimakamkan di TPU Karet Bivak berdampingan dengan makam sang istri.
1956–1959
Noor sempat menjadi Menteri Pekerjaan Umum era Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Di masa Orde Baru hingga akhir hayatnya, Noor berkhidmat sebagai wakil rakyat Kalimantan dalam DPR/MPR.
PONTIANAK
BALIKPAPAN
PALANGKARAYA
BANJARMASIN
MARTAPURA
2 September 1945
Gubernur Noor membentuk sebuah badan yang berfungsi membantu tugas-tugas gubernur. Badan itu dinamakan Badan Pembantu Oesaha Gubernur (BPOG).

2. Menjadi Gubernur Kalimantan

Panitia kecil PPKI diketuai Presiden Sukarno. Pada awalnya seorang jurnalis yang bernama Anang Abdul Hamidhan adalah sosok yang ditunjuk menjadi Gubernur Kalimantan. Seperti P.M. Noor, Hamidhan juga berasal dari Kalimantan Selatan. P.M. Noor sendiri diangkat menjadi Wakil Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Namun, Hamidhan menolak tawaran Presiden Sukarno karena tetap ingin berjuang sebagai wartawan. Kemudian, Hamidhan mengusulkan nama P.M. Noor kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Negara Otto Iskandar Dinata untuk menduduki jabatan gubernur. Akhirnya, atas rekomendasi Hatta, P.M. Noor didaulat sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan dengan ibukota Banjarmasin.

Penunjukan P.M. Noor memang lebih cenderung karena hubungan baiknya dengan Hatta. Kerjasama keduanya cukup akrab menjelang hari-hari genting setelah Jepang akan angkat kaki dari Indonesia. P.M. Noor dan Hatta secara solid berkoordinasi menggalang dukungan rakyat Kalimantan di Banjarmasin agar tetap bergabung dalam negara Republik Indonesia. Terlepas dari penolakan Hamidhan, penunjukan P.M. Noor sebagai Gubernur Kalimantan terbilang tepat karena ia memiliki modal kultural sebagai putra bangsawan Kerajaan Banjar. Selain itu, P.M. Noor berpengalaman dalam bidang birokrasi pemerintahan. P.M. Noor juga memiliki hubungan baik dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Namun, menjadi gubernur pada masa revolusi bukan perkara mudah. P.M. Noor harus menghadapi tantangan yang berat, antara lain, karena terbatasnya infrastruktur dan fasilitas untuk menunjang jalannya roda pemerintahan. Selain itu, keadaan di Kalimantan tidak mendukung P.M. Noor untuk menjalankan pemerintahan secara langsung. Dalam situasi perang, praktis membuat P.M. Noor tidak berada di Kalimantan selama revolusi.

Noor dan Hatta. Dok. jejakrekam.com



PROVINSI KALIMANTAN PADA MASA KEMERDEKAAN



Peta Dasar Badan Informasi Geospasial (BIG), 2019

2.1 Keadaan di Kalimantan

Di Kalimantan keadaan yang dihadapi cukup pelik. Belanda berniat kembali berkuasa di Kalimantan yang kaya sumber daya alam. Kalimantan dikenal sebagai daerah penghasil minyak di bagian Timur, pertambangan di bagian Selatan, dan hasil alam di Barat dan Tengah. Wilayah Kalimantan Timur yang kaya minyak bumi bahkan menjadi salah satu medan Perang Asia Timur Raya yang ikut menentukan kekalahan Jepang. Tentara Sekutu telah mendarat di Kalimantan Timur pada Juli 1945 dan sekitar awal Agustus 1945 di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Selatan, tentara Sekutu tiba pada 17 September 1945, satu bulan setelah proklamasi.

Kedatangan pasukan Sekutu bertujuan untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tahanan perang. Dalam misi itu, ikut pula bersama Sekutu Pasukan NICA dari Belanda. Tentara NICA mendapat dukungan dari sekitar 70 tentara KNIL di Kalimantan, baik yang dibebaskan dari tahanan Jepang maupun yang melaporkan diri dan menyatakan bergabung dengan NICA. Selain itu, kedatangan NICA juga diikuti sekitar 160 orang tentara lengkap dengan pegawai sipilnya di bawah pimpinan Mayor A.L. van Assendrep. Mereka langsung menduduki kantor-kantor instansi pemerintahan di Banjarmasin, Kandangan, Barabai, dan Amuntai. Maksud pendudukan itu hendak menegakkan kembali kekuasan Belanda. Persoalan makin bertambah karena Kalimantan terdiri atas beragam kelompok sosial dengan kepentingan yang beragam pula. Tidak sedikit kelompok elite yang cenderung menerima kembali Belanda. Mereka inilah yang menjadi kaki tangan Belanda dalam membangun kembali perangkat pemerintahannya di berbagai wilayah Kalimantan.

Pada Juli 1945 Belanda membentuk Panitia Pembantu Perubahan Pemerintahan Kalimantan Selatan beserta cabang-cabangnya di setiap kota. Kemudian, di Kalimantan Barat dan Timur Belanda menancapkan pengaruh dengan mendekati dan mengangkat kerabat sultan. Kedudukan raja-raja dihidupkan kembali.

Hamid Alkadri dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Pontianak dan menjadi Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Di Kalimantan Selatan, Belanda mengangkat seorang kiai besar sebagai kepala daerah Hulu-Sungai. Situasi memperlihatkan bahwa Belanda menghidupkan lagi alat-alat kekuasan seperti di era kolonial ke seluruh wilayah Kalimantan. Situasi ini belum lagi diperburuk dengan terpecahnya kelompok Republikan di Kalimantan yang berjuang dengan caranya masing-masing.

Karena pasukan Belanda telah menjangkau Kalimantan, P.M. Noor menghadapi sejumlah kesulitan untuk menjangkau daerah yang akan dipimpinnya. Untuk menjalankan tugasnya, Gubernur P.M. Noor membuka Kantor Perwakilan Gubernur Kalimantan yang pertama di Yogyakarta (Jalan Lapangan 2). Di kantor itulah P.M. Noor mengendalikan pemerintahannya dengan segala keterbatasan. Selain dari segi jarak yang jauh dari Kalimantan, urusan keuangan juga jadi persoalan yang tidak kalah pelik. Untuk membiayai perjuangan, P.M. Noor bahkan tidak lagi mempunyai dana pribadi. Atas rekomendasi Hatta, P.M. Noor memperoleh pinjaman dari BNI sebesar dua juta rupiah. Hampir seluruh perjuangan yang diprakarsai P.M. Noor untuk Kalimantan dibiayai dari dana tersebut.

"Cita-cita untuk membangun Kalimantan tidak semata-mata ditujukan untuk Kalimantan sendiri, tetapi terutama dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk memecahkan soal yang maha penting untuk Indonesia, ialah kepadatan penduduk di Jawa."

(Pidato M. Noor mengenai rencana pembangunan Kalimantan dalam DPRS, Jakarta, 2 Oktober 1950)


Peta Pendaratan Tentara Sekutu/Australia di Kalimantan
Sabah
Tarakan
1 Mei 1945
Kuching
Singkawang
Pontianak
Samarinda
Balikpapaan
7 Juli 1945
Banjarmasin
Armada laut
Pasukan darat
Lokasi pendaratan pasukan
Pergerakan pasukan

2.2 Membentuk Badan Perjuangan

Untuk menjalankan pemerintahan di tengah perang, Gubernur Noor membentuk sebuah badan yang berfungsi membantu tugas-tugas gubernur pada 2 September 1945. Badan itu dinamakan Badan Pembantu Oesaha Gubernur (BPOG) yang bertujuan untuk

1) mempersatukan seluruh putra Kalimantan yang berada di Jawa untuk dapat membantu perjuangan rakyat di Kalimantan, baik secara politik, militer, maupun ekonomi;
2) membentuk cabang-cabang BPOG di daerah-daerah yang lain; dan
3) membantu Gubernur Kalimantan dalam melaksanakan tugasnya.

Melalui BPOG, P.M. Noor bermaksud menyatukan seluruh kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik di Kalimantan. Untuk memaksimalkan tugas BPOG, Gubernur P.M. Noor menempatkan markas utama BPOG di Surabaya (Jalan Embong Tanjung 17). Kota Surabaya dinilai strategis untuk mengonsolidasikan kekuatan. Sejumlah pemuda asal Kalimantan telah bergabung dalam berbagai laskar di Surabaya. Selain itu, Surabaya merupakan salah satu basis perjuangan nasional yang penting. Pelabuhan Surabaya yang strategis sebagai titik tolak penyeberangan ekspedisi militer ke Kalimantan telah terkoordinasikan secara baik dengan daerah dan pelabuhan lain. Dengan demikian, letak geografis Surabaya memudahkan penyatuan pejuang Kalimantan dalam satu garis komando gubernur.

P.M. Noor menunjuk G.Obos sebagai ketua dan A. Gani sebagai wakil ketua BPOG. Keduanya dibantu oleh beberapa staf, antara lain, M. Mugni Thalib (keuangan), Gusti Majur (sekretaris), H. Saadiat (tata usaha), H. Ahmad Hasan dan Hassan Thamrin (pembantu). Kemudian, BPOG membuka cabang di Jakarta dan dipimpin oleh G. Djohan dan Firmansyah, dan Bandung di bawah pimpinan M. Rasyid dan Guru Barmawi. Pembukaan cabang-cabang itu bertujuan mempersatukan dan mengoordinasikan putra-putra Kalimantan di seluruh Pulau Jawa di tengah minimnya anggaran dana dan keterbatasan saluran komunikasi. Di tengah keterbatasannya, BPOG berhasil mengirimkan bantuan logistik kepada para pejuang di Kalimantan melalui pedagang yang berniaga di Pulau Jawa. Tercatat lima kali ekspedisi yang dilakukan oleh BPOG, diantaranya, ekspedisi Rahadi Usman ke Kalimantan Barat (1945), ekspedisi Firmansyah ke Kalimantan Selatan



Kantor Perwakilan Gubernur Kalimantan di Surabaya, Dok. Direktorat Sejarah, 2019.

(1946), ekspedisi Kapten Mulyono ke Kalimantan Selatan (1946), ekspedisi Tjilik Riwut ke Kalimantan Tengah (1946), dan ekspedisi Mustafa Ideham ke Kalimantan Selatan (1946). Akan tetapi, pengiriman bantuan itu tidak selalu tepat sasaran. Gubernur P.M. Noor menyadari bahwa selalu terdapat orang-orang oportunistis yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan di tengah perjuangan. Peninjauan BPOG ke lapangan pun dilakukan.

Pada akhir Oktober 1945 Gubernur P.M. Noor bersama staf dan anggota BPOG bergabung dengan kurang lebih 120 orang pemuda Kalimantan yang telah berada di Surabaya. Sesuai dengan rencana awal, rombongan P.M. Noor akan bertolak dari Pelabuhan Gresik ke Samarinda dengan menumpang kapal Merdeka. Rombongan P.M. Noor mendapat dukungan dari Residen Surabaya, Sudirman, dan Radio Surabaya yang membekali dua buah pemancar radio sebagai perangkat komunikasi selama di perjalanan. Akan tetapi, rombongan gagal berangkat karena terjadi pertempuran antara pasukan tentara Republik Indonesia dan tentara Inggris Gurkha. Kapal Merdeka terkena tembakan dan dalam posisi miring sehingga tidak layak untuk berlayar. Akhirnya, P.M. Noor dan anggota yang menyertainya tertahan di Surabaya.

Seperti mendapat kesempatan mendadak, para pemuda Kalimantan anggota rombongan ikut serta dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Sementara itu, Noor kembali ke Yogyakarta untuk menjalankan pemerintahan daerahnya merangkap sebagai penasihat presiden dalam Dewan Pertimbangan Agung. Kegagalan Gubernur P.M. Noor beserta rombongan ke Kalimantan berarti kegagalan mendirikan pemerintahan sipil di sana. Meskipun demikian, kegagalan itu menjadi pelajaran berharga bagi P.M. Noor untuk menyusun rencana berikutnya.



Pasukan MN 1001, Dok. Wadiji

2.3 Pembentukan Pasukan MN 1001

Setelah memperhatikan perkembangan politik dan keamanan, P.M. Noor berpikir untuk membentuk korps khusus kemiliteran. Pasukan itu dirancang untuk mengefektifkan pelaksanaan instruksi gubernur sekaligus menjadi perwakilan pemerintahan di Kalimantan. Organisasi militer itu diisi oleh orang-orang sipil terlatih. Pasukan khusus ini berlatih teknik tempur bersama pasukan Pesindo Kalimantan dan Hisbullah Kalimantan pimpinan Mustafa Ideham di Solo. Setelah dilatih selama tiga bulan, pasukan khusus tersebut siap dikirim ke Kalimantan. Pasukan khusus yang dibentuk Gubernur P.M. Noor ini dinamakan Pasukan MN 1001. Mereka berasal dari pemuda-pelajar Kalimantan yang dipersiapkan terjun ke palagan Kalimantan. Sebutan Pasukan MN 1001 merupakan singkatan nama Mohammad Noor, sedangkan arti 1001 adalah cara atau jalan yang bermakna banyak cara atau jalan perjuangan.

Seorang putra Dayak bernama Tjilik Riwut ditunjuk sebagai Komandan Pasukan MN 1001. Penunjukan Tjilik Riwut adalah contoh terbaik untuk melihat upaya P.M. Noor membangun prinsip multikulturalisme dalam perjuangan. Dalam sejarah, kedua etnik ini memperlihatkan kontestasi dari waktu ke waktu.

Pada 12 Januari 1946 P.M. Noor membuat surat perintah kepada Tjilik Riwut untuk berangkat ke Kalimantan. Dalam surat perintah itu disebutkan bahwa Gubernur Provinsi Kalimantan memberi kuasa kepada Tjilik Riwut untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi pembelaan dan pembangunan negara di daerah Kalimantan. Selain itu, seluruh pegawai negeri dan masyarakat juga diimbau untuk dapat membantunya. Surat perintah tersebut diberikan kepada Tjilik Riwut pada 16 Januari 1946. Untuk melaksanakan tugas itu, Gubernur P.M. Noor memberi dana sebesar Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) dan satu pucuk senapan untuk keamanan.

Pasukan MN 1001 tiba di Sungai Tabuk pada 6 Maret 1946. Kedatangan pasukan MN 1001 di sana disambut oleh para pemuda dan rakyat setempat. Sambutan pertama yang luar biasa itu disebabkan oleh pandangan masyarakat setempat bahwa pasukan MN 1001 adalah representasi P.M. Noor dan merupakan utusan pemerintah pusat yang sering diasosiasikan sebagai "orang merah putih". Pada malam harinya diadakan rapat untuk memberi penerangan dan gambaran mengenai kemerdekaan Indonesia yang belum lama diproklamasikan. Selain itu, rapat tersebut menjadi forum untuk memperkenalkan visi dan misi Gubernur Kalimantan sekaligus pembentukan Pasukan MN 1001 di daerah itu.

Dari Sungai Tabuk, Tjilik Riwut memimpin rombongan sebanyak 19 orang dengan berjalan kaki menuju Kotawaringin sekitar pukul 03.00 dinihari. Di tengah perjalanan mereka bertemu pasukan Pesindo pimpinan Husin Hamzah di Teluk Bogan. Kemudian, Mereka berbagi tugas dalam tiga kelompok: (1) kelompok Tjilik Riwut dengan tujuan ke Kotawaringin; (2) kelompok yang tergabung dalam pasukan Pesindo pimpinan Husin Hamzah; dan (3) kelompok Yusuf Mubarak dengan tujuan ke Ketapang, Kalimantan Barat. Secara bersama-sama mereka menyebarkan informasi pembentukan pemerintahan sipil di daerah tujuan masing-masing.

Sejak kedatangannya di Kalimantan, pasukan MN 1001 berhasil membentuk basis pertahanannya di berbagai wilayah mulai dari Sungai Tabuk di Kalimantan Barat hingga Balikpapan di Kalimantan Timur. Jumlah anggota Pasukan MN 1001 terbanyak berada di daerah Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan. Pasukan ini juga disebut Pasukan MN 1001 daerah Banjar. Dari MN 1001, P.M. Noor mencetuskan gagasan untuk membentuk pasukan payung (*para troops*) untuk menembus blokade laut Belanda di Kalimantan. Pada 1947 P.M. Noor menginisiasi pembentukan armada ALRI Divisi IV yang dipimpin oleh Kolonel Zakaria Madun yang kemudian diteruskan oleh Hassan Basry.

2.4 Linggajati dan Akhir Jabatan

Perjanjian Linggajati diselenggarakan pada 11–13 November 1946. Hasil perundingan itu sendiri diratifikasi 25 Maret 1947 di Istana Negara. Dalam perundingan itu, Belanda mengakui kedaulatan *de facto* Republik Indonesia meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. Sementara itu, wilayah lainnya, termasuk Borneo (Kalimantan), digabungkan kedalam negara federal bentukan Belanda.

Rakyat Kalimantan merespon secara negatif hasil Perjanjian Linggajati. Barisan perjuangan, termasuk Pasukan MN 1001, enggan mengakui perjanjian itu sekalipun Pemerintah Pusat telah menandatanganinya. Rakyat Kalimantan beranggapan bahwa perjuangan mencapai kemerdekaan tidak bisa dibatasi dengan kesepakatan Linggajati. Sebaliknya, pasca-Linggajati Belanda dengan gigih berupaya memaksakan pendirian "Negara Kalimantan". Untuk itu, Belanda terlebih dahulu membentuk daerah otonom Kalimantan Tenggara dan Banjar yang dilengkapi dengan Dewan Banjar. Rencana pembentukan Negara Kalimantan telah mengakibatkan sikap rakyat Kalimantan Selatan terbagi dalam tiga golongan. *Pertama* adalah golongan yang pro-Belanda, yakni mereka yang merasa berutang budi dan merasa perlu setia kepada Belanda. Pada umumnya mereka berasal dari kaum feodal yang mempertahankan kedudukannya di birokrasi pemerintahan secara turun-temurun sebagai hadiah dari sistem kolonial Belanda di masa lalu. *Kedua* adalah golongan federal, yakni golongan yang mendukung ide pemerintah kolonial Belanda untuk mendirikan Negara Kalimantan di luar negara Republik Indonesia. *Ketiga* adalah golongan unitarisme, yakni golongan yang bercita-cita ke arah negara kesatuan. Golongan ini adalah kaum Republikan yang bercita-cita menjadikan Kalimantan bagian dari Republik Indonesia.

Golongan unitarisme sendiri terbagi menjadi dua, yakni golongan bersenjata dan golongan politik. Golongan bersenjata merupakan pejuang yang bergerilya di hutan-hutan yang menentang kekuasaan Belanda dengan bertempur secara



Pimpinan ALRI Divisi IV di Tuban, bersama Gubernur P.M. Noor. Dok. repro buku: Hassan Basry.

fisik. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pasukan MN 1001 dan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Sementara itu, golongan politik secara legal dan kooperatif berjuang melalui saluran politik. Sebagai anggota Dewan Banjar, mereka menentang pembentukan Negara Kalimantan. Golongan ini terdiri dari Partai Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) dan Partai Serikat Muslimin Indonesia (Sermi). Yang termasuk juga dalam golongan ini adalah kelompok wanita bernama Persatuan Tindakan Wanita Indonesia (Pertiwi).

Dalam menyikapi perkembangan politik setelah Linggajati, beberapa angota SKI menemui Gubernur P.M. Noor untuk melaporkan keadaan perjuangan di Kalimantan Selatan. Mereka melaporkan bahwa rakyat Kalimantan Selatan baik dari golongan gerilyawan maupun dari golongan politik yang terhimpun dalam Partai SKI kompak menghadapi Belanda. Atas nama SKI, mereka menyampaikan sebuah pernyataan kepada Wakil Presiden Hatta berupa dukungan dan kesetiaan terhadap Republik Indonesia. Di sisi lain, konsekuensi Perjanjian Linggajati menjadikan Kalimantan berada di luar kekuasaan politik dan hukum Republik Indonesia. Dengan sendirinya, kedudukan Gubernur Kalimantan tidak ada lagi dalam struktur pemerintahan. Jabatan itu dihapuskan berdasarkan Penetapan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1947. Oleh karena itu, P.M. Noor berhenti menjadi Gubernur Kalimantan.

Menurut perhitungan P.M. Noor, lebih realistis jika markas perjuangannya dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta. Sebabnya, di Jakarta tersedia segala fasilitas untuk melaksanakan infiltrasi politik. Setelah hijrah ke Jakarta, P.M. Noor mendirikan Yayasan Dharma. Dia bergiat dalam bidang penerbitan dan propaganda. Salah satu warta andalanny adalah mingguan *Mimbar Indonesia*. Warta ini bertujuan memberikan penerangan serta menanamkan keinsyafan bernegara, terutama bagi rakyat Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda.

Meskipun tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan, P.M. Noor tetap melakukan konsolidasi dengan Pasukan MN 1001. Di Kalimantan Pasukan MN 1001 telah berganti nama menjadi partai politik bernama Mandau Talabang Kalimantan (MTK). Sebutan MTK kemudian diubah menjadi pasukan MTKI atau Pasukan Mandau Talawang Kalimantan Indonesia. P.M. Noor mendukung MTKI dengan memberi bantuan berupa pembelian sekitar seribu pucuk senjata di Filipina dan Singapura. Dalam perkembangannya, Pasukan MTKI menjelma menjadi kelompok gerilya dengan jumlah pasukan yang besar tersebar di berbagai kawasan di Kalimantan. Pasukan ini merupakan kekuatan revolusi terbesar kedua setelah ALRI Divisi IV Kalimantan. Sepanjang 1947 hingga 1949 MTKI sering terlibat kontak senjata dengan pasukan NICA dan KNIL.

3. Akhir Hayat

Di tengah krisis revolusi kiprah P.M. Noor sebagai gubernur dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan memperlihatkan hasil yang signifikan. P.M. Noor berupaya membangun persatuan dan kesatuan di Kalimantan yang multietnis. Pasukan yang dibangunnya berhasil membuka cabang di seluruh wilayah Kalimantan dan hasilnya beragam kelompok dapat disatukan dalam satu wadah perjuangan. Pembentukan BPOG dan Pasukan MN 1001 adalah terobosan penting sebagai produk kebijakan P.M. Noor sebagai gubernur. Tidak salah apabila dikatakan bahwa P.M. Noor telah membangun imajinasi kebangsaan di Kalimantan pada masa revolusi. Tidak hanya bagi daerahnya, P.M. Noor juga menyumbang kontribusi bagi pemerintah pusat dengan membendung pengaruh propaganda Belanda.

Pada 1947 P.M. Noor bekerjasama dengan tokoh nasionalis lain seperti Sukardjo Wirjopranoto dan Mr. Soepomo dalam menghidupkan *Mimbar Indonesia*. Segmen pembaca yang disasar *Mimbar Indonesia* adalah rakyat Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda. Di wilayah yang dikuasai Belanda, rakyat terpecah, terutama setelah Perjanjian Linggajati. Media ini berperan besar dalam menggaungkan seruan integrasi Republik serta menolak konsep negara federal buatan Belanda.

Meskipun tidak lagi aktif sebagai gubernur sejak 1947, jabatan itu baru ditanggalkan P.M. Noor pada 1950. Serah terima jabatan gubernur Kalimantan setelah Noor baru bisa dilaksanakan pada masa pengakuan kedaulatan. Pada 1956–

1959 Noor sempat menjadi Menteri Pekerjaan Umum pada era Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Pada masa Orde Baru hingga akhir hayatnya, Noor berkhidmat sebagai wakil rakyat Kalimantan dalam DPR/MPR.

Gubernur pertama Kalimantan ini wafat di Jakarta 15 Januari 1979. Pangeran Mohammad Noor dimakamkan di TPU Karet Bivak yang berdampingan dengan makam sang istri.

Pada 2010 jasad Noor beserta istrinya dibawa kekampung halaman di Martapura atas permintaan keluarga. Di Kompleks Pemakaman Sultan Adam itulah jasad P.M. Noor menempati pusara terakhirnya. Pada 2018 Pemerintah Indonesia menetapkan P.M. Noor sebagai pahlawan nasional. Dengan demikian, Noor menambah deretan pahlawan nasional dari etnis Banjar setelah Pangeran Antasari, Hassan Basry, dan Idham Chalid.

"Bung Hatta meminta kepada saya untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman saya sebagai seorang insinyur irigasi untuk menjadikan padang dan alang-alang itu sawah yang subur. Lupa perang, lupa pemboman, hanya pembangunan yang diperhatikan! Sejak itulah berkembang ide cita-cita ke arah suatu konsepsi untuk pembangunan Kalimantan."
(Perbincangan antara Bung Hatta dan M. Noor dalam perjalanan di pesawat menuju Kalimantan, 1945)



Pemindahan makam M. Noor dari TPU Karet Bivak, Jakarta ke Martapura, Kalimantan Selatan. Dok. BPNB Kalimantan Barat



I Gusti Ketut Pudja

Gubernur Sunda Kecil

"Jangan pernah meminta apapun kepada negara. Tetapi jika negara memberimu sesuatu, terimalah dan hormatilah pemberian itu..."

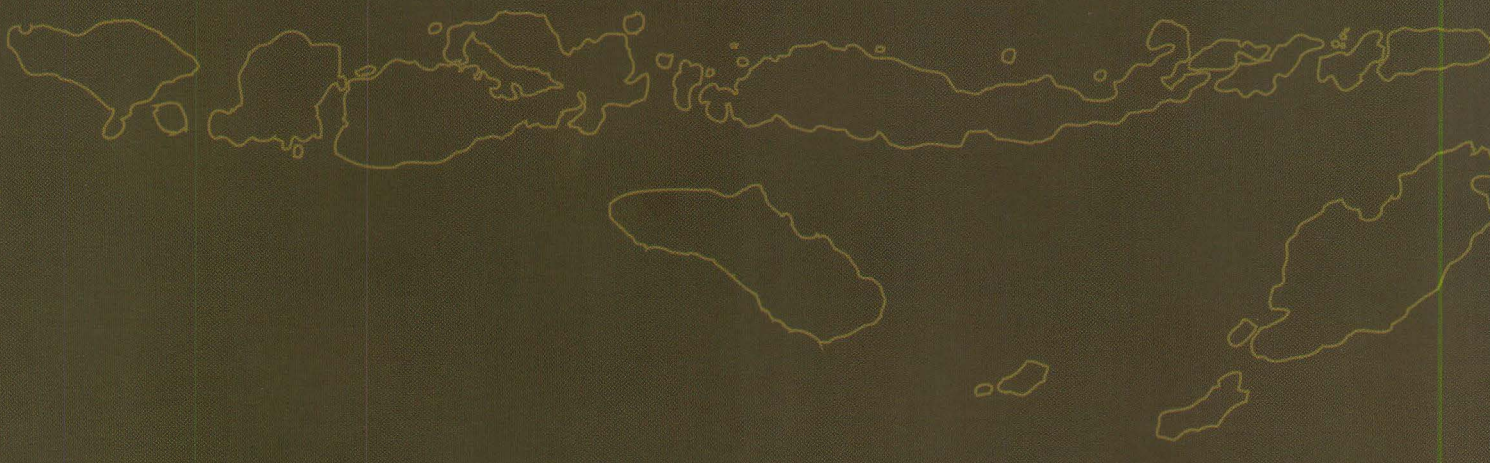

1. Kiprah Sebelum Gubernur

I Gusti Ketut Pudja lahir di lingkungan Puri Sukasada, Buleleng, pada 19 Mei 1908. Ayahnya seorang *punggawa* bernama I Gusti Nyoman Raka dan ibunda Pudja bernama Jero Ratna Kusuma. Kendati ayahnya adalah sosok yang sangat memperhatikan pendidikan, ia tidak menyekolahkan Pudja di sekolah milik pemerintah, yakni Tweede Klasse School yang telah ada di Singaraja sejak 1875. Sejak kecil Pudja mendapat pendidikan membaca, menulis, dan berhitung dari seorang mantri candu yang dipanggil datang ke rumah oleh orang tuanya. Di sisi lain, Ibunda Pudja merupakan putri I Nyoman Gempol, seorang kepala desa di Banjar Jawa. Gempol ikut memimpin pemberontakan besar yang sangat mencemaskan pemerintah Belanda di Banjar Jawa pada 1858. Pemerintah Belanda harus mengerahkan satu batalion untuk menyerbu Banjar Jawa dan menangkap Gempol dan kawan-kawannya. Sebagai hukuman ia dibuang ke Padang. Di rantau ia menikah dengan Sa'adiyah Alimatu, seorang muslimah asli dari Minangkabau dan menjadi seorang muslim.

Sebagai anak bangswan, Pudja memiliki kesempatan dalam mengenyam pendidikan terbaik. Pada 1914 Ayah Pudja mendaftarkan putranya ke Hollandsch Inlandsche School (HIS) saat Pudja berusia 6 tahun. HIS bersifat eksklusif sehingga hanya mereka yang berasal dari keluarga kerajaan atau bangsawan yang diperbolehkan bersekolah di HIS. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan di HIS selama tujuh tahun dengan nilai tinggi dan melanjutkan pendidikan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Malang. Setelah menyelesaikan pendidikan di MULO, Pudja kemudian melanjutkan pendidikan di Algemeene Middelbare School (AMS) Bagian A di Bandung pada 1926. Ketika memasuki ranah pendidikan tinggi, Pudja memilih untuk menempuh ilmu di RHS (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia, yang kini menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selama belajar di RHS, Pudja tinggal di asrama mahasiswa di daerah Guntur, Menteng dan setelah mencapai sarjana muda ia pindah ke Studentenhuis di Jalan Pegangsaan Timur 17. Kedua asrama itu cukup istimewa karena banyak mahasiswa berbagai suku bangsa dari kota-kota lain di Hindia Belanda yang tinggal di sana. Mereka bergaul secara leluasa dan berbincang-bincang tentang nasionalisme dan kolonialisme. Pudja sendiri lulus dari RHS dalam waktu lima tahun. Ia adalah orang Bali pertama yang memperoleh gelar Meester in de Rechten. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan di RHS, ayah Pudja memintanya pulang ke Bali.



Mr Pudja saat melangsungkan perkawinan dengan I Gust Ayu Made Mirah (masih saudara sepupu) 1935 Januari. Dok. Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

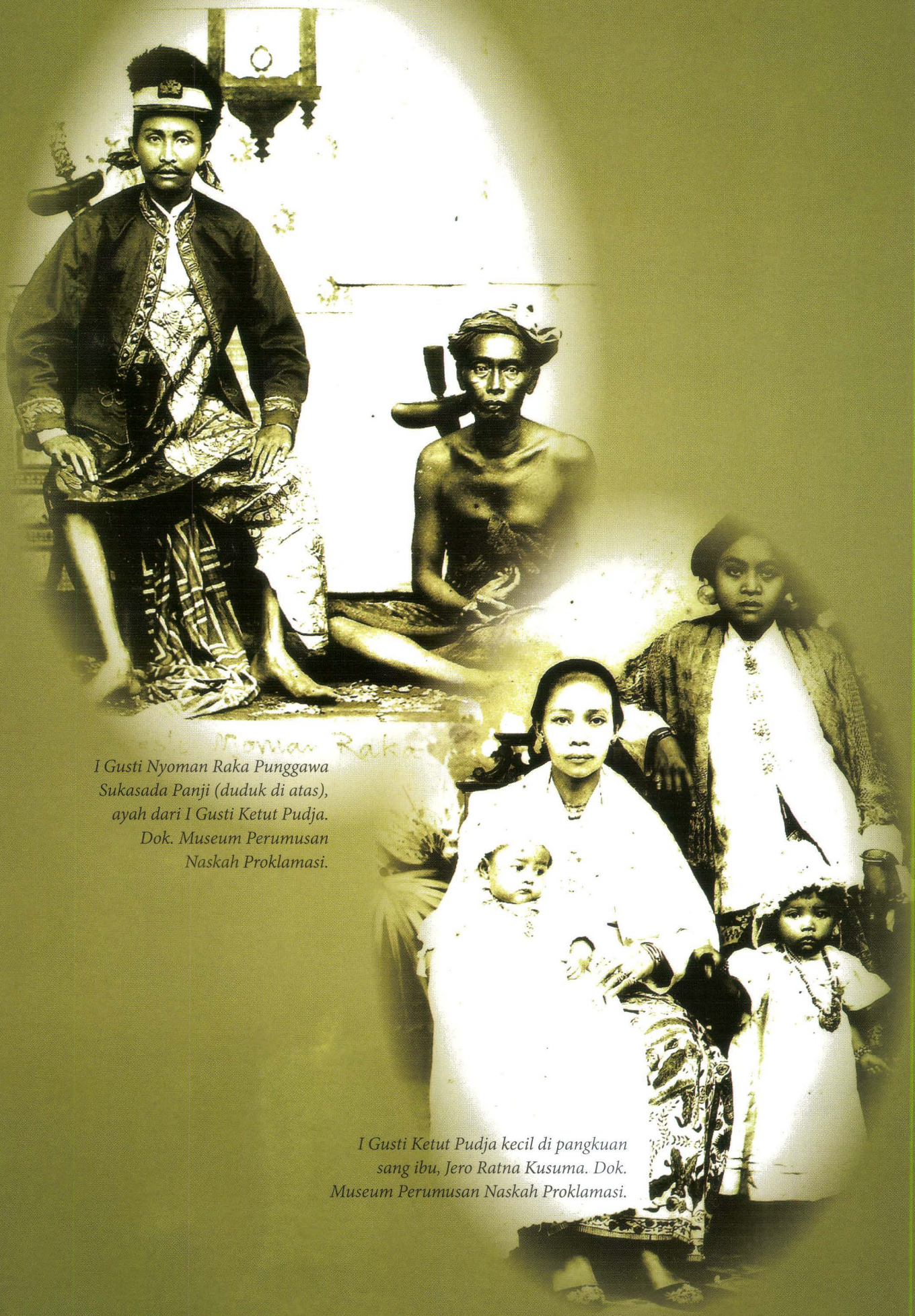

I Gusti Nyoman Raka Punggawa Sukasada Panji (duduk di atas), ayah dari I Gusti Ketut Pudja. Dok. Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

I Gusti Ketut Pudja kecil di pangkuan sang ibu, Jero Ratna Kusuma. Dok. Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

I Gede Ketut Pudja lahir.

19 Mei 1908

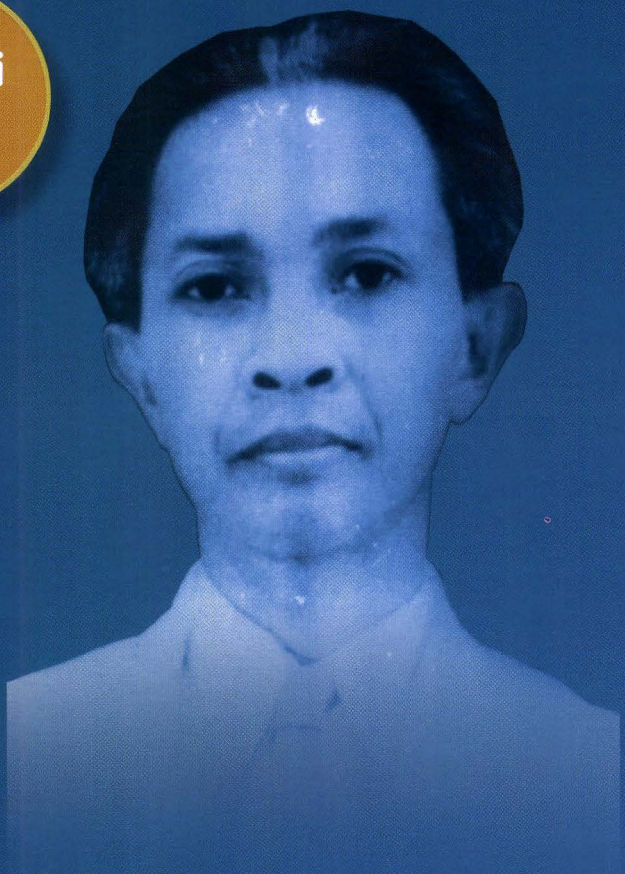

1926, Pudja dikirim ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, Algemeene Middelbare School (AMS) Bagian A di Bandung,

1926

Segera setelah tiba di Bali pada awal 1935, Pudja bekerja secara suka rela di kantor Residen Bali dan Lombok di Singaraja untuk mengawasi Volkscrediet Bank (Bank Perkreditan Rakyat].

1935



Pudja dibebaskan pada 13 Maret 1948, tetapi ia tidak kembali ke Bali melainkan langsung membantu Presiden Sukarno untuk urusan pemerintahan di dalam negeri ketika pemerintah Republik dialihkan ke Yogyakarta.

13 Maret 1948

Empat hari kemudian Perwira Komando AMACAB, J. A. van Beuge, dan stafnya mengadakan pertemuan dengan Gubernur Pudja dan seluruh jajaran pemerintahannya di Singaraja. Mereka menyatakan bahwa tugas mereka di Bali adalah membebaskan tawanan Jepang, melucuti prajurit Jepang, dan memulangkan mereka ke negerinya.

6 Maret 1946

Pada 6 Oktober, dengan dikawal massa pemuda dan didampingi semua kepala kantor jawatan pemerintahan, Gubernur Pudja mendatangi kediaman Minseibu Chōkan di Singaraja dan menyampaikan ultimatum yang sudah dibicarakan.

6 Oktober 1945

14 Agustus 1945

Pudja ditunjuk oleh pejabat Minseibu untuk mewakili Sunda Kecil dan diperintahkan berangkat ke Jakarta pada 14 Agustus. Kemungkinan ia diutus karena perannya yang penting sebagai penasihat pemerintah Jepang di Syu Kaigi.

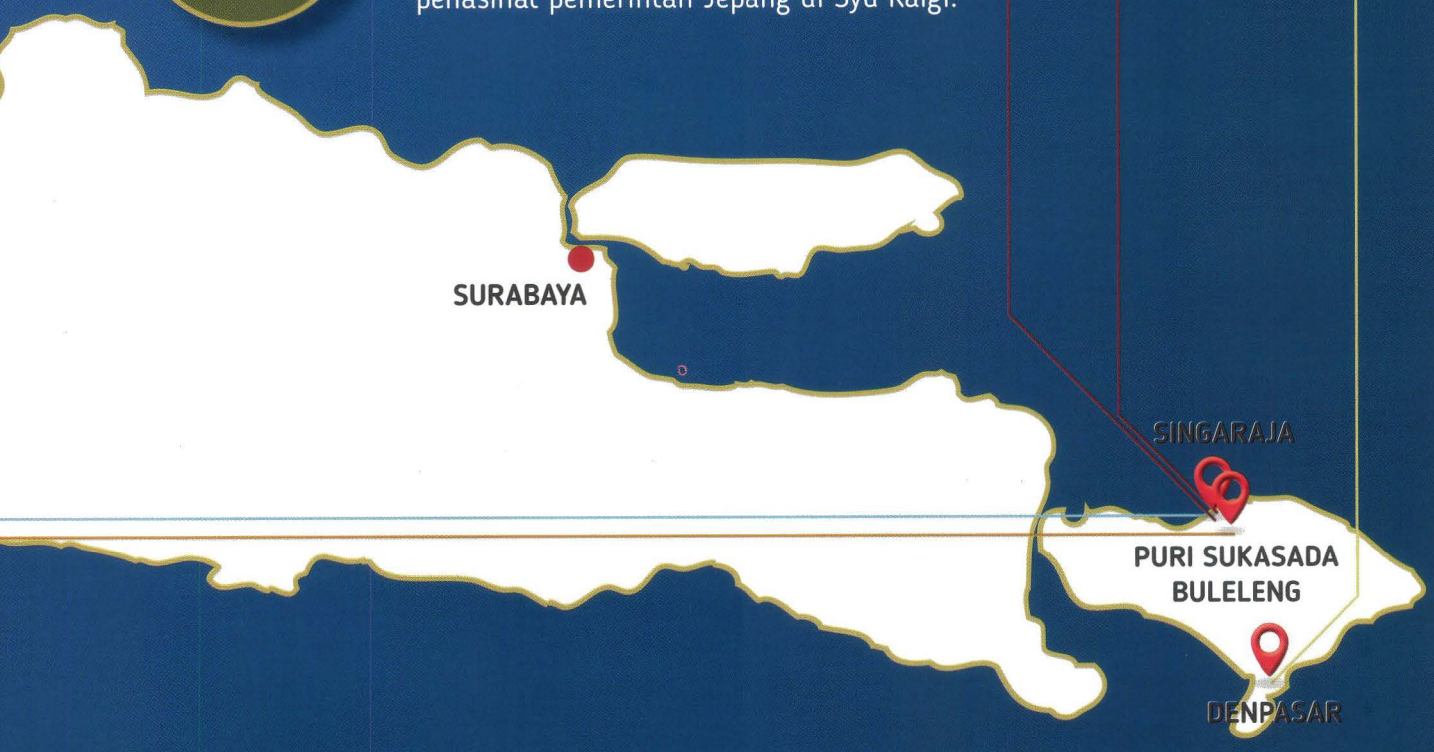

Jenjang Pendidikan yang Ditempuh:

1. Sekolah di rumah (home schooling)
2. HIS (Hollandsch Inlandsche School) di Singaraja
3. MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Malang
4. AMS (Algemeene Middelbare School) Bagian A di Bandung
5. Rechtshogeschool di Bandung

Catatan: Pudja lulus dari RHS dalam waktu lima tahun. Ia adalah orang Bali pertama yang memperoleh gelar *Meester in de Rechten*.

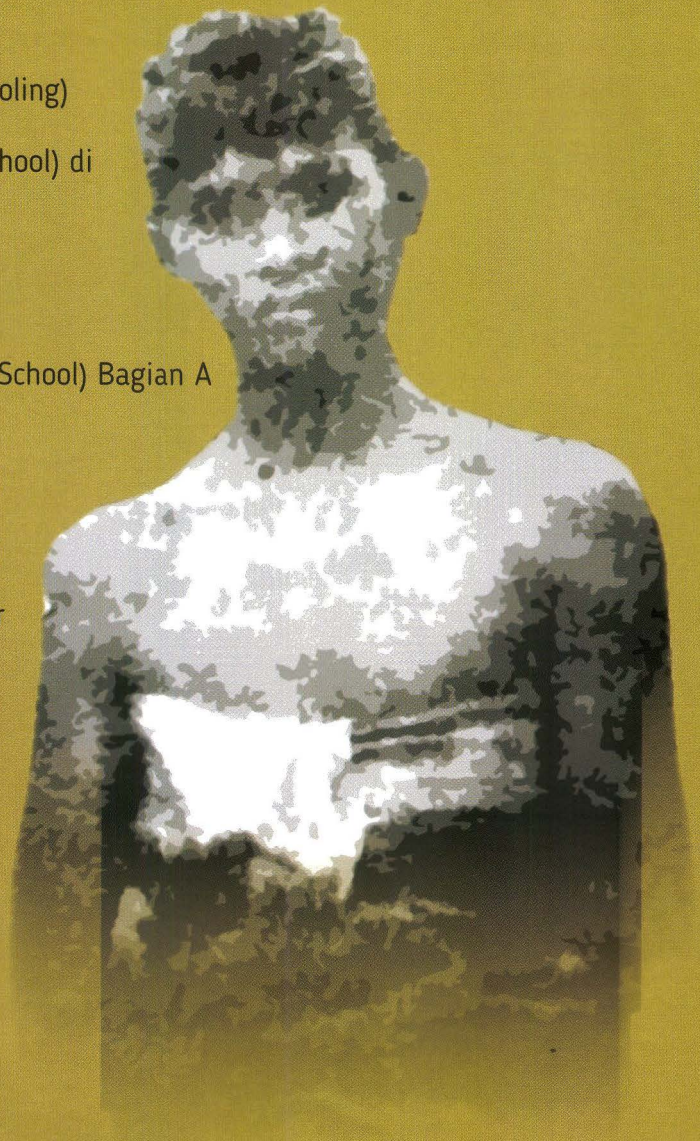

1.1 Sebagai Pegawai Hindia Belanda

Bali yang ditinggalkan Pudja pada awal 1920-an sudah banyak berubah ketika ia kembali pada 1934. Pemerintah kolonial berusaha menata Bali dan masyarakatnya sedemikian rupa agar tercapai keamanan dan ketertiban di seluruh Hindia Belanda. Segera setelah tiba di Bali pada awal 1935 Pudja bekerja secara sukarela di kantor Residen Bali dan Lombok di Singaraja untuk mengawasi Bank Perkreditan Rakyat(Volkscrediet Bank). Dua tahun kemudian ia diperbantukan sebagai tenaga cadangan di Raad van Kerta, yakni lembaga peradilan adat yang menangani perkara ringan dan mengatur tata tertib kerajaandi Denpasar.



Mr. I Gusti Ketut Pudja (berdiri ketiga dari kiri) saat berdinas di Pengadilan Negeri Badung (Lieed Kerta). Dok. Museum Perumusan Naskah Proklamasi.



Jenjang Karier

1935 : Pekerja sukarela Kantor Residen Bali dan Lombok di Singaraja untuk mengawasi *Volkscrediet Bank* (Bank Perkreditan Rakyat]

1937 : Diperbantukan sebagai tenaga cadangan pada Raad van Kerta, lembaga peradilan adat yang menangani perkara ringan dan mengatur tata tertib kerajaan, di Denpasar sekaligus hakim di Raad van Kerta Badung.

1942 : Diangkat oleh Pemerintah Militer Jepang sebagai sebagai *Rijikan-dairi* atau Penasehat Residen untuk Bali dan Lombok sekaligus sebagai Kepala Daerah Bali Utara.

1945 : Diangkat oleh Pemerintah RI sebagai Gubernur Sunda Kecil.

1948 : Diangkat sebagai pejabat RI untuk urusan dalam negeri.

1950 : Menteri Kehakiman NIT

1951 : Diangkat sebagai Gubernur Sunda Kecil

1.2 Sebagai Pegawai di Era Pendudukan Jepang

Pada 8 Maret 1942 Letnan Jendral Hein Ter Poorten, Panglima KNIL, mewakili Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer menyerah tanpa syarat kepada penguasa militer Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Untuk membantu menghidupkan kembali pemerintahan sipil di Bali, pimpinan AD Jepang menunjuk Ketut Pudja, yang sudah menjadi hakim di Raad van Kerta Badung, sebagai *rijikan-dairi* atau penasehat residen. Bali tetap dikelola bersama Lombok dalam satu Karesidenan yang disebut Syo Sunda Minseibu dan dipimpin oleh seorang *chōkan*–setara dengan residen pada zaman Belanda–berkebangsaan Jepang yang berkantor di Singaraja. *Minseibu Chōkan* bertanggung jawab kepada panglima militer (*shireikan*) yang bermarkas di Denpasar. Bali dibagi menjadi dua wilayah militer: Bali Utara yang mencakup kerajaan-kerajaan (*syu*) Buleleng dan Jembrana dan Bali Selatan yang mencakup enam kerajaan lainnya. Raja-raja Bali diberi



Mr. I Gusti Ketut Pudja (baris pertama paling kiri), pada saat pelantikan dirinya sebagai Kepala Pemerintahan Swa Praja Rizikan Dairi. Dok. Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

nama *syuco* dan dalam memerintah didampingi oleh penasihat Jepang (*bunken kanrinkan*) yang tugasnya mirip dengan kontrolir zaman Belanda.

Dewan raja-raja yang dibentuk Belanda pada 1938, yakni Paruman Agung, dipertahankan sebagai wadah komunikasi antara pihak kerajaan dan penguasa militer Jepang. Pudja sendiri kemudian ditunjuk menjadi kepala daerah Bali Utara, sedangkan untuk Bali Selatan ditunjuk I Putu Serangan.Atas desakan Sukarno dan Hatta pemerintah pendudukan Jepang mendirikan badan propaganda baru, yaitu Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Putera bertujuan untuk mengajak berbagai organisasi nasionalis yang sudah ada bekerja sama mendukung Jepang melawan Sekutu. Tidak lama setelah Putera bekerja, pemerintah mendirikan Chuo Sangi-in (Dewan Pertimbangan Pusat), semacam dewan perwakilan rakyat, tetapi tidak memiliki wewenang membuat undang-undang. Lembaga serupa juga didirikan di tingkat Karesidenan dengan nama Shu Sangi-kai (Dewan Pertimbangan Karesidenan). Namun, khusus untuk Karesidenan Bali-Lombok, lembaganya bernama Syu Kaigi dan Pudja ditunjuk menjadi penasihat umum.

Sejak pertengahan 1942 penguasa Jepang di Indonesia kemudian melipatgandakan segala upaya produksi dan pengumpulan bahan-bahan sandang pangan dan kebutuhan industri perang. Di Bali dari raja hingga pegawai di tingkat desa menjadi ujung tombak mobilisasi logistik itu dan berhadapan langsung dengan rakyat, terutama petani, untuk

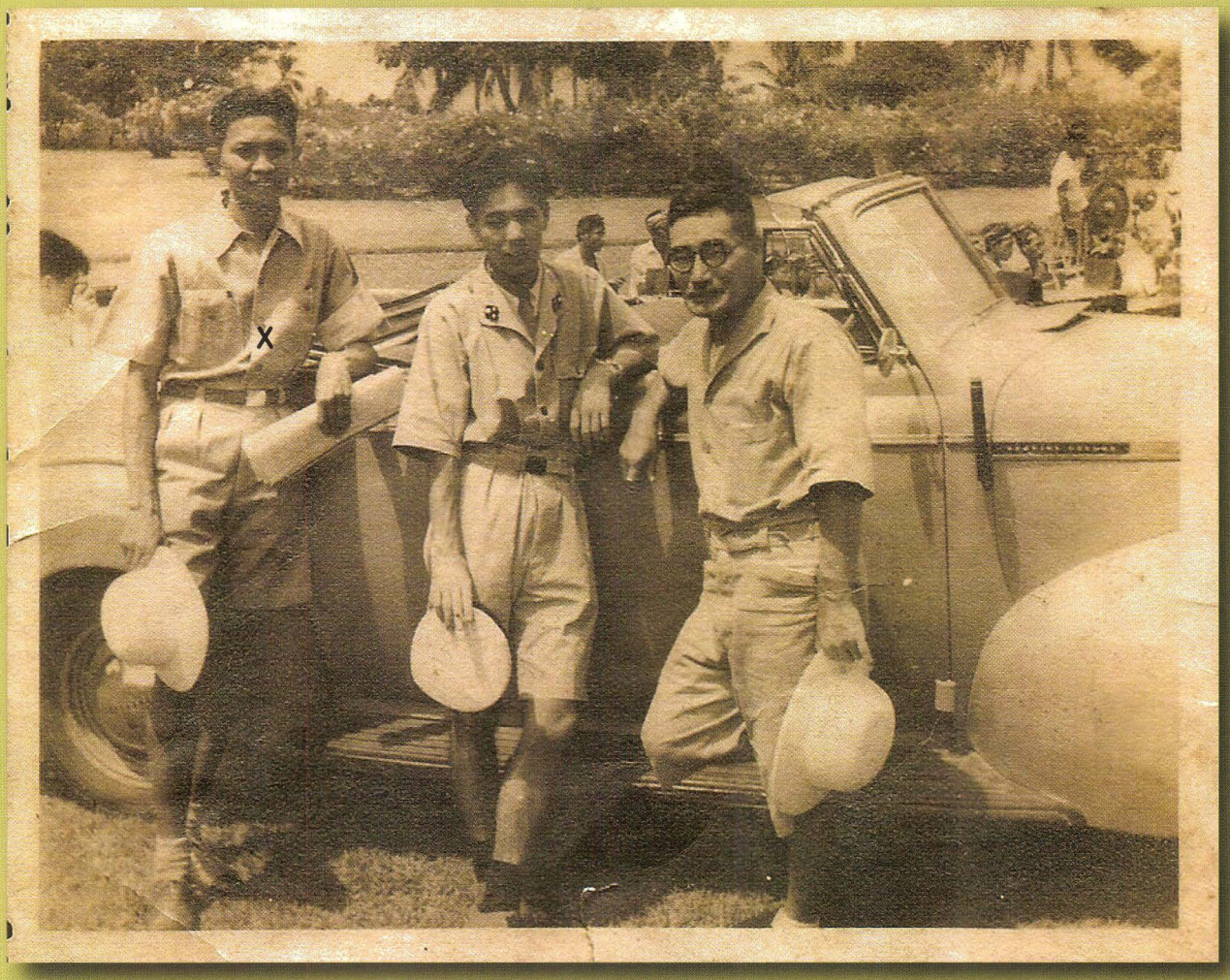

Mr. I Gusti Ketut Pudja (kiri), bersama pegawai dari pemerintahan militer Jepang di Bali.
Dok. Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

memaksa mereka menyerahkan beras dan hasil bumi lainnya dan ternak.

Di Bali para pemuda telah mengorganisasikan diri sejak Jepang masuk di sana. Pejuang-pejuang itu membangun jaringan bawah tanah dengan sistem sel di semua swapraja setelah mereka berhubungan dengan berbagai kelompok di Jawa dan bertukar informasi tentang situasi di daerah masing-masing. Namun, untuk melakukan perlawanan secara terbuka terhadap Pasukan Jepang sangat tidak mungkin dilakukan.

Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya dan Sukarno-Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI yang bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Sukarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sukarno lalu membentuk Panitia Kecil yang diketuai oleh Oto Iskandardinata dan beranggotakan sembilan orang, termasuk Pudja, untuk membicarakan program prioritas pemerintah, susunan pemerintahan, serta kepolisian dan ketentaraan. Keesokan harinya Oto Iskandardinata melaporkan hasil kerja mereka dan berdasarkan tanggapan dari anggota-anggota yang lain ditetapkan pembagian Indonesia menjadi delapan provinsi, yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Pudja ditunjuk menjadi Gubernur Sunda Kecil dengan wilayah yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.



Admiral Nakamura penguasa perang di Sunda Kecil dari bala tentara Dai Nippon. Dok. Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

2. Menjadi Gubernur Sunda Kecil

Di tengah situasi yang masih belum menentu Pudja kembali ke Bali sebagai Gubernur Sunda Kecil dengan membawa mandat dari pemerintah pusat untuk menyebarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan RI dan membentuk pemerintahan Republik. Presiden Sukarno juga telah memberi mandat kepada Ida Bagus Putra Manuaba untuk menjadi Ketua KNI Sunda Kecil yang akan membentuk komite-komite serupa sampai ke tingkat desa.

Gubernur Pudja bergerak dengan sangat hati-hati karena ia menghadapi persoalan kurang-lebih serupa dengan yang dihadapi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, yakni dualisme pemerintahan dan tidak punya pasukan untuk menegakkan wewenang. Bersama Manuaba, ia segera membentuk KNI untuk Sunda Kecil yang beranggotakan 17 orang, masing-masing 2 wakil dari 8 swapraja dan 1 orang mewakili pulau-pulau Nusa Penida dan Jungul Batu. Selanjutnya, KNI membentuk badan pekerja yang terdiri dari Ida Bagus Putra Manuaba sendiri, I Gusti Bagus Oka, dan Dr. Mohamad Angsar Kartakusuma. Mereka juga mengunjungi raja-raja penguasa swapraja untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan, pembentukan pemerintahan Provinsi Sunda Kecil, dan meminta dukungan dari para raja.

Para raja pada dasarnya ingin mendapat kejelasan tentang posisi penguasa militer Jepang di Bali. Mereka mempertanyakan bahwa seandainya kebijakan pemerintah provinsi dan penguasa militer bertentangan, perintah siapa yang harus diikuti. Selain itu, persoalan pokok bagi para raja adalah status mereka sebagai penguasa swapraja yang sejak zaman pemerintahan Belanda memiliki otonomi untuk mengelola wilayah mereka masing-masing. Mereka bertanya kepada Pudja dan Manuaba perihal status mereka pada masa kemerdekaan. Namun, keduanya tidak



dapat memberi jawaban yang pasti untuk dua pertanyaan pokok tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana jawaban pemerintah pusat atas dua pertanyaan para raja di Bali tersebut, Manuaba dan seorang anggota KNI diutus ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat pada 24 September 1945.

Namun, pemerintah pusat tidak memiliki jawaban untuk dua pertanyaan tersebut. Ketut Pudja dan Manuaba kembali membicarakan persoalan itu dengan para raja dan pejabat pemerintah daerah. Dengan mengacu pada hasil pembicaraan tersebut, Gubernur Pudja harus mengajukan tuntutan resmi kepada penguasa militer Jepang, yakni *Minseibu Chōkan* terkait hal-hal sebagai berikut:

1) mengganti bendera Jepang Hinomaru yang masih dikibarkan di kantor-kantor pemerintah dengan bendera Indonesia Sang Merah Putih;
2) mengganti pemakaian waktu Jepang yang disesuaikan dengan Tokyo dengan waktu Indonesia;
3) menghapus jam malam dan perintah penggelapan yang menjadi ciri suasana peperangan dan menciptakan suasana kemerdekaan yang aman dan damai;
4) mengganti para pimpinan dan pekerja berkebangsaan Jepang di jawatan-jawatan pemerintah dengan tenaga kerja bangsa Indonesia.

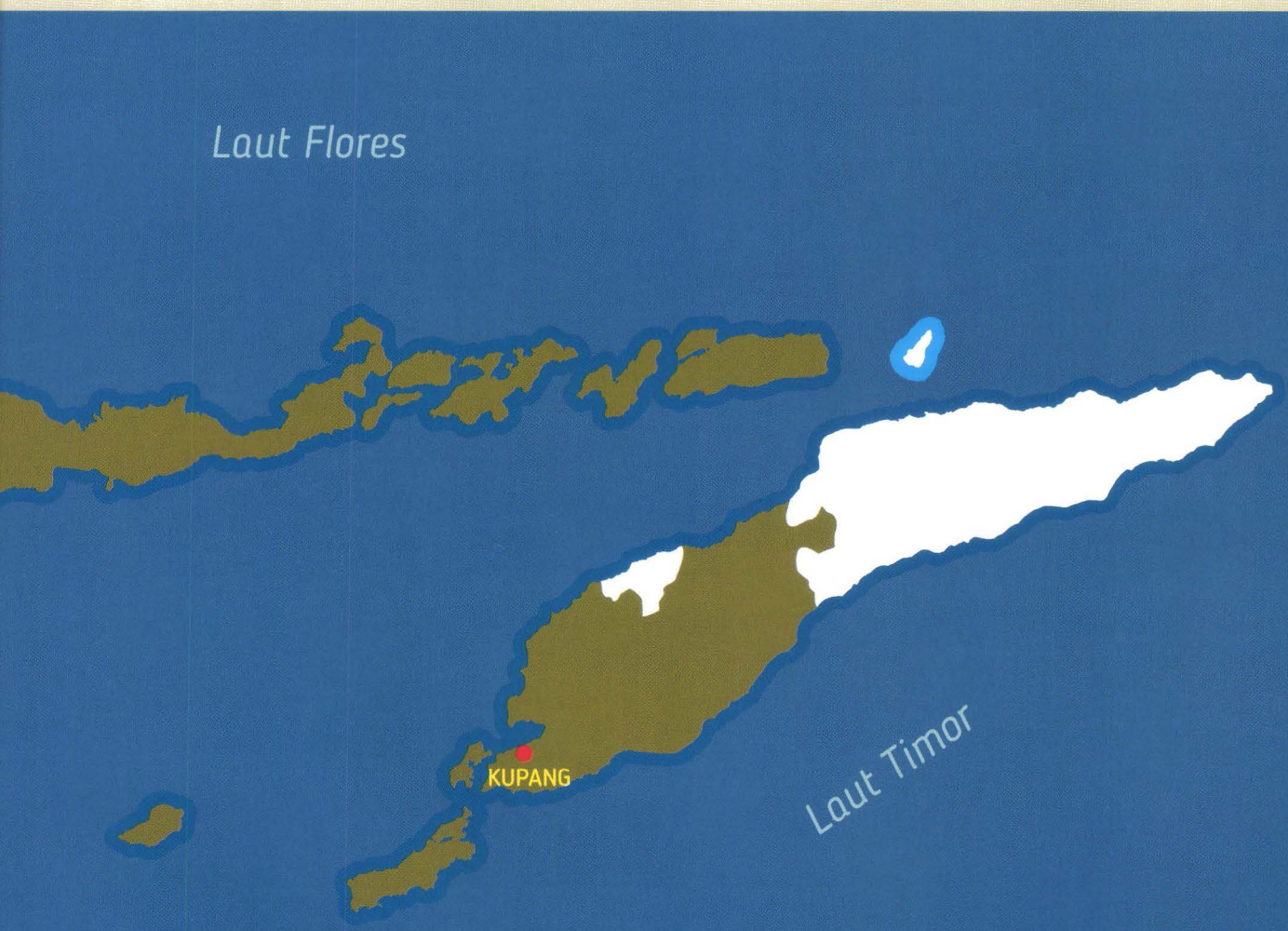

Peta Dasar Badan Informasi Geospasial (BIG), 2019

Dari Bali untuk Republik Indonesia

22 Agustus 1945

IGK Pudja diangkat sebagai Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia (Sukarno) di Sunda Kecil (Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa dan Dompu).

31 Agustus 1945

Memulai tugas pertama sebagai Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia (Sukarno) di Sunda Kecil dengan berkeliling Bali guna menyampaikan berita proklamasi dan program-program Pemerintah RI. Untuk wilayah Lombok, Sumba, Sumbawa dan Dompu, IGK Pudja mengirimkan utusan untuk meminta dukungan kepada penguasa setempat seperti yang dilakukannya kepada Sultan Muhammad Shalahuddin, penguasa swapraja Bima-Dompu.

22 September 1945

Ditetapkan sebagai Gubernur Sunda Kecil oleh Presiden Republik Indonesia Sukarno.

6 Oktober 1945

Dengan dikawal massa pemuda dan didampingi semua kepala kantor jawatan pemerintahan, Gubernur Pudja mendatangi kediaman *Minseibu Chōkan* di Singaraja dan menyampaikan ultimatum yang sudah dibicarakan. Awalnya pihak Chokan meminta waktu lima hari untuk mempertimbangkannya. Tetapi melihat besarnya semangat dan dukungan yang diperlihatkan massa di belakang Gubernur, mereka bersedia melakukan penyerahan kekuasaan dalam waktu dua hari.

8 Oktober 1945

Gubernur Pudja datang kembali ke kediaman Minseibu Chōkan dengan diiringi demonstrasi massa yang lebih besar. Mereka menagih janji dari pihak Chokan untuk menyerahkan kekuasaan.

9 Oktober 1945

Kelompok pemuda bersama rakyat berbaris secara teratur. Mereka mengibarkan bendera Merah Putih, dan meneriakkan 'Merdeka!' berulang kali, diselingi dengan lagu-lagu perjuangan. Chōkan segera melaksanakan upacara penyerahan kekuasaan kepada Gubernur Pudja.

10 Oktober 1945

Gubernur Pudja dan para pejabat pemerintah lainnya mengadakan rapat dengan raja-raja di Bali untuk menyampaikan kabar tentang proses serah terima dari penguasa militer Jepang kepada pemerintah Republik. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa para raja akan bekerja sama dengan KNI di setiap daerah untuk mengelola administrasi pemerintahan di swapraja masing-masing, dan mereka bertanggung jawab kepada Gubernur Pudja.

1 November 1945

Diadakan rapat bersama yang dipimpin Gubernur Pudja dan dihadiri Ketua KNI Manuaba, para raja, dan pimpinan badan-badan perjuangan di Kantor Gubernur Sunda Kecil di Singaraja untuk meminta pihak Jepang menyerahkan senjata. Rencananya hari itu akan diadakan juga upacara peresmian TKR yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai, seorang bangsawan dari Puri Carangsari, Badung. Namun semua rencana itu harus berhenti di tengah jalan karena pihak pemuda sudah terlanjur menyerbu tangsi-tangsi tentara Jepang dan berhasil digagalkan oleh militer Jepang. Tentara Jepang kemudian menangkap Gubernur Pudja dan jajarannya. Mereka dituduh sebagai "provokator" di balik penyerbuan tangsi-tangsi tentara Jepang.



13 Desember 1945
Tentara Jepang membebaskan Gubernur Pudja dan jajarannya.

1 Maret 1946
Bala tentara Sekutu yang membonceng tentara Belanda mendarat di Benoa.

2 Maret 1946
Tentara Sekutu menguasai Denpasar.

3 Maret 1946
Gianyar jatuh ke tangan pasukan Sekutu.

5 Maret 1946
Giliran Singaraja dikuasai oleh tentara Sekutu.

11 Maret 1946
Tentara Belanda yang memboncengi Sekutu menangkap Gubernur Pudja dan memenjarakannya.

13 Maret 1948
Usai Perjanjian Renville disepakati oleh Indonesia dan Belanda, Gubernur Pudja dibebaskan dari penjara dan dikembalikan ke pihak RI melalui Trowulan, Mojoagung.

14 Maret 1948
Menjadi Pejabat Gubernur Sunda Kecil dari Yogyakarta sekaligus membantu Kementerian Dalam Negeri RI dalam soal desentralisasi.

19 Desember 1948
Belanda melakukan agresi-nya yang ke-2 dengan menyerang dan menguasai Yogyakarta. Pejabat Gubernur Pudja kembali ditahan oleh Belanda di Penjara Wirogunan, Yogyakarta selama 6 hari.

25 Desember 1948
Mr. Pudja dibebaskan dari tahanan. Seterusnya, dia menjadi penghubung antara pihak parlemen dengan pemerintah Republik Indonesia.

1 Januari 1950
IGK Pudja diangkat oleh Pemerintah RIS sebagai Pejabat Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi soal desentralisasi.

Mei 1950
IGK Pudja ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman NIT. Beberapa saat setelah pengangkatan, dia melikuidasi NIT.

Januari 1951
Diangkat kembali oleh Pemerintah RI sebagai Gubernur Sunda Kecil.

Penguasa Dai Nippon menolak semua tuntutan Gubernur Pudja karena memegang teguh perintah dari Tokyo agar menjaga *status quo* hingga utusan Sekutu tiba di Bali untuk menerima penyerahan Jepang secara resmi. Dengan penolakan itu, beberapa raja di Bali menjadi ragu-ragu untuk mengambil sikap politik tertentu. Kondisi ini membuat Pudja dan Manuaba memutuskan untuk berkeliling Bali dan menggalang dukungan dari masyarakat.

Kekuatan utama yang membantu jalannya roda pemerintahan Gubernur Pudja dalam situasi vakum kekuasaan itu adalah kelompok pemuda. Kerja sama antara pemerintah Pudja-Manuaba dan pemuda menghasilkan perluasan basis-basis Republik yang militan di sejumlah swapraja, terutama di Badung, Buleleng, Jembranan, dan Tabanan. Pada saat yang sama sudah terbentuk pula BKR di Singaraja yang dipimpin oleh Daidanco I Made Putu dan di Denpasar oleh I Nyoman Pegeg pada 31 Agustus. Namun, keterbatasan alat komunikasi dan transportasi membuat Gubernur Pudja dan Manuaba kesulitan menjangkau tokoh-tokoh yang tinggal di pulau-pulau lain dalam lingkup Sunda Kecil untuk segera mengabarkan proklamasi kemerdekaan, pembentukan provinsi baru, serta pendirian KNI. Pada awal pemerintahannya, Gubernur Pudja hanya sempat mengirim utusan dari Singaraja untuk menemui penguasa swapraja Bima-Dompu, Sultan Muhammad Salahuddin, guna memperoleh dukungan darinya.

Pada 1 Oktober 1945 berita tentang pengakuan atas Republik Indonesia dari Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Republik Rakyat Tiongkok tersiar di radio setempat. Kelompok pelajar dan pemuda menyambutnya dengan kegembiraan luar biasa dan mengadakan pawai keliling kota untuk merayakannya. Mereka melihat perkembangan itu sebagai kesempatan bagi pemerintahan Gubernur Pudja untuk mendesak pejabat lokal Dai Nippon menyerahkan kekuasaannya. Saat itu Gubernur Pudja dan Manuaba baru kembali dari perjalanan keliling Bali untuk mengabarkan proklamasi dan mendirikan KNI di daerah-daerah swapraja. Dengan diwakili Ketua BKR, I Made Putu, kelompok pemuda mendorong Gubernur untuk mendesak penguasa Jepang dengan ultimatum bahwa jika mereka tidak segera menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Republik akan terjadi pemogokan para pegawai pemerintah dan kerusuhan yang tak terkendali. Gubernur Pudja sepakat dengan usulan pemuda. Pada 6 Oktober 1945 dengan dikawal massa pemuda dan didampingi semua kepala kantor jawatan pemerintahan, Gubernur Pudja mendatangi kediaman Minseibu Chōkan di Singaraja dan menyampaikan ultimatum yang sudah dibicarakan. Awalnya pihak Chokan meminta waktu 5 hari untuk mempertimbangkannya. Akan tetapi,ketika melihat besarnya semangat dan dukungan yang diperlihatkan massa di belakang Gubernur, mereka bersedia melakukan penyerahan kekuasaan dalam waktu dua hari.

Dua hari kemudian Gubernur Pudja datang kembali ke kediaman Minseibu Chōkan dengan diiringi demonstrasi massa yang lebih besar. Kelompok pemuda bersama rakyat berbaris secara teratur, mengibarkan bendera Merah Putih, dan meneriakkan *merdeka* berulang kali dan diselingi dengan lagu-lagu perjuangan.Chōkan segera melaksanakan upacara penyerahan kekuasaan kepada Gubernur Pudja. Pada 10 Oktober Gubernur dan para pejabat pemerintah lainnya mengadakan rapat dengan raja-raja di Bali untuk menyampaikan kabar tentang proses serah terima dari penguasa militer Jepang kepada pemerintah Republik. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa para raja akan bekerja sama dengan KNI di setiap daerah untuk mengelola administrasi pemerintahan di swapraja masing-masing dan mereka bertanggung jawab kepada Gubernur Pudja.

Setelah penegasan status kepemimpinan sipil menjadi lebih jelas, Gubernur Pudja mengirim utusan, Hilan Tedjokusumo, ke Lombok, Sumbawa, dan Bima-Dompu, untuk membentuk KNI di kedua daerah tersebut. Masyarakat berduyun-duyun menghadiri rapat umum dalam rangka proklamasi kemerdekaan dengan antusias kendati masih terdapat 3.000 tentara Jepang di Bali. Ancaman yang lebih besar sesungguhnya adalah kehadiran balatentara Sekutu di sebagian wilayah Indonesia. Di Indonesia Timur hanya Bali, Lombok, dan Sumbawa yang belum dikuasai. Hal ini karena Pasukan Sekutu yang diwakili oleh Australia dan Inggris datang bersama pasukan Belanda, yakni NICA berikut perangkat administrasi sipilnya. Mereka melakukan provokasi untuk kembali menguasai Indonesia.

Pada akhir Oktober sebuah kapal dagang Belanda, Abraham Crijnssen, merapat ke Pelabuhan Buleleng tanpa izin.Sejumlah awak kapal bersenjata masuk kota, merampok bahan makanan, menurunkan dan merobek-robek bendera Merah Putih, dan menggantinya dengan bendera Belanda. Kelompok pemuda yang berjaga-jaga di pelabuhan tidak mampu melawan mereka karena tidak bersenjata, tetapi mereka dengan berani menurunkan bendera Belanda dan menaikkan kembali bendera Indonesia. Pertikaian berakhir dengan penembakan terhadap salah satu pemuda, I Ketut Merta, dari Banjar Liligundi oleh awak kapal Belanda hingga tewas.

Aksi provokasi Belanda ini membuat pimpinan BKR dan organisasi-organisasi pemuda memutuskan untuk mengonsolidasi kekuatan mereka di bawah satu komando militer Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada 1 November 1945 diadakan rapat bersama yang dipimpin Gubernur Pudja dan dihadiri Ketua KNI Manuaba, para raja, dan pimpinan badan-badan perjuangan di Kantor Gubernur Sunda Kecil di Singaraja untuk meresmikan TKR yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai, seorang bangsawan dari Puri Carangsari, Badung.

Salah satu langkah awal TKR untuk memperkokoh kekuatannya adalah meminta petinggi militer Jepang di Bali untuk menyerahkan persenjataan mereka.Permohonan itu ditolak.Para pemuda kemudian berinsiatif untuk melucuti pasukan Jepang, tetapi gagal.Akibat insiden tersebut, penguasa militer Jepang menangkap Gubernur Pudja, Ketua KNI Manuaba, dan pimpinan unit-unit TKR di Singaraja, I Made Putu, dan kawan-kawan, serta menyekap mereka di Bali Hotel Denpasar. Penahanan terhadap Gubernur Pudja dan Manuaba membuat pemerintahan Sunda Kecil yang terpusat di Bali praktis lumpuh.

Sementara itu, Gubernur Pudja dan seluruh pengurus KNI ditahan, pihak Jepang mendorong para raja untuk membentuk Dewan Raja-Raja dan mengambil alih pemerintahan Republik. Untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat, mereka membebaskan Gubernur Pudja dan Ketua KNI Manuaba serta anggota lainnya pada 21 Januari 1946 dengan syarat mereka bersedia menghadiri



Baju dinas peninggalan IGK Ketutu Pudja yang tersimpan di Museum Naskah Proklamasi, Jakarta. Dok. Direktorat Sejarah, 2019.

rapat gabungan antara Dewan Raja-Raja dan KNI yang seluruh agendanya sudah ditentukan penguasa Jepang bersama para raja. Salah satu putusan utama rapat itu adalah menghidupkan kembali lembaga kuasi-legislatif yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda pada 1938 yakni Paruman Agung. Gubernur Pudja dan Manuaba didesak untuk mengakui keberadaan Paruman Agung sebagai pemegang otoritas negara di Bali.

Gubernur Pudja dan Manuaba menghadapi persoalan yang pelik. Mereka harus mempertahankan Republik, tetapi juga menyadari kelemahan pemerintahan mereka karena tidak memiliki kendali penuh atas kekuatan polisi dan militer serta organisasi-organisasi pemuda yang anggotanya jauh melampaui pasukan TKR. Dukungan dari pemerintah pusat juga tidak memadai karena pemerintah pusat menghadapi masalah yang tidak kalah sulitnya. Mereka terpaksa harus mengakui bahwa bagaimanapun raja-raja masih memiliki kekuasaan lebih besar di swapraja masing-masing. Pada 9 Februari1946 KNI mengeluarkan maklumat yang menyatakan penyerahan hak dan kekuasaan yang dipegang Republik Indonesia kepada Paruman Agung dengan syarat apa pun yang diperbuat badan tersebut tidak boleh menyimpang dari konstitusi Republik Indonesia.

Pada 2 Maret 1946 pasukan KNIL di bawah komando Letnan Kolonel F.H. ter Meulen bersama aparat pemerintahan sipil, yakni Allied Military Authority, Civil Affairs Branch (AMACAB) mendarat di Pantai Sanur.Empat hari kemudian Perwira Komando AMACAB, J. A. van Beuge, dan stafnya mengadakan pertemuan dengan Gubernur Pudja dan seluruh jajaran pemerintahannya di Singaraja. Mereka menyatakan bahwa tugas mereka di Bali adalah membebaskan tawanan Jepang, melucuti prajurit Jepang, dan memulangkan mereka ke negerinya. Mereka berharap pemerintah Pudja akan membantu tugas-tugas itu dan Gubernur segera menyanggupinya. Yang aneh dari pertemuan ini adalah pernyataan bahwa AMACAB akan memakai Undang-Undang Militer yang memberlakukan jam malam dan melarang penggunaan semboyan yang mengganggu bangsa lain. Hal itu berarti pembatasan terhadap kegiatan perlawanan dari kelompok-kelompok pemuda pro-Republik. Gubernur Pudja keberatan dengan pemberlakuan UU itu karena ia menganggap tidak ada masalah keamanan di Bali, tetapi Beuge bersikukuh UU itu akan dilaksanakan sebagai bagian dari kewenangannya demi ketertiban umum.

Di tengah situasi itu Gubernur Pudja mendapat laporan bahwa pasukan KNIL mulai bergerak. Mereka menurunkan bendera Merah Putih di mana-mana dan menangkap salah satu anggota organisasi pemuda, Ketut Subrata, di Denpasar. Pada 11 Maret 1946 saat Gubernur Pudja sedang mengadakan rapat dengan Ketua KNI Manuaba dan kepala-kepala jawatan pemerintah di kediaman resminya, pasukan KNIL mengepung rumah tersebut dan menangkap Gubernur Pudja, Manuaba, dan seluruh kepala jawatan pemerintah yang hadir. Alasan yang dikemukakan komandan pasukan adalah bahwa kondisi keamanan di Sunda Kecil memburuk dan pemerintahan Pudja tidak mampu mengatasi keadaan. Penguasa Belanda tampaknya menduga bahwa dengan menangkap Gubernur Pudja dan Ketua KNI Manuaba beserta seluruh stafnya perlawanan terhadap upaya pemulihan kekuasaan Belanda di Bali akan menjadi lebih lancar. Dugaan itu salah besar karena rakyat Bali tetap melanjalankan perlawanan dan tidak bersedia menyerah.

Setelah kegagalan penyerbuan tangsi Jepang pada Desember 1945, I Gusti Ngurah Rai, memimpin delegasi TKR ke Jawa untuk melaporkan situasi di Bali dan meminta bantuan dari pemerintah pusat. Lawatan selama tiga bulan itu (Januari-April 1946) membuahkan hasil yang berarti: pemerintah bersedia memberikan bantuan persenjataan, personel, dan keperluan lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan RI. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Tentara Republik Indonesia (TRI) Resimen Sunda Kecil oleh staf Panglima Besar Sudirman di Jawa. Perang gerilya pun dimulai dan para raja harus berhadap-hadapan dengan pemuda. Sementara itu, Gubernur Pudja masih tetap ditahan.Dia ditempatkan dalam sel terpisah dari tahanan politik lainnya di penjara Denpasar di daerah Pekambingan. Selama di penjara, ia terus berusaha mengikuti perkembangan situasi politik di luar dengan secara sembunyi-sembunyi bertanya kepada tahanan lain yang baru masuk. Pihak Belanda seringkali mengintimidasi dan membujuk Pudja agarmendukung pemerintah NIT dengan janji akan dibebaskan, tetapi ia selalu menolak. Di luar Bali kampanye untuk membebaskan Pudja cukup gencar dilakukan, bahkan oleh pejabat-pejabat NIT yang nasionalis dan pro-Republik.



Kembali ke pangkuan ibu pertiwi di Yogyakarta melalui Trowulan setelah menjalani hukuman penjara Pekambingan di Denpasar tahun 1946.
Dok. Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Hari-Hari Terakhir

1954 : Kembali ke Jakarta dan menjadi anggota Dewan Pengawas Keuangan sekaligus anggota Panitia Negara Pembaharuan Undang-Undang Perbendaharaan

1957 : Diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan

1959 : Menjadi anggota DEPERNAS (Dewan Perancang Nasional

1960 : Diangkat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

1962 : Anggota Panitia Negara untuk menyusun sistem perpajakan, penyusunan UU Pokok Agraria dan anggota Dewan Pertimbangan Sosial/ Pengumpulan uang dan barang.

1964 : Berhenti sebagai Ketua BPK namun tetap bertugas di badan ini hingga purnabhakti pada 1968.

1968 : Diangkat sebagai Komisaris Pembinan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912

4 Mei 1977 : wafat di RS. Cipto Mangunkusomo dalam usia 69 tahun dan dimakamkan di Tunon Bajang Ratu, Desa Bantang Banoa Bali



I Gusti Ketut Pudja (X) saat menghadiri sidang likuidasi NIT pada Desember 1950. Dok. Museum Perumusan Naskah Proklamasi.



Para pejabat BPK. Dari kiri ke kanan: Soemitro, Raja Kaliansyah Sinaga, I Gusti Ketut Pudja (x), Tjahjono, dan R.M. Ratmoko. Dok. Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

3. Hari-Hari Terakhir

Pudja dibebaskan pada 13 Maret 1948.Namun, ia tidak kembali ke Bali, tetapi langsung membantu Presiden Sukarno untuk urusan pemerintahan di dalam negeri ketika pemerintah Republik dialihkan ke Yogyakarta. Sebagai pejabat yang diserahi tanggung jawab mengawasi jalannya pemerintahan daerah,ia sering berkeliling bersama Sukarno untuk melakukan negosiasi dengan penguasa lima belas negara bagian agar mereka bersedia kembali membangun NKRI. Ia berulang kali mewartakan perjuangan pemuda yang masih terus berlanjut di daerah pegunungan di Bali untuk melawan kekuasaan Belanda dan menegakkan Republik. Dengan penuh keyakinan ia mengatakan bahwa apabila diadakan plebisit di Bali untuk menentukan ikut Republik atau ikut negara buatan Belanda, 90 persen rakyat Bali akan memilih ikut Republik.

Setelah penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949, ia diminta menjadi Menteri Kehakiman NIT dalam Kabinet Putuhena yang disebut *kabinet likuidasi* karena tugasnya mempersiapkan peleburan NIT ke dalam NKRI. Pudja ikut dalam Tim Likuidasi NIT pada akhir 1950. Setelah itu, ia terus aktif di berbagai kepanitian dan departemen untuk membantu Presiden Sukarno memantapkan Republik, antara lain, sebagai anggota Dewan Pengawas Keuangan, anggota Panitia Negara Pembaharuan UU Perbendaharaan Negara, Panitia Nasional Sistem Perpajakan, dan Panitia Penyusun UU Pembaharuan Agraria. Jabatan terakhirnya sebelum ia pensiun pada 1968 adalah sebagai Ketua Badan Pengawas Keuangan. Ia meninggal dunia 9 tahun kemudian pada 4 Mei 1977 dalam usia menjelang 69 tahun.



I Gusti Ketut Pudja (paling kiri) bersama para menantunya saat menghadiri upacara keagamaan (Purnama) di Pura Adityawarman, Rawamangun (Jakarta). Dok. keluarga I Gusti Ketut Pudja.



SAM RATULANGI
GUBERNUR SULAWESI

"Si Tou Timou Tu Mou Tou
(Manusia hidup
untuk memanusiakan sesamanya)"

(Semboyan hidup Ratulangi dalam bahasa Minahasa)

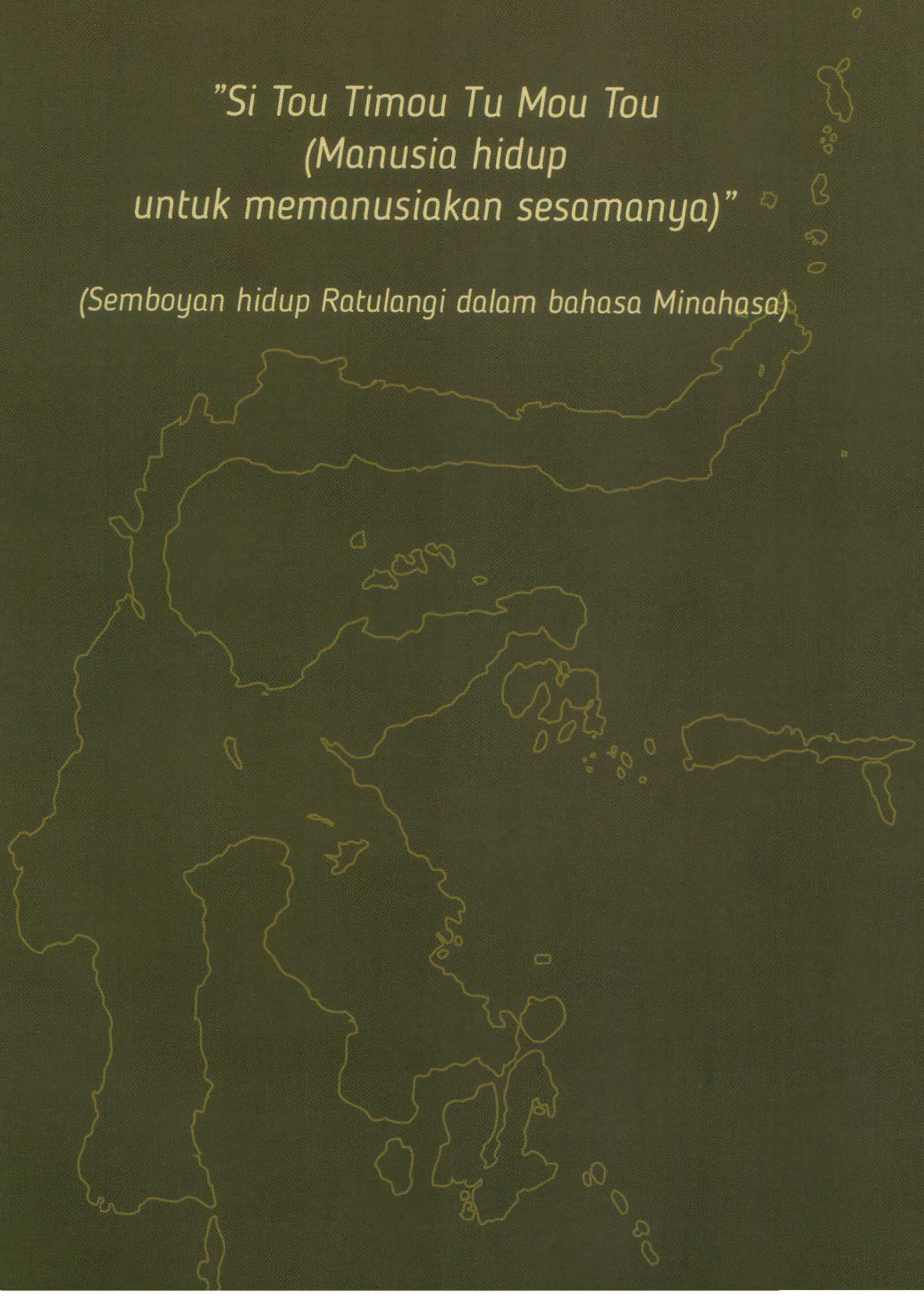

1. Cendekiawan Minahasa

Lahir dengan nama lengkap Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi pada 5 November 1890.

Sam (panggilan kecilnya) Ratulangi berasal dari keluarga bangsawan di desa Tungkarumber, tepi Danau Tondano, Sulawesi Utara. Ibunya, Agustina Gerungan, putri kepala distrik Tondano-Toulian. Adapun ayahnya, Jozias Ratulangi, orang terpandang sebagai guru di sekolah Eton Minahasa, sekolah untuk para kepala desa atau disebut juga Sekolah Raja.

Sam Ratulangi merupakan anak bungsu dan anak laki-laki satu-satunya dalam keluarganya. Karena masih keturunan bangsawan kecil, Sam Ratulangi memperoleh pendidikan yang baik. Setelah menamatkan pendidikan di Sekolah Raja-tempat ayahnya mengajar, Sam Ratulangi merantau ke Batavia. Pada usia 14 tahun Sam Ratulangi memasuki sekolah dokter bumiputra (STOVIA). Namun, ditengah jalan Sam Ratulangi tidak meneruskan niatnya menjadi dokter. Kemudian, dia memasuki sekolah teknik Koningen Wilhelmina School (KWS). Setelah lulus KWS,



Ratulangi (kanan, tanda x) bersama sepupu di Manado 1905. Dok. keluarga Sam Ratulangi.

Sam Ratulangi sempat bekerja selama 2 tahun di Jawatan Kereta Api yang meliputi jalur Priangan-Cilacap. Di sana batinnya berontak karena Ratulangi melihat pegawai bumiputra mendapat upah setengah dari yang diterima pegawai Eropa. Kemudian, dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda dan memilih jurusan Ilmu Pendidikan di Vrije Universiteit. Ia aktif berorganisasi dan bahkan menjadi Ketua Indische Vereniging yang kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Melalui organisasi ini, ia bersua dengan Mohammad Hatta.

Pada akhir 1917 Sam Ratulangi telah memperoleh dua gelar diploma yang memungkinkannya mengajar matematika.Namun, Sam Ratulangi memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke Universitas Zurich di Swiss. Di Zurich, Sam Ratulangi menjadi Ketua Perhimpunan Mahasiswa-Mahasiswa Asia. Setelah tahun, Sam Ratulangi merampungkan studinya dan memperoleh gelar doktor dalam Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Ia adalah orang Minahasa sekaligus orang Indonesia pertama yang mencapai doktor di bidang eksakta.

Sekembali dari Eropa, Sam Ratulangi mengajar ilmu pasti di AMS (setingkat sekolah menengah umum) di Yogyakarta. Ketika bertugas di Bandung, dia mendirikan Maskapai Asuransi Indonesia (1922–24). Itulah pertama kalinya nama Indonesia digunakan di luar bidang etnologi. Di Bandung, Sam Ratulangi sempat berkenalan dengan pemuda bernama Sukarno.

Pada 1924 Sam Ratulangi menjadi Sekretaris Dewan Minahasa di Manado. Melalui dewan ini, ia membantu masyarakat untuk membuka daerah pertanian, mendirikan yayasan dana belajar, dan kegiatan lainnya. Ia juga bergabung dengan Sarikat Minahasa dan berhasil mengubah orientasi serikat ini dari semula pro-Belanda menjadi pro-Indonesia.

Pada tahun 1927 Sam Ratulangi kembali ke Batavia. Kemudian, ia diangkat menjadi anggota Volksraad mewakili Minahasa. Sejak itu ia sering berpidato mengecam pemerintah Belanda. Bersama wakil Batavia, Mohammad Husni Thamrin, Sam Ratulangi melancarkan oposisi terhadap politik kolonial. Ia juga mendukung Petisi Soetardjo yang menuntut otonomi yang lebih luas agar negeri Hindia dapat berdiri sendiri.



Universitas Zurich di Swiss, tempat Ratulangi menimba ilmu. Dok. keluarga Sam Ratulangi.

Di Volksraad, Sam Ratulangi mengajukan tuntutan supaya pemerintah Belanda menghapuskan segala rupa perbedaan terhadap rakyat pribumi: politik, ekonomi, dan pendidikan. Akibat berbagai kritikannya tersebut pemerintah kolonial mencari kesalahan yang bisa didakwakan kepada Sam Ratulangi. Pada 1937 Pengadilan Tinggi mendakwa Sam Ratulangi bersalah atas pemalsuan surat dan penggelapan uang sebesar 200 gulden. Pengacaranya menyatakan bahwa Ratulangi kurang teliti dan tidak bermaksud menipu. Alih-alih diusut tuntas, pemerintah telanjur melancarkan proses hukum terhadap Sam Ratulangi. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman selama tiga 3 tahun dikeluarkan dari keanggotaan Volksraad serta tidak disertakan dalam pemilihan untuk badan perwakilan apapun. Selain itu, Sam Ratulangi harus menjalani hukuman penjara selama 4 bulan di Sukamiskin, Bandung. Kendati ratusan orang Minahasa menandatangani petisi kepada Gubernur Jenderal, Sam Ratulangi tetap kehilangan posisinya di Volksraad. Setelah tidak lagi aktif di Volksraad, Ratulangi mendirikan Vereniging Indonesische Academici (Persatuan Kaum Sarjana Indonesia) dan menerbitkan mingguan *Peninjauan* dengan dr. Amir. Sejak 1938 hingga kedatangan tentara Jepang, Sam Ratulangi menjadi redaktur mingguan politik *Nationale Commentaren.*

Pada masa pendudukan Jepang, awalnya Sam Ratulangi menolak bekerjasama dengan pemerintah pendudukan Dai Nippon. Sam Ratulangi sempat mengorganisasi pelayanan sosial kepada keluarga-keluarga tentara KNIL asal Minahasa yang jadi korban pendudukan Jepang di Batavia. Karena tekanan-tekanan yang keras, terpaksa Sam Ratulangi menerima jabatan di lingkungan Angkatan Laut Jepang (Kaigun) di Makassar sebagai penasihat. Pengangkatan Sam Ratulangi disebabkan ketokohannya yang cukup berpengaruh untuk kawasan Indonesia Timur. Dalam menjalankan tugasnya, Sam Ratulangi mengumpulkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang berasal dari Indonesia Timur seperti Bali, Lombok, dan Palu yang menetap di Jawa. Kepada mereka, ia menitipkan nasib 2.500 orang Minahasa di Jawa. Sebaliknya, Sam Ratulangi

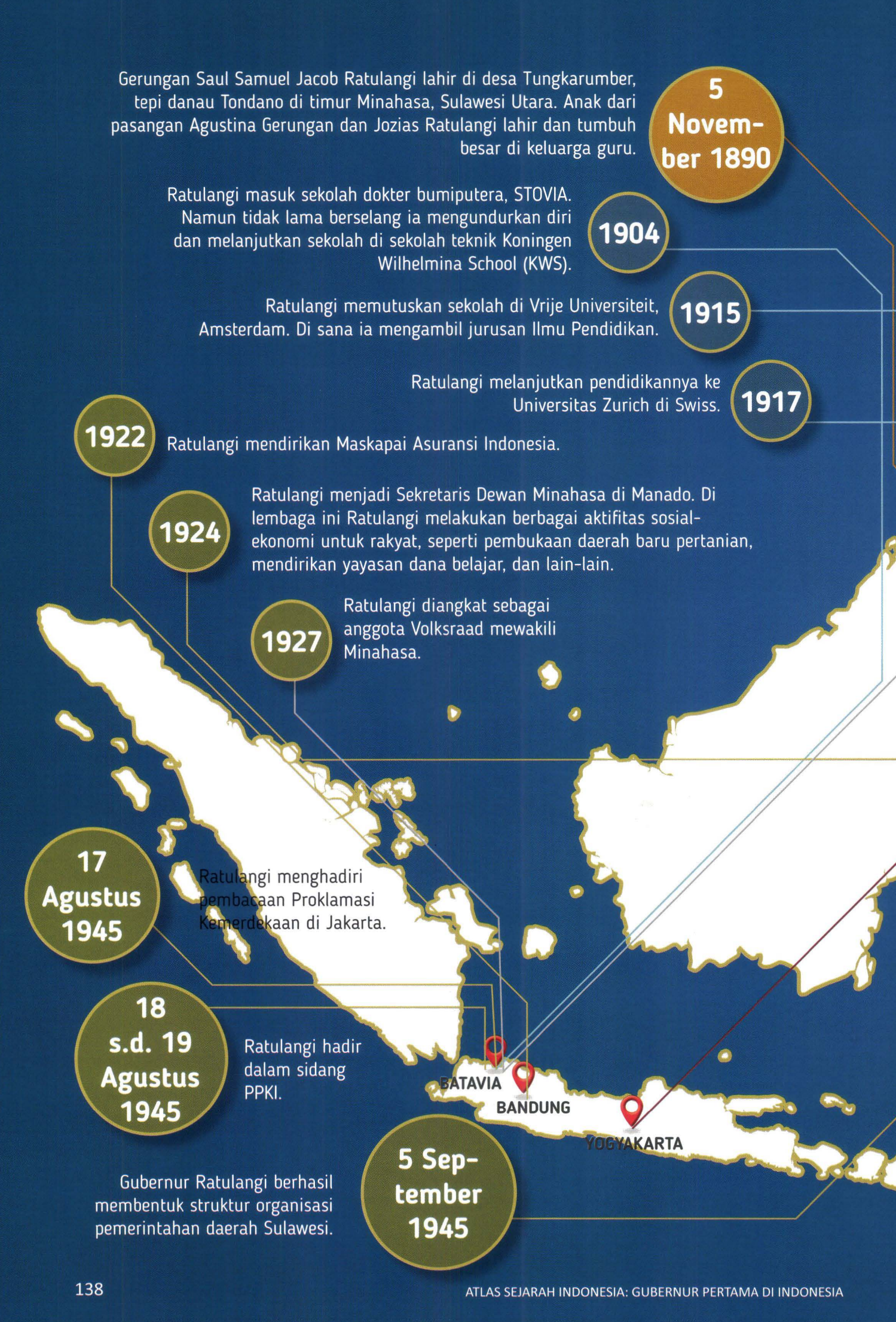
5 November 1890
Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi lahir di desa Tungkarumber, tepi danau Tondano di timur Minahasa, Sulawesi Utara. Anak dari pasangan Agustina Gerungan dan Jozias Ratulangi lahir dan tumbuh besar di keluarga guru.
1904
Ratulangi masuk sekolah dokter bumiputera, STOVIA. Namun tidak lama berselang ia mengundurkan diri dan melanjutkan sekolah di sekolah teknik Koningen Wilhelmina School (KWS).
1915
Ratulangi memutuskan sekolah di Vrije Universiteit, Amsterdam. Di sana ia mengambil jurusan Ilmu Pendidikan.
1917
Ratulangi melanjutkan pendidikannya ke Universitas Zurich di Swiss.
1922
Ratulangi mendirikan Maskapai Asuransi Indonesia.
1924
Ratulangi menjadi Sekretaris Dewan Minahasa di Manado. Di lembaga ini Ratulangi melakukan berbagai aktifitas sosial-ekonomi untuk rakyat, seperti pembukaan daerah baru pertanian, mendirikan yayasan dana belajar, dan lain-lain.
1927
Ratulangi diangkat sebagai anggota Volksraad mewakili Minahasa.
17 Agustus 1945
Ratulangi menghadiri pembacaan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta.
18 s.d. 19 Agustus 1945
Ratulangi hadir dalam sidang PPKI.
BATAVIA
BANDUNG
YOGYAKARTA
5 September 1945
Gubernur Ratulangi berhasil membentuk struktur organisasi pemerintahan daerah Sulawesi.

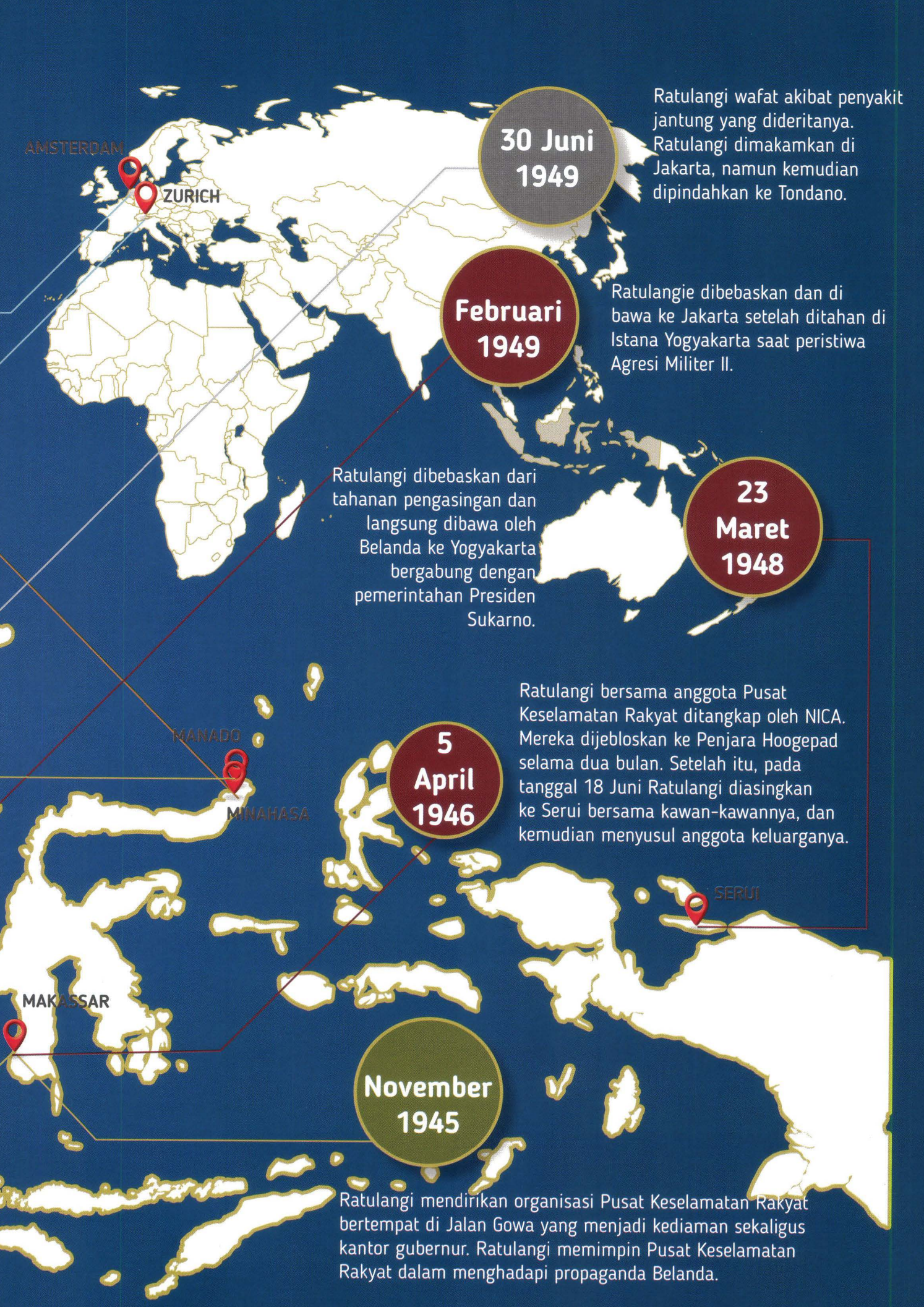
AMSTERDAM
ZURICH
30 Juni 1949
Ratulangi wafat akibat penyakit jantung yang dideritanya. Ratulangi dimakamkan di Jakarta, namun kemudian dipindahkan ke Tondano.
Februari 1949
Ratulangie dibebaskan dan di bawa ke Jakarta setelah ditahan di Istana Yogyakarta saat peristiwa Agresi Militer II.
23 Maret 1948
Ratulangi dibebaskan dari tahanan pengasingan dan langsung dibawa oleh Belanda ke Yogyakarta bergabung dengan pemerintahan Presiden Sukarno.
MANADO
MINAHASA
5 April 1946
Ratulangi bersama anggota Pusat Keselamatan Rakyat ditangkap oleh NICA. Mereka dijebloskan ke Penjara Hoogepad selama dua bulan. Setelah itu, pada tanggal 18 Juni Ratulangi diasingkan ke Serui bersama kawan-kawannya, dan kemudian menyusul anggota keluarganya.
SERUI
MAKASSAR
November 1945
Ratulangi mendirikan organisasi Pusat Keselamatan Rakyat bertempat di Jalan Gowa yang menjadi kediaman sekaligus kantor gubernur. Ratulangi memimpin Pusat Keselamatan Rakyat dalam menghadapi propaganda Belanda.

berjanji akan menjamin keselamatan orang Jawa yang berada di Sulawesi Selatan.

Atas perintah Jepang, Sam Ratulangi bersama pemuka-pemuka lokal mendirikan Sumber Darah Rakyat (Sudara). Para pemuda pejuang dihimpun ke dalam lembaga ini. Mereka dimobilisasi untuk membantu Jepang melawan Sekutu. Lambat laun, Sudara menjadi wadah perintis gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia di Makassar. Tokoh-tokoh pemuda seperti Andi Mattalatta, Saleh Lahode, Amiruddin Mukhlis, Manai Sophian, Sutan M. Yusuf dan Y. Siranamua dibina di sana.

Seiring dengan kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, Sam Ratulangi menyempurnakan struktur organisasi Sudara. Sam Ratulangi sebagai Ketua Umum; Mappanyuki sebagai Ketua Kehormatan; dan Lanto Daeng Pasewang sebagai Ketua Pusat. Dalam struktur baru itu, reputasi Sam Ratulangi semakin diperhitungkan sebagai tokoh nasionalis dari Sulawesi.



Ratulangi (barisan depan, nomor dua dari kanan, tanda x) dalam Pertemuan anggota Dewan Minahasa (Minahasa Raad) pada 1927. Dok. repro "Indonesia di Pasifik" karya Sam Ratulangi. Dok. repro buku: Indonesia di Pasifik karya Samuel Ratulangi.



Ratulangi (berdiri di tengah nomor 7 dari kiri, tanda x) sebagai anggota Dewan Rakyat (Volksraad) hadir dalam jamuan makan resepsi memperingati hari ulang tahun Ratu Wilhelmina, 1936. Dok. repro buku: Indonesia di Pasifik karya Samuel Ratulangi.

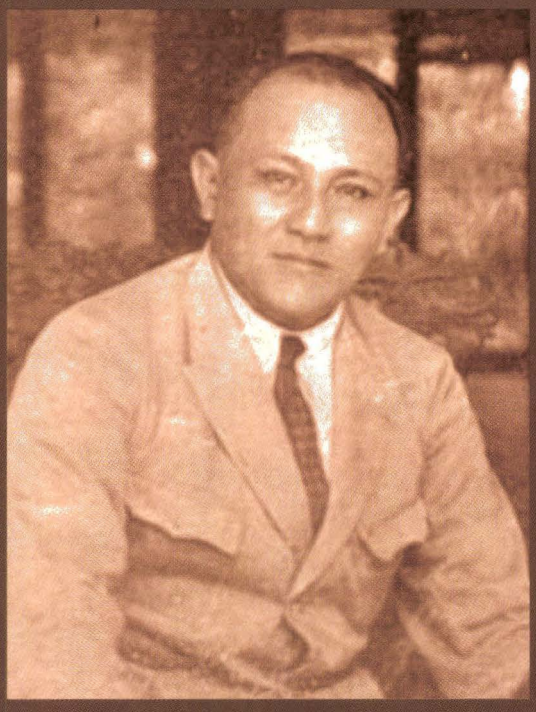

Jenjang karier

1919	Guru di Sekolah Teknik Prinses Juliana School, Yogyakarta (kini menjadi SMK Negeri 2)
1922	Direktur Maskapai Asuransi Indonesia di Bandung
1924	Sekretaris Dewan Minahasa di Manado
1927	Anggota Volkraad (Dewan Rakyat)
1938	Redaktur majalah politik *Nationale Commentaren*
1942	Penasihat Kaigun (Angkatan Laut Kekaisaran Jepang)
1945	Gubernur Sulawesi



Ratulangi dan Sukarno. Dok. keluarga Sam Ratulangi.

2. Menjadi Gubernur Sulawesi

Pada April 1945 pemerintah pendudukan Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sam Ratulangi saat itu masih berada di Sulawesi Selatan sehingga tidak ikut serta dalam badan itu. Sam Ratulangi baru bertolak ke Jakarta pada awal Agustus. Ia turut menjadi saksi sejarah pembacaan proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, bersama Andi Sultan Daeng Raja dan Andi Pangeran Daeng Parani, Sam Ratulangi ditunjuk menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam notulen rapat-rapat PPKI yang diterbitkan Mohammad Yamin, Sam Ratulangi tercatat hadir dalam sidang PPKI pada 18 dan 19 Agustus 1945.

Dalam sidang hari pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan sebagai konstitusi. Sementara itu, Sukarno dan Mohammad Hatta dipilih sebagai presiden dan wakilnya. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dan wakil presiden dibantu Komite Nasional Indonesia.

Keesokan harinya sidang kedua digelar. Agenda sidang membahas penyusunan pemerintahah daerah. Oto Iskandardinata sebagai salah satu ketua panitia kecil PPKI mengusulkan wilayah Indonesia dibagi menjadi delapan daerah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur. Hari itu juga Presiden Sukarno menunjuk delapan gubernur masing-masing provinsi. Pada saat itulah Sukarno menunjuk Sam Ratulangi menjadi Gubernur Sulawesi. Sam Ratulangi langsung berhadapan dengan situasi bahwa tentara Sekutu dan Belanda datang ke Sulawesi. Padahal, ia hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan daerah di Sulawesi.

PROVINSI SULAWESI PADA MASA KEMERDEKAAN



Peta Dasar Badan Informasi Geospasial (BIG), 2019

2.1 Situasi di Sulawesi

Setelah pelantikan, Gubernur Sam Ratulangi bersama rombongan langsung bertolak ke Makassar. Mereka mendarat di lapangan terbang Sapiria, Bulukumba. Setiba di Makassar, Ratulangi secara resmi mengumumkan kepada pemuka rakyat setempat bahwa kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan oleh Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1945.

Sepekan pertama, Gubernur Sam Ratulangi dan rombongannya menetap di Empress Hotel. Yang pertama dilakukan Sam Ratulangi adalah menemui sejumlah tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yang dihimpun berasal dari lintas kalangan. Mereka, antara lain, Lanto Daeng Pasewang, Saleh Daeng Tompo, Zainal Abidin (ketiganya dari Sulawesi Selatan), W.S.T. Pondaag (Sulawesi Utara), Josef Latumahina (Maluku), I.P.L.Tobing (Sumatra), dan Soewarno (Jawa). Ketujuh orang inilah yang menjadi staf penting Ratulangi dalam menjalankan tugas kegubernuran. Selain itu, ia juga mendapat dukungan dari raja-raja lokal di Sulawesi. Mereka memberikan mandat sepenuhnya kepada Sam Ratulangi untuk bertindak atas nama raja-raja dalam menentukan status dari daerah kerajaan.

Sementara itu, pasukan Sekutu termasuk di dalamnya pasukan NICA mulai berdatangan ke Sulawesi melalui Makassar pada 21 September 1945. Rencana NICA untuk berkuasa telah dipersiapkan sebelumnya di Brisbane, Australia, sebagai realisasi *Anglo-Dutch Civil Affairs Agreement* pada 15 Agustus 1945. Perjanjian itu menyatakan Inggris akan menyerahkan kekuasaan sipil di Indonesia kepada Belanda setelah tugas Sekutu melucuti Jepang selesai. Oleh karena itu, selain membawa serdadu, NICA turut memboyong pegawai-pegawai sipil dan polisi istimewa untuk dikerahkan ke berbagai sektor.

Di sisi lain para pemuda Sulawesi menuntut agar kekuasaan segera direbut dari militer Jepang. Seorang tokoh pemuda bernama Muhammad Jusuf Kamah menyerukan agar segenap penduduk kota mengibarkan bendera dwiwarna Merah Putih. Keinginan kelompok pemuda disampaikan



Ratulangi bersama Sukarno dan Hatta. Dok. keluarga Sam Ratulangi.



Ratulangi dan Douwes Dekker. Dok. keluarga Sam Ratulangi.

kepada Gubernur Sam Ratulangi, tetapi Sam Ratulangi tidak segera menyetujui aksi pemuda. Dia lebih memilih melakukan diplomasi dengan panglima balatentara Jepang dan Sekutu kendati upaya diplomasi tersebut juga tidak berhasil. Tentara Jepang bahkan mengancam akan melakukan kekerasan bersenjata jika terjadi perebutan kekuasaan dari pihak Indonesia. Menurut perhitungan Sam Ratulangi, pemuda Sulawesi tidak cukup senjata untuk melawan tentara Jepang. Maka, dia menginstruksikan agar pertumpahan darah di pihak sendiri jangan sampai terjadi apalagi kondisi saat itu Jepang masih memiliki cukup banyak perlengkapan dan secara rutin melakukan persiapan militer.

Dalam situasi yang sulit, Gubernur Sam Ratulangi berhasil membentuk struktur organisasi pemerintahan daerah Sulawesi dan sejak 5 September 1945 pemerintahan yang telah terstruktur tersebut sudah dapat berjalan. Satu hal yang merupakan kecermatan Sam Ratulangi adalah mengonsolidasikan potensi kekuatan pemuda, termasuk pembentukan Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI) yang ditulangpunggungi barisan pemuda eks tentara Heiho dan berpusat di Makassar. Tujuan organisasi ini adalah untuk menghimpun berbagai organisasi pemuda lainnya dalam satu gerakan terpadu. Selanjutnya, Sam Ratulangi bersama Lanto Daeng Pasewang, Soewarno, Andi Zainal Abidin, Tadjuddin Noor, dan Siranamual Daeng Saelan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nasional dengan mengambil alih gedung bekas markas Tentara Dai Nippon di Gowaweg (sekarang Jalan Dr. Ratulangi). Sekolah tersebut didirikan pada 8 Oktober 1945 guna menampung pelajar-pelajar yang putus sekolah akibat perang semasa pendudukan Jepang. Tenaga pengajar diambil dari kalangan pejuang sendiri. Sam Ratulangi sendiri bertindak sebagai kepala sekolah.

Ketika Belanda menerapkan blokade, para pemuda memegang peranan penting dengan berjaga di sepanjang garis pantai pelabuhan Makassar setiap waktu. Diusahakan agar segala bahan makanan yang diangkut jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Namun sebaliknya, pihak Belanda juga turut melancarkan provokasi beragam rupa terhadap rakyat. Mereka melakukan penukaran uang 1:30 untuk memukul roda perekonomian pemerintah Republik. Selain itu NICA menawarkan pembagian kebutuhan pokok seperti kain, susu, dan mentega bagi rakyat dan tokoh masyarakat yang bersedia bekerja sama dengan Belanda.

2.2 Menghadapi Belanda

Dengan kembalinya Belanda ke wilayah Indonesia bagian timur, kedudukan penguasa Republik yang diawaki Sam Ratulangi menjadi surut. Pada 2 Oktober 1945, satu peleton tentara KNIL–yang ditengarai dari unsur Ambon–mengendarai empat buah truk keluar dari Fort Rotterdam dan menembaki pemuda dan rakyat sipil di tepi jalan Lajangiru, Maccini, dan Maricaya. Atas peristiwa itu, massa pemuda dan rakyat secara spontan melakukan pembalasan terhadap orang-orang Ambon yang sudah lama menetap di Makassar. Ironisnya, orang-orang Ambon yang jadi sasaran pembalasan itu sebenarnya mereka yang pro RI binaan Johannes Latuharhary, Gubernur Maluku.

Para bangsawan lokal resah menyaksikan ketegangan yang terjadi. Pada 15 Oktober 1945 bertempat di rumah Raja Bone Arumpone Andi Mappanyukki di Jongaya diadakan pertemuan antar raja-raja di Sulawesi Selatan. Pertemuan itu dihadiri sekitar 40 orang pemuka rakyat. Mereka pada intinya merumuskan deklarasi yang mendukung kekuasaan Republik di Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Sam Ratulangi. Sementara itu, di kancah fisik PPNI mulai melacarkan pemberontakan bersenjata pada 27 Oktober 1945. Mereka merebut tempat-tempat strategis yang diduduki NICA, mulai dari Radio Makassar, stasiun radio Matoangin dan Maradekaja, tangsi polisi di Jalan Gowa, hingga kantor NICA (Conica). Meski perlawanan dilancarkan, nyatanya tentara Australia malah membalas aksi pro Republik dengan represi. Komandan pasukan Australia, Brigjen Chihon, sikapnya lebih pro Belanda ketimbang Brigjen Dougherty yang berkesan simpati terhadap perjuangan Indonesia. Dengan dalih pemulihan pemerintahan sipil, tentara Australia tidak segan menindak dengan senjata dan pada akhirnya mematahkan gerakan bersenjata kelompok pemuda.

Sam Ratulangi menghimpun dan melindungi semua kekuatan pro Republik yang ada di belakangnya dalam satu organisasi. Pada November 1945, Ratulangi mendirikan organisasi Pusat Keselamatan Rakyat. Bertempat di Jalan Gowa yang menjadi kediaman sekaligus kantor gubernur, Sam Ratulangi memimpin Pusat Keselamatan Rakyat dalam menghadapi propaganda Belanda. Pada saat yang sama Ratulangi juga mengadakan petisi yang melibatkan ratusan pemuka rakyat Sulawesi Selatan.

Sam Ratulangi merancang petisi yang berisikan maklumat untuk mempertahankan daerah Sulawesi sebagai bagian mutlak negara Indonesia. Sebanyak 540 orang yang terdiri dari raja-raja, pemuda, tokoh agama, dan pemimpin politik dari Sulawesi Tengah dan Selatan ikut menandatangani petisi. Setelah rampung, petisi diserahkan kepada Panglima Australia sebagai perwakilan Sekutu di Indonesia bagian timur. Kemudian, petisi diteruskan ke Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada Desember 1945 pihak Belanda mengadakan perundingan dengan Gubernur Sam Ratulangi. Kedua belah pihak sepakat untuk memerintah kota Makassar melalui Komite Bersama Indonesia-Belanda yang diawasi oleh Sekutu. Sementara itu, daerah-daerah di luar Sulawesi berada dalam kekusaan Indonesia dengan Sam Ratulangi sebagai pemimpinnya. Status Sulawesi ditentukan kemudian hari berdasarkan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan Belanda yang akan diselenggarakan. Namun, Belanda tidak pernah mematuhi persetujuan yang sudah disepakati. Pada akhir Januari 1946 NICA telah menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi di bawah pengawasan tentara Australia. Sam Ratulangi sendiri selalu menolak ajakan Belanda untuk bekerja sama untuk menjadikan Sulawesi sebagai federasi tersendiri. Sementara itu, muncul pula tokoh lokal yang bemufakat dengan musuh Republik. Sosok yang dimaksud ialah Nadjmudin Daeng Malewa.

Manuver politik Nadjmudin dalam pertemuannya dengan van Mook yang tanpa melibatkan kaum Republik memunculkan friksi dengan Pusat Keselamatan Rakyat yang dipimpin Sam Ratulangi. Dampaknya sudah diperkirakan, yaitu penangkapan-penangkapan sejumlah orang Republik yang dilakukan oleh pihak Belanda. Pada akhirnya, pemerintahan Sam Ratulangi tidak berlangsung lama. Selama sembilan bulan Gubernur Sam Ratulangi berjuang memimpin Sulawesi sebelum mengalami masa pengasingan di pulau seberang.



Penembakan masyarakat sipil oleh tentara KNIL di makassar pada 2 Oktober 1945



Fort Rotterdam, Makassar.



2.3 Diasingkan di Serui

Pada 5 April 1946 Sam Ratulangi bersama anggota Pusat Keselamatan Rakyat dan kelima stafnya ditangkap oleh pasukan NICA. Mereka dijebloskan ke Penjara Hoogepad, Makassar, selama dua bulan. Setelah itu, Sam Ratulangi dan kawan-kawan dibawa ketempat pengasingan yang mula-mula dirahasiakan. Dibalik tindakan mengasingkan Sam Ratulangi, Belanda memiliki rencana terkait proses penyerahan kekuasaan dari pihak Sekutu kepada NICA yang akan berlangsung pada Juli 1946. Pada bulan itu juga NICA berencana menyelenggarakan konferensi di Malino sebagai upaya menyemai embrio pembentukan federasi Negara Indonesia Timur. Oleh karena itu, keberadaan Sam Ratulangi di Makassar dianggap dapat mengancam upaya Belanda menegakkan kekuasaannya di wilayah tersebut.

Pada 18 Juni 1946 Sam Ratulangi ternyata diberangkatkan ke pulau Serui, Yapen, Irian Barat (kini Papua). Dengan menumpang pesawat Catalina, Sam Ratulangi termasuk dalam rombongan pertama yang diterbangkan langsung ke Serui. Sebulan kemudian, istri Sam Ratulangi dan istri kawan-kawannya sesama tahanan diberangkatkan ke Serui menaiki pesawat terbang biasa melalui Ambon, Morotai, dan mendarat di Biak. Diperkirakan bahwa jumlah keseluruhannya empat puluh orang.

Setiba di pengasingan penguasa memaklumatkan larangan kepada penduduk Serui untuk berbaur dengan para tahanan dari Makassar ini. Pada awalnya rombongan Sam Ratulangi dijauhi penduduk karena termakan propaganda Belanda. Mereka sempat dianggap sebagai kriminal dan orang-orang berbahaya oleh pemerintah setempat. Namun, lambat laun penduduk menyadari bahwa para tahanan itu sebenarnya orang-orang baik. Kemudian, penduduk asli menyebut para tahanan itu sebagai "tuan-tuan merdeka". Pemerintah Belanda juga berangsur-angsur membebaskan kelompok Sam Ratulangi untuk berhubungan dengan masyarakat.

Kontak Sam Ratulangi dengan penduduk Serui diawali oleh kedatangan "rahasia" Yakop Thung Tjing Ek, seorang keturunan Tionghoa asal Makassar. Bersama penduduk lain, Benjamin Kajai dan Alwi Rahman, Yakop bergantian mengunjungi Sam Ratulangi hingga ketiganya mengetahui latar belakang mengapa Ratulangi dan kawan-kawan



Ratulangi beserta staf nya saat akan diasingkan ke Serui. Dok. keluarga Sam Ratulangi.

Tokoh Papua Binaan Ratulangi

Tidak kalah penting untuk disebut peran Silas Papare. Silas Papare seorang perawat senior dan mantan tentara Amerika untuk Sekutu setelah Perang Dunia. Ia pernah bekerja pada perusahaan minyak di Sorong dan dipandang memiliki andil besar dalam melayani pasien orang Indonesia yang bekerja di Sorong tanpa memandang asal-usul latar belakangnya. Pada Februari 1946, Silas Papare dikembalikan ke Serui dan bekerja di rumah sakit.

Kedudukannya sebagai tentara Sekutu, menempatkan Silas Papare mula-mula sebagai "lawan" bangsa Indonesia. Namun, sikapnya berbalik simpati kepada Indonesia ketika ia bertemu Ratulangi. Lambat laun Silas melihat kenyataan dan menyadari lambannya perkembangan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia di bawah pemerintahan Belanda/ NICA. Dalam PKII dan setelahnya, Silas menjadi tokoh Papua yang nasionalis dan aktif menentang Belanda. Namanya tercatat sebagai salah satu pahlawan nasional asal Papua.

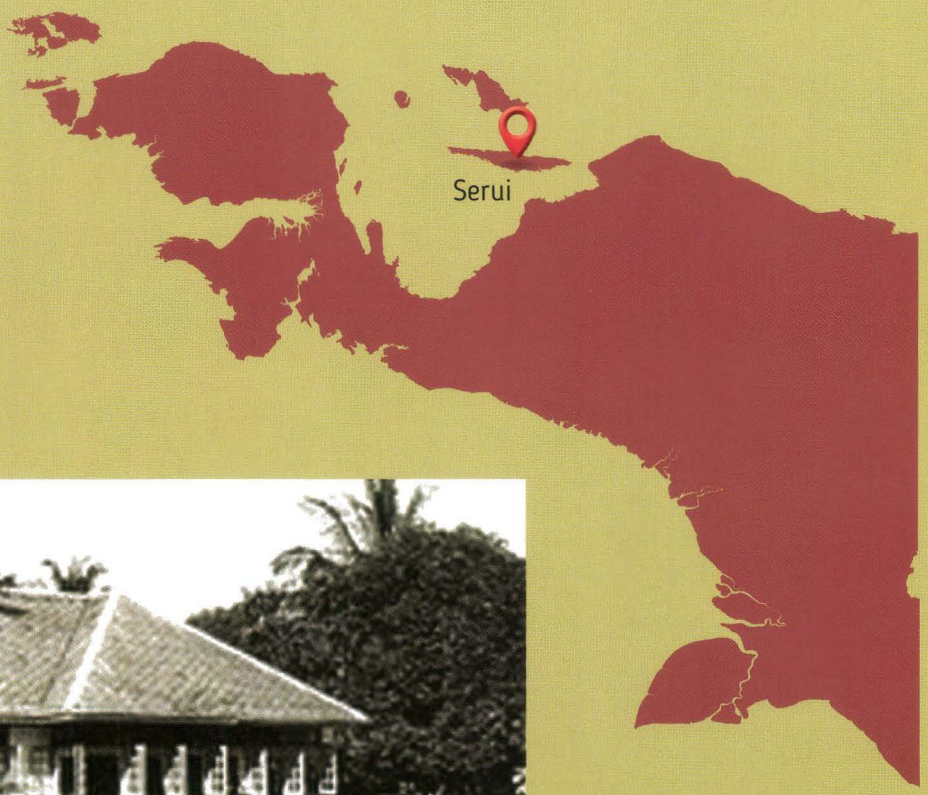



Rumah Penahanan Ratulangi di Serui.

diasingkan di Serui. Hubungan jadi lebih "akrab" lagi ketika Martha Raweyai, istri Yakop, menjadi pengasuh anak-anak keluarga Sam Ratulangi.

Meskipun dalam tahanan pengasingan, Sam Ratulangi tetap menjalankan gerakan perjuangan dengan melakukan relasi yang lebih luas dengan orang-orang Papua di Serui. Ratulangi berupaya memperoleh dukungan dari masyarakat di Serui untuk mempertahankan persatuan dari Sabang hingga Merauke. Mereka adalah guru-guru asal Ambon dan Ternate serta pedagang asal Sumatra dan Makassar. Kepada elite Papua yang bersimpati, Sam Ratulangi meyakinkan mereka bahwa Papua merupakan bagian dari Republik Indonesia.

Orang Papua yang sering berhubungan dengan Sam Ratulangi, antara lain, Silas Papare, Stefanus Rumbewas, Benjamin Kajai, Yakop Thung Tjing Ek, dan Alwy Rahman yang berasal dari Sumatra. Dalam beberapa pertemuan akhirnya diambil kesepakatan untuk membentuk partai. Pada 29 November 1946 sejumlah tokoh Papua di Serui membentuk Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). Sam Ratulangi terpilih sebagai Pemimpin Umum PKII kendati telah mendapat peringatan agar tidak bertindak lebih jauh. Sementara itu, Silas Papare ditunjuk sebagai ketua dan Baldus Dumatubun sebagai wakil ketua. Sekretaris dijabat Alwi Rahman: bendahara dijabatAchmad Djalali; dan para komisaris terdiri dari A. Wanane, A. Waimuri, Benjamin Kajai, dan Paulus Pajawa. Dibentuk pula Dewan Penasihat yang terdiri dari Barnabas Aninam dan L.R.Tiwo.

Dalam aktivitasnya PKII bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Serui sekaligus menyemai semangat kebangsaan Indonesia. Kehadiran Sam Ratulangi di Serui memiliki arti penting bagi perkembangan masyarakat setempat. Ia mampu memotivasi elite Papua di Serui untuk maju sekaligus membimbing untuk mengenal keindonesiaan.

Setelah dua tahun berlangsung kehidupan para tahanan di pengasingan semakin baik. Jika pada tahun pertama para tahanan tidak diberi beras dan gula, pada tahun berikutnya mereka memperoleh banyak sumber pangan dari hasil bercocok tanam di Serui. Tantangan bagi mereka ialah membuka lahan dari rimba yang penuh pohon besar dan hewan melata. Mereka bergotong royong melakukan banyak aktivitas bertani dan mengambil lauk ikan yang melimpah di Lautan Pasifik.



Keluarga Ratulangi yang dibebaskan dari pengasingan di Serui, Papua, tiba di Pelabuhan Tanjungpriok, 14 Juni 1948. Dok. Koleksi Perpustakaan Nasional.

3. Akhir Hayat

Pada 23 Maret 1948 Sam Ratulangi dibebaskan dari tahanan pengasingan. Belanda membawa Ratulangi ke Yogyakarta untuk bergabung dengan pemerintahan Presiden Sukarno. Di Yogyakarta Sam Ratulangi mendapat tugas baru sebagai penasihat pemerintah pusat dan anggota delegasi dalam perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda.

Secara formal Sam Ratulangi diangkat menjadi pegawai tinggi pada Departemen Dalam Negeri. Kemudian, Sam Ratulangi ditetapkan menjadi Duta Besar RI untuk Filipina. Sebelum Sam Ratulangi berangkat menuju posnya di Manila, Belanda telanjur melancarkan agresinya yang kedua. Bersama pemimpin Republik lainnya, Sam Ratulangi ditangkap dan ditahan di Istana Yogyakarta pada 25 Desember 1948. Karena kondisi kesehatannya yang menurun, Sam Ratulangi dibebaskan dan dibawa ke Jakarta pada 12 Januari 1949. Kondisi kesehatan Ratulangi yang menurun tidak terlepas dari sekian banyak aktivitas politik dan perjuangannya selama bertahun-tahun sejak masa muda. Ia keluar masuk hutan di pedalaman Irian Jaya setelah sebelumnya aktif dalam aktivitas politik dan pendidikan selama dan setelah menempuh pendidikannya di dalam dan luar negeri. Penyakit lambung (*maag*) yang ia derita juga merupakan akibat aktivitasnya yang tidak mengenal lelah dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan sehingga pola makan beliau tidak teratur.

Menurut rencana, Belanda akan mengasingkan kembali Sam Ratulangi ke Pulau Bangka bersama Sukarno dan tokoh nasional yang lain. Akan tetapi, rencana pengasingan terhadap Sam Ratulangi itu batal karena gangguan kesehatan pada mantan Gubernur Sulawesi itu. Dengan demikian, Ratulangi menghabiskan hari-hari di tahanan Prapatan, Jakarta untuk istirahat dan berobat. Ia sesekali menjawab wawancara pers baik nasional maupun internasional. Aktivitas politik pun ditinggalkan meski semangat juangnya tetap menyala-nyala.

Semangat yang menyala dalam diri Sam Ratulangi akhirnya padam jua. Pada 30 Juni 1949 Sam Ratulangi wafat akibat penyakit jantung yang dideritanya. Sebelum meninggal, Sam Ratulangi masih sempat bersenda gurau dengan salah satu putrinya, Matulanda yang akrab dipanggi Lani. Perkabungan Ratulangi terasa menyedihkan karena dirinya meninggal dunia dalam status sebagai tawanan musuh.

Jenazah Sam Ratulangi mula-mula disemayamkan di rumah duka Kebun Djahe, Tanah Abang, Jakarta. Kendaraan yang penuh dengan karangan bunga berderet mengikuti mobil yang membawa jasad Sam Ratulangi. Setelah kurang lebih 10 hari, jasadnya dibawa ke pusara terakhir di Tondano. Di tanah leluhurnya itulah Sam Ratulangi dimakamkan.

Atas jasanya, pemerintah Indonesia menetapkan Sam Ratulangi sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1961. Di Manado nama Sam Ratulangi diabadikan sebagai nama universitas dan bandar udara. Pada 1978 nama Sam Ratulangi menandai salah satu jalan di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat. Salah satu kapal kontainer Indonesia yang diproduksi PT PAL pada 2001 juga membubuhkan nama Sam Ratulangi di badan kapal. Terakhir, potret wajah Sam Ratulangi menandai lembaran uang rupiah emisi 2016 bernilai 20.000.



Sam dan Keluarga. Dok. keluarga Sam Ratulangi.

Setiap komunitas etnis (bangsa) yang menghargai diri sendiri mendapatkan sebuah pusaka suci berupa budaya dan tradisi dari para leluhurnya. Kita harus mempertahankan budaya dan tradisi kita dengan seluruh semangat kita karena semangat itu sendiri tidak terbentuk dari apapun selain budaya dan tradisi. Bunga-bunga budaya dan tradisi kita mungkin berubah dan pasti kita perlu memodernkannya, namun kita tidak akan mengubah benihnya karena benih-benih itu tertanam di dalam darah dan hati setiap bangsa.

(Pidato Ratulangi di Manado diwartakan Fikiran, 31 Mei 1930)

"Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya karena pengetahuan merupakan modal yang paling berharga selama hidupmu. Saya tidak meninggalkan harta kepadamu, tetapi saya meninggalkan banyak teman-teman yang akan berkata kepadamu, 'Kami mengenal ayahmu'"
"Tentu kita akan merdeka, akan tetapi saya tak akan dapat menikmati hasil perjuangan kita."

(Pesan terakhir Ratulangi kepada anak-anaknya sebelum meninggal)

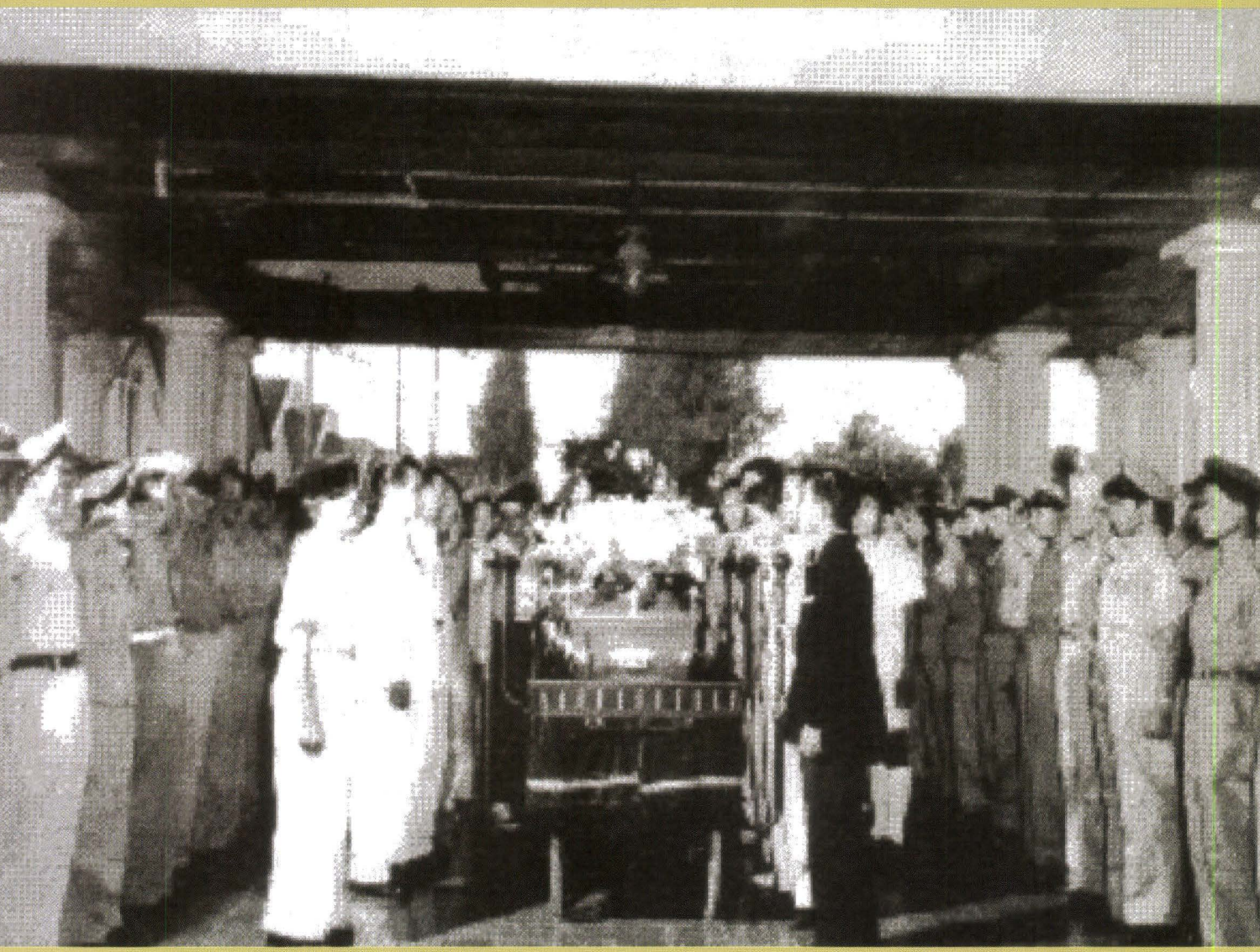

Perwira dan Serdadu KRIS menghormati jenazah Ratulangi. Dok. keluarga Sam Ratulangi.



Johannes Latuharhary

Gubernur Maluku

"...Saya meminta kepada saudara-saudara semuanya, berdirilah serentak di belakang Republik Indonesia..."

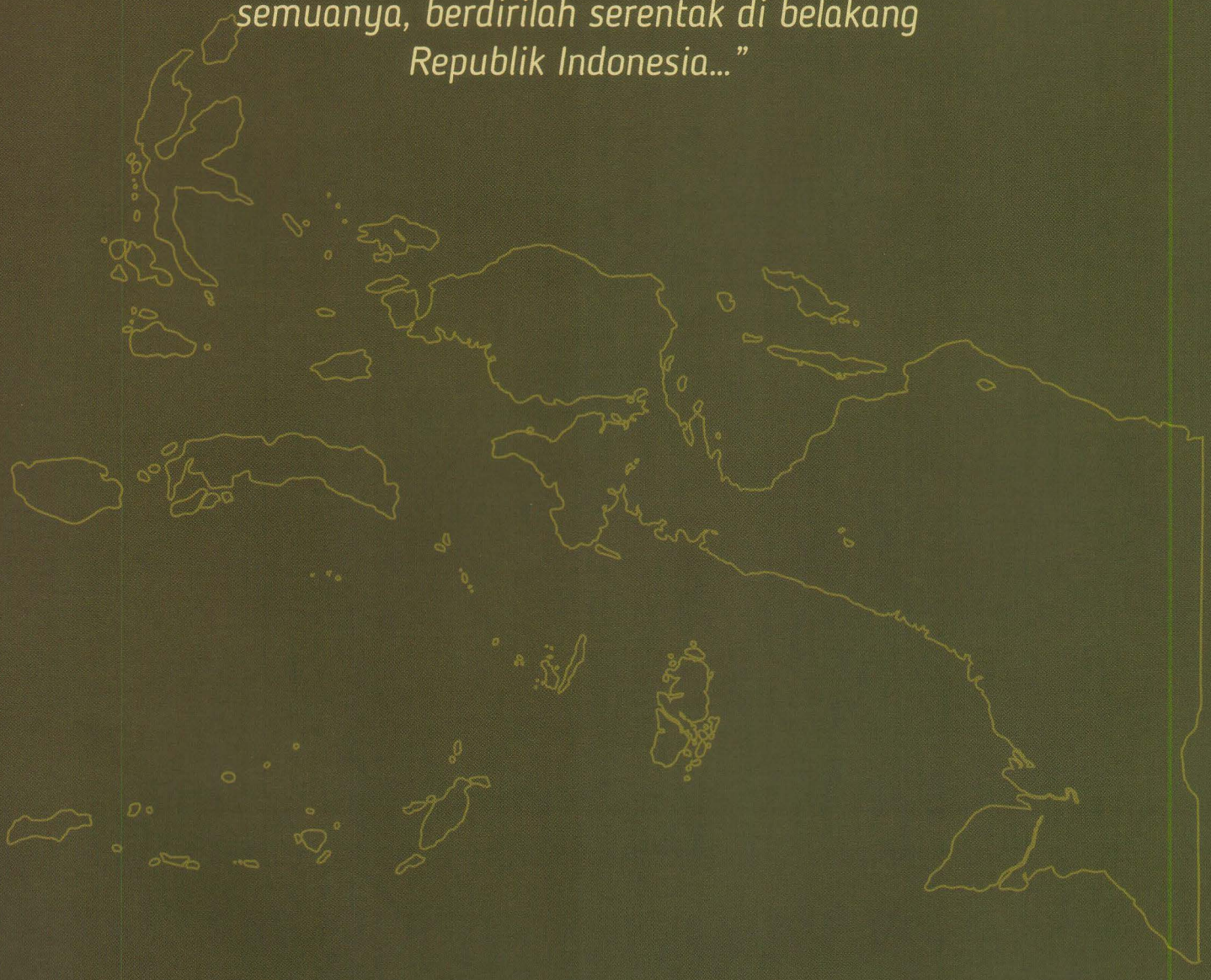

Johannes Latuharhary dilahirkan pada tanggal 6 Juli 1900 di Ulat, Kota Saparua, Maluku. Ayahnya seorang guru bernama Jan Latuharhary, sedangkan ibundanya bernama Josefin Hiariej. Johannnes adalah putra sulung dari empat bersaudara dan bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan. Hal itu menunjukkan adanya pengaruh profesi ayahnya dalam dirinya.

Johannes memperoleh pendidikan dasar di Saparuasche School, yakni sekolah kelas satu atau EersteKlasse School di Kota Saparua. Kemudian, keluarga Latuharhary pindah ke Ambon pada 1909 dan Johannes melanjutkan pendidikan di Europesche Lagere School (ELS). Ia menyelesaikan pendidikan di ELS pada 1917 dengan hasil memuaskan dan kemudian melanjutkan pendidikan di Hogere Burger School (HBS). Johannes adalah siswa yang cerdas dan tekun dalam menempuh pendidikan. Ia selalu naik kelas setiap tahun. Seiring dengan itu, ia menguasai sejumlah bahasa asing, yakni bahasa Belanda, Inggris, Jerman, dan Prancis. Selain itu, Johannes juga memiliki bakat pada bidang sen, yakni musik dan olahraga, terutama sepak bola disamping gemar membaca buku.

Pada 25 Mei 1923 Johannes Latuharhary menyelesaikan studi di HBS dengan hasil memuaskan sehingga membuka jalan baginya untuk melanjutkan studi ilmu hukum di Paris. Namun, tidak lama kemudian ia pindah ke Leiden untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Leiden di Belanda dengan beasiswa dari Ambonsch Studiefonds. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Van Vollenhoven, Johannes berhasil menyelesaikan pendidikan dan berhasil meraih gelar sarjana hukum (*meester in di rechten*) dengan spesialisasi hukum adat dari Universitas Leiden pada bulan Juni 1927. Ia menjadi putra Maluku pertama yang berhasil meraih gelar sarjana di luar negeri. Namun, hal tersebut tidak menjadikan dirinya memiliki banyak uang. Ketika pulang ke Hindia Belanda pada 1927, ia bahkan terpaksa menumpang kapal barang Jerman karena tidak memiliki cukup uang untuk menaiki kapal penumpang.

Setiba di tanah air pada 22 Desember 1927, Johannes Latuharhary diangkat menjadi *ambtenaar ter beschikking* atau pegawai yang diperbantukan pada President van de Raad van Justitie atau Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaya. Karena dianggap berprestasi, dia kemudian diangkat sebagai *landrechter* atau hakim di Surabaya dan menjadi *givier* di Raad van Justitie (semacam dewan kehakiman yang bertugas dan berwenang menangani masalah pidana dan perdata di wilayah Hindia Belanda). Ia bekerja selama 2 tahun di kantor tersebut.Seiring dengan itu, kesadaran akan arti kemerdekaan tumbuh dalam dirinya dan hal tersebut ikut mendorong Johannes untuk bergabung dengan Sarekat Ambon. Organisasi tersebut merupakan wadah bagi masyarakat Ambon Maluku yang berada di Pulau Jawa. Kelak Johannes terpilih menjadi ketua organisasi tersebut.

Saat memimpin Sarekat Ambon, Johannes Latuharhary memasukkan ide-ide dan perspektif baru, terutama ide persatuan dan kemerdekaan. Menurutnya, persatuan dan kesatuan di



Bekas bangunan Europesche Lagere School (ELS) tempat sekolah latuharhary. Dok. Direktorat Sejarah, 2019.

LANGKAH-LANGKAH SAREKAT AMBON DI ERA KEPEMIMPINAN LATUHARHARY

I. Memupuk rasa persatuan di antara penduduk Maluku.

II. Perbaikan dalam bidang sosial-ekonomi penduduk Maluku.

III. Peningkatan dan perluasan pendidikan bagi orang-orang Maluku.

IV. Memberi sokongan keuangan bagi pemuda-pemuda Maluku yang ingin melanjutkan pendidikan.

V. Menentang sentimen-sentimen rasial.

VI. Turut mempertahankan negara dalam keadaan bahaya.

VII. Bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain yang setujuan.

kalangan rakyat Maluku harus solid sehingga kemerdajaan bisa diraih. Ia juga mengubah dasar-dasar Sarekat Ambon dan menyatakan bahwa tujuan organisasi Sarekat Ambon adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia serta memajukan daerah Maluku. Namun, tindakan tersebut membuat pertentangan politik dengan Moluksc Politiek Verbond. Johannes menyadari bahwa penggalangan persatuan nasional dengan partai-partai politik dalam Ambon Raad tidak akan berjalan seperti yang diharapkannya karena tidak ada wakil Sarekat Ambon dalam Volksraad. Wakil Ketua Sarekat Ambon, J.F. Tuwanakotta, mengusulkan agar Sarekat Ambonbergabungdalam PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Namun, usul tersebut ditolak Johannes. Ia berpandangan bahwa Sarekat Islam harus terhindar dari pertentangan agama dan tidak boleh melakukan kerja sama dengan organisasi yang berlandaskan agama.

Dalam perjalanannya, Sarekat Ambon yang berada di luar PPPKI perlu merapatkan barisan dengan organisasi kebangsaan lainnya seperti Budi Utomo dan Indonesische Studieclub. Di sisi lain, pemerintah kolonial tidak mengakui organisasi kemasyarakatan, termasuk Sarekat Ambon yang membuat perjuangan Johannes melalui organisasi itu semakin sulit. Kemudian, hal itu menyadarkan dirinya bahwa cara nonkooperatif saat itu akan menghambat pencapaian tujuan perjuangan. Sebaliknya, dengan jalan kooperatif perjuangan untuk lepas dari penjajahan dan memerdekakan diri akan tercapai. Atas dasar itulah, pada 1932 Sarekat Ambon bergabung dengan PPPKI. Dalam organisasi yang dipimpin Dr. Sutomo itu, Johannes ditunjuk sebagai sekretaris.

Ketika memasuki masa pemerintahan pendudukan Jepang yang bercorak fasis, dinamika partai politik mengalami kemunduran. Pemerintah pendudukan Jepang melakukan penangkapan terhadap pemimpin organisasi pergerakan serta menutup media massa yang sebelumnya terbit pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Penangkapan juga dilakukan terhadap orang-orang Belanda dan orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan pemerintah kolonial Belanda seperti orang-orang Indo, Ambon, Manado, dan Timor. Diantara sekian banyak, Mr. Johannes Latuharhary termasuk orang yang ditangkap oleh pemerintah pendudukan Jepang. Setelah 2 bulan, ia dibebaskan dari tahanan dan pindah ke Jakarta. Pemerintah Pendudukan Jepang memberinya tugas sebagai kepala Kantor Urusan Penduduk Maluku yang berada di suluruh Jawa. Untuk melaksanakan tugasnya itu, ia ditempatkan pada bagian Urusan Dalam Negeri (*naimubu*) di bawah *Gunseikanbu*. Namun, sentimen Jepang terhadap orang-orang Ambon dan keberadaan mereka yang dianggap sebagai mata-mata Sekutu membuat bahwa ia kembali ditahan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Berkat usaha Johannes, yakni Yet Pattiradjawane, Johannes Latuharhary, dan sejumlah tokoh Maluku dibebaskan. Dia kembali dipekerjakan untuk mengurus sekitar 30.000 orang Maluku yang berada di Jawa.


Johannes Latuharhary lahir dari pasangan Januari Latuharhary dan Josefin Hiariej.
1900
Latuharhary kecil pindah ke Ambon untuk bersekolah di Europesche Lagere School (ELS) setingkat sekolah dasar. Latuharhary tampat ELS pada tahun 1917 dan kemudian melanjutkan sekolah ke Hogere Burger School (HBS).
1909
Latuharhary lulus dari HBS yang ditempuhnya selama lima tahun.
25 Mei 1923
Latuharhary berhasil meraih gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) dengan spesialisasi hukum adat dari Universitas Leiden.
Juni 1927
Latuharhary diangkat sebagai ambtenaar ter beschikking (pegawai yang diperbantukan) pada President van de Raad van Justitie (Ketua Pengadilan Tinggi).
22 Desember 1927
Gubernur Latuharhary mengeluarkan seruan yang berisi pernyataan penekanan posisi Maluku yang berada di belakang Republik dan berjuang bersama-sama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
11 Oktober 1945
Latuharhary kembali ke Maluku sebagai Gubernur setelah dihapuskannya Republik Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950.
12 Desember 1950
Kabinet Ali Sastroamidjojo memutuskan menarik kembali Latuharhary ke Jakarta dan memperbantukannya pada Menteri Dalam Negeri. Keputusan itu otomatis mengakhiri jabatan Latuharhary sebagai gubernur Maluku dan membawanya kembali ke Jakarta.
1954
BATAVIA
SURABAYA
8 November 1959
Latuharhary menghembuskan nafasnya yang terakhir.


LEIDEN
AMBON
SAPARUA

Menjadi Gubernur Maluku

Berkat kegigihan para pejuang dan tokoh-tokoh pergerakan, Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebagai anggota BPUPKI dan PPKI Johannes Latuharhary merupakan salah satu saksi mata pembacaan naskah proklamasi tersebut. Selanjutnya, Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi dan Presiden Sukarno menunjuk Johannes Latuharhary menjadi Gubernur Provinsi Maluku. Pengalaman berorganisasi pada masa pergerakan dan kecakapannya dalam mengurus semua keperluan masyarakat Ambon, khususnya yang berada di Pulau Jawa sebelum kemerdekaan merupakan pertimbangan utama penunjukan dirinya sebagai Gubernur Provinsi Maluku.

Tugas pertama yang diemban Johannes Latuharhary sebagai Gubernur Maluku adalah menyebarluaskan berita tentang proklamasi kemerdekaan sehingga didengar dan dipahami rakyat Maluku, termasuk melalui surat kabar, yakni harian *Merdeka*. Pernyataan dalam surat kabar itu berdampak besar terhadap pemuda-pemuda Maluku. Serentak di setiap daerah di Maluku, para pemuda berinisiatif mengadakan berbagai pertemuan dan membentuk Angkatan Pemuda Indonesia Ambon dengan tujuan membela kemerdekaan dan keamanan Indonesia secara damai dalam semangatpersaudaraan.



Peta wilayah kekuasaan Kerajaan Tidore koleksi museum Siwalima, Ambon. Dok. Direktorat Sejarah, 2019.

Situasi perpolitikan nasional yang belum stabil setelah kemerdekaan turut mewarnai perkembangan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Maluku, mengalami pergolakan politik yang tidak biasa jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Jawa dan Sumatra. Selain menjadi daerah yang pertama kali didarati Sekutu, Indonesia bagian timur juga mengalami pergolakan lokal yang lebih masif jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya.

Pada Februari 1946 tentara Australia memasuki kawasan Indonesia bagian timur untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Kedatangan tentara Australia itu disusupi oleh satuan-satuan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang telah disiapkan oleh Van Mookuntuk menjalankan pemerintahan sipil di daerah-daerah yang diduduki tentara Australia. Dengan demikian, tentara Australia yang setengah hati memasuki Indonesia bagianTimur tidak perlu menangani urusan administrasi pemerintahan sipil. Situasi itu membuat Latuharhary yang ditunjuk untuk mengepalai wilayah Maluku dibawah naungan pemerintah Republik Indonesia tidak bisa memimpin Maluku secara langsung. Sebagai Gubernur Maluku, Latuharhary putus hubungan dengan provinsi dan masyarakat Maluku yang berada di Kepulauan Maluku secara langsung. Situasi politik dan transportasi yang sulit kala itu menyebabkan Latuharhary tidak bisa segera kembali ke Maluku sehingga ia menjalankan kepemimpinannya dari Jakarta.

Sementara itu, pendaratan tentara Sekutu dengan membawa serta tentara Belanda dan NICA yang di dalamnya terdapat unsur tentara Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL) asal Ambon membawa kesulitan tersendiri bagi masyarakat Ambon di Jawa. Kenyataan itu makin memperkuat stereotipe bahwa orang Ambon memang setia kepada Belanda seperti terdengar dalam ungkapan *door de eeuwen trouw* 'tetap setia (kepada

PROVINSI MALUKU PADA MASA KEMERDEKAAN



Peta Dasar Badan Informasi Geospasial (BIG), 2019

Memerintah Maluku dari Luar Maluku

7 Agustus 1945
Johannes Latuharhary masuk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

17 Agustus 1945
Ikut melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan terlibat dalam pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.

18 Agustus 1945
Johannes Latuharhary diangkat sebagai Gubernur RI untuk wilayah Maluku.

9 Oktober 1945
Mengawali tugasnya sebagai Gubernur Maluku. Melalui media massa, Johannes Latuharhary mengumumkan kemerdekaan Indonesia kepada orang-orang Maluku.

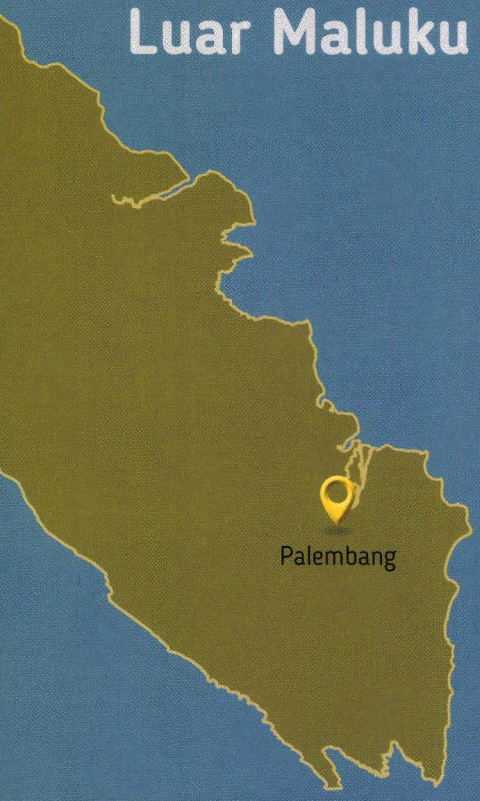

11 Oktober 1945
Gubernur Latuharhary mengeluarkan seruan yang berisi pernyataan penekanan posisi Maluku yang berada di belakang Republik Indonesia dan berjuang bersama-sama untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.

Kantor Kegubernuran

Kantor Pembantu Gubernur

1 November 1945
Kantor Kegubernuran Maluku didirikan untuk sementara di Jakarta.

1 Desember 1945
Kantor Pembantu Gubernur Maluku dibentuk di sejumlah kota.

1 Januari 1946
Kantor Kegubernuran Maluku pindah ke Yogyakarta.

1 November 1945
Kantor Kegubernuran Maluku sementara di Jakarta

12 Desember 1950
Gubernur Latuharhary kembali ke Maluku dan memimpin masyarakat Maluku lewat Ambon.



1 Januari 1946
Kantor Kegubernuran Maluku sementara di Yogyakarta



Selanjutnya, pada Desember 1945 Kantor Pembantu Gubernur Maluku dibuka di beberapa kota di Pulau Jawa dengan pemimpinnya sebagai berikut.

Bandung	dipimpin oleh L. Lopulisa dan Lambert Pelupessy
Sukabumi	dipimpin oleh E. D. Masihelo
Cirebon	dipimpin oleh Leimena, B. J. Tanahatu, Wim Silooy, Tupamahu, dan Lilipaly
Purwokerto	dipimpin oleh I. O. Nanulaitta
Magelang	dipimpin oleh M. Ruhupatty, Atus Kailola, Ely Lesilolo, Mias Nendisa
Semarang	dipimpin oleh J. Bakker, I. R. Lobo, dan J. A. Matahelumual
Yogyakarta	dipimpin oleh Alex W. Huwae, B. D. [Cois] Lilipaly, Alex Sahusilawane, dan Wim Tutuarima
Surakarta	dipimpin oleh Gijs Hahuly
Madiun	dipimpin oleh Karel Pattypeilohy, dan S. Gaspersz
Kediri	dipimpin oleh Ferry Latumeten
Mojokerto	dipimpin oleh Arend Pattirajawane
Malang	dipimpin oleh Librek Nanlohy
Lawang	dipimpin oleh Tentua
Bondowoso	dipimpin oleh J. B. Suitella, I. A. Latuheru
Palembang	dipimpin oleh Dominggus Tomahu
Purworejo	dipimpin oleh J. Tahalele.

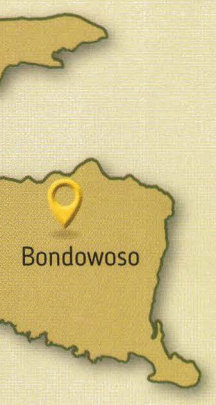

Belanda) sepanjang abad'. Dengan memanfaatkan situasi itu, NICA mulai menyebarkan isu bahwa orang-orang Ambon akan dibunuh oleh rakyat Indonesia sendiri. Akibatnya, pasukan KNIL melakukan perlawanan dan bentrokan dengan rakyat pun tidak bisa dihindari. Situasi makin diperparah oleh respons sejumlah tokoh Ambon di Jawa yang konfrontatif. Pada titik ini Belanda berhasil menerapkan kembali politik *devide et impera*. Pamflet-pamflet yang menyatakan perang tersebar di mana-mana dan surat-surat kabar ikut memberitakannya sehingga situasi makin panas. Di Jakarta terjadi penyerangan dan pembunuhan terhadap orang-orang Ambon. Tentara KNIL membalas dengan melakukan teror dalam masyarakat. Dalam menanggapi hal tersebut, pada 11 Oktober 1945 Gubernur Latuharhary mengeluarkan seruan yang berisi pernyataan penekanan posisi Maluku yang berada di belakang Republik dan berjuang bersama-sama untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.

Pernyataan Gubernur Latuharhary disusul dengan pengiriman sejumlah petugas ke beberapa kota besar di Jawa untuk mempersiapkan pembukaan Kantor Pembantu Gubernur Maluku. Keputusan tersebut diperkuat dengan Maklumat No.1 Pemerintah Provinsi Maluku pada 25 Oktober 1945 sebagai berikut.

Dengan persetujuan P.J.M. Presiden dan Menteri Urusan Dalam Negeri maka pada tanggal 1 November 1945 diadakan Kantor Gubernur Maluku pada sementara waktu di Jakarta, van heutszplei No. 7 dengan maksud seperti berikut:

a. Menginsafkan penduduk bangsa Indonesia Maluku akan mempertahankan kemerdekaannya bangsa dan negara Indonesia
b. Menjamin keselamatannya penduduk tersebut
c. Mengadakan persiapan berhubungan dengan pulangnya penduduk Maluku ke daerahnya, supaya bersama-sama membangunkannya menjadi daerah yang kuat dari Negara Republik Indonesia. (Tekstidakdiedit.)

Untuk menjalankan maksud ini, maka di Surabaya, Jogjakarta, Bandung, dan lain-lain adalah tempat yang dianggap perlu diadakan perwakilan kantor tersebut. Selanjutnya, pada Desember 1945 Kantor Pembantu Gubernur Maluku dibuka di beberapa kota di Pulau Jawa.

Pembukaan Kantor Pembantu Gubernur tersebut membuat masyarakat Maluku di Jawa merasa diperhatikan dan dilindungi oleh pemerintah daerahnya sehingga mempermudah koordinasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat Maluku untuk tetap berada dan berjuang bersama-sama

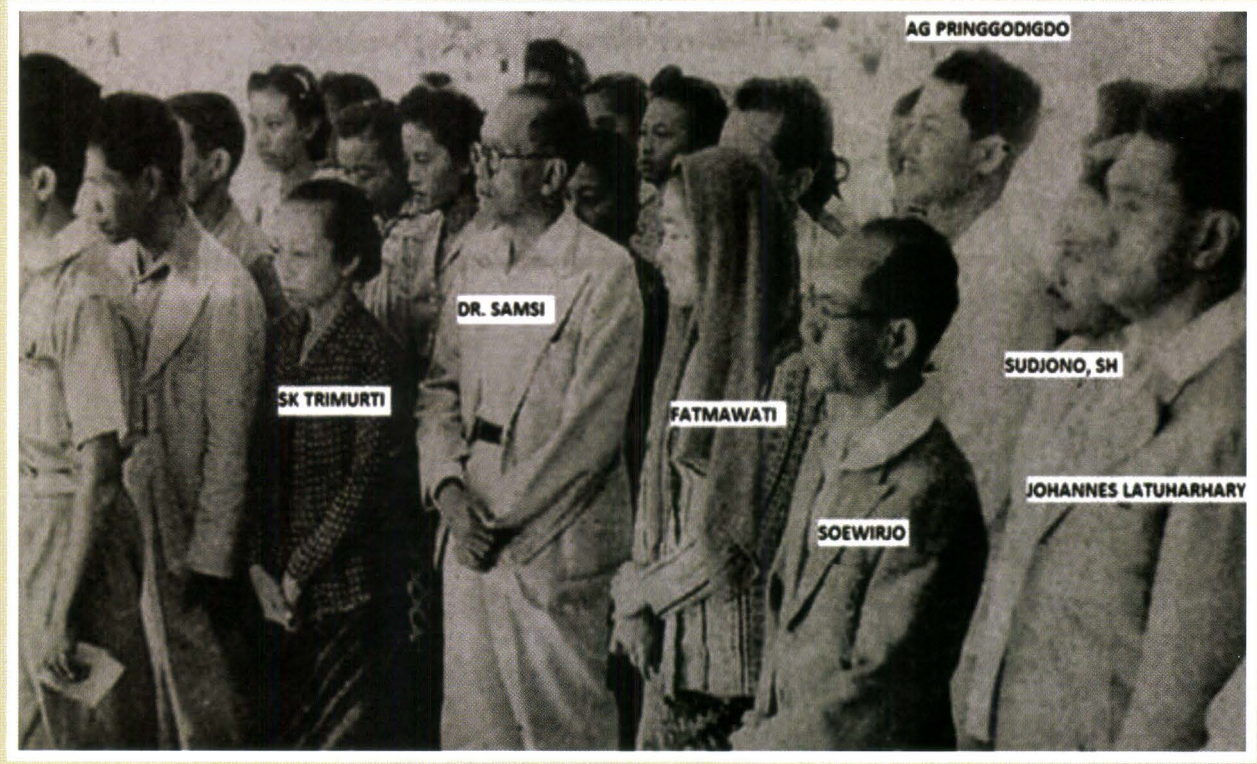

Menyaksikan Pembacaan Proklamasi. Dok: Perpustakaan Nasional RI.



Jenjang Karier:

1927	: Diangkat sebagai asisten Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaya
1929	: Diangkat sebagai hakim di Surabaya.
1931	: Aktif di Serikat Ambon.
1932	: Diangkat sebagai Sekretaris Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).
1943	: Diangkat oleh pemerintah militer Jepang sebagai Kepala Urusan Penduduk Maluku di seluruh Jawa.
1945	: Diangkat sebagai Gubernur RI untuk Maluku.
1954	: Diangkat sebagai pejabat di Kementerian Dalam Negeri RI.

PERNYATAAN PERS LATUHARHARY TERKAIT PROKLAMASI 17-8-1945

Salah satoe berita radio jang disiarkan pada tanggal 5 boelan Oktober tahoen 1945 pada djam 18.20 menjatakan bahwa keratoes-ratoes serdadoe Indonesia (sisa Balatentara Belanda dahoeloe) memadjoekan permintaan kepada pemerintah Australie soepaja mereka diangkoetkan ke Indonesia oentuk berdjoeang bersama-sama saudara-saudara di Indonesia oentuk mempertahankan Indonesia merdeka.

Nah! Saudara-saudara ale Njong!

Tjoba pikir sadiki tentang kabar diatas. Ale maoe dipake djadi alat-alat Belanda kembali.

Balong tjokoep ditjoejoe idong lai?

E, ingatan djangan sampe katoeng boenoe katoeng, tagal Nica poeng tahela.

KITA BANGSA MERDEKA!

HIDOEP SAMA RATA SAMA RASA

Maski kasiang-kasiang katoeng oeroes sendiri!

Angkatan Pemoeda Indonesia-Ambon.

guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, pada Januari 1946 pusat pemerintahan nasional terpaksa dipindahkan ke Yogyakarta. Hal itu membuat Kantor Pusat Gubernur Maluku berpindah ke Yogyakarta, yakni di Margokridongo, kendati Kantor Pembantu Gubernur Maluku di Jakarta yang dipimpin oleh Wim Tutopoly tetap dibuka.

Pada masa awal kepemimpinannya, Gubernur Latuharhary menghadapi masalah seputar prasangka yang telanjur berkembang dalam masyarakat umum yang meragukan loyalitas orang Ambon akibat pengalaman masa kolonial. Namun, Latuharhary berusaha meyakinkan bahwa masyarakat Ambon secara keseluruhan tetap berada di belakang Republik dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Belanda terus berupaya untuk kembali berkuasa di Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah mendirikan dewan penasihat yang beranggotakan delapan orang dan mewakili dua agama, yaitu Nasrani dan Islam. Pembentukan dewan penasihat itu berhubungan dengan janji Ratu Belanda untuk memberi otonomi bagi Indonesia sama seperti yang sudah diberikan pada daerah jajahan Belanda yang lain. Untuk mewujudkan janji tersebut, dewan penasihat mengingatkan pemerintah agar tidak menunda reorganisasi internal di Ambon hingga situasi di Jawa memungkinkan. Hal itu membuat masyarakat Maluku terpecah. Terdapat kelompok yang menginginkan Ambon berstatus seperti Curaçao dan Suriname. Sementara itu, kelompok lain menginginkan Ambon menjadi bagian dari Indonesia karena secara ekonomis masih bergantung dengan Indonesia.



J. Latuharhary (baris pertama paling kiri) saat mengikuti perundingan Indonesia-Belanda di Kapal Renville. Dok. Arsip Nasional Belanda.

Di sisi lain raja-raja Ambon Maluku terkesan dengan ide pembentukan persemakmuran Maluku. Persemakmuran yang dimaksud mencakup wilayah Maluku Utara, Irian Barat, dan Maluku Selatan. Ide pembentukan Persemakmuran Maluku ini didukung oleh kehadiran tiga pemimpin Perkumpulan Kebangsaan Maluku dari Jakarta pada pertengahan April 1946. Mereka berkeinginan bahwa Maluku menjadi bagian dari Indonesia daripada menjadi bagian Kerajaan Belanda. Sementara itu, upaya untuk membentuk negara federal yang dilakukan oleh Van Mook melalui Konferensi Malino dan Denpasar pada 1947 memutuskan pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Kalimantan. Negara Indonesia Timur menggunakan sistem parlementer dengan Sukawati sebagai Presiden, Tadjudin Noor sebagai Ketua Parlementer Sementara dan Nadjamudin Daeng Malewa sebagai Perdana Menterinya. Pada Bulan April 1947 Presiden NIT Sukawati mengundang tokoh-tokoh Republik, termasuk Johannes Latuharhary yang datang bukan dalam kapasitas Gubernur Maluku, melainkan sebagai tokoh yang berasal dari Maluku.

Upaya Belanda untuk membentuk negara federasi melahirkan Aksi Militer II pada 19 Desember 1948. Selanjutnya, negara-negara bentukan Belanda yang bergabung dalam suatu badan musyawarah Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) melakukan konferensi dengan Republik Indonesia di Yogyakarta dan Jakarta.Konferensi yang dikenal dengan Konferensi Inter-Indonesia tersebut menghasilkan putusan untuk membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Di sisi lain, perundingan antara RI dan Belanda terus dilakukan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) Pada 27 Desember 1949 RIS dibentuk. Sukarno diangkat menjadi Presiden dan Hatta diangkat



Latuharhary (mewakili Republik Indonesia) menyerahkan surat pengakuan kedaulatan Negara Indonesia Timur (NIT) dari pemerintah RI kepada Anak Agung Gde Agung selaku wakil dari NIT pada 17 Januari 1948. Dok. ANP.

menjadiPerdana Menteri RIS. Akan tetapi, dalam kenyataannya upaya untuk mempertahankan Maluku sebagai bagian dari wilayah RIS mendapat tantangan di Ambon dan juga Ternate. Aksi demi aksi perlawanan dilakukan dan mencapai puncaknya pada 25 April 1950 ketika J.H.Manuhutu memproklamasikan kemerdekaan bagi Maluku Selatan, lepas dari NIT atau RIS. Karena melihat perkembangan Ambon Maluku hingga pertengahan 1950, pemerintah NIT bekerja sama dengan RIS terus berusaha menyelesaikan persoalan dengan cara damai.

Perebutan kekuasaan dan pengaruh di Maluku sangat kompleks yang melibatkan tiga kekuatan, yakni RI, NIT yang dibantu Belanda, dan kelompok Republik Maluku Selatan pada aras lokal. Pada 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat dihapuskan dan bentuk negara kembali ke negara kesatuan. Presiden Sukarno mengangkat kembali Latuharhary sebagai Gubernur Provinsi Maluku dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pengangkatan kembali Latuharhary sebagai Gubernur Maluku bukan tanpa hambatan. Selain mendapat dukungan, pengangkatannya juga ditolak oleh sebagian pihak dalam masyarakat Maluku. Meskipun demikian, pada 12 Desember 1950 Latuharhary kembali ke Maluku. Dengan berbekal penunjukan dirinya sebagai gubernur oleh Presiden, Latuharhary memimpin kembali negeri kelahirannya. Kali ini langsung di Tanah Maluku.

Berbagai masalah yang dihadapi Gubernur Johannes Latuharhary sangat berat. Jika dilihat dari sisi politik dan keamanan, wilayah Maluku masih mengalami gangguan kemanan, terutama dari pihak Belanda. Sementara itu, jika dilihat dari sisi ekonomi dan sosial, Gubernur Johannes Latuharhary harus menyelesaikan masalah kemiskinan, kelaparan, dan perbaikan gedung yang rusak. Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur Latuharhary mengambil langkah-langkah sebagai berikut ini.

Gub Latuharhary dampingin Sukarno di maluku 1954. Dok: Perpustakaan Nasional



1. Dalam bidang pemerintahan dibentuk struktur yang terdiri dari Residen Koordinator Pemerintahan, Sekretaris Provinsi, Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi, Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Kepala Bagian Politik, Kepala Bagian Umum, Pembantu Umum Gubernur, dan Pembantu Khusus Gubernur
2. Dalam bidang pendidikan, dihimpun guru-guru yang masih "tersisa" di Maluku. Walaupun dalam keadaan yang serba prihatin, guru-guru tersebut tetap semangat memperbaiki pendidikan di Maluku.
3. Pembangunan sosial terlihat dalam pembangunan kembali ibu kota Provinsi Maluku.
4. Pembangunan di bidang agama didasarkan pada kerukunan umat beragama yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat Maluku.
5. Dalam pembangunan di bidang ekonomi dilakukan perubahan dari sistem perekonomian kolonial menjadi sistem perekonomian nasional.
6. Dalam pengembangan seni budaya diarahkan untuk menggali nilai-nilai kebudayaan asli rakyat Maluku. Untuk mencapai tujuan itu dibentuk Inspeksi Kebudayaan, Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
7. Di bidang pertanian diadakan usaha pembukaan sawah di Kairatu dan Seram untuk mencukupi kebutuhan beras di wilayah Maluku.
8. Dalam bidang perindustrian dimulai dengan pembukaan perusahaan batu bata dan kapur di Latulahat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan rakyat yang sedang giat membangun pada masa itu.
9. Untuk mengembangkan bidang perikanan dan kehutanan diusahakan menggali potensi untuk keperluan rakyat dan ekspor; selain penghijauan atas bukit-bukit yang gundul.



Pertemuan Gubernur Latuharhary dgn Sek Kementrian Agama R. Moh. Kajrawi di Ambon-Mimbar Agama, April 1953.

Akhir Masa Jabatan

Sejak pembentukan Yayasan Cengkih pada 1952 hubungan antara Gubernur dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Maluku Tengah mengalami ketegangan. Masalahnya adalah bahwa pembentukan yayasan itu tidak melibatkan DPRDS setempat. Demikian pula dalam penetapan harga cengkih, Gubernur Latuharhary dianggap mengambil jalan sendiri. Ketegangan bertambah dengan pernyataan anggota Dewan bahwa Gubernur memperlambat penyerahan hak-hak otonomi kepada daerah Maluku Tengah. Hingga akhirnya DPRDS memutuskan untuk mengirim delegasi ke Jakarta–yang dipimpin Ketua Dewan itu sendiri–untuk mengurus langsung penyerahan hak otonomi tersebut.

Di Jakarta seorang anggota delegasi DPRDS Maluku Tengah membuat pernyataan keras agar Gubernur Latuharhary diganti. Pernyataan itu mengguncang partai-partai politik di Ambon. Reaksi prokontra terhadap pernyataan itu bermunculan. Dalam sidang DPRDS pada Februari berikutnya, tanpa banyak perdebatan, lewat *voting*, mayoritas anggota menginginkan Latuharhary segera diganti dari jabatannya sebagai gubernur. "Dengan tidak mengurangi kecakapan dan jasa-jasa Mr. Latuharhary sebagai gubernur, dalam waktu yang terakhir ini timbul suara-suara yang ingin melihat seorang yang lain sebagai kepala Provinsi Maluku," tulis *Merdeka* (Maret 1953) saat mengutip suara-suara yang beredar dalam sidang Dewan.

Gubernur Latuharhary tampaknya tidak sedikit pun merasa terganggu oleh kegaduhan politik yang tengah terjadi di Maluku. Di tengah bayangan usul penggantian dirinya, ia tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai gubernur. Namun Situasi makin panas terutama ketika sistem politik pemerintahan nasional beralih menjadi


MR. LATUHARH RY TAK S EGAN MENJAPU SENDIRI:
memperlambatkan penjerahan hak-hak otonomi . (Istimewa)

Gubernur Latuharhary sedang menyapu sebuah lapangan di tengah isu penggantian dirinya. Dok. Merdeka, 1 Maret 1953.

sistem parlementer pada 1953 yang berimplikasi terhadap dinamika politik di daerah. Dalam politik parlementer kekuasaan partai-partai besar sangat menentukan kedudukan politik dalam kabinet dan jabatan-jabatan strategis lainnya termasuk jabatan gubernur.

Dalam suasana tarik-menarik kekuatan politik tersebut, posisi Gubernur Maluku goyah karena kehilangan dukungan dari partai yang tengah berkuasa. Partai Nasional Indonesia dan Partai Masyumi di Maluku meminta agar Latuharhary diganti sebagai gubernur. Kabinet Ali Sastroamidjojo akhirnya memutuskan untuk menarik Johannes kemabli ke Jakarta pada 1954 dan memperbantukannya kepada Menteri Dalam Negeri. Putusan itu otomatis mengakhiri jabatan Latuharhary sebagai gubernur Maluku dan membawanya kembali ke Jakarta.
Nama Latuharhary lambat laun meredup. Namun, banyak orang mengenangnya sebagai sosok sederhana yang sangat mengutamakan kepentingan rakyat di atass egalanya. Empat tahun setelah dia diberhentikan sebagai gubernur Maluku, Johannes Latuharhary mengembuskan nafasnya yang terakhir di Jakarta pada 8 November 1959.



Gubernur Latuharhary di tengah pemuda pejuang asal Maluku. Dok. IPPHOS.

Hari-Hari Terakhir

Oktober 1952 : Gubernur Latuharhary mendirikan Yayasan Cengkih. Hal itu dilakukannya sebagai upaya melepaskan jerat tengkulak di kalangan petani cengkih di Maluku.

Maret 1953 : Akibat menentukan harga cengkih secara sendiri tanpa melibatkan DPRDS, Gubernur Latuharhary terlibat dalam konflik dengan partai-partai politik. Bahkan, PNI dan Masyumi meminta Latuharhary diberhentikan sebagai gubernur.

1954 : Gubernur Latuharhary diberhentikan dari jabatannya kemudian ditarik ke Kementerian Dalam Negeri.

8 November 1959 : Setelah 2 hari mengalami koma, Latuharhary akhirnya wafat di RSCM Jakarta.



Patung Latuharhary di desa Haruku, Maluku. Dok. Direktorat Sejarah, 2019.

Penutup

Perjuangan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan merupakan amanat para pendiri bangsa terhadap generasi penerus. Kendati kini seluruh tokoh kemerdekaan telah terlebih dahulu menghadap sang Maha Pencipta, hasil kerja keras mereka terus dirasakan dan dinikmati oleh mereka yang hidup pada masa berikutnya sehingga rakyat Indonesia dapat menghirup udara segar kemerdekaan. Di sisi lain generasi penerus menerima tongkat estafet untuk mempertahankan kedaulatan dan mengisi kemerdekaan. Tugas mulia tersebut secara nyata telah dirintis oleh delapan gubernur pertama yang telah dijelaskan dalam paparan sejumlah bab terdahulu.

Merefleksikan perjuangan dan kontribusi pemikiran hingga mempertaruhkan jiwa delapan gubernur pertama demi menjaga kedaulatan Republik Indonesia merupakan salah satu upaya terbaik dalam memaknai dan mensyukuri kemerdekaan. Lembaran sejarah kehidupan para gubernur pertama di republik ini diharapkan akan memberi suntikan semangat kepada generasi muda dalam meneladani dan menerapkan nilai-nilai kepahlawanan untuk melanjutkan pembangunan menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dengan demikian, penanaman nilai-nilai kepahlawanan merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dari generasi ke generasi karena generasi mendatang akan hidup dalam rentang tahun yang kian jauh dari masa kemerdekaan. Penulisan buku ini diharapkan menjadi salah satu upaya penanaman nilai-nilai kepahlawanan tersebut.

Secara umum hampir semua gubernur pertama yang terpilih dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah mereka yang telah dikenal sebagai tokoh-tokoh perjuangan dan telah teruji kecakapan dan keberanian dalam mengarungi masa pergerakan dengan segala kesulitan yang dihadapi. Pengalaman dalam menghadapi medan politik pada masa kolonial Belanda yang dilanjutkan dengan kehidupan politik yang serba terbatas pada masa pendudukan Jepang menjadi bekal penting dalam memimpin provinsi masing-masing. Selain itu, penunjukkan mereka untuk memimpin delapan provinsi pertama Republik Indonesia merupakan pertimbangan matang Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Mereka merupakan tokoh pergerakan yang telah berkiprah dalam perjuangan menentang kolonialisme Belanda dan secara eksplisit menyampaikan sikap anti penjajahan mereka melalui berbagai kegiatan pergerakan. Karena sikap anti kolonial mereka yang lantang, sejumlah gubernur bahkan pernah mendekam dalam jeruji besi pemerintah Kolonial Belanda. Tidak hanya dikenal oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai tokoh yang berbahaya, dengan sudut pandang yang berbeda, masyarakat di provinsi masing-masing mengenal mereka sebagai tokoh pergerakan yang berjuang tanpa mengenal lelah.

Sebagai gubernur yang menjabat pada masa transisi dari sebuah bangsa yang terjajah menjadi sebuah bangsa yang merdeka, para gubernur tersebut menghadapi sebuah tantangan dalam menata sebuah birokrasi dalam sistem pemerintahan yang baru. Seperti halnya penataan pemerintahan di tingkat pusat, upaya untuk menata pemerintahan daerah terkendala dengan perbedaan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada. Selain itu, minimnya ketersediaan dana untuk menjalankan pemerintahan merupakan faktor lain yang juga membuat para gubernur tersebut tidak dapat menjalankan program-program awal pemerintahan daerah secara maksimal.

Jika berbagai faktor internal seperti sarana dan ketersediaan dana berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan daerah, terdapat pula faktor eksternal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah daerah, terutama keberadaan kelompok-kelompok yang cenderung kepada sikap anti republik. Kelompok-kelompok tersebut umumnya masih memiliki keterikatan dengan kekuatan-kekuatan asing, terutama Belanda dan Jepang yang masih memiliki pengaruh kuat di Indonesia pascaproklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan yang dikomandangkan di Jakarta dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan penuh pertimbangan sehingga bisa dibayangkan betapa keamanan di daerah masih belum terjamin. Sejumlah gubernur yang notabene merupakan kepala pemerintahan daerah bahkan dengan mudah ditangkap pasukan Belanda dan diasingkan dari wilayah yang menjadi wewenangnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintahan Republik Indonesia yang baru terbentuk belum diakui oleh beberapa kelompok masyarakat di daerah, terutama yang berafiliasi dengan kekuatan atau ideologi asing. Di lain pihak, keterbatasan kekuatan militer di awal berdirinya republik ini belum mampu melakukan perlawanan terhadap penangkapan tersebut. Ironisnya, penangkapan terhadap para kepala daerah pertama terjadi di era kemerdekaan saat kedaulatan atas wilayah Republik Indonesia telah diakui oleh sejumlah negara di dunia.

Upaya untuk melakukan napak tilas perjuangan delapan gubernur pertama diharapkan menginsipirasi tidak hanya pelajar dan mahasiswa, tetapi juga para pejabat di pemerintahan daerah untuk dapat memberikan kontribusi terbaik mereka bagi kemajuan daerah masing-masing di tengah maraknya pemekaran wilayah dan gaung otonomi daerah yang semakin kuat. Jika pada masa lalu para gubernur pertama telah berkorban dalam menyebarluaskan berita proklamasi dan mempertahankan kedaulatan daerah sebagai amanah yang dititipkan kepada mereka oleh pemerintah pusat, upaya untuk terus memajukan daerah sebagai penyempurna tugas para kepala daerah pertama tersebut patut ditunaikan di tengah alam kemerdekaan.

Daftar Pustaka

1977/1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bali.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

1983/1984. *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bali.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

1988. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

1999. *Himpunan Risalah Sidang-Sidang.* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

A. A. G. N. Ari Dwipayana. 2001. *Kelas dan Kasta: Pergulatan Kelas Menengah Bali.* Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

A. A. M. Djelantik. 1997. *The Birthmark: Memoirs of a Balinese Prince.* Hong Kong: Periplus.

A. H. Nasution. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid II: Diplomasi atau Bertempur.* Bandung: Penerbit Angkasa.

A. H. Nasution. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid III Diplomasi Sambil Bertempur.* Bandung: Penerbit Angkasa.

Abeyasekere, Susan. 1973. "The Soetardjo Petition" dalam *Indonesia*, no. 15.

Anak Agung Bagus Wirawan. 2012. *Pusaran Revolusi Revolusi Indonesia di Sunda Kecil 1945-1950.* Denpasar: Udayana University Press.

Anderson, Benedict R. O'G. 1972. *Java in a Time of Revolution.* Ithaca: Cornell University.

Des, Alwi. 2012. *Pertempuran Surabaya November 1945.* Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer.

Djawatan Penerangan Propinsi Jawa Barat. 1952. *Republik Indonesia: Provinsi Jawa Barat.* Jakarta: Kementerian Penerangan.

Djawatan Penerangan Propinsi Kalimantan. 1952. *Republik Indonesia: Provinsi Kalimantan.* Jakarta: Kementerian Penerangan.

Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi. 1953. *Provinsi Indonesia: Sulawesi.* Jakarta: Kementerian Penerangan.

Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara. 1953. *Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Utara.* Jakarta: Kemenerian Penerangan.

Frank, Palmos. 2016. *Surabaya 1945, Sakral Tanahku.* Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Gonggong, Anhar. 1983. *R.P. Soeroso: Dokumen-Dokumen Terbatas tentang Dirinya.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

H.N., Irna dan Hadi Soewito. 1994. *Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan (Bagian I).* Jakarta: Grasindo.

Hendi, Jo. 2015. *Zaman Perang: Orang-orang Biasa dalam Sejarah Luar Biasa.* Yogyakarta: Mata Padi.

I Ketut Ardhana. "Balinese Puri in Historical Perspective: The Role of Puri Satria and Puri Pamacutan in Social and Political Changes in Badung, South Bali 1906-1950," Tesis M.A. Desember 1993.

I, Made Pageh. 2011. *Konteks Lampah Mr. I Gusti Ketut Pudja 1908-2010: Kepahlawanan dan Perjuangan Sejarah Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Denpasar: Pustaka Larasan, MSI Cabang Buleleng, Universitas Negeri Pendidikan Ganesha Singaraja, dan Pemerintah Daerah Buleleng.

I., O. Nanulalitta. 1982/1983. *Johannes Latuharhary, S.H.: Hasil Karya dan Pengabdiannya.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Isa, Teuku Mohammad (ed.). 1999. *Mr. Teuku Moehammad Hasan: Dari Aceh ke Pemersatu Bangsa.* Jakarta: Papas Sinanti.

Kartohadikusumo, Setiadi. 1990. *Soetardjo: "Petisi Soetardjo" dan Perjuangannya.* Jakarta: Sinar Harapan.

Kementerian Penerangan RI. 1953. *Republik Indonesia: Propinsi Jawa Timur.* Malang: Kementerian Penerangan.

Klinken, Gerry van. 2010. *5 Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen.* Yogyakarta: LKis.

M. P. B. Manus, dkk. 1993. *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Manuskrip (Tidak diterbitkan), *Mengenang 50 Tahun Wafatnya Dr. G.S.S.J. Ratu-Langie.*

Manus, MBP, dkk. 1993. *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Jilid 1.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Marwati, Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.). 2010. *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Meteray, Bernarda. 2012. *Nasionalisme Ganda Orang Papua.* Jakarta: Kompas.

Noor. 1981. *Teruskan . . . Gawi Kita Balum Tuntung.* Banjarmasin: Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45 dan Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Kalimantan Selatan.

Nugroho, Notosusanto. 1985. *Pertempuran Surabaya.* Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Prima, Biro Sejarah, 1976. *Medan Area Mengisi Proklamasi.* Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area.

R., Z. Leirissa. 1975. *Maluku dalam Perjuangan Nasional Indonesia.* Jakarta: Lembaga Sejarah Universitas Indonesia.

Ratulangie, G.S.S.J. 1984. *Indonesia di Pasifik: Analisa Masalah-masalah Pokok Asia-Pasifik.* Jakarta: Sinar Harapan.

Reid, Anthony. 2012. *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional.* Depok: Komunitas Bambu.

Richard, Mc Millan. 2005. *The British Occupation of Indonesia 1945-1946.* London and New York: Routledge,

Ricklefs, M. C. 1993. *A History of Modern Indonesia Since c.1300* ., California: Stanford University Press.

Ricklefs, M. C. 2011. *Sejarah Indonesia Modern.* Yogyakarta: UGM Press.

Rika, Umar. 1986. *Mr. I Gusti Ketut Pudja: Riwayat Hidup dan Pengabdiannya.* Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekretariat Negara RI. 1998. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI.* Jakarta.

Smail, John. R.W. 2011. *Bandung awal Revolusi 1945–1946.* Depok: Ka Bandung.

Shah, T.H.M Sulaiman (ed.). 1995. *Dr. Mr. Moehammad Hassan: Salah Seorang Pendiri Republik Indonesia dan Pemimpin Bangsa.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Suhario, Padmowirio. 2001. *Memoar Hario Kecik.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suhario, Padmowirio. 2009. *Pemikiran Militer I Sepanjang Masa Bangsa Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suriani. 2015. *Pasukan. MN 1001/MTKI.* Banjarmasin: Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Kalimantan Selatan.

Sutjiatiningsih. 1977. *Pahlawan Nasional Gubernur Suryo.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Wawancara

Gusti Firdausi Nusyirwan Noor (cucu Pangeran Mohammad Noor), 16 Agustus 2019.

Henriete Josefine Mans (anak pertama Johannes Latuharhary), 8 Mei 2019.

I Gusti Made Arinte (anak ke-2 I Gusti Ketut Pudja), 14 Mei 2019.

Matulanda Sugandi Ratulangi (Oma Lani, 86 tahun), putri keempat dari istri kedua Samuel Ratulangi, 20 Mei 2019.

Setia Dharma Madjid (cucu menantu Soetardjo Kartohadikoesoemo), 5 Juli 2019.

Wawancara dengan Keluarga Gubernur Pertama di Indonesia



Wawancara dengan Henriete Josefine Mans (Anak Ke-1 Gubernur Johannes Latuharhary)

Bagaimana keluarga melihat sosok Johannes Latuharhary?

"Saya mengenangnya sebagai seorang ayah yang sangat penyayang. Walau saat-saat zaman perjuangan dulu, kondisi kami serba prihatin, dia tetap selalu berupaya untuk yang terbaik buat istri dan tujuh anaknya. Sebenarnya. ayah saya harus berbagi perhatian mengingat saat kami di Jakarta dan Yogya, ayah saya dianggap sebagai pemimpin orang-orang Ambon (Maluku) yang ada di Jawa. Jadi, kalau ada apa-apa terkait orang Maluku, ayah sayalah yang dicari. Berbeda dengan kebanyakan orang Maluku yang selalu berperangai menyala-nyala, dia itu orangnya justru sangat tenang sekali. Yang paling saya kenang, dia itu selalu siap sedia menolong orang yang sedang susah."

Ayah Anda pernah marah?

"Dia tidak pernah sedikit pun membentak kami. Justru karena itu kami menjadi sangat segan dan hormat kepadanya. Bilamana salah seorang dari kami dipanggil, kami kerap gemetar. Padahal, dia sama sekali tidak pernah marah, apalagi memukul."

Ada nasihat khusus yang selalu diingat oleh anak-anaknya?

"Harus selalu rajin belajar dan kalau berteman, tidak boleh memilah-milah suku atau agama. Dia pun tidak menyukai kita (jika) hanya bergaul dengan orang kaya atau bangsawan. Dengan siapa pun harus bergaul, katanya. Oh ya, dia juga selalu bilang jangan terlalu memanjakan keinginan kepada sesuatu. Kalau tidak bisa memiliki, ya sudah."

Pak Latuharhary pernah dikecam oleh sebagian orang Maluku pada saat beliau datang ke Maluku. Mengapa?

"Ya pernah. Suatu hari pada tahun 1950-an, ayah saya pernah dituduh sebagai seorang koruptor. Ya Allah, kami betul-betul sedih mendengar fitnah sebagian kecil orang di Ambon itu. Bagaimana bisa dia korup, sedangkan dia mengajarkan kepada kami untuk merasa bersyukur dengan apa yang kami punya dan jangan menginginkan barang yang sudah menjadi hak orang lain. Sebetulnya, fitnah itu datangnya dari seorang tentara bernama Manggus. Kabarnya, dia menginkan saya untuk jadi istrinya, tapi saya tidak mau. Nah, sejak itulah dia terus menebar kebencian kepada keluarga kami. Salah satunya dia bilang, Latuharhary itu koruptor besar. Saya betul-betul sedih jika ingat soal itu."

Oh ya, Pak Latuharhary hobinya apa?

"Dia hanya main tenis aja."

Apa harapan Pak Latuharhary kepada Indonesia?

"Dia sangat mengidamkan persatuan. Dia tidak suka kita tercerai berai hanya karena beda suku dan agama."

Sebagai anaknya, anda pasti mengetahui prinsip ayah anda?

"Saya ingat sekali dia selalu dekat dengan Al-Kitab. Buku kecil itu selalu dia bawa ke mana-mana. Dia percaya, kehendak Tuhan selalu ada di mana-mana."

Bagaimana keluarga melihat kiprah perjuangan Pak Latuharhary?

"Ketika Ambon hancur lebur karena perang, sebagai gubernur dia mencoba meyakinkan kembali rakyatnya untuk kembali pada kasih sayang dan persatuan. Awalnya, banyak yang mencela, tapi lama-lama orang melihat kesungguhannya dan percaya kembali untuk bergabung dengan Republik Indonesia."

Sebagai anak pertama, ada kenangan berkesan terhadap ayah anda ?

"Dia sangat senang saat saya menikah di Ambon. Saat itu banyak saudara-saudara dari kalangan Islam maupun Kristen, datang membantu kami. Sangat spontan tapi itulah tradisi asli kami. Ayah saya sangat senang dengan situasi itu dan menaruh rasa hormat kepada mereka yang selalu mengupayakan kerukunan."

Bisa cerita bagaimana pengalaman saat ayah Anda harus berjuang di Jakarta dan Yogyakarta pada 1945–1949?

"Suatu hari pada 1946 kami harus pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemindahan itu harus berlangsung diam-diam karena menghindar dari pengawasan tentara Belanda. Bung Karno juga termasuk yang harus hijrah ke Yogya saat itu. Saya ingat ketika di kereta api menuju Yogyakarta, adik-adik saya lapar dan merengek, mulut mereka langsung ditutup supaya tidak ketahuan sama orang-orang Ambon pro Belanda yang menjaga perlintasan kereta api. Rasanya lama sekali perjalanan itu. Sampai akhirnya kami tiba di Yogyakarta."



Wawancara dengan I Gusti Made Arinte (Anak Ke-2 Gubernur I Gusti Ketut Pudja)

Bagaimana keluarga melihat sosok I Gusti Ketut Pudja?

"Kami mengenalnya sebagai seorang lelaki yang pendiam. Tak ada yang paling beliau sukai selain membaca, baik itu membaca koran maupun membaca buku. Ayah saya itu mengajarkan untuk tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Kepada kami anak-anaknya, selalu ditekankan untuk segera menyelesaikan semua pekerjaan dan tugas. Itu pendidikan yang kami tidak pernah lupa dari beliau."

Ayah Anda memiliki hobi apa?

"Beliau itu hobinya itu main tenis. Saya ingat sekali beliau rutin bermain tenis di Jalan Pegangsaan Timur (Jakarta)."

Ada nasihat khusus yang selalu beliau sampaikan kepada anak-anaknya?

"Ya tentu saja ada. Dalam setiap kesempatan, beliau selalu memberikan nasihat kepada kami untuk selalu berhemat. Dalam setiap hal. sebagai contoh, waktu saya baru datang di Jakarta (dari Yogyakarta) dan masih tinggal di sebuah hotel, saya dinasihati oleh beliau untuk jangan menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak mendesak. Makanya, kalau pulang sekolah, saya pulang-pergi tetap naik trem, tidak menggunakan taksi atau mobil. Bahkan, Ayah menyarankan jika masih bisa, agar uang yang ada ditabungkan saja, jangan mencoba untuk hidup boros. Itulah yang menyebabkan saya begitu hemat sampai sekarang. Itu sudah saya jalani sejak saya sekolah di UI. Bahkan, waktu kuliah, segala keperluan saya selalu saya usahakan ambil dari tabungan saya."

Jadi bisa dikatakan Pak Pudja itu seorang pejabat yang bersahaja ya?

"Ya begitulah. Beliau itu sebetulnya selalu berusaha patuh kepada pemerintah dan sangat anti memanfaatkan fasilitas negara. Sebagai contoh, saya dan saudara-saudara saya sangat sangat dilarang oleh ayah untuk mempergunakan mobil dinas. Jangankan memakainya, memegangnya saja tidak boleh. Tapi, dasar anak muda, kadang saya mencuri-curi kesempatan dan meminta supir ayah untuk mengajarkan kami mengendarai mobil. Tapi, ya namanya mencuri kesempatan, tidak bisa banyak berbuat. Kami hanya bisa belajar memundurkan mobil saja, enggak bisa maju-maju."

Bisa diceritakan bagaimana perjalanan hidup Pak Pudja?

"Ayah saya lahir pada 19 Mei 1908. Ketika HIS di Bali dididirikan pada 1914, beliau bersekolah di sana. Sebelumnya, waktu Mr. Pudja masih kecil dan kakak-kakaknya tidak sekolah, ayahnya yang seorang mantri candu memanggil guru ke rumah untuk mengajarkan anak-anaknya menulis dan berhitung. Tamat dari HIS Singaraja pada 1920, ayahnya kemudian mengirim Mr. Pudja ke Malang untuk melanjutkan sekolah ke MULO. Setelah 3 tahun, dari MULO kemudian dia melanjutkan ke AMS di Bandung. Usai dari AMS, dia melanjutkan ke RHS di Batavia dan lulus pada 1934. Begitu lulus, ayahnya langsung meminta beliau untuk pulang ke Bali. Padahal, ayah saya inginnya meneruskan ke negeri Belanda. Tapi, ya tidak boleh. 'Sudah kamu cukup di sini saja, kamu harus pulang ke Bali,' kata ayahnya. Tahun itu juga Mr. Pudja pulang dan kemudian dinikahkan dengan sepupunya yang bernama I Gusti Made Mirah. Mr. Pudja kemudian bekerja di Karesidenan Bali-Lombok sebagai pegawai di Raad van Kerta dan menjadi kepala pengadilan di Singaraja. Setelah itu, dia diangkat sebagai kepala Raad van Kerta di Badung. Waktu itu

bala tentara Jepang masuk pada Maret 1942. Beliau didaulat untuk menjadi *rijikan dairi* oleh tentara Jepang. Terakhir, beliau diangkat sebagai penasihat. Pada sekitar 1945 beliau ditunjuk agar datang ke Jakarta guna bertemu dengan Bung Karno untuk membahas soal kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada 14 Agustus 1945 Mr. Pudja ke Jakarta dan menginap di Hotel Des Indes. Kemudian, pada 16 Agustus 1945, dengan dr. Widyodiningrat, beliau pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk merembukkan naskah proklamasi. Jadi, pada 17 Agustus 1945 itu beliau hadir saat penaikan bendera di Peganggasaan Timur. Tanggal 18 Agustus 1945, selaku anggota PPKI, beliau ikut konferensi pembuatan Undang-Undang Dasar. Oh ya, saat pembahasan itulah beliau yang mengusulkan alinea ketiga Undang-Undang Dasar untuk diganti kata *Allah* dengan *Tuhan*. Jadi, "berkat rahmat Allah" menjadi "berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa".

Bisa diceritakan bagaimana kiprah beliau saat menjadi gubernur?

Pada 19 Agustus 1945 beliau diusulkan untuk menjadi Gubernur Sunda Kecil. Maka, setelah selesai pembuatan Undang-Undang Dasar, pada 22 Agustus 1945 beliau bersama 5 orang lainnya diangkat sebagai Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia di Sunda Kecil oleh Bung Karno. Kemudian, baru pada pelantikan kabinet pertama, istilah "Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia" itu diubah namanya menjadi gubernur. Selain Mr. Pudja dari Sunda Kecil, ada 7 orang lain yang diangkat sebagai gubernur untuk wilayah-wilayah lain di Indonesia. Setelah menjadi gubernur, mereka berangkat ke Bali dan mengambil kedudukan di Singaraja sebagai ibu kota Sunda Kecil. Beliau kemudian mengangkat para pembantunya. Pada 9 Oktober 1945 beliau memimpin rakyat Bali untuk mengupayakan penaikan bendera Sang Merah Putih di Singaraja. Namun, pada 11 Maret 1945, saat mengadakan rapat dengan para pembantunya, Mr. Pudja ditangkap oleh tentara KNIL kemudian dipenjara selama 2 tahun di penjara Pekambingan. Penjara itu sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian, pada 13 Maret 1948 dia dibebaskan. Namun, sebelum dibebaskan, dia meminta untuk dilepas secara resmi di wilayah Republik Indonesia, tidak di Bali yang saat itu sesuai dengan kesepakatan Renville dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Belanda."

Mengapa tidak mau di Bali, kan itu tanah tumpah darahnya?

"Waktu di penjara, Mr. Pudja dan kawan-kawannya selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di luar. Tahun 1946 Anak Agung Gde Agung dengan Van Mook mengadakan konferensi Denpasar. Mereka kemudian sepakat mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT). Beliau marah sekali dengan pendirian NIT itu. Ketika beliau diajak untuk bergabung dengan NIT oleh Anak Agung Gde Agung, beliau menolak mentah-mentah. 'Saya diangkat oleh Bung Karno bukan oleh kalian! (Anak Agung Gede Agung Perdana Menteri NIT dan Sukowati Presiden NIT). Makanya, beliau lebih memilih untuk mengabdi di Yogja saja. Baru setelah NIT bubar, dia baru mau ke Bali lagi."

Bagaimana kiprah beliau saat tidak lagi menjadi gubernur?

"Beliau sempat aktif sebagai menteri dalam Kabinet Djuanda. Kemudian, pada 1954 beliau diminta untuk menjadi anggota Dewan Pengawas Keuangan. Beliau kemudian pindah ke Jakarta terus tinggal di Hotel Des Indes selama 2 tahun. Waktu Abdul Karim Pringgodigdo diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas Keuangan, ayah saya menjadi wakilnya, tapi tak lama karena Pak Pringgo meninggal. Lalu, ayah saya naik menjadi ketuanya. Belia kemudian mengubah nama lembaga menjadi Badan Pemeriksa Keuangan."

Kenapa bisa ada perubahan seperti itu?

"Menurut ayah saya, kalau menggunakan istilah *dewan* kesannya kita masih berdasarkan konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang sudah bubar. Kalau mau mengacu pada UUD 1945, ya istilahnya harus diganti menjadi badan.



Augustina Eferdina Matulanda Ratulangie (86 tahun). Anak ke 4 (dari 5 bersaudara) Sam Ratulangi dari istri kedua

Bagaimana sosok Sam Ratulangi di mata keluarga?

Seperti saya kembali ke waktu kecil. Dia seorang ayah yang mempunyai perhatian kepada anak-anaknya. Kadang-kadang ngobrol kadang-kadang suka berekelakar.

Bagimana Sam Ratulangi terpilih sebagai gubernur Sulawesi?

Tidak terpilih tetapi ditunjuk dengan satu surat Keputusan Presiden yang ditandatangani sendiri oleh Bung Karno.

Mengapa Sam Ratulangi yang ditunjuk Sukarno sebagai gubernur Sulawesi?

Mereka sudah berkenalan. Pada 1965, saya pernah dengar Bung Karno berpidato di Istora Senayan (sekarang Stadion Gelora Bung Karno -red) bahwa dia angkat Sam Ratulangi yang sudah dikenalnya sejak 1922. Jadi figur itu (Ratulangi) sudah tertanam perkenalannya waktu Bung Karno masih jadi mahasiswa naik sepeda di Bandung.

Apa saja kebijakan Sam Ratulangi semasa menjabat gubernur Sulawesi pertama?

Dia bisa bergaul dengan siapa saja. Dia punya firasat untuk memilih orang jujur menjadi berkat. Entah dia dapat feeling darimana. Dari situ kemudian mendirikan Sudara - Sumber Darah Rakyat - untuk mengorganisasikan gerakan rakyat. Jasa-jasanya menanam kesadaran kemerdekan di Sulawesi hingga sampai Papua.

Seperti apa pengalaman sewaktu Sam Ratulangi sekeluarga diasingkan ke Serui?

Waktu ayah ditangkap dan dibui, Ibu dipanggil (pemerintah Belanda). Katanya kami sekeluarga mau dikirim ke suatu tempat yang terbangnya berjarak 10 jam dari Makassar tapi tidak diberitahu dimana. Ternyata ke Serui di Papua. Di sana lingkungannya bagus dan indah. Orang nya lugu tapi saya suka main sama anak-anak Papua. Mereka suka menyelam bikin kacamata dari kayu.

Kepada masyarakat, Belanda menyampaikan dengan memakai istilah dan cerita Alkitab - karena disana banyak Protestan - bahwa kami adalah oknum berbahaya jadi harus berhati-hati. Ibu saya kalau masak, dapurnya menghadap ke jendela yang terbuka. Jadi mereka suka datang menghampiri di jendela itu. Mereka suka sapa "selamat pagi Nyonya, selamat malam Nyonya". Mereka halus budinya. Ayah saya pintar bergaul dan ngobrol dengan semua lapisan. Selalu suka bercanda. Mereka tanya ayah kenapa ada disini. Ayah bilang, kita mau merdeka, jadi lain kali kalau datang kesini, tidak usah katakan "selamat malam tuan, selamat malam nyonya" cukup bilang saja "merdeka". Setelah itu dan seterusnya mereka kalau berjumpa dengan kami selalu sapa "Merdeka Nyonya, Merdeka Tuan".

Bagaimana kiprah Sam Ratulangi pasca pengasingan dari Serui?

Setelah dari Serui akibat dari agreement Renvile dipustuskan mesti membebaskan tahanan. Saya dibebaskan duluan sama Ibu. Waktu pulang, pertama-tama Ayah mengunjungi daerah-daerah yang berada dalam wilayah Republik. Statusnya saat itu bukan gubernur lagi.

Bagaimana kebersamaan terakhir bersama Sam Ratulangi?

Saat terakhir itu di bulan Juni 1949. Waktu itu saya SMP jadi biasanya anak sekolah bikin pertandingan olahraga. Jadi saya ke Bandung mewakili Ikatan Pelajar Pelajar Indonesia (IPP) Jakarta untuk olahraga renang.

Waktu balik saya bilang enggak menang.Terus dia peluk saya, dia bilang "enggak apa-apa kok, kau sudah berlatih tapi enggak jadi juara enggak apa-apa" Lalu ayah bilang saya usahakan kamu nanti malam mimpi dapat bunga. Dan benar pada malam itu bukan saja mimpi bunga tapi bunganya banyak sekali. Besoknya jam sembilan pagi dia sudah meninggal (karena) jantung. Jadi firasat melalui mimpi itu sudah memang ada dan kedekatan ayah dengan saya itu erat sekali.

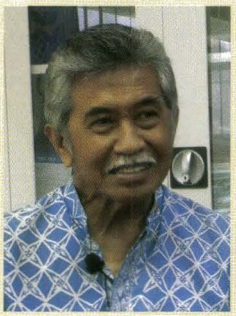

Wawancara dengan Setya Dharma Madjid, cucu menantu Sutardjo Kartohadikoesoemo

Bagaimana awal mula mengenal sosok Soetardjo?

"Saya masuk ke keluarga Soetardjo di tahun 60-an. Waktu itu saya SMA masih pacaran dengan istri yang merupakan cucu langsung Pak Tardjo."

Boleh digambarkan silsilah keluarga Soetardjo?

"Eyang itu punya sebelas anak hanya dari istri pertama (dari istri kedua dan ketiga tidak punya anak). Dari sebelas ini turunannya sekarang sudah sampai cicit dan canggah. Semuanya tergabung ke dalam Ikatan Cucu dan Cicit Soetardjo (ICUS). Istri saya cucu dari anak Eyang Tardjo yang nomor tiga."

Bagaimana sosok Soetardjo yang anda kenal?

"Eyang itu tidak neko-neko. Beliau pernah berkata, 'berbuatlah untuk keluarga kalau keluarga kamu baik itu akan menular pada komunitas tempat kamu tinggal.' Nah, kalau itu baik menular lagi kepada satu kelompok RT baru ke RW dan selanjutnya. Itu saja sudah cukup. Nanti Allah menunjukkan jalan bahwa apa yang sudah diperbuat itu akan ditiru."

Apa pengalaman paling berkesan bersama Soetardjo?

"Dia suka jalan-jalan. Setiap sore itu Eyang minta dianter dengan mobil dodge-nya. Saya yang nyetir, dia duduk di depan. Kita berjalan keliling ke Kebayoran sambil Eyang cerita masa tempo dulu.

Eyang juga suka duduk di depan teras rumah peristirahatannya di Cimelati sambil melihat matahari sampai terbenam. Eyang melihat apa yang kita buat toh akhirnya akan hilang. Harga yang kita kumpulkan semua akan sirna pada saatnya. Itulah malam hari. Kita dapatkan semua di pagi hari sampai siang dan akhirnya tenggelam juga. Jadi, kita masing-masing mesti menyiapkan waktu karena waktu itu tidak bisa kita tahan."

Apa pesan keteladanan dari Soetardjo yang paling anda ingat?

"Kata beliau, 'kita tidak perlu menjabat, tapi cukuplah kita berperan. Itu lebih tinggi nilainya daripada menjabat tapi tanpa peran. Berperan tanpa jabatan nilainya lebih tinggi.'"



Wawancara dengan Gusti Firdaus Firman Noor, Cucu menantu dari Anak Kedua Pangeran M. Noor (dari Sebelas Bersaudara)

Bagaimana silsilah dari P.M. Noor sampai kepada Anda?

"Kakek saya menikah dengan Gusti Aminah dan punya anak banyak, ada 11. Ayah saya anak nomor 2. Namanya Gusti Rizaly Noor. Saya anak pertama dari Gusti Rizaly Noor. Jadi, saya adalah cucu P.M. Noor."

Bagaimana cerita saat pertama kali mengenal kakek?

Kami cucu-cucunya sering datang ke rumah beliau di Jalan Sriwijaya, Kebayoran. Rumahnya cukup besar yang beliau bangun sendiri. Beliau itu 'kan insinyur sipil. Waktu itu beliau sudah pensiun. Saya panggilnya Nini Laki."

Seperti apa sosok P.M. Noor bagi anda?

"Beliau itu orangnya pendiam. Pembawaanya agak kaku. Tapi, kalau kita ajak bicara yang masuk dalam hal yang dia senangi, langsung berbeda. Semangat gitu nada bicaranya.

Tapi, yang saya ingat, setelah itu, saya baru tahu kenapa beliau begitu. Ternyata, pikirannya itu di Kalimantan. Begitu dia di sana beda 180 derajat."

Apa pengalaman paling berkesan bersama beliau?

"Jadi, sebelum saya kuliah ke Delft, Belanda, dia khusus bilang, 'Sebelum kalian ke Belanda, kalian harus lihat tanah leluhur.' Jadi, saya diajak beliau ke Kalimantan setahun sebelum berangkat ke Belanda. Waktu itu saya pergi ke Waduk Riam Kanan yang sedang dibangun.

Saya lihat kakek saya itu, bicaranya banyak. Dia terangkan semuanya kepada cucu-cucu, kepada bupati, kepada siapa saja bagaimana gagasannya, bagaimana maunya dia, segala macam. Semangat sekali. Dia ingin masyarakat di situ harus maju, bangun kembali ekonominya."

Seperti apa P.M. Noor ingin membangun Kalimantan?

"Sebelum kita merdeka, gagasannya sudah muncul. Inisiatifnya dari Bung Hatta. Mereka pernah satu pesawat menuju Borneo. Di atas Borneo sebelum mendarat, Bung Hatta pernah bicara ke P.M.Noor, 'Eh, jij ini orang sini, jij ini insinyur sipil, jij ini harus bangun Borneo, bangun dan kasih gagasan.'

Sesudah merdeka, beliau ditunjuk sebagai gubernur pertama Kalimantan. Nah, akhirnya Beliau bisa menuangkan gagasan-gagasannya banyak sekali. Salah satu gagasan yang besar yang beliau melihatnya satu Kalimantan yang dipisahkan sungai-sungai besar. Di Kalimantan itu ada tiga sungai besar, Sungai Kapuas ke arah barat, Sungai Mahakam ke arah timur, Sungai Barito ke arah selatan. Beliau melihat sungai besar itu dengan gagasan, bagaimana kalo kita kembangkan dengan dasarnya adalah dari sungai yang tiga besar itu."

Apa cerita perjuangan yang pernah dituturkan P.M Noor kepada anak-anak atau cucu-cucunya?

"Pada saat dengan Bung Hatta, beliau harus ke Kalimantan untuk memberi semangat kepada para pejuang di sana yang mulai turun semangatnya karena Belanda terus hajar.

Tapi, bagaimana caranya bisa terbang? Satu-satunya jalan harus ikut satu pesawat yang pemerintah resminya masih Jepang. Jadi, ikut pesawat yang salah satu penumpangnya jenderal Jepang. Jadi, beliau dengan Bung Hatta naik pesawat itu

Bagaimana tidak dag dig dug terus sepanjang perjalanan. Kalo Belanda tahu ada jenderal Jepang di situ, pasti ditembak. Betapa tegangnya waktu itu. Akhirnya, selamat. Beliau kemudian membakar semangat pejuang di Kalimantan pada pemuda-pemuda khususnya."

Kalimat apa atau kutipan apa yang paling anda ingat dari P.M.Noor sebagai nasihat atau pesan?

"Ya, seperti judul buku otobiografinya itu, Teruskan, Gawi Kita Belum Tuntung ('teruskan, kerja kita belum usai'). Gawe-nya ini 'pekerjaan ini' (membangun Kalimantan) harus dituntaskan, harus diteruskan. Itulah maksudnya."

Apa yang warisan P.M. Noor, baik secara pemikiran ataupun yang konkrit yang bisa dilestarikan sebagai sebuah pembelajaran sejarah?

"Beliau ini jiwanya sangat pejuang. Jadi, sesuatu yang belum selesai itu harus kita selesaikan dan kita harus berjuang membangun lagi Indonesia. Ini khususnya buat beliau adalah Kalimantan. Gagasannya yang akhirnya terlaksana adalah Waduk Riam Kanan dan pengerukan Sungai Barito.

Biodata Penulis dan Editor

Penulis



Hendi Johari

Hendi Jo adalah redaktur di HISTORIA.ID, situs online sejarah pertama di Indonesia. Dia juga merupakan salah satu pendiri Historika Indonesia sekaligus pengelola situs sejarah Arsip Indonesia (www.arsipindonesia.com) . Ia Lahir di Cianjur pada 18 Juli 1975. Besar dan tumbuh di kota yang sama hingga pada 1995 meneruskan sekolah di jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Nasional (UNAS) Jakarta. Sejak 1999 ia aktif sebagai jurnalis pada sejumlah media di Jakarta. Tahun 2005 ia memutuskan untuk mendalami dunia sejarah kontemporer Indonesia (terutama fase revolusi kemerdekaan 1945–1949) hingga kini. Selain dalam bukunya Biografi Jenderal (Purn) Edi Sudradjat, Back to Basic: Dari Operasi ke Operasi (2010), Zaman Perang (2015) dan Orang-Orang di Garis Depan (2018), tulisan dan opini Hendi Jo tentang sejarah tersebar juga di *Intisari, Pikiran Rakyat, Reader Digest Indonesia, Koran Sindo, Historia, Kompas* dan beberapa media *online*. Untuk korespondensi, ia dapat dihubungi melalui hazkalah@gmail.com

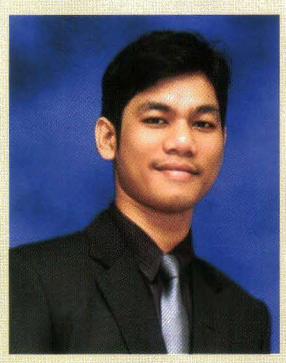

Martin Sitompul

Lahir di Medan, 30 Maret 1991. Dia Alumnus Universitas Indonesia jurusan Ilmu Sejarah. Lulus pada 2014 dengan skripsi "Perjuangan Diplomasi Indonesia dalam Sengketa Irian Barat 1959–1963". Dia Menaruh perhatiannya pada kajian sejarah kontemporer Indonesia, khususnya periode 1960-an.
Pada 2013 mendirikan komunitas literasi bernama Komunitas Lesehan Buku (KLB). Penulis dan kontributor beberapa buku salah satunya *Gubernur Pertama di Indonesia* yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018). Saat ini berkhidmat sebagai jurnalis di majalah *Historia* untuk rubrik politik dan militer.
Korespondensi melalui surat elektronik: martinoztompul@gmail.com.

Editor Substansi



Agus Setiawan

Agus Setiawan adalah pengajar di Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia pada 1998. Pada 2003 ia melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Kajian Wilayah Amerika. Setelah menyelesaikan pendidikan magister, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Leiden pada 2006. Pada 2011 ia melanjutkan pendidikan doktoral di Jacobs University Bremen. Hingga kini ia aktif menulis buku dan artikel mengenai sejarah pertambangan dan sejarah politik luar negeri Amerika Serikat yang dimuat dalam sejumlah jurnal.



Perjalanan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia senantiasa mengingatkan pada sejumlah pertempuran menghadapi kekuatan kolonial Belanda yang akan kembali berkuasa di Indonesia. Sejumlah tokoh militer muncul untuk memimpin rakyat dalam berjibaku mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah. Selain perjuangan fisik, para pemimpin bangsa tanpa mengenal lelah dan secara konsisten memperjuangkan pengakuan kedaulatan melalui berbagai perundingan. Kedua perjuangan tersebut yakni baik perjuangan fisik maupun diplomasi adalah sebuah sinergi yang membuat bangsa Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan. Namun dalam dinamika perjuangan revolusi tersebut terdapat sebuah bagian penting yang patut kembali diingat bahwa berjalannya sebuah pemerintahan setelah diproklamasikannya sebuah kemerdekaan adalah sebuah bentuk eksistensi sebuah negara yang telah berdaulat.

Buku ini berupaya mengingatkan kembali bahwa perjuangan menjalankan pemerintahan terutama pemerintahan daerah yang dipimpin oleh para gubernur pertama di republik ini memberikan kontribusi besar bagi berjalannya perlawanan terhadap kekuatan kolonial Belanda sekaligus penataan sistem pemerintahan daerah pertama dengan segala keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Kedelapan gubernur pertama di republik ini patut menjadi teladan bagi pemimpin daerah karena dengan segala keterbatasan tersebut, mereka berhasil memimpin provinsi yang menjadi amanah pemerintah pusat sekaligus mengarungi masa revolusi fisik yang penuh bahaya. Seluruh daya dan upaya, fikiran, tenaga harta dan bahkan jiwa telah dipertaruhkan oleh kedelapan gubernur tersebut demi terjaganya proklamasi kemerdekaan.

Dinamika perjuangan delapan gubernur pertama dalam buku ini diharapkan memberikan inspirasi mengenai ketokohan dan kepemimpinan para pemimpin daerah bagi generasi mendatang sekaligus menghargai perjuangan mereka. Selain itu penyajian narasi yang lebih singkat serta dilengkapi dengan peta perjalanan perjuangan mereka diharapkan akan memberikan gambaran perjuangan yang lebih komprehensif untuk lebih memaknai berbagai peristiwa kepahlawanan para gubernur pertama di Indonesia dalam memimpin provinsinya masing-masing.

DIREKTORAT SEJARAH
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

ISBN 978-623-7092-09-4
9 786237 092094